



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

# LAPORAN KEUANGAN 2025

AUDITED

INKLUSIF BERKELANJUTAN, SIDOARJO TANGGUH



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 29 Mei 2026

Nomor : 149/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Yth. Bupati Sidoarjo  
di  
Sidoarjo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- Proses Pemilihan Penyedia Belum Dilaksanakan Secara Kompetitif dan Terdapat Kekurangan Volume atas Tujuh Paket Pekerjaan Konstruksi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima Perangkat Daerah, mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar **Rp1,93 miliar**.
- Kekurangan Volume dan/atau Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis atas 28 Paket Pekerjaan Konstruksi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar **Rp1,98 miliar**.

- c. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas 39 Paket Pekerjaan Konstruksi pada Lima Perangkat Daerah, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar **Rp2,38 miliar**.

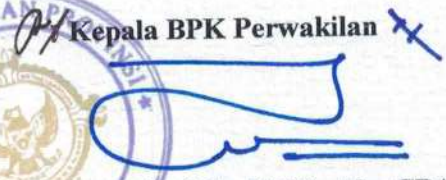
Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo, antara lain agar memerintahkan:

- Sekretaris Daerah agar melakukan pengawasan secara memadai dalam memastikan seluruh tahapan pemilihan penyedia dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- Kepala Perangkat Daerah terkait agar memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar **Rp1.27 miliar** dan ke Kas BLUD sebesar **Rp658 juta** serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.
- Kepala Dinas PUBMSDA agar memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar **Rp1.98 miliar** serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.
- Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menginstruksikan para PPKom pekerjaan terkait supaya memproses denda keterlambatan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar **Rp2,09 miliar** dan Kas BLUD sebesar **Rp296 juta** serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 64.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 dan Nomor 64.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 masing-masing tanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, kami ucapkan terima kasih.

 Kepala BPK Perwakilan  
  
Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA  
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:

- Anggota V BPK
- Direktur Jenderal PKN V BPK
- Inspektur Jenderal BPK
- Kepala Badan Renvaja PKN BPK
- Inspektur Kabupaten Sidoarjo



## BUPATI SIDOARJO

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 25 Mei 2026

Bupati Sidoarjo



Supandi, SH., M.Kn.

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax. 8946924

Email: [bupati@sidoarjokab.go.id](mailto:bupati@sidoarjokab.go.id) Website: [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku entitas pelaporan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan konsolidasi atas laporan keuangan OPD selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang lengkap dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun 2025 Kabupaten Sidoarjo ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus-menerus berupaya untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

**BUPATI SIDOARJO**  
  
**SUBANDI**

## **RINGKASAN KINERJA KEUANGAN APBD**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 ini juga menginformasikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 125 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pemerintah daerah menjalankan sistem akuntansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sidoarjo Tahun 2025 merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga menyajikan informasi keuangan yang berada pada pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini adalah ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025.

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggambarkan perbandingan antara Anggaran Tahun 2025 dengan Realisasinya.

Nilai realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp5.526.067.795.469,54 mengalami kenaikan sebesar Rp192.684.329.134,73 atau 3,61% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.333.383.466.334,81.

Nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp2.786.895.912.278,54 mengalami kenaikan sebesar Rp433.508.755.188,78 atau 18,42% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.353.387.157.089,76.

Nilai realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp2.739.171.883.191,00 mengalami penurunan sebesar Rp240.724.741.815,00 atau 8,08% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.979.896.625.006,00.

Nilai realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp99.684.239,05 atau 100,00% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp99.684.239,05.

Nilai realisasi Belanja Daerah sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.464.353.883.312,25 mengalami kenaikan sebesar Rp 213.010.893.010,78 atau 4,06% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.251.342.990.301,47.

Nilai realisasi Belanja Operasi sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.039.796.915.419,43 mengalami kenaikan sebesar Rp103.796.921.585,96 atau 2,64 % jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.935.999.993.833,47.

Nilai realisasi Belanja Modal sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 683.337.397.730,82 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.259.398.412,82 atau 2,28% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp668.077.999.318,00.

Nilai realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp10.254.834.782,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.314.113.262,00 atau 61,40% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp26.568.948.044,00.

Nilai Beban Daerah sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp5.053.182.085.466,62 mengalami kenaikan sebesar Rp203.020.258.251,77 atau 4,19% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp4.850.161.827.214,85.

Nilai surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp416.775.414.265,53.

Nilai surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp22.665.232.728,16.

Nilai surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Sehingga menghasilkan nilai Surplus (defisit)-LO sebesar Rp439.440.646.993,69.

## **5. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas, menyajikan informasi tentang Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, Transitoris, Kenaikan/Penurunan Kas, Saldo Awal Kas, dan Saldo Akhir Kas.

Nilai Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp 743.787.299.819,11.

Nilai Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi adalah sebesar (Rp 681.622.341.018,66).

Nilai Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan adalah sebesar (Rp24.286.058.018,28) dan

Nilai Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp552.396.335,00.

Nilai Kenaikan Kas adalah sebesar Rp38.431.297.117,17.

## **6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir untuk Periode yang Berakhir 31 Desember.

Ekuitas Awal tahun 2025 adalah sebesar Rp 23.008.854.766.847,82. Surplus (defisit)-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp439.440.646.993,69.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Ekuitas Akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp23.448.295.413.841,51.

## **7. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Kebijakan Fiskal, Kebijakan Akuntansi, dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, Daftar Rincian atau Nilai Pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.



# 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

| No. | Uraian                                                                    | Catatan     | Anggaran 2025        | Realisasi 2025       | %      | Realisasi 2024       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 1   | PENDAPATAN                                                                | 5.1.1       | 5.452.656.668.769,00 | 5.526.067.795.469,54 | 101,35 | 5.333.383.466.334,81 |
| 2   |                                                                           |             |                      |                      |        |                      |
| 3   | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                    | 5.1.1.1     | 2.691.396.942.109,00 | 2.786.895.912.278,54 | 103,55 | 2.353.387.157.089,76 |
| 4   | Pendapatan Pajak Daerah                                                   | 5.1.1.1.1   | 1.896.451.167.743,00 | 1.750.894.046.285,18 | 103,21 | 1.407.663.067.473,40 |
| 5   | Pendapatan Retribusi Daerah                                               | 5.1.1.1.2   | 899.169.421.000,00   | 896.932.667.144,57   | 99,75  | 861.595.661.847,07   |
| 6   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan              | 5.1.1.1.3   | 47.821.663.259,00    | 47.730.122.053,50    | 99,81  | 38.107.714.820,50    |
| 7   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 5.1.1.1.4   | 47.954.690.107,00    | 91.339.076.795,29    | 190,47 | 46.020.713.148,79    |
| 8   |                                                                           |             |                      |                      |        |                      |
| 9   | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 5.1.1.2     | 2.761.259.726.660,00 | 2.739.171.883.191,00 | 99,20  | 2.979.896.625.006,00 |
| 10  | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 5.1.1.2.1   | 2.515.939.170.280,00 | 2.465.790.036.041,00 | 98,01  | 2.466.301.337.959,00 |
| 11  | Dana Perimbangan                                                          | 5.1.1.2.1.1 | 4.145.584.000,00     | 5.414.602.000,00     | 130,61 | 0,00                 |
| 12  | Dana Desa                                                                 | 5.1.1.2.2.2 | 340.770.181.000,00   | 307.367.596.442,00   | 90,20  | 328.647.743.000,00   |
| 13  | Insentif Fiskal                                                           | 5.1.1.2.2.3 | 14.428.969.000,00    | 14.428.969.000,00    | 100,00 | 0,00                 |
| 14  | Dana Bagi Hasil                                                           | 5.1.1.2.2.4 | 217.175.557.000,00   | 209.289.086.700,00   | 96,37  | 209.922.496.000,00   |
| 15  | Dana Alokasi Umum                                                         | 5.1.1.2.2.5 | 1.317.451.887.000,00 | 1.311.742.341.100,00 | 99,57  | 1.272.254.530.355,00 |
| 16  | Dana Alokasi Khusus                                                       | 5.1.1.2.2.6 | 621.966.992.260,00   | 617.547.440.799,00   | 99,29  | 655.476.568.804,00   |
| 17  | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 5.1.1.2.2   | 245.320.556.400,00   | 273.381.847.150,00   | 111,44 | 513.595.287.047,00   |
| 18  | Pendapatan Bagi Hasil                                                     | 5.1.1.2.2.1 | 234.071.479.400,00   | 262.332.020.150,00   | 112,07 | 502.620.091.047,00   |
| 19  | Bantuan Keuangan                                                          | 5.1.1.2.2.2 | 11.249.077.000,00    | 11.049.827.000,00    | 98,23  | 10.975.196.000,00    |
| 20  | LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH                                            | 5.1.1.3     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 99.684.239,05        |
| 21  | Pendapatan Hibah                                                          | 5.1.1.3.1   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 99.015.000,00        |
| 22  | Lain2 Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan LRA | 5.1.1.3.2   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 669.239,05           |
| 23  | Jumlah Pendapatan                                                         |             | 5.452.656.668.769,00 | 5.526.067.795.469,54 | 101,35 | 5.333.383.466.334,81 |
| 24  |                                                                           |             |                      |                      |        |                      |
| 25  | BELANJA                                                                   | 5.1.2       | 6.071.145.324.287,20 | 5.464.353.883.312,25 | 90,01  | 5.251.342.990.301,47 |
| 26  | BELANJA OPERASI                                                           | 5.1.2.1     | 4.380.444.407.659,20 | 4.039.796.915.419,43 | 92,22  | 3.935.999.993.833,47 |
| 27  | Belanja Pegawai                                                           | 5.1.2.1.1   | 1.914.484.607.621,20 | 1.786.341.122.963,05 | 93,31  | 1.778.430.605.560,10 |
| 28  | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 5.1.2.1.2   | 2.073.392.534.605,00 | 1.883.020.460.459,29 | 90,82  | 1.690.376.003.896,45 |
| 29  | Belanja Bunga                                                             | 5.1.2.1.3   | 3.000.000.000,00     | 2.580.053.896,65     | 86,00  | 345.719.188,92       |
| 30  | Belanja Subsidi                                                           | 5.1.2.1.4   | 5.040.000.000,00     | 2.955.285.939,00     | 58,64  | 1.767.853.335,00     |
| 31  | Belanja Hibah                                                             | 5.1.2.1.5   | 277.433.120.433,00   | 273.391.805.661,44   | 98,54  | 362.111.796.853,00   |
| 32  | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 5.1.2.1.6   | 107.094.145.000,00   | 91.508.186.500,00    | 85,45  | 102.968.015.000,00   |
| 33  |                                                                           |             |                      |                      |        |                      |
| 34  | BELANJA MODAL                                                             | 5.1.2.2     | 906.290.705.142,00   | 683.337.397.730,82   | 75,40  | 668.077.999.318,00   |
| 35  | Belanja Tanah                                                             | 5.1.2.2.1   | 52.043.827.186,00    | 23.250.256.678,00    | 44,67  | 822.965.280,00       |
| 36  | Belanja Peralatan dan Mesin                                               | 5.1.2.2.2   | 223.496.322.012,00   | 206.772.187.050,00   | 92,52  | 191.438.182.917,00   |
| 37  | Belanja Gedung dan Bangunan                                               | 5.1.2.2.3   | 357.334.751.113,00   | 252.754.816.360,50   | 70,73  | 193.594.456.481,00   |
| 38  | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                                       | 5.1.2.2.4   | 272.050.633.991,00   | 199.730.563.281,32   | 73,42  | 281.538.154.853,00   |
| 39  | Belanja Aset Tetap Lainnya                                                | 5.1.2.2.5   | 599.320.840,00       | 584.702.457,00       | 97,56  | 128.568.760,00       |
| 40  | Belanja Aset Lainnya                                                      | 5.1.2.2.6   | 765.850.000,00       | 244.871.904,00       | 31,97  | 555.671.027,00       |
| 41  |                                                                           |             |                      |                      |        |                      |
| 42  | BELANJA TAK TERDUGA                                                       | 5.1.2.3     | 19.977.358.000,00    | 10.254.834.782,00    | 51,33  | 26.568.948.044,00    |
| 43  | Belanja Tak Terduga                                                       |             | 19.977.358.000,00    | 10.254.834.782,00    | 51,33  | 26.568.948.044,00    |
| 44  |                                                                           |             |                      |                      |        |                      |
| 45  | BELANJA TRANSFER                                                          | 5.1.2.4     | 764.432.853.486,00   | 730.964.735.380,00   | 95,62  | 620.696.049.106,00   |
| 46  | Belanja Bagi Hasil Pajak                                                  | 5.1.2.4.1   | 186.786.423.521,00   | 186.786.423.521,00   | 100,00 | 132.387.660.544,00   |
| 47  | Belanja Bagi Hasil Retribusi                                              | 5.1.2.4.2   | 9.016.783.265,00     | 9.016.783.265,00     | 100,00 | 4.293.418.012,00     |
| 48  | Belanja Bantuan Keuangan                                                  | 5.1.2.4.3   | 568.629.646.700,00   | 535.161.528.594,00   | 94,11  | 484.014.970.550,00   |
| 49  |                                                                           |             |                      |                      |        |                      |
| 50  | Jumlah belanja                                                            |             | 6.071.145.324.287,20 | 5.464.353.883.312,25 | 90,01  | 5.251.342.990.301,47 |
| 51  | Surplus/Defisit                                                           |             | (618.488.655.518,20) | 61.713.912.157,29    | 109,98 | 82.040.476.033,34    |

| No. | Uraian                                                                                | Catatan        | Anggaran 2025      | Realisasi 2025     | %      | Realisasi 2024     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 52  |                                                                                       |                |                    |                    |        |                    |
| 53  |                                                                                       |                |                    |                    |        |                    |
| 54  | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                     | <b>5.1.4</b>   |                    |                    |        |                    |
| 55  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                   | <b>5.1.4.1</b> |                    |                    |        |                    |
| 56  | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                  | 5.1.4.1.1      | 642.775.655.518,20 | 642.775.655.518,20 | 100,00 | 511.902.365.548,05 |
| 57  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                                            | 5.1.4.1.2      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 58  | Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir                                                 | 5.1.4.1.3      | 0,00               | 451.046.643,16     | 100,00 | 260.697.900,22     |
| 59  | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan  | 5.1.4.1.4      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 51.245.044.141,00  |
| 60  | Jumlah                                                                                |                | 642.775.655.518,20 | 643.226.702.161,36 | 100,07 | 563.408.107.589,27 |
| 61  |                                                                                       |                |                    |                    |        |                    |
| 62  | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                  | <b>5.1.4.2</b> |                    |                    |        |                    |
| 63  | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                        | 5.1.4.2.1      | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00               |
| 64  | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 5.1.4.2.2      | 24.287.000.000,00  | 24.286.058.018,28  | 100,00 | 2.672.928.104,41   |
| 65  | Jumlah                                                                                |                | 24.287.000.000,00  | 24.286.058.018,28  | 100,00 | 2.672.928.104,41   |
| 66  |                                                                                       |                |                    |                    |        |                    |
| 67  |                                                                                       |                |                    |                    |        |                    |
| 68  | Pembiayaan Neto                                                                       |                | 618.488.655.518,20 | 618.940.644.143,08 |        | 560.735.179.484,86 |
| 69  | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran                                                        | 5.1.5          | 0,00               | 680.654.556.300,37 |        | 642.775.655.518,20 |

Sidoarjo, 25 Mei 2026  
**BUPATI SIDOARJO**  
  
**SUBANDI**

## 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

| NO | URAIAN                                                     | CATATAN | 2025               | 2024               |
|----|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 1  | SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL                                  | 5.2.1   | 642.775.655.518,20 | 511.902.365.548,05 |
| 2  | PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN | 5.2.2   | 642.775.655.518,20 | 511.902.365.548,05 |
| 3  | SUB TOTAL (1-2)                                            |         | 0,00               | 0,00               |
| 4  | SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)        | 5.2.3   | 680.654.556.300,37 | 642.775.655.518,20 |
| 5  | SUB TOTAL (3+4)                                            |         | 680.654.556.300,37 | 642.775.655.518,20 |
| 6  | KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA               |         | 0,00               | 0,00               |
| 7  | LAIN-LAIN                                                  |         | 0,00               | 0,00               |
| 8  | SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)                         | 5.2.4   | 680.654.556.300,37 | 642.775.655.518,20 |

Sidoarjo, 25 Mei 2026  
**BUPATI SIDOARJO**  
  
**SUBANDI**



### 3. NERACA



#### PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

| NO | URAIAN                              | CATATAN     | 2025                          | 2024                          |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | <b>ASET</b>                         | 5.3.1       | <b>23.600.900.823.442,32</b>  | <b>23.213.233.721.800,60</b>  |
| 2  |                                     |             |                               |                               |
| 3  | <b>ASET LANCAR</b>                  | 5.3.1.1     | <b>1.146.161.856.502,26</b>   | <b>1.054.825.042.986,58</b>   |
| 4  | <b>KAS</b>                          | 5.3.1.1.1   | <b>681.405.369.240,37</b>     | <b>642.974.057.123,20</b>     |
| 5  | Kas di Kas Daerah                   | 5.3.1.1.1.1 | 573.120.409.199,45            | 489.907.723.902,60            |
| 6  | Kas di Bendahara Pengeluaran        | 5.3.1.1.1.2 | 0,00                          | 0,00                          |
| 7  | Kas di Bendahara Penerimaan         | 5.3.1.1.1.3 | 0,00                          | 0,00                          |
| 8  | Kas di BLUD                         | 5.3.1.1.1.4 | 107.275.707.689,92            | 152.087.754.612,60            |
| 9  | Kas di Bendahara BOS                | 5.3.1.1.1.5 | 15.000,00                     | 46.000,00                     |
| 10 | Kas Lainnya                         | 5.3.1.1.1.6 | 750.797.940,00                | 198.401.605,00                |
| 11 | Kas di Bendahara BOK                | 5.3.1.1.1.7 | 258.439.411,00                | 780.131.003,00                |
| 12 | <b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>      | 5.3.1.1.1.8 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 13 | <b>PIUTANG</b>                      | 5.3.1.1.2   | <b>330.602.281.267,39</b>     | <b>328.453.435.479,02</b>     |
| 14 | Piutang Pajak Daerah                | 5.3.1.1.2.1 | 548.440.297.183,10            | 539.130.907.186,10            |
| 15 | Piutang Retribusi Daerah            | 5.3.1.1.2.2 | 95.423.064.590,00             | 82.716.866.436,52             |
| 16 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah      | 5.3.1.1.2.3 | 13.198.079.532,81             | 13.620.031.450,97             |
| 17 | Piutang Transfer Antar Daerah       | 5.3.1.1.2.4 | 0,00                          | 0,00                          |
| 18 | Piutang Lainnya                     | 5.3.1.1.2.5 | 10.787.648.000,00             | 18.942.507.000,00             |
| 19 | Penyisihan Piutang                  | 5.3.1.1.2.6 | (342.188.215.123,58)          | (331.001.473.652,83)          |
| 20 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi   | 5.3.1.1.2.7 | 4.921.407.085,06              | 5.044.597.058,26              |
| 21 | <b>BEBAN DIBAYAR DIMUKA</b>         | 5.3.1.1.3   | <b>506.791.355,00</b>         | <b>600.441.573,00</b>         |
| 22 | <b>PERSEDIAAN</b>                   | 5.3.1.1.4   | <b>133.647.414.639,50</b>     | <b>82.797.108.811,36</b>      |
| 23 | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>     | 5.3.1.2     | <b>687.596.591.941,65</b>     | <b>643.507.483.845,75</b>     |
| 24 | <b>INVESTASI NON PERMANEN</b>       | 5.3.1.2.1   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 25 | <b>INVESTASI PERMANEN</b>           | 5.3.1.2.2   | <b>687.596.591.941,65</b>     | <b>643.507.483.845,75</b>     |
| 26 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  | 5.3.1.2.2.1 | 687.596.591.941,65            | 643.507.483.845,75            |
| 27 | <b>ASET TETAP</b>                   | 5.3.1.3     | <b>21.232.411.248.692,05</b>  | <b>20.972.246.200.489,90</b>  |
| 28 | <b>TANAH</b>                        | 5.3.1.3.1   | <b>15.757.085.153.809,10</b>  | <b>15.713.692.534.667,10</b>  |
| 29 | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>          | 5.3.1.3.2   | <b>2.669.347.345.799,57</b>   | <b>2.498.456.465.952,11</b>   |
| 30 | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>          | 5.3.1.3.3   | <b>4.256.006.445.175,76</b>   | <b>4.014.815.377.925,16</b>   |
| 31 | <b>JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN</b> | 5.3.1.3.4   | <b>5.872.559.729.290,86</b>   | <b>5.579.548.037.374,28</b>   |
| 32 | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>           | 5.3.1.3.5   | <b>72.449.003.327,19</b>      | <b>71.241.179.972,19</b>      |
| 33 | <b>KONTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>   | 5.3.1.3.6   | <b>166.108.736.831,90</b>     | <b>143.179.847.170,59</b>     |
| 34 | <b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>         | 5.3.1.3.7   | <b>(7.561.145.165.542,33)</b> | <b>(7.048.687.242.571,53)</b> |
| 35 |                                     |             |                               |                               |

| NO | URAIAN                                                  | CATATAN     | 2025                  | 2024                  |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 36 | <u>ASET LAINNYA</u>                                     | 5.3.1.4     | 444.529.100.279,00    | 451.701.572.348,69    |
| 37 | TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH                              | 5.3.1.4.1   | 0,00                  | 0,00                  |
| 38 | KEMITRAAN DENGAN Fihak KETIGA                           | 5.3.1.4.2   | 297.064.192.000,00    | 297.064.192.000,00    |
| 39 | Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Fihak Ketiga | 5.3.1.4.2.1 | (43.741.263.892,49)   | (40.967.350.498,91)   |
| 40 | Nilai Buku Aset Kemitraan Dengan Fihak Ketiga           |             | 253.322.928.107,51    | 256.096.841.501,09    |
| 41 | <u>ASET TIDAK BERWUJUD</u>                              | 5.3.1.4.3   | 33.718.798.724,83     | 33.506.521.824,83     |
| 42 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud                | 5.3.1.4.3.1 | (31.837.099.332,60)   | (30.066.229.549,32)   |
| 43 | Nilai Buku Aset Tidak Berwujud                          |             | 1.881.699.392,23      | 3.440.292.275,51      |
| 44 | <u>ASET LAIN-LAIN</u>                                   | 5.3.1.4.4   | 694.139.888.837,35    | 710.688.363.920,54    |
| 45 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain                     |             | (504.815.416.058,09)  | (519.162.702.348,45)  |
| 46 | Nilai Buku Aset Lain-Lain                               |             | 189.324.472.779,26    | 191.525.661.572,09    |
| 47 | DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY                          | 5.3.1.4.5   | 0,00                  | 638.777.000,00        |
| 48 |                                                         |             |                       |                       |
| 49 | <u>PROPERTI INVESTASI</u>                               | 5.3.1.5     | 90.202.026.027,36     | 90.953.422.129,68     |
| 50 | PROPERTI INVESTASI                                      | 5.3.1.5.1   | 97.336.026.510,00     | 97.297.101.442,00     |
| 51 | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi                 | 5.3.1.5.1.1 | (7.134.000.482,64)    | (6.343.679.312,32)    |
| 52 | Nilai Buku Properti Investasi                           |             | 90.202.026.027,36     | 90.953.422.129,68     |
| 53 | JUMLAH ASET                                             |             | 23.600.900.823.442,32 | 23.213.233.721.800,60 |
| 54 |                                                         |             |                       |                       |
| 55 | <u>KEWAJIBAN</u>                                        | 5.3.2       | 152.605.409.600,81    | 204.378.954.952,78    |
| 56 |                                                         |             |                       |                       |
| 57 | <u>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u>                          | 5.3.2.1     | 152.605.409.600,81    | 204.378.954.952,78    |
| 58 | Utang Bunga                                             | 5.3.2.1.2   | 122.779.515,54        | 169.325.331,97        |
| 59 | Utang Pajak                                             | 5.3.2.1.3   | 15.000,00             | 0,00                  |
| 60 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank  | 5.3.2.1.4   | 24.286.058.018,31     | 48.572.118.036,59     |
| 61 | Pendapatan diterima dimuka                              | 5.3.2.1.5   | 23.850.658.314,01     | 22.594.087.932,92     |
| 62 | Utang Belanja                                           | 5.3.2.1.6   | 79.158.986.563,89     | 94.823.298.433,26     |
| 63 | Utang Jangka Pendek Lainnya                             | 5.3.2.1.7   | 1.290.549.804,00      | 1.574.847.107,00      |
| 64 | Utang Transfer                                          | 5.3.2.1.8   | 24.096.362.385,06     | 36.645.280.111,04     |
| 65 | <u>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</u>                         | 5.3.2.2     | 0,00                  | 0,00                  |
| 66 |                                                         |             |                       |                       |
| 67 | <u>EKUITAS</u>                                          | 5.3.3       | 23.448.295.413.841,51 | 23.008.854.766.847,82 |
| 68 |                                                         |             |                       |                       |
| 69 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS                            |             | 23.600.900.823.442,32 | 23.213.233.721.800,60 |

Sidoarjo, 25 Mei 2026  
**BUPATI SIDOARJO**  
  
**SUBANDI**

#### 4. LAPORAN OPERASIONAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

| NO. | URAIAN                                                                       | CATATAN              | 2025                        | 2024                        | KENAIKANI/ PENURUNAN        | (%)            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1   | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                                  | <b>5.4.1</b>         |                             |                             |                             |                |
| 2   | Pendapatan Pajak Daerah-LO                                                   | 5.4.1.1.1.1          | 1.760.167.463.997,10        | 1.410.110.419.284,57        | 350.057.044.712,53          | 24,82          |
| 3   | Pendapatan Retribusi Daerah-LO                                               | 5.4.1.1.1.2          | 907.277.339.836,02          | 865.259.748.953,02          | 42.017.590.883,00           | 4,86           |
| 4   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO              | 5.4.1.1.1.3          | 91.819.230.149,40           | 49.892.315.052,25           | 41.926.915.097,15           | 84,03          |
| 5   | Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO                                            | 5.4.1.1.1.4          | 89.221.279.359,94           | 41.746.038.028,17           | 47.475.241.331,77           | 113,72         |
| 6   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO</b>                                             |                      | <b>2.848.485.313.342,46</b> | <b>2.367.008.521.318,01</b> | <b>481.476.792.024,45</b>   | <b>20,34</b>   |
| 7   |                                                                              |                      |                             |                             |                             |                |
| 8   | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO</b>                               | <b>5.4.1.1.2.1.1</b> | <b>2.135.199.834.599,00</b> | <b>2.102.959.260.959,00</b> | <b>32.240.573.640,00</b>    | <b>1,53</b>    |
| 9   | Dana Bagi Hasil -LO                                                          | 5.4.1.1.2.1.1.1      | 206.548.829.700,00          | 175.228.162.000,00          | 31.320.667.700,00           | 17,87          |
| 10  | Dana Alokasi Umum-LO                                                         | 5.4.1.1.2.1.1.2      | 1.311.103.564.100,00        | 1.272.254.530.355,00        | 38.849.033.745,00           | 3,05           |
| 11  | Dana Alokasi Khusus-LO                                                       | 5.4.1.1.2.1.1.3      | 617.547.440.799,00          | 655.476.568.604,00          | (37.929.127.805,00)         | (5,79)         |
| 12  | <b>DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO</b>                             | <b>5.4.1.1.2.1.2</b> | <b>14.428.969.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>14.428.969.000,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 13  | Insentif Fiskal-LO                                                           | 5.4.1.1.2.1.2.1      | 14.428.969.000,00           | 0,00                        | 14.428.969.000,00           | 0,00           |
| 14  | Dana Desa-LO                                                                 | 5.4.1.1.2.1.2.2      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00           |
| 15  | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>                                  |                      | <b>2.149.628.803.599,00</b> | <b>2.102.959.260.959,00</b> | <b>46.669.542.640,00</b>    | <b>2,22</b>    |
| 16  | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO</b>                                   | <b>5.4.1.1.2.2</b>   |                             |                             |                             |                |
| 17  | Pendapatan Bagi Hasil-LO                                                     | 5.4.1.1.2.2.1        | 262.332.020.150,00          | 502.620.091.047,00          | (240.288.070.897,00)        | (47,81)        |
| 18  | Bantuan Keuangan-LO                                                          | 5.4.1.1.2.2.2        | 10.736.542.779,00           | 10.904.992.200,00           | (168.449.421,00)            | (1,54)         |
| 19  |                                                                              |                      | <b>273.068.562.929,00</b>   | <b>513.525.083.247,00</b>   | <b>(240.456.520.318,00)</b> | <b>(46,82)</b> |
| 20  | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>                                         |                      | <b>2.422.697.366.528,00</b> | <b>2.616.484.344.206,00</b> | <b>(193.786.977.678,00)</b> | <b>(7,41)</b>  |
| 21  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO</b>                                      | <b>5.4.1.1.3</b>     |                             |                             |                             |                |
| 22  | Pendapatan Hibah                                                             | 5.4.1.1.3.1          | 198.774.819.861,68          | 46.170.921.677,21           | 152.603.898.184,47          | 330,52         |
| 23  | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 5.4.1.1.3.2          | 0,00                        | 669.239,05                  | (669.239,05)                | 100,00         |
| 24  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO</b>                                      |                      | <b>198.774.819.861,68</b>   | <b>46.171.590.916,26</b>    | <b>152.603.228.945,42</b>   | <b>330,51</b>  |
| 25  | <b>JUMLAH PENDAPATAN-LO</b>                                                  |                      | <b>5.469.957.499.732,14</b> | <b>5.029.664.456.440,27</b> | <b>440.293.043.291,87</b>   | <b>8,75</b>    |
| 26  |                                                                              |                      |                             |                             |                             |                |
| 27  | <b>BEBAN</b>                                                                 |                      |                             |                             |                             |                |
| 28  | <b>BEBAN OPERASI</b>                                                         | <b>5.4.1.2.1</b>     |                             |                             |                             |                |
| 29  | Beban Pegawai                                                                | 5.4.1.2.1.1          | 1.775.507.456.239,06        | 1.757.330.325.262,61        | 18.177.130.976,45           | 1,03           |
| 30  | Beban Persediaan                                                             | 5.4.1.2.1.2          | 660.167.157.891,08          | 597.820.111.253,25          | 62.347.046.637,83           | 10,43          |
| 31  | Beban Jasa                                                                   | 5.4.1.2.1.3          | 991.309.982.041,60          | 876.029.953.751,96          | 115.280.028.289,64          | 13,16          |
| 32  | Beban Pemeliharaan                                                           | 5.4.1.2.1.4          | 170.107.413.338,58          | 138.432.661.221,16          | 31.674.752.117,42           | 22,88          |
| 33  | Beban Perjalanan Dinas                                                       | 5.4.1.2.1.5          | 73.822.119.646,00           | 110.523.458.873,00          | (36.701.339.227,00)         | (33,21)        |
| 34  | Beban Bunga                                                                  | 5.4.1.2.1.6          | 2.533.508.080,22            | 0,00                        | 2.533.508.080,22            | 100,00         |
| 35  | Beban Subsidi                                                                | 5.4.1.2.1.7          | 3.128.933.535,00            | 3.009.364.430,00            | 119.569.105,00              | 3,97           |
| 36  | Beban Hibah                                                                  | 5.4.1.2.1.8          | 273.391.805.661,44          | 361.998.076.858,22          | (88.606.271.196,78)         | (24,48)        |
| 37  | Beban Bantuan Sosial                                                         | 5.4.1.2.1.9          | 93.725.551.700,00           | 106.371.888.000,00          | (12.646.336.300,00)         | (11,89)        |
| 38  | Beban Penyisihan Piutang                                                     | 5.4.1.2.1.10         | 38.195.234.213,32           | 43.689.631.975,19           | (5.494.397.761,87)          | (12,58)        |
| 39  | Beban Penyusutan & Amortisasi                                                | 5.4.1.2.1.11         | 560.487.782.329,30          | 553.251.332.628,94          | 7.236.449.700,36            | 1,31           |
| 40  | <b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>                                                  |                      | <b>4.642.376.944.675,60</b> | <b>4.548.456.804.254,33</b> | <b>93.920.140.421,27</b>    | <b>2,06</b>    |

| NO. | URAIAN                                                     | CATATAN          | 2025                        | 2024                        | KENAIKAN/ PENURUNAN       | (%)           |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 41  |                                                            |                  |                             |                             |                           |               |
| 42  | <b>BEBAN TRANSFER</b>                                      | <b>5.4.1.2.2</b> |                             |                             |                           |               |
| 43  | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak                            | 5.4.1.2.2.1      | 175.089.404.628,18          | 140.766.306.747,31          | 34.323.097.880,87         | 24,38         |
| 44  | Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi                        | 5.4.1.2.2.2      | 7.921.804.010,84            | 5.571.488.663,21            | 2.350.315.347,63          | 42,18         |
| 45  | Beban Transfer Bantuan Keuangan                            | 5.4.1.2.2.3      | 227.793.932.152,00          | 155.367.227.550,00          | 72.426.704.602,00         | 46,62         |
| 46  | <b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>                               |                  | <b>410.805.140.791,02</b>   | <b>301.705.022.960,52</b>   | <b>109.100.117.830,50</b> | <b>36,16</b>  |
| 47  |                                                            |                  |                             |                             |                           |               |
| 48  | <b>BEBAN TAK TERDUGA</b>                                   | <b>5.4.1.3</b>   |                             |                             |                           |               |
| 49  | Beban Tak Terduga                                          | 5.4.1.3          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00          |
| 50  | <b>JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA</b>                            |                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 51  | <b>JUMLAH BEBAN</b>                                        |                  | <b>5.053.182.085.466,62</b> | <b>4.850.161.827.214,85</b> | <b>203.020.258.251,77</b> | <b>4,19</b>   |
| 52  | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                        | <b>5.4.2</b>     | <b>416.775.414.265,52</b>   | <b>179.502.629.225,42</b>   | <b>237.272.785.040,10</b> | <b>132,18</b> |
| 53  |                                                            |                  |                             |                             |                           |               |
| 54  | <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                            |                  |                             |                             |                           |               |
| 55  | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>       | <b>5.4.3</b>     |                             |                             |                           |               |
| 56  | Surplus Penjualan Aset Non Lancar                          | 5.4.3.1          | 7.537.097.000,00            | 0,00                        | 7.537.097.000,00          | 100,00        |
| 57  | Defisit Penjualan Aset Non Lancar                          | 5.4.3.2          | (18.731.179.263,37)         | (4.293.145.185,01)          | (14.438.034.078,36)       | 336,30        |
| 58  | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya      | 5.4.3.3          | 33.859.314.991,54           | 27.092.577.111,81           | 6.766.737.879,73          | 24,98         |
| 59  | <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISITDARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> |                  | <b>22.665.232.728,17</b>    | <b>22.799.431.926,80</b>    | <b>(134.199.198,63)</b>   | <b>0,59</b>   |
| 60  | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>              |                  | <b>439.440.646.993,69</b>   | <b>202.302.061.152,22</b>   | <b>237.138.585.841,47</b> | <b>117,22</b> |
| 61  |                                                            |                  |                             |                             |                           |               |
| 62  | <b>POS LUAR BIASA</b>                                      |                  |                             |                             |                           |               |
| 63  | Pendapatan Luar Biasa                                      |                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00          |
| 64  | Beban Luar Biasa                                           |                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00          |
| 65  | <b>POS LUAR BIASA</b>                                      |                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 66  | <b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>                                |                  | <b>439.440.646.993,69</b>   | <b>202.302.061.152,22</b>   | <b>237.138.585.841,47</b> | <b>117,22</b> |

Sidoarjo, 25 Mei 2026  
**BUPATI SIDOARJO**  
  
**SUBANDI**

## 5. LAPORAN ARUS KAS



### PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025 DAN 2024

| NO. |                                                                                  | CATATAN | 2025                        | 2024                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                                           | 5.6.1   |                             |                             |
| 2   | <b>Arus Kas Masuk :</b>                                                          | 5.6.1.1 |                             |                             |
| 3   | Penerimaan Pajak Daerah                                                          |         | 1.750.894.046.285,18        | 1.407.663.067.473,40        |
| 4   | Penerimaan Retribusi Daerah                                                      |         | 896.932.667.144,57          | 861.595.661.847,07          |
| 5   | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan                     |         | 47.730.122.053,50           | 38.107.714.620,50           |
| 6   | Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                             |         | 90.075.066.726,29           | 43.923.942.343,79           |
| 7   | Penerimaan Dana Bagi Hasil                                                       |         | 214.703.688.700,00          | 210.276.122.670,00          |
| 8   | Penerimaan Dana Alokasi Umum                                                     |         | 1.311.742.341.100,00        | 1.272.254.530.355,00        |
| 9   | Penerimaan Dana Alokasi Khusus                                                   |         | 617.547.440.799,00          | 655.476.568.604,00          |
| 10  | Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                   |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 11  | Penerimaan Dana Desa                                                             |         | 307.367.596.442,00          | 328.647.743.000,00          |
| 12  | Penerimaan Dana Insentif Fiskal                                                  |         | 14.428.969.000,00           | 0,00                        |
| 13  | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                           |         | 262.332.020.150,00          | 502.620.091.047,00          |
| 14  | Penerimaan Bantuan Keuangan                                                      |         | 11.049.827.000,00           | 10.975.196.000,00           |
| 15  | Penerimaan Pendapatan Hibah                                                      |         | 0,00                        | 99.015.000,00               |
| 16  | Penerimaan Lain2 Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |         | 0,00                        | 669.239,05                  |
| 17  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                                     |         | <b>5.524.803.785.400,54</b> | <b>5.331.640.322.199,81</b> |
| 18  |                                                                                  |         |                             |                             |
| 19  | <b>Arus Kas Keluar :</b>                                                         | 5.6.1.2 |                             |                             |
| 20  | Pembayaran Pegawai                                                               |         | 1.786.341.122.963,05        | 1.778.430.605.560,10        |
| 21  | Pembayaran Barang dan Jasa                                                       |         | 1.883.020.460.459,29        | 1.690.376.003.896,45        |
| 22  | Pembayaran Bunga                                                                 |         | 2.580.053.896,65            | 345.719.188,92              |
| 23  | Pembayaran Subsidi                                                               |         | 2.955.285.939,00            | 1.767.853.335,00            |
| 24  | Pembayaran Hibah                                                                 |         | 273.391.805.661,44          | 362.111.796.853,00          |
| 25  | Pembayaran Bantuan Sosial                                                        |         | 91.508.186.500,00           | 102.968.015.000,00          |
| 26  | Pembayaran Tak Terduga                                                           |         | 10.254.834.782,00           | 26.568.948.044,00           |
| 27  | Pembayaran Bagi Hasil pajak                                                      |         | 186.786.423.521,00          | 132.387.660.544,00          |
| 28  | Pembayaran Bagi Hasil retribusi                                                  |         | 9.016.783.265,00            | 4.293.418.012,00            |
| 29  | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                                         |         | 535.161.528.594,00          | 484.014.970.550,00          |
| 30  | Pembayaran Bantuan Keuangan                                                      |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 31  | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                                    |         | <b>4.781.016.485.581,43</b> | <b>4.583.264.990.983,47</b> |
| 32  |                                                                                  |         |                             |                             |
| 33  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                                    |         | <b>743.787.299.819,11</b>   | <b>748.375.331.216,34</b>   |
| 34  |                                                                                  |         |                             |                             |
| 35  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                                         | 5.6.2   |                             |                             |
| 36  |                                                                                  |         |                             |                             |
| 37  | <b>Arus Kas Masuk :</b>                                                          | 5.6.2.1 |                             |                             |
| 38  | Pencairan Dana Cadangan                                                          |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 39  | Pendapatan Penjualan atas Tanah                                                  |         | 0,00                        | 763.776.000,00              |
| 40  | Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin                                    |         | 179.596.274,00              | 326.670.199,00              |
| 41  | Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan                                    |         | 1.080.413.795,00            | 648.697.936,00              |
| 42  | Pendapatan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi                            |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 43  | Penjualan Aset Tetap Lainnya                                                     |         | 4.000.000,00                | 4.000.000,00                |
| 44  | Penjualan Aset Lainnya                                                           |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 45  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                  |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 46  | Penerimaan Penjualan Investasi non Permanen                                      |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 47  | Penerimaan Kembali Dana Bergulir                                                 |         | 451.046.643,16              | 260.697.900,22              |
| 48  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                                     |         | <b>1.715.056.712,16</b>     | <b>2.003.842.035,22</b>     |

| NO. |                                                                           | CATATAN | 2025                        | 2024                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 49  |                                                                           |         |                             |                             |
| 50  | <b>Arus Kas Keluar :</b>                                                  | 5.6.2.2 |                             |                             |
| 51  | Pembentukan Dana Cadangan                                                 |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 52  | Perolehan Tanah                                                           |         | 23.250.258.078,00           | 822.965.280,00              |
| 53  | Perolehan Peralatan dan Mesin                                             |         | 206.772.187.060,00          | 181.438.182.917,00          |
| 54  | Perolehan Gedung dan Bangunan                                             |         | 282.754.818.380,50          | 183.594.456.481,00          |
| 55  | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                                     |         | 189.730.563.281,32          | 281.538.154.853,00          |
| 56  | Perolehan Aset Tetap Lainnya                                              |         | 584.702.457,00              | 128.588.780,00              |
| 57  | Perolehan Aset Lainnya                                                    |         | 244.871.904,00              | 555.871.027,00              |
| 58  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                        |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 59  | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen                              |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 60  | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                             |         | <b>683.337.397.730,82</b>   | <b>668.077.999.318,00</b>   |
| 61  |                                                                           |         |                             |                             |
| 62  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>                           |         | <b>(681.622.341.018,80)</b> | <b>(668.074.157.282,78)</b> |
| 63  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                                  | 5.6.3   |                             |                             |
| 64  | <b>Arus Kas Masuk :</b>                                                   |         |                             |                             |
| 65  | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                                  |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 66  | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya                         |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 67  | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank                             |         | 0,00                        | 51.245.044.141,00           |
| 68  | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank                       |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 69  | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi                                          |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 70  | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                                           |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 71  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara                      |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 72  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah                      |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 73  | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya              |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 74  | Penerimaan Kembali Dana Bergulir                                          |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 75  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                              |         | <b>0,00</b>                 | <b>51.245.044.141,00</b>    |
| 76  |                                                                           |         |                             |                             |
| 77  | <b>Arus Kas Keluar :</b>                                                  |         |                             |                             |
| 78  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                 |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 79  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya        |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 80  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Kepada Lembaga Keuangan Bank       |         | 24.286.058.018,28           | 2.672.928.104,41            |
| 81  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 82  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi                         |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 83  | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                          |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 84  | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara                               |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 85  | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah                               |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 86  | Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya                       |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 87  | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                        |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 88  | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                             |         | <b>24.286.058.018,28</b>    | <b>2.672.928.104,41</b>     |
| 89  |                                                                           |         |                             |                             |
| 90  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>                           |         | <b>(24.286.058.018,28)</b>  | <b>48.572.116.036,59</b>    |
| 91  |                                                                           |         |                             |                             |
| 92  | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>                         | 5.6.4   |                             |                             |
| 93  | <b>Arus Kas Masuk :</b>                                                   | 5.6.4.1 |                             |                             |
| 94  | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                                 |         | 220.589.374.380,00          | 215.277.552.515,00          |
| 95  | Penerimaan Seloran dari BLUD                                              |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 96  | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                              |         | <b>220.589.374.380,00</b>   | <b>215.277.552.515,00</b>   |
| 97  |                                                                           |         |                             |                             |
| 98  | <b>Arus Kas Keluar :</b>                                                  | 5.6.4.2 |                             |                             |
| 99  | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                                |         | 220.036.963.045,00          | 215.890.785.852,00          |
| 100 | Pengeluaran - Setor Ke Kasda                                              |         | 0,00                        | 0,00                        |
| 101 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                             |         | <b>220.036.963.045,00</b>   | <b>215.890.785.852,00</b>   |
| 102 |                                                                           |         |                             |                             |
| 103 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>                         |         | <b>552.411.335,00</b>       | <b>(613.213.347,00)</b>     |
| 104 |                                                                           |         |                             |                             |
| 105 | <b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>                                             | 5.6.5   | <b>38.431.312.117,17</b>    | <b>130.260.076.623,16</b>   |
| 106 |                                                                           |         |                             |                             |

| NO. |                                                | CATATAN | 2025                      | 2024                      |
|-----|------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| 107 | <b>SALDO AWAL KAS</b>                          | 5.6.6   | <b>642.974.057.123,20</b> | <b>512.713.980.500,05</b> |
| 108 | Kas di Kas Daerah                              |         | 489.907.723.574,75        | 396.931.018.165,20        |
| 109 | Kas in Transit di Bank Jatim - Pajak Jasa Giro |         | 327,85                    | 0,00                      |
| 110 | Kas di Bendahara Pengeluaran                   |         | 0,00                      | 0,00                      |
| 111 | Kas di Bendahara Penerimaan                    |         | 0,00                      | 0,00                      |
| 112 | Kas di BLUD RSUD RT NOTOPURO                   |         | 107.870.857.318,38        | 94.227.129.769,63         |
| 113 | Kas di BLUD RSUD SIDOARJO BARAT                |         | 31.183.017.288,95         | 11.997.376.874,71         |
| 114 | Kas di BLUD PUSKESMAS                          |         | 9.889.810.672,83          | 5.646.332.912,32          |
| 115 | Kas di BLUD TPA                                |         | 3.144.069.332,44          | 2.248.342.304,28          |
| 116 | Kas di Bendahara BOS                           |         | 46.000,00                 | 0,00                      |
| 117 | Kas di Bendahara BOK                           |         | 780.131.003,00            | 824.807.765,00            |
| 118 | Kas Lainnya (E-Money)                          |         | 10.342.580,00             | 564.757.033,91            |
| 119 | Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top UP )         |         | 188.059.025,00            | 274.215.675,00            |
| 120 | <b>SALDO AKHIR KAS</b>                         | 5.6.6   | <b>681.405.369.240,37</b> | <b>642.974.057.123,20</b> |
| 121 | Kas di Kas Daerah                              |         | 573.120.409.199,45        | 489.907.723.574,75        |
| 122 | Kas in Transit di Bank Jatim - Pajak Jasa Giro |         | 0,00                      | 327,85                    |
| 123 | Kas di Bendahara Pengeluaran                   |         | 0,00                      | 0,00                      |
| 124 | Kas di Bendahara Penerimaan                    |         | 0,00                      | 0,00                      |
| 125 | Kas di BLUD RSUD RT NOTOPURO                   |         | 70.316.192.622,56         | 107.870.857.318,38        |
| 126 | Kas di BLUD RSUD SIDOARJO BARAT                |         | 22.940.206.588,03         | 31.183.017.288,95         |
| 127 | Kas di BLUD PUSKESMAS                          |         | 11.125.864.658,69         | 9.889.810.672,83          |
| 128 | Kas di BLUD TPA                                |         | 2.779.686.085,93          | 3.144.069.332,44          |
| 129 | Kas di BLUD IPALD                              |         | 113.757.734,71            | 0,00                      |
| 130 | Kas di Bendahara BOS                           |         | 15.000,00                 | 46.000,00                 |
| 131 | Kas di Bendahara BOK                           |         | 258.439.411,00            | 780.131.003,00            |
| 132 | Kas Lainnya (E-Money)                          |         | 22.425.090,00             | 10.342.580,00             |
| 133 | Kas Lainnya (Jaminan Rusunawa)                 |         | 538.782.400,00            | 0,00                      |
| 134 | Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top UP )         |         | 189.590.450,00            | 188.059.025,00            |

Sidoarjo, 25 Mei 2026  
**BUPATI SIDOARJO**  
  
**SUBANDI**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

| NO | URAIAN                                                    | CATATAN | 2025                  | 2024                  |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | EKUITAS AWAL                                              | 5.5.1   | 23.008.854.766.847,82 | 22.805.036.725.621,60 |
| 2  | SURPLUS/DEFISIT LO                                        | 5.5.2   | 439.440.646.993,69    | 202.302.081.152,22    |
| 3  | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : | 5.5.3   | 0,00                  | 1.515.980.074,00      |
| 4  | KOREKSI INVESTASI PERMANEN                                |         | 0,00                  | 1.515.980.074,00      |
| 5  | EKUITAS AKHIR                                             | 5.5.4   | 23.448.295.413.841,51 | 23.008.854.766.847,82 |

Sidoarjo, 25 Mei 2026  
BUPATI SIDOARJO  
  
SUBANDI

## DAFTAR ISI

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....                                      | i    |
| KATA PENGANTAR.....                                                  | ii   |
| DAFTAR ISI.....                                                      | iii  |
| DAFTAR GRAFIK.....                                                   | viii |
| DAFTAR TABEL .....                                                   | ix   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                | xxiv |
| RINGKASAN KINERJA KEUANGAN APBD .....                                | xxvi |
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....                                   | 1    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                              | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                             | 1    |
| 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....               | 2    |
| 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....                  | 3    |
| 1.4 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....                           | 4    |
| 1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....         | 6    |
| BAB II KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO .....             | 7    |
| 2.1 Ekonomi Makro .....                                              | 7    |
| 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....                                       | 7    |
| 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....                    | 9    |
| 2.1.3 Inflasi .....                                                  | 10   |
| 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran .....     | 10   |
| 2.1.5 Indikator Ketimpangan Rasio Gini .....                         | 11   |
| 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....                          | 11   |
| 2.1.7 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin .....            | 13   |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN.....                     | 14   |
| 3.1 Pencapaian Target Keuangan menurut Urusan Pemerintahan .....     | 14   |
| 3.1.1 Pencapaian Target Pendapatan menurut Urusan Pemerintahan.....  | 15   |
| 3.1.2 Pencapaian Target Belanja menurut Urusan Pemerintahan .....    | 17   |
| 3.2 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....                   | 21   |
| 3.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....                         | 21   |
| 3.2.2 Rasio Efektivitas .....                                        | 21   |
| 3.2.3 Rasio Jenis Belanja Terhadap Total Belanja.....                | 22   |
| 3.2.3.1 Rasio Pertumbuhan .....                                      | 22   |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....                                      | 24   |
| 4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ..... | 24   |

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2 Kebijakan Akuntansi Akun.....                                                                                                                 | 24  |
| 4.2.1 Kas .....                                                                                                                                   | 24  |
| 4.2.2 Piutang .....                                                                                                                               | 24  |
| 4.2.3 Beban Dibayar Dimuka.....                                                                                                                   | 28  |
| 4.2.4 Persediaan .....                                                                                                                            | 29  |
| 4.2.5 Investasi Jangka Panjang .....                                                                                                              | 30  |
| 4.2.6 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir .....                                                                                   | 31  |
| 4.2.7 Aset Tetap .....                                                                                                                            | 31  |
| 4.2.8 Aset Lainnya .....                                                                                                                          | 33  |
| 4.2.9 Properti Investasi.....                                                                                                                     | 34  |
| 4.2.10 Kewajiban .....                                                                                                                            | 35  |
| 4.2.11 Pendapatan .....                                                                                                                           | 36  |
| 4.2.12 Belanja dan Beban .....                                                                                                                    | 37  |
| 4.2.13 Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,<br>Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan. .... | 38  |
| BAB V PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN .....                                                                                                       | 40  |
| 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....                                                                                                              | 40  |
| 5.1.1 Pendapatan Daerah.....                                                                                                                      | 40  |
| 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....                                                                                                               | 40  |
| 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah.....                                                                                                            | 41  |
| 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah .....                                                                                                       | 51  |
| 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....                                                                                 | 63  |
| 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah .....                                                                                                            | 64  |
| 5.1.1.2 Pendapatan Transfer.....                                                                                                                  | 73  |
| 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....                                                                                               | 74  |
| 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah .....                                                                                                  | 78  |
| 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah.....                                                                                                        | 79  |
| 5.1.2 Belanja Daerah.....                                                                                                                         | 80  |
| 5.1.2.1 Belanja Operasi.....                                                                                                                      | 80  |
| 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai.....                                                                                                                    | 81  |
| 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa .....                                                                                                           | 89  |
| 5.1.2.1.3 Belanja Bunga.....                                                                                                                      | 97  |
| 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi .....                                                                                                                   | 98  |
| 5.1.2.1.5 Belanja Hibah.....                                                                                                                      | 98  |
| 5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial .....                                                                                                            | 101 |
| 5.1.2.2 Belanja Modal .....                                                                                                                       | 103 |

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah .....                                                    | 103 |
| 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Mesin .....                                          | 104 |
| 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....                                      | 114 |
| 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi .....                             | 116 |
| 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....                                        | 118 |
| 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya.....                                              | 119 |
| 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga.....                                                     | 120 |
| 5.1.2.4 Belanja Transfer.....                                                          | 121 |
| 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil .....                                                     | 121 |
| 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan.....                                                | 122 |
| 5.1.3 Pembiayaan Daerah.....                                                           | 123 |
| 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah.....                                              | 124 |
| 5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran<br>Sebelumnya..... | 124 |
| 5.1.3.1.2 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir .....                                  | 125 |
| 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....                                             | 125 |
| 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....                                      | 126 |
| 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....                                       | 127 |
| 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal.....                                                   | 127 |
| 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....                 | 127 |
| 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....                                      | 128 |
| 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir .....                                                 | 129 |
| 5.3 NERACA .....                                                                       | 130 |
| 5.3.1 Aset .....                                                                       | 130 |
| 5.3.1.1 Aset Lancar .....                                                              | 131 |
| 5.3.1.1.1 Kas .....                                                                    | 131 |
| 5.3.1.1.2 Piutang .....                                                                | 136 |
| 5.3.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka.....                                                  | 150 |
| 5.3.1.1.4 Persediaan .....                                                             | 151 |
| 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang .....                                                 | 154 |
| 5.3.1.2.1 Investasi Permanen .....                                                     | 155 |
| 5.3.1.3 Aset Tetap .....                                                               | 157 |
| 5.3.1.3.1 Tanah.....                                                                   | 157 |
| 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin.....                                                     | 161 |
| 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan.....                                                     | 162 |
| 5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi .....                                           | 163 |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.1.3.1 Aset Tetap Lainnya .....                                    | 163 |
| 5.3.1.3.2 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....                            | 164 |
| 5.3.1.3.3 Akumulasi Penyusutan.....                                   | 165 |
| 5.3.1.4 Aset Lainnya .....                                            | 166 |
| 5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi.....                                    | 167 |
| 5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....                          | 167 |
| 5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud .....                                   | 169 |
| 5.3.1.4.4 Aset Lain-lain.....                                         | 170 |
| 5.3.1.4.5 Dana Treasury Deposit Facility .....                        | 171 |
| 5.3.1.4.6 Properti Investasi.....                                     | 172 |
| 5.3.2 Kewajiban .....                                                 | 172 |
| 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek .....                                 | 173 |
| 5.3.2.1.1 Utang Bunga .....                                           | 173 |
| 5.3.2.1.2 Utang Pajak.....                                            | 173 |
| 5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank..... | 174 |
| 5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka .....                            | 174 |
| 5.3.2.1.5 Utang Belanja.....                                          | 175 |
| 5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya.....                            | 176 |
| 5.3.2.1.7 Utang Transfer .....                                        | 177 |
| 5.3.3 Ekuitas.....                                                    | 178 |
| 5.4 LAPORAN OPERASIONAL .....                                         | 180 |
| 5.4.1 Kegiatan Operasional.....                                       | 180 |
| 5.4.1.1 Pendapatan Daerah-LO .....                                    | 180 |
| 5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO .....                             | 180 |
| 5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer.....                                    | 196 |
| 5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....                  | 199 |
| 5.4.1.2 Beban Daerah.....                                             | 200 |
| 5.4.1.2.1 Beban Operasi.....                                          | 201 |
| 5.4.1.2.2 Beban Transfer.....                                         | 218 |
| 5.4.1.3 Beban Tak Terduga.....                                        | 220 |
| 5.4.2 Surplus/Defisit dari Operasional .....                          | 220 |
| 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....              | 220 |
| 5.4.3.1 Surplus Non Operasional-LO.....                               | 221 |
| 5.4.3.2 Defisit Non Operasional-LO .....                              | 225 |
| 5.4.4 Surplus/Defisit LO .....                                        | 228 |
| 5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....                                   | 229 |

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.5.1 Ekuitas Awal .....                                                                                      | 229 |
| 5.5.2 Surplus (Defisit) LO.....                                                                               | 229 |
| 5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....                                           | 230 |
| 5.5.4 Ekuitas Akhir .....                                                                                     | 230 |
| 5.6 LAPORAN ARUS KAS .....                                                                                    | 231 |
| 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....                                                                   | 231 |
| 5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....                                                            | 231 |
| 5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....                                                           | 232 |
| 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi.....                                                                  | 232 |
| 5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.....                                                          | 233 |
| 5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.....                                                         | 233 |
| 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.....                                                                  | 234 |
| 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.....                                                                | 234 |
| 5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....                                                        | 236 |
| 5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris.....                                                       | 237 |
| 5.6.5 Kenaikan / Penurunan Kas .....                                                                          | 237 |
| 5.6.6 Saldo Kas .....                                                                                         | 238 |
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....                                                            | 239 |
| 6.1 Kondisi Internal yang Berpengaruh Pada Laporan Keuangan Tahun 2025.....                                   | 239 |
| 6.1.1 Adanya Perubahan Regulasi dan Penggunaan Aplikasi Nasional (SIPD) pada<br>Penyusunan APBD TA 2025 ..... | 239 |
| 6.1.2 Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Berubah pada Tahun<br>2023 .....                  | 239 |
| BAB VII PENUTUP .....                                                                                         | 240 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 – 2025(YoY) (dalam %) | 8  |
| Grafik 2. 2 Rata-Rata Lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2025                       | 12 |
| Grafik 2. 3 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kabupaten Sidoarjo                                                              | 12 |
| Grafik 2. 4 Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025 (ribu rupiah)                        | 13 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Konstran (ADHK) dalam persen ..... | 9  |
| Tabel 2. 2 Angka Inflasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2025 (YoY).....                                               | 10 |
| Tabel 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sidoarjo Tahun 2021 - 2025 .....                                            | 10 |
| Tabel 2. 4 Rasio Gini Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2025 .....                                                          | 11 |
| Tabel 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia .....                                                                               | 11 |
| Tabel 2. 6 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025.....                       | 13 |
| <br>Tabel 3. 1 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan .....                                                                  | 14 |
| Tabel 3. 2 Klasifikasi Pendapatan Menurut Organisasi .....                                                                | 15 |
| Tabel 3. 3 Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi.....                                                                    | 17 |
| Tabel 3. 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....                                                                        | 21 |
| Tabel 3. 5 Rasio Efektivitas .....                                                                                        | 22 |
| Tabel 3. 6 Rasio Belanja Operasi dibanding Total Belanja.....                                                             | 22 |
| Tabel 3. 7 Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja.....                                                               | 22 |
| Tabel 3. 8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan .....                                                                             | 23 |
| Tabel 3. 9 Rasio Pertumbuhan Belanja .....                                                                                | 23 |
| <br>Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah .....                                                             | 40 |
| Tabel 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah.....                                                          | 40 |
| Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....                                                      | 40 |
| Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....                                               | 41 |
| Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah.....                                                                       | 41 |
| Tabel 5. 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah .....                                                              | 41 |
| Tabel 5. 7 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel .....                                                                       | 42 |
| Tabel 5. 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel .....                                                               | 42 |
| Tabel 5. 9 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran .....                                                                    | 42 |
| Tabel 5. 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran.....                                                            | 43 |
| Tabel 5. 11 Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan .....                                                                    | 43 |
| Tabel 5. 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan.....                                                             | 43 |
| Tabel 5. 13 Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame .....                                                                    | 43 |
| Tabel 5. 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame.....                                                             | 44 |
| Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan .....                                                           | 45 |
| Tabel 5. 16 Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir .....                                                                     | 45 |
| Tabel 5. 17 Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah.....                                                                   | 46 |



|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 5. 18 Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)                                                             | 46 |
| Tabel 5. 19 Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....                                                              | 47 |
| Tabel 5. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .....                                                     | 49 |
| Tabel 5. 21 Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) .....                                                                         | 49 |
| Tabel 5. 22 Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) .....                                                                         | 49 |
| Tabel 5. 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) .....                                                                 | 49 |
| Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....                                                                          | 50 |
| Tabel 5. 25 Anggaran dan Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....                                                                | 51 |
| Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah .....                                                                                              | 51 |
| Tabel 5. 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah.....                                                                                       | 51 |
| Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum.....                                                                                            | 52 |
| Tabel 5. 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum .....                                                                                   | 52 |
| Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan.....                                                                                  | 52 |
| Tabel 5. 31 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan .....                                                                         | 53 |
| Tabel 5. 32 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.....                                                                    | 53 |
| Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.....                                                                  | 53 |
| Tabel 5. 34 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar .....                                                                                     | 55 |
| Tabel 5. 35 Rincian Retribusi Pelayanan Pasar .....                                                                                                    | 56 |
| Tabel 5. 36 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .....                                                                        | 56 |
| Tabel 5. 37 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran .....                                                                  | 56 |
| Tabel 5. 38 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .....                                                                  | 56 |
| Tabel 5. 39 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan .....                                                                                | 57 |
| Tabel 5. 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan .....                                                            | 57 |
| Tabel 5. 41 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha.....                                                                                           | 57 |
| Tabel 5. 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha .....                                                                                  | 58 |
| Tabel 5. 43 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....                                                                            | 58 |
| Tabel 5. 44 Anggaran dan Realisasi Retribusi Terminal.....                                                                                             | 58 |
| Tabel 5. 45 Anggaran dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan .....                                                                                  | 59 |
| Tabel 5. 46 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.....                                                                        | 59 |
| Tabel 5. 47 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ..... | 59 |
| Tabel 5. 48 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak .....                                                             | 60 |
| Tabel 5. 49 Anggaran dan Belanja Retribusi Pelayanan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga .....                                         | 60 |
| Tabel 5. 50 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah .....                                                    | 61 |
| Tabel 5. 51 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah.....                                                          | 61 |

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 5. 52 Retribusi Pelayanan Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah per OPD .....                                                                | 62 |
| Tabel 5. 53 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu .....                                                                          | 62 |
| Tabel 5. 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu .....                                                                  | 62 |
| Tabel 5. 55 Anggaran dan Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung .....                                                                 | 62 |
| Tabel 5. 56 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) .....                                                         | 63 |
| Tabel 5. 57 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....                                                     | 63 |
| Tabel 5. 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ..... | 63 |
| Tabel 5. 59 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah .....                                                                                | 64 |
| Tabel 5. 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah .....                                                                        | 64 |
| Tabel 5. 61 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan .....                                                             | 65 |
| Tabel 5. 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan .....                                                     | 65 |
| Tabel 5. 63 Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan .....                                                           | 66 |
| Tabel 5. 64 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ....                                                    | 66 |
| Tabel 5. 65 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro .....                                                                                             | 66 |
| Tabel 5. 66 Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro .....                                                                                     | 67 |
| Tabel 5. 67 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga .....                                                                                      | 67 |
| Tabel 5. 68 Rincian Pendapatan Bunga .....                                                                                                     | 67 |
| Tabel 5. 69 Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah .....                                               | 68 |
| Tabel 5. 70 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah .....                                       | 68 |
| Tabel 5. 71 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain .....                                                         | 68 |
| Tabel 5. 72 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan .....                                             | 69 |
| Tabel 5. 73 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah .....                                                                         | 70 |
| Tabel 5. 74 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah .....                                                                 | 70 |
| Tabel 5. 75 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah .....                                                                     | 70 |
| Tabel 5. 76 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah .....                                                             | 71 |
| Tabel 5. 77 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan .....                                                                | 71 |
| Tabel 5. 78 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian .....                                                                          | 71 |
| Tabel 5. 79 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian .....                                                            | 71 |
| Tabel 5. 80 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD .....                                                                                       | 73 |
| Tabel 5. 81 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir .....                                                            | 73 |
| Tabel 5. 82 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah .....                                                    | 73 |
| Tabel 5. 83 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer .....                                                                                   | 73 |
| Tabel 5. 84 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer .....                                                                           | 74 |
| Tabel 5. 85 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat .....                                                                  | 74 |
| Tabel 5. 86 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat .....                                                                     | 74 |

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 5. 87 Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan.....                                              | 75 |
| Tabel 5. 88 Anggaran dan Realisasi Dana Desa.....                                                           | 75 |
| Tabel 5. 89 Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal .....                                                    | 75 |
| Tabel 5. 90 Anggaran dan Realisasi DBH.....                                                                 | 75 |
| Tabel 5. 91 Rincian Anggaran dan Realisasi DBH .....                                                        | 76 |
| Tabel 5. 92 Anggaran dan Realisasi DAU .....                                                                | 76 |
| Tabel 5. 93 Anggaran dan Realisasi DAK .....                                                                | 76 |
| Tabel 5. 94 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK .....                                                        | 77 |
| Tabel 5. 95 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah.....                                    | 78 |
| Tabel 5. 96 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah .....                           | 78 |
| Tabel 5. 97 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil.....                                               | 78 |
| Tabel 5. 98 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....                                 | 79 |
| Tabel 5. 99 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan.....                                                    | 79 |
| Tabel 5. 100 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah .....                                     | 79 |
| Tabel 5. 101 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah .....                                                    | 80 |
| Tabel 5. 102 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah .....                                            | 80 |
| Tabel 5. 103 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi .....                                                   | 80 |
| Tabel 5. 104 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi .....                                           | 80 |
| Tabel 5. 105 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai .....                                                   | 81 |
| Tabel 5. 106 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai .....                                           | 81 |
| Tabel 5. 107 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN .....                                    | 82 |
| Tabel 5. 108 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN .....                            | 82 |
| Tabel 5. 109 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN .....                                  | 84 |
| Tabel 5. 110 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN.....                           | 84 |
| Tabel 5. 111 Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN..... | 85 |
| Tabel 5. 112 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN .                   | 86 |
| Tabel 5. 113 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD .....                                   | 86 |
| Tabel 5. 114 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD .....                           | 86 |
| Tabel 5. 115 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH .....                               | 87 |
| Tabel 5. 116 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.....                        | 87 |
| Tabel 5. 117 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH .....           | 89 |
| Tabel 5. 118 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH .....   | 89 |
| Tabel 5. 119 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD.....                                               | 89 |
| Tabel 5. 120 Rincian Belanja Pegawai BLUD .....                                                             | 89 |
| Tabel 5. 121 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa .....                                           | 89 |
| Tabel 5. 122 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....                                    | 90 |

|                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 123 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa <i>per OPD</i> .....                                                      | 90  |
| Tabel 5. 124 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang .....                                                                                      | 93  |
| Tabel 5. 125 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa .....                                                                                        | 93  |
| Tabel 5. 126 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan .....                                                                                | 93  |
| Tabel 5. 127 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan.....                                                                         | 93  |
| Tabel 5. 128 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas .....                                                                            | 94  |
| Tabel 5. 129 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas .....                                                                    | 94  |
| Tabel 5. 130 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas .....                                                                    | 94  |
| Tabel 5. 131 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.....                 | 94  |
| Tabel 5. 132 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.....         | 95  |
| Tabel 5. 133 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.....         | 95  |
| Tabel 5. 134 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS .....                                                                         | 95  |
| Tabel 5. 135 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP .....                                                                        | 96  |
| Tabel 5. 136 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP.....                                                                 | 96  |
| Tabel 5. 137 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas .....                                                               | 96  |
| Tabel 5. 138 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.....                                                                               | 97  |
| Tabel 5. 139 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD .....                                                                        | 97  |
| Tabel 5. 140 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD.....                                                                                        | 97  |
| Tabel 5. 141 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga .....                                                                                       | 97  |
| Tabel 5. 142 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi .....                                                                                     | 98  |
| Tabel 5. 143 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah .....                                                                                       | 98  |
| Tabel 5. 144 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah.....                                                                                | 99  |
| Tabel 5. 145 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat .....                                                               | 99  |
| Tabel 5. 146 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat .....                                                       | 99  |
| Tabel 5. 147 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.....         | 99  |
| Tabel 5. 148 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia..... | 99  |
| Tabel 5. 149 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS .....                                                                              | 100 |
| Tabel 5. 150 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik... 100                                               | 100 |
| Tabel 5. 151 Daftar Penerima Hibah Bantuan Partai Politik.....                                                                                | 100 |
| Tabel 5. 152 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP.....                                                                              | 101 |
| Tabel 5. 153 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP .....                                                                     | 101 |
| Tabel 5. 154 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial.....                                                                               | 101 |
| Tabel 5. 155 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial.....                                                                       | 101 |
| Tabel 5. 156 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu .....                                                              | 102 |

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 157 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu .....                                                             | 102 |
| Tabel 5. 158 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga .....                                                                     | 102 |
| Tabel 5. 159 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan<br>(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)..... | 102 |
| Tabel 5. 160 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal .....                                                                                              | 103 |
| Tabel 5. 161 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal .....                                                                                      | 103 |
| Tabel 5. 162 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah.....                                                                                         | 103 |
| Tabel 5. 163 Rincian Belanja Modal Tanah.....                                                                                                        | 103 |
| Tabel 5. 164 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....                                                                          | 104 |
| Tabel 5. 165 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....                                                                   | 104 |
| Tabel 5. 166 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar.....                                                                                    | 105 |
| Tabel 5. 167 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar .....                                                                           | 105 |
| Tabel 5. 168 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar .....                                                                           | 105 |
| Tabel 5. 169 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan.....                                                                                 | 105 |
| Tabel 5. 170 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan.....                                                                         | 106 |
| Tabel 5. 171 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan.....                                                                         | 106 |
| Tabel 5. 172 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur.....                                                                    | 106 |
| Tabel 5. 173 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur .....                                                           | 106 |
| Tabel 5. 174 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur .....                                                           | 107 |
| Tabel 5. 175 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian.....                                                                                | 107 |
| Tabel 5. 176 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian .....                                                                       | 107 |
| Tabel 5. 177 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.....                                                                  | 108 |
| Tabel 5. 178 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga ..                                                            | 108 |
| Tabel 5. 179 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga ..                                                            | 108 |
| Tabel 5. 180 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar...                                                           | 108 |
| Tabel 5. 181 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan<br>Pemancar.....                                              | 109 |
| Tabel 5. 182 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan<br>Pemancar.....                                              | 109 |
| Tabel 5. 183 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan.....                                                                 | 109 |
| Tabel 5. 184 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan...                                                           | 110 |
| Tabel 5. 185 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium.....                                                                             | 110 |
| Tabel 5. 186 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium .....                                                                    | 110 |
| Tabel 5. 187 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer .....                                                                                     | 111 |
| Tabel 5. 188 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer .....                                                                             | 111 |
| Tabel 5. 189 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer .....                                                                             | 111 |
| Tabel 5. 190 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja .....                                                                       | 111 |
| Tabel 5. 191 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja .....                                                               | 112 |
| Tabel 5. 192 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengeboran .....                                                                              | 112 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 193 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi .....     | 112 |
| Tabel 5. 194 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu .....                         | 112 |
| Tabel 5. 195 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu.....                  | 112 |
| Tabel 5. 196 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga .....                  | 113 |
| Tabel 5. 197 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga .....          | 113 |
| Tabel 5. 198 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS .....             | 113 |
| Tabel 5. 199 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP .....            | 113 |
| Tabel 5. 200 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP .....    | 113 |
| Tabel 5. 201 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD .....            | 114 |
| Tabel 5. 202 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....                 | 114 |
| Tabel 5. 203 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....          | 114 |
| Tabel 5. 204 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung.....                      | 114 |
| Tabel 5. 205 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung .....             | 114 |
| Tabel 5. 206 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti .....            | 115 |
| Tabel 5. 207 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti .....    | 115 |
| Tabel 5. 208 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD .....            | 116 |
| Tabel 5. 209 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi .....        | 116 |
| Tabel 5. 210 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi..... | 116 |
| Tabel 5. 211 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan.....                   | 116 |
| Tabel 5. 212 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan .....          | 117 |
| Tabel 5. 213 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan .....          | 117 |
| Tabel 5. 214 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air .....                        | 117 |
| Tabel 5. 215 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air.....                 | 117 |
| Tabel 5. 216 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi .....                           | 117 |
| Tabel 5. 217 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi .....                   | 118 |
| Tabel 5. 218 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan .....                            | 118 |
| Tabel 5. 219 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan.....                     | 118 |
| Tabel 5. 220 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD .....   | 118 |
| Tabel 5. 221 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya .....                  | 118 |
| Tabel 5. 222 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....           | 119 |
| Tabel 5. 223 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan .....                  | 119 |
| Tabel 5. 224 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan.....           | 119 |
| Tabel 5. 225 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD .....             | 119 |
| Tabel 5. 226 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya .....                        | 119 |
| Tabel 5. 227 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga .....                             | 120 |
| Tabel 5. 228 Rincian Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 : .....          | 120 |
| Tabel 5. 229 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer .....                                  | 121 |
| Tabel 5. 230 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer .....                          | 121 |
| Tabel 5. 231 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil.....                         | 121 |

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 232 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa .....             | 121 |
| Tabel 5. 233 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.....                | 122 |
| Tabel 5. 234 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan .....                                                                | 122 |
| Tabel 5. 235 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan .....                                                        | 123 |
| Tabel 5. 236 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa .....   | 123 |
| Tabel 5. 237 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ..... | 123 |
| Tabel 5. 238 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah .....                                                                       | 123 |
| Tabel 5. 239 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah.....                                                                | 124 |
| Tabel 5. 240 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah .....                                                            | 124 |
| Tabel 5. 241 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah .....                                                    | 124 |
| Tabel 5. 242 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya .....                                        | 124 |
| Tabel 5. 243 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir .....                                                   | 125 |
| Tabel 5. 244 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....                                                           | 125 |
| Tabel 5. 245 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....                                                           | 125 |
| Tabel 5. 246 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....                                                                                  | 126 |
| Tabel 5. 247 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024.....                                                                  | 127 |
| Tabel 5. 248 Saldo Anggaran Lebih Awal .....                                                                                      | 127 |
| Tabel 5. 249 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan .....                                                    | 127 |
| Tabel 5. 250 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....                                                                                  | 128 |
| Tabel 5. 251 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....                                                      | 130 |
| Tabel 5. 252 Rincian Aset .....                                                                                                   | 130 |
| Tabel 5. 253 Rincian Aset .....                                                                                                   | 130 |
| Tabel 5. 254 Aset Lancar .....                                                                                                    | 131 |
| Tabel 5. 255 Rincian Aset Lancar .....                                                                                            | 131 |
| Tabel 5. 256 Rincian Kas di Kas Daerah .....                                                                                      | 131 |
| Tabel 5. 257 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran .....                                                                           | 133 |
| Tabel 5. 258 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan .....                                                                            | 133 |
| Tabel 5. 259 Kas di BLUD.....                                                                                                     | 133 |
| Tabel 5. 260 Rincian Kas di Bendahara BOS .....                                                                                   | 135 |
| Tabel 5. 261 Kas Lainnya .....                                                                                                    | 135 |
| Tabel 5. 262 Rincian Kas Lainnya .....                                                                                            | 135 |
| Tabel 5. 263 Kas di Bendahara BOK .....                                                                                           | 135 |
| Tabel 5. 264 Rincian Kas di Bendahara BOK.....                                                                                    | 136 |
| Tabel 5. 265 Rincian Piutang .....                                                                                                | 137 |
| Tabel 5. 266 Piutang Pajak.....                                                                                                   | 137 |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 267 Rincian Piutang Pajak .....                                            | 137 |
| Tabel 5. 268 Rincian Piutang Pajak Hotel.....                                       | 138 |
| Tabel 5. 269 Rincian Piutang Pajak Restoran .....                                   | 138 |
| Tabel 5. 270 Rincian Piutang Pajak Hiburan .....                                    | 139 |
| Tabel 5. 271 Rincian Piutang Pajak Reklame .....                                    | 140 |
| Tabel 5. 272 Rincian Pajak Penerangan Jalan.....                                    | 140 |
| Tabel 5. 273 Rincian Pajak Parkir.....                                              | 141 |
| Tabel 5. 274 Rincian Pajak Air Tanah .....                                          | 141 |
| Tabel 5. 275 Rincian Pajak PBB-P2 .....                                             | 142 |
| Tabel 5. 276 Rincian Piutang Pajak BPHTB.....                                       | 143 |
| Tabel 5. 277 Piutang Retribusi Daerah .....                                         | 143 |
| Tabel 5. 278 Rincian Piutang Retribusi Daerah .....                                 | 143 |
| Tabel 5. 279 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan .....                    | 144 |
| Tabel 5. 280 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan .....     | 145 |
| Tabel 5. 281 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar.....                         | 145 |
| Tabel 5. 282 Rincian Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair.....                  | 146 |
| Tabel 5. 283 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .....                      | 146 |
| Tabel 5. 284 Rincian Piutang Rusunawa.....                                          | 146 |
| Tabel 5. 285 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga..... | 147 |
| Tabel 5. 286 Piutang Izin Mendirikan Bangunan.....                                  | 148 |
| Tabel 5. 287 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....                            | 148 |
| Tabel 5. 288 Piutang Transfer Antar Daerah.....                                     | 149 |
| Tabel 5. 289 Piutang Lainnya .....                                                  | 149 |
| Tabel 5. 290 Rincian Piutang Lainnya .....                                          | 149 |
| Tabel 5. 291 Penyisihan Piutang .....                                               | 149 |
| Tabel 5. 292 Rincian Penyisihan Piutang.....                                        | 150 |
| Tabel 5. 293 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi .....                        | 150 |
| Tabel 5. 294 Belanja Dibayar Dimuka .....                                           | 150 |
| Tabel 5. 295 Rincian Belanja Dibayar Dimuka.....                                    | 150 |
| Tabel 5. 296 Persediaan .....                                                       | 151 |
| Tabel 5. 297 Rincian Persediaan dalam Kondisi Usang.....                            | 151 |
| Tabel 5. 298 Rincian Persediaan .....                                               | 151 |
| Tabel 5. 299 Rincian Persediaan per OPD .....                                       | 152 |
| Tabel 5. 300 Rincian Persediaan per Jenis Barang.....                               | 153 |
| Tabel 5. 301 Rincian Investasi Jangka Panjang .....                                 | 154 |
| Tabel 5. 302 Rincian Investasi Jangka Panjang .....                                 | 154 |
| Tabel 5. 303 Investasi Permanen.....                                                | 155 |
| Tabel 5. 304 Rincian Investasi Permanen .....                                       | 155 |
| Tabel 5. 305 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah .....                               | 155 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 306 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2025 ..... | 156 |
| Tabel 5. 307 Rincian Aset Tetap .....                                    | 157 |
| Tabel 5. 308 Rincian Aset Tetap .....                                    | 157 |
| Tabel 5. 309 Tanah .....                                                 | 157 |
| Tabel 5. 310 Rincian Permasalahan Hukum Status Tanah SMKN Prambon .....  | 158 |
| Tabel 5. 311 Peralatan dan Mesin .....                                   | 161 |
| Tabel 5. 312 Gedung dan Bangunan .....                                   | 162 |
| Tabel 5. 313 Jalan, Jaringan, dan Irigasi .....                          | 163 |
| Tabel 5. 314 Aset Tetap Lainnya .....                                    | 163 |
| Tabel 5. 315 Konstruksi Dalam Pengerjaan .....                           | 164 |
| Tabel 5. 316 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD .....           | 164 |
| Tabel 5. 317 Akumulasi Penyusutan .....                                  | 165 |
| Tabel 5. 318 Aset Lainnya .....                                          | 166 |
| Tabel 5. 319 Rincian Aset Lainnya .....                                  | 166 |
| Tabel 5. 320 Tuntutan Ganti Rugi .....                                   | 167 |
| Tabel 5. 321 Kemitraan dengan Pihak Ketiga .....                         | 167 |
| Tabel 5. 322 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga .....    | 168 |
| Tabel 5. 323 Aset Tidak Berwujud .....                                   | 169 |
| Tabel 5. 324 Akumulasi Amortisasi .....                                  | 169 |
| Tabel 5. 325 Aset Lain-Lain .....                                        | 170 |
| Tabel 5. 326 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain .....                   | 171 |
| Tabel 5. 327 Rincian Dana Treasury Deposit Facility .....                | 171 |
| Tabel 5. 328 Property Investasi .....                                    | 172 |
| Tabel 5. 329 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi .....               | 172 |
| Tabel 5. 330 Rincian Kewajiban .....                                     | 172 |
| Tabel 5. 331 Rincian Kewajiban Jangka Pendek .....                       | 173 |
| Tabel 5. 332 Rincian Kewajiban Jangka Pendek .....                       | 173 |
| Tabel 5. 333 Rincian Utang Pajak .....                                   | 173 |
| Tabel 5. 334 Rincian Utang Bunga .....                                   | 174 |
| Tabel 5. 335 Pendapatan Diterima Dimuka .....                            | 174 |
| Tabel 5. 336 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka .....                    | 174 |
| Tabel 5. 337 Utang Belanja .....                                         | 175 |
| Tabel 5. 338 Rincian Utang Belanja .....                                 | 175 |
| Tabel 5. 339 Rincian Utang belanja per OPD .....                         | 175 |
| Tabel 5. 340 Utang Jangka Pendek Lainnya .....                           | 176 |
| Tabel 5. 341 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya .....                   | 176 |
| Tabel 5. 342 Rincian Utang KKPD per OPD .....                            | 177 |
| Tabel 5. 343 Utang Transfer .....                                        | 177 |
| Tabel 5. 344 Rincian Utang Transfer .....                                | 178 |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 345 Ekuitas.....                                                         | 178 |
| Tabel 5. 346 Rincian Ekuitas .....                                                | 179 |
| Tabel 5. 347 Pendapatan Daerah-LO .....                                           | 180 |
| Tabel 5. 348 Rincian Pendapatan Daerah-LO .....                                   | 180 |
| Tabel 5. 349 Pendapatan Asli Daerah-LO.....                                       | 180 |
| Tabel 5. 350 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO .....                              | 181 |
| Tabel 5. 351 Pendapatan Pajak Daerah-LO .....                                     | 181 |
| Tabel 5. 352 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO .....                             | 181 |
| Tabel 5. 353 Perbedaan Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO .....   | 182 |
| Tabel 5. 354 Pajak Hotel-LO .....                                                 | 182 |
| Tabel 5. 355 Rincian Pajak Hotel-LO .....                                         | 182 |
| Tabel 5. 356 Pajak Restoran-LO .....                                              | 183 |
| Tabel 5. 357 Rincian Pajak Restoran-LO.....                                       | 183 |
| Tabel 5. 358 Pajak Hiburan-LO .....                                               | 183 |
| Tabel 5. 359 Rincian Pajak Hiburan-LO.....                                        | 183 |
| Tabel 5. 360 Pajak Reklame-LO .....                                               | 184 |
| Tabel 5. 361 Rincian Pajak Reklame-LO.....                                        | 184 |
| Tabel 5. 362 Pajak Penerangan Jalan-LO .....                                      | 184 |
| Tabel 5. 363 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO .....                              | 184 |
| Tabel 5. 364 Pajak Parkir-LO .....                                                | 184 |
| Tabel 5. 365 Pajak Air Tanah-LO.....                                              | 185 |
| Tabel 5. 366 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO.....      | 185 |
| Tabel 5. 367 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO .....           | 185 |
| Tabel 5. 368 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO.....    | 185 |
| Tabel 5. 369 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO .....                        | 185 |
| Tabel 5. 370 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO .....             | 186 |
| Tabel 5. 371 Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....                                  | 186 |
| Tabel 5. 372 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO .....                         | 186 |
| Tabel 5. 373 Retribusi Jasa Umum-LO.....                                          | 186 |
| Tabel 5. 374 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO .....                                 | 187 |
| Tabel 5. 375 Retribusi Jasa Usaha-LO .....                                        | 188 |
| Tabel 5. 376 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO.....                                 | 188 |
| Tabel 5. 377 Retribusi Perizinan Tertentu-LO .....                                | 188 |
| Tabel 5. 378 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO.....                         | 188 |
| Tabel 5. 379 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO..... | 189 |
| Tabel 5. 380 Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO.....                               | 189 |
| Tabel 5. 381 Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO .....                      | 189 |
| Tabel 5. 382 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO.....                   | 190 |
| Tabel 5. 383 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO.....           | 190 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 384 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO .....                               | 190 |
| Tabel 5. 385 Hasil Kerja Sama Daerah-LO.....                                                    | 191 |
| Tabel 5. 386 Jasa Giro-LO .....                                                                 | 191 |
| Tabel 5. 387 Rincian Jasa Giro-LO.....                                                          | 191 |
| Tabel 5. 388 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO .....                               | 191 |
| Tabel 5. 389 Pendapatan Bunga-LO .....                                                          | 191 |
| Tabel 5. 390 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO.....                    | 192 |
| Tabel 5. 391 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO .....           | 192 |
| Tabel 5. 392 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO .....                             | 192 |
| Tabel 5. 393 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO.....                  | 192 |
| Tabel 5. 394 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO .....                                             | 192 |
| Tabel 5. 395 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO.....                                      | 193 |
| Tabel 5. 396 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO .....                                         | 194 |
| Tabel 5. 397 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO .....                                 | 194 |
| Tabel 5. 398 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO.....                                   | 194 |
| Tabel 5. 399 Pendapatan dari Pengembalian-LO .....                                              | 194 |
| Tabel 5. 400 Rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO.....                                       | 194 |
| Tabel 5. 401 Pendapatan dari BLUD-LO.....                                                       | 195 |
| Tabel 5. 402 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO .....                        | 196 |
| Tabel 5. 403 Pendapatan Transfer .....                                                          | 196 |
| Tabel 5. 404 Rincian Pendapatan Transfer-LO .....                                               | 196 |
| Tabel 5. 405 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat .....                                         | 196 |
| Tabel 5. 406 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat .....                                 | 197 |
| Tabel 5. 407 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO.....                                           | 197 |
| Tabel 5. 408 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO .....                                  | 197 |
| Tabel 5. 409 Pendapatan Bagi Hasil-LO .....                                                     | 198 |
| Tabel 5. 410 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO .....                                             | 198 |
| Tabel 5. 411 Bantuan Keuangan-LO.....                                                           | 198 |
| Tabel 5. 412 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO .....                                     | 198 |
| Tabel 5. 413 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....                                         | 199 |
| Tabel 5. 414 Pendapatan Hibah.....                                                              | 199 |
| Tabel 5. 415 Rincian Pendapatan Hibah-LO.....                                                   | 199 |
| Tabel 5. 416 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO ..... | 200 |
| Tabel 5. 417 Beban Daerah .....                                                                 | 200 |
| Tabel 5. 418 Rincian Beban Daerah.....                                                          | 201 |
| Tabel 5. 419 Beban Operasi .....                                                                | 201 |
| Tabel 5. 420 Rincian Beban Operasi.....                                                         | 201 |
| Tabel 5. 421 Beban Pegawai .....                                                                | 201 |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 422 Rincian Beban Pegawai.....                                                                               | 202 |
| Tabel 5. 423 Beban Gaji dan Tunjangan ASN .....                                                                       | 202 |
| Tabel 5. 424 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN.....                                                                | 202 |
| Tabel 5. 425 Beban Tambahan Penghasilan ASN.....                                                                      | 203 |
| Tabel 5. 426 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN .....                                                             | 203 |
| Tabel 5. 427 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN .                               | 204 |
| Tabel 5. 428 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.....                    | 204 |
| Tabel 5. 429 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD .....                                                                      | 205 |
| Tabel 5. 430 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD .....                                                              | 205 |
| Tabel 5. 431 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH .....                                                                  | 206 |
| Tabel 5. 432 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.....                                                           | 206 |
| Tabel 5. 433 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH .....                                              | 207 |
| Tabel 5. 434 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH .....                                      | 207 |
| Tabel 5. 435 Beban Persediaan .....                                                                                   | 207 |
| Tabel 5. 436 Rincian Beban Persediaan .....                                                                           | 207 |
| Tabel 5. 437 Beban Jasa.....                                                                                          | 207 |
| Tabel 5. 438 Beban Pemeliharaan .....                                                                                 | 208 |
| Tabel 5. 439 Rincian Beban Pemeliharaan.....                                                                          | 208 |
| Tabel 5. 440 Beban Perjalanan Dinas .....                                                                             | 208 |
| Tabel 5. 441 Rincian Beban Perjalanan Dinas .....                                                                     | 209 |
| Tabel 5. 442 Rincian Beban Perjalanan Dinas .....                                                                     | 209 |
| Tabel 5. 443 Beban Bunga .....                                                                                        | 209 |
| Tabel 5. 444 Beban Subsidi.....                                                                                       | 209 |
| Tabel 5. 445 Beban Hibah.....                                                                                         | 210 |
| Tabel 5. 446 Rincian Beban Hibah .....                                                                                | 210 |
| Tabel 5. 447 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat .....                                                                | 210 |
| Tabel 5. 448 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat.....                                                         | 210 |
| Tabel 5. 449 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia .....         | 210 |
| Tabel 5. 450 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ..... | 211 |
| Tabel 5. 451 Beban Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta .....                                           | 211 |
| Tabel 5. 452 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.....                                                  | 211 |
| Tabel 5. 453 Beban Hibah Dana BOSP .....                                                                              | 211 |
| Tabel 5. 454 Rincian Beban Hibah Dana BOSP .....                                                                      | 212 |
| Tabel 5. 455 Beban Bantuan Sosial.....                                                                                | 212 |
| Tabel 5. 456 Rincian Beban Bantuan Sosial .....                                                                       | 212 |
| Tabel 5. 457 Beban Penyisihan Piutang.....                                                                            | 212 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 458 Rincian Beban Penyisihan Piutang.....                                        | 213 |
| Tabel 5. 459 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah.....                                   | 213 |
| Tabel 5. 460 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah .....                          | 213 |
| Tabel 5. 461 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah .....                              | 214 |
| Tabel 5. 462 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.....                       | 214 |
| Tabel 5. 463 Beban Penyusutan Dan Amortisasi .....                                        | 214 |
| Tabel 5. 464 Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi.....                                 | 214 |
| Tabel 5. 465 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.....                                    | 215 |
| Tabel 5. 466 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin .....                           | 215 |
| Tabel 5. 467 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.....                                    | 216 |
| Tabel 5. 468 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan .....                           | 216 |
| Tabel 5. 469 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.....                            | 216 |
| Tabel 5. 470 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi .....                   | 216 |
| Tabel 5. 471 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya.....                                     | 217 |
| Tabel 5. 472 Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....           | 217 |
| Tabel 5. 473 Beban Penyusutan Aset Lainnya .....                                          | 217 |
| Tabel 5. 474 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....                                    | 217 |
| Tabel 5. 475 Beban Transfer .....                                                         | 218 |
| Tabel 5. 476 Rincian Beban Transfer.....                                                  | 218 |
| Tabel 5. 477 Beban Bagi Hasil Pajak.....                                                  | 218 |
| Tabel 5. 478 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa .  | 218 |
| Tabel 5. 479 Rincian Beban Bagi Hasil Retribusi.....                                      | 218 |
| Tabel 5. 480 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa..... | 219 |
| Tabel 5. 481 Beban Bantuan Keuangan .....                                                 | 219 |
| Tabel 5. 482 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa .....     | 219 |
| Tabel 5. 483 Rincian Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa   | 219 |
| Tabel 5. 484 Beban Tak Terduga .....                                                      | 220 |
| Tabel 5. 485 Surplus Operasional-LO.....                                                  | 220 |
| Tabel 5. 486 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional .....                          | 220 |
| Tabel 5. 487 Surplus Non Operasional-LO .....                                             | 221 |
| Tabel 5. 488 Rincian Surplus Non Operasional-LO.....                                      | 221 |
| Tabel 5. 489 Defisit Non Operasional-LO .....                                             | 225 |
| Tabel 5. 490 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO .....                        | 225 |
| Tabel 5. 491 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO.....                      | 225 |
| Tabel 5. 492 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO .....             | 225 |
| Tabel 5. 493 Surplus/Defisit LO .....                                                     | 228 |
| Tabel 5. 494 Laporan Perubahan Ekuitas.....                                               | 229 |
| Tabel 5. 495 Ekuitas Awal .....                                                           | 229 |
| Tabel 5. 496 Rincian Surplus (Defisit) LO .....                                           | 230 |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5. 497 Ekuitas Akhir .....                                                   | 230 |
| Tabel 5. 498 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi .....                          | 231 |
| Tabel 5. 499 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....                            | 231 |
| Tabel 5. 500 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....                           | 232 |
| Tabel 5. 501 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....                         | 233 |
| Tabel 5. 502 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi .....                         | 233 |
| Tabel 5. 503 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi .....                        | 233 |
| Tabel 5. 504 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan .....                        | 234 |
| Tabel 5. 505 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....                      | 235 |
| Tabel 5. 5066 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....                     | 235 |
| Tabel 5. 5076 Rincian Saldo Kartu Flazz RSUD RT Notopuro per 31 Desember 2025..... | 235 |
| Tabel 5. 5086 Rincian Uang Jaminan Rusunawa per 31 Desember 2025 .....             | 236 |
| Tabel 5. 509 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....                        | 236 |
| Tabel 5. 510 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....                | 237 |
| Tabel 5. 511 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris .....                      | 237 |
| Tabel 5. 512 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris.....               | 237 |
| Tabel 5. 513 Kenaikan/Penurunan Kas .....                                          | 237 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Rincian Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah .....                                          | 1   |
| Lampiran 2 Belanja Pegawai per OPD.....                                                                    | 29  |
| Lampiran 3 Belanja Barang dan Jasa .....                                                                   | 32  |
| Lampiran 4 Daftar Pekerjaan Fisik Atas Belanja Pemeliharaan Dan Belanja Barjas Yang Tidak Terlaksana ..... | 51  |
| Lampiran 5 Rincian Belanja Barang .....                                                                    | 52  |
| Lampiran 6 Belanja Jasa .....                                                                              | 58  |
| Lampiran 7 Belanja Pemeliharaan .....                                                                      | 66  |
| Lampiran 8 Daftar Penerima Hibah Uang.....                                                                 | 70  |
| Lampiran 9 Daftar Penerima Hibah Barang.....                                                               | 307 |
| Lampiran 10 Penerima Bantuan Sosial .....                                                                  | 308 |
| Lampiran 11 Daftar Pekerjaan Fisik Atas Belanja Modal Yang Tidak Terlaksana .....                          | 312 |
| Lampiran 12 Rincian Belanja Tidak Terduga .....                                                            | 316 |
| Lampiran 13 Daftar Bantuan Keuangan.....                                                                   | 324 |
| Lampiran 14 Kas di BLUD .....                                                                              | 346 |
| Lampiran 15 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang.....                                                     | 348 |
| Lampiran 16 Piutang ke KPKNL .....                                                                         | 351 |
| Lampiran 17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi .....                                                        | 366 |
| Lampiran 18 Beban Dibayar Dimuka .....                                                                     | 390 |
| Lampiran 19 Persediaan per OPD .....                                                                       | 392 |
| Lampiran 20 Persediaan - Usang/Rusak .....                                                                 | 396 |
| Lampiran 21 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan .....                                                       | 417 |
| Lampiran 22 Daftar Kemitraan dengan Pihak Ketiga .....                                                     | 443 |
| Lampiran 23 Rincian Aset Tidak Berwujud.....                                                               | 444 |
| Lampiran 24 Aset Lain-Lain per OPD .....                                                                   | 460 |
| Lampiran 25 Rincian Properti Investasi .....                                                               | 463 |
| Lampiran 26 Pendapatan Diterima Dimuka .....                                                               | 467 |
| Lampiran 27 Perbedaan Pendapatan Daerah antara LRA dan LO .....                                            | 519 |
| Lampiran 28 Perbedaan Pendapatan Retribusi antara LRA dan LO .....                                         | 520 |
| Lampiran 29 Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO.....                                | 522 |
| Lampiran 30 Perbedaan Belanja dan Beban antara LRA dan LO .....                                            | 525 |
| Lampiran 31 Perbedaan antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai antara LRA dan LO .....                     | 526 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 32 Perbedaan Belanja Persediaan dan Beban Persediaan antara LRA dan LO.....              | 527 |
| Lampiran 33 Perbedaan Belanja Jasa dan Beban Jasa antara LRA dan LO.....                          | 528 |
| Lampiran 34 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan antara LRA dan LO .             | 529 |
| Lampiran 35 Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas antara LRA dan LO ..... | 530 |

Nilai realisasi Belanja Transfer sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 730.964.735.380,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.268.686.274,00 atau 17,77% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp620.696.049.106,00.

Nilai realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 618.940.644.143,08 mengalami kenaikan sebesar Rp58.205.464.658,22 atau 10,38 % jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp560.735.179.484,86.

Nilai realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 643.226.702.161,36 mengalami kenaikan sebesar Rp 79.818.594.572,09 atau 14,17% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp563.408.107.589,27.

Nilai realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp24.286.058.018,28 mengalami kenaikan sebesar Rp 21.613.129.913,87 atau 808,59% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.672.928.104,41.

## **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 642.775.655.518,20 merupakan saldo SiLPA Tahun 2024. SAL awal Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp130.873.289.970,15 atau 25,57% apabila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp511.902.365.548,05.

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 680.654.556.300,37 mengalami kenaikan Rp37.878.900.782,17 atau 5,89% dari TA 2024 sebesar Rp642.775.655.518,20.

## **3. Neraca**

Neraca, menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.600.900.823.442,32 mengalami kenaikan sebesar Rp387.667.101.641,72 atau 1,67% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp23.213.233.721.800,60.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp152.605.409.600,81 mengalami penurunan sebesar Rp51.773.545.351,97 atau 25,33% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp204.378.954.952,78.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.448.295.413.841,51 mengalami kenaikan sebesar Rp439.440.646.993,70 atau 1,91% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp23.008.854.766.847,82.

## **4. Laporan Operasional**

Laporan Operasional, menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.

Nilai Pendapatan Daerah-LO sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp5.469.957.499.732,15 mengalami kenaikan sebesar Rp440.293.043.291,88 atau 8,75% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.029.664.456.440,27.

## **1. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dengan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah tercapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

### **1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja OPD Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sidoarjo;
17. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### **1.4 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). SKPKD adalah BPKAD, sedangkan BLUD adalah 31 Puskesmas, RSUD RTN Sidoarjo, RSUD Sidoarjo Barat, TPA Griyo Mulyo Jabon, dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan serta mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi sebanyak 47 OPD, terdiri dari 6 Badan, 19 Dinas, 2 Sekretariat, Inspektorat, Satpol PP dan 18 Kecamatan.

##### **6 (Enam) badan terdiri dari:**

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

##### **19 (Sembilan belas) dinas terdiri dari:**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Pangan dan Pertanian;
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**2 (Dua) Sekretariat terdiri dari:**

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

**1(Satu) Inspektorat**

**1(Satu) Satuan Polisi Pamong Praja**

**18 (Delapan belas) kecamatan terdiri dari:**

1. Kecamatan Sidoarjo;
2. Kecamatan Candi;
3. Kecamatan Buduran;
4. Kecamatan Wonoayu;
5. Kecamatan Krian;
6. Kecamatan Porong;
7. Kecamatan Krembung;
8. Kecamatan Jabon;
9. Kecamatan Balongbendo;
10. Kecamatan Tarik;
11. Kecamatan Taman;
12. Kecamatan Waru;
13. Kecamatan Gedangan;
14. Kecamatan Sedati;
15. Kecamatan Tanggulangin;
16. Kecamatan Tulangan;
17. Kecamatan Prambon;
18. Kecamatan Sukodono.

**Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdapat pada:**

1. RSUD RTN Sidoarjo (Direktur);
2. RSUD Sidoarjo Barat (Direktur);
3. Sekretariat Daerah (Kepala Bagian);
4. Dinas Kesehatan (Kepala Puskesmas);
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Kepala UPT TPA Jabon);
6. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang (Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik);
7. Kecamatan Sidoarjo (Kepala Kelurahan);
8. Kecamatan Porong (Kepala Kelurahan);

9. Kecamatan Krian (Kepala Kelurahan);
10. Kecamatan Taman (Kepala Kelurahan).

### **1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

1. Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan keuangan menyajikan informasi mengenai kebijakan keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.

3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Penjelasan Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, sisa lebih anggaran, pendapatan dan beban operasional, arus kas, perubahan ekuitas dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

6. Penutup

Penutup memuat informasi mengenai Rincian Perhitungan SiLPA dan pernyataan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*).

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan harus dilandasi dengan asumsi dasar ekonomi makro daerah yang mempertimbangkan data terkait ekonomi makro dan nasional dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Sidoarjo dalam Angka Tahun 2025. Asumsi dasar tersebut merupakan besaran fundamental yang menjadi acuan dalam meningkatkan perekonomian daerah, selain karena sangat berpengaruh besar dalam menentukan pengambilan kebijakan pengelolaan anggaran daerah yang akan dialokasikan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan, juga sebagai tindakan penyesuaian terhadap kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengeliminir berbagai permasalahan krusial di masyarakat melalui prioritas pembangunan yang diimplementasikan ke dalam dokumen Tahunan.

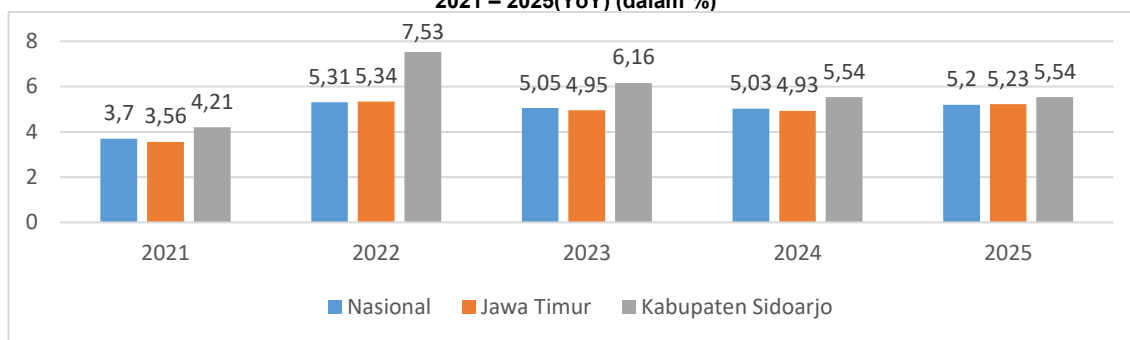
Kondisi makro ekonomi Kabupaten Sidoarjo akan ditinjau dari indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi daerah yaitu (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) Inflasi; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran; (4) Indikator Ketimpangan Rasio Gini; (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan (6) Tingkat Kemiskinan.

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan pertumbuhan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan antara periode sekarang dan Tahun-Tahun sebelumnya di suatu daerah. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan sebagai acuan dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dari Tahun sekarang dengan Tahun sebelumnya. Indikator ini sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan serta berguna pula untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 beserta perbandingannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional tersaji pada grafik di bawah ini:

**Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 – 2025 (YoY) (dalam %)**



**Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021-2025**

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 adalah 4,21%, kemudian Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo meningkat menjadi sebesar 7,53% dikarenakan pemulihan dari dampak pandemi COVID 19 yang melanda secara global. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,16% dan Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,54%.

Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) seperti terlampauinya atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan pelampauan alokasi belanja daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tgl 17 Februari 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025. Sesuai dengan Dasar Hukum Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Perubahan tersebut untuk mengakomodir :
  - a. Penambahan pagu pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat DAK Nonfisik (Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian) sebesar Rp360.240.000,00; dan
  - b. Penambahan pagu Belanja Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp360.240.000,00.
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2025 tgl 2 Mei 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025, Sesuai dengan Dasar Hukum (1)Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (2) Surat Dinas Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1/686.14/101.1/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Pagu Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota Tahun 2025; (3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi

oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025; (4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025; dan (5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/013/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Perubahan tersebut untuk mengakomodir :

- a. Pengurangan pagu pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat DAU Bid. Pekerjaan Umum sebesar Rp9.103.772.000,00;
  - b. Penambahan pagu pendapatan Transfer antar Daerah BKK Bidang Pendidikan sebesar Rp 9.084.000.000,00, BKK Bidang Kesehatan sebesar Rp 237.077.000,00 dan BKK Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa sebesar Rp 54.000.000.000,00;
  - c. Dan Penyesuaian pagu belanja menyesuaikan dengan penambahan dan pengurangan pagu pendapatan pada 6 (enam) SKPD.
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2025 tgl 19 Desember 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran PAPBD TA 2025, sesuai dengan dasar hukum (1) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/394/013/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Ke Kabupaten; (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Katahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; (3) Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 900.1.1/5332/438.5.1/2025 tanggal 2 Desember 2025 perihal Permohonan dan (4) Surat pergeseran belanja gaji dan tunjangan dari beberapa OPD karena adanya kekurangan anggaran belanja tunjangan PPh PNS, Perubahan tersebut untuk mengakomodir :
- a. Penambahan pagu pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat DAK Non Fisik TPG dan Tamsil sebesar Rp 2.522.134.000,00;
  - b. Penambahan pagu pendapatan Transfer antar Daerah Honorarium Pembahas bagi Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp 1.874.000.000,00;
  - c. Dan Penyesuaian pagu belanja menyesuaikan dengan penambahan dan pengurangan pagu pendapatan pada 2 (dua) SKPD.

### 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah seluruh (nilai tambah) atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu Tahun. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting yaitu pendapatan per kapita, pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu daerah.

**Tabel 2. 1 PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Konstran (ADHK) dalam persen**

| Keterangan       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>PDRB ADHB</b> | <b>4,21</b> | <b>7,53</b> | <b>6,16</b> | <b>5,54</b> | <b>9,28</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021-2025

### 2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan berkelanjutan sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi dimana para pelaku ekonomi enggan untuk melakukan spekulasi dalam perekonomian. Di samping itu, inflasi juga bisa memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik. Oleh karenanya informasi angka inflasi menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan oleh pemerintah daerah.

Biaya hidup per orang di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 1.702.975, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2024 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2025 menurut BI sebesar 2,5%, maka biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Sidoarjo mungkin akan naik mendekati 2.000.000. Sedangkan UMK 2025 Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebesar Rp4.940.090,00 (+1.43%) dari UMK tahun 2024 sebesar Rp4.870.511,00.

**Tabel 2. 2 Angka Inflasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2025 (YoY)**

| Tahun       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Inflasi (%) | 2,49 | 5,50 | 2,61 | 3,20 | 3,40 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021-2025

### 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu ukurannya. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertumbuhan jumlah kesempatan kerja lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Indikator tersebut berguna sebagai acuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  $TPT = (\text{Pencari Kerja} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100\%$ . Perkembangan TPT Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sidoarjo Tahun 2021 - 2025**

| Keterangan               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Tingkat pengangguran (%) | 2,49 | 8,80 | 8,05 | 6,49 | 5,40 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021-2025

Jumlah Angkatan kerja pekerja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 sebesar 1,09%, lebih rendah dari Tahun 2024. Namun Tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo masih menjadi yang paling tinggi di Kabupaten/Kota se Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

### 2.1.5 Indikator Ketimpangan Rasio Gini

Koefisien Gini (Rasio Gini) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Rasio Gini Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 mengalami peningkatan.

**Tabel 2. 4 Rasio Gini Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2025**

| Tahun | Ratio Gini |
|-------|------------|
| 2021  | 0,35       |
| 2022  | 0,37       |
| 2023  | 0,36       |
| 2024  | 0,33       |
| 2025  | 0,31       |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021-2025

### 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan manusia di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2021 hingga 2025, status pembangunan manusia Kabupaten Sidoarjo sudah berada di level “sangat tinggi”. Selama 2021–2025, IPM Kabupaten Sidoarjo rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun, dari 81,01 pada tahun 2022 menjadi 83,35 pada tahun 2025, dengan data sebagai berikut:

**Tabel 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia**

| Tahun | IPM   |
|-------|-------|
| 2021  | 81,01 |
| 2022  | 81,37 |
| 2023  | 81,88 |
| 2024  | 82,67 |
| 2025  | 83,35 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2022-2025

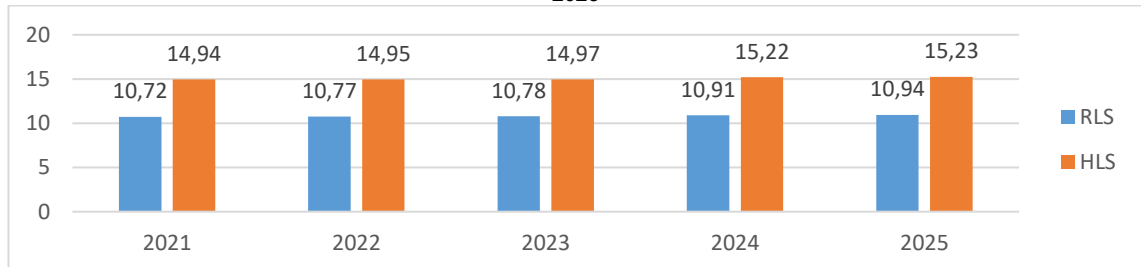
IPM sendiri secara konseptual merupakan suatu ukuran komposit yang mencerminkan pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran riil per kapita. Ketiga variabel tersebut masing-masing meliputi:

#### 1. Indeks Pendidikan

Merupakan penggambaran tingkat pendidikan serta kemampuan akademik dan keterampilan, dan tercermin melalui angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*) dan Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*). Angka Harapan Lama Sekolah dihitung pada penduduk usia 7 Tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya

pendidikan (dalam Tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan lama rata-rata seseorang menempuh pendidikan formal dengan artian waktu maksimal yang digunakan seseorang dalam menekuni pendidikan sekolah pada semua jenjang dengan cakupan penduduk berusia 25 Tahun ke atas.

**Grafik 2. 2 Rata-Rata Lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2025**



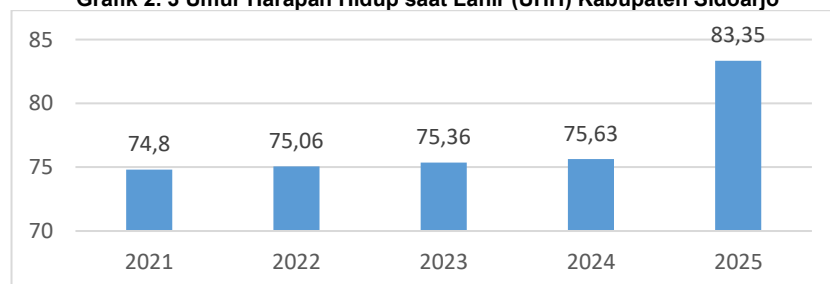
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021-2025

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2025, HLS Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,94 rata-rata meningkat 0,62 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,59 persen per tahun. RLS tahun 2025 meningkat 0,13 tahun (0,03 persen) dibandingkan tahun 2024.

## 2. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diindikasikan dengan Indeks Harapan Hidup (*Life Expectancy at Age*), yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Selama periode 2021 hingga 2025, UHH telah meningkat sebesar 0,83 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,37 persen per tahun. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Sidoarjo adalah 74,80 tahun dan pada tahun 2025 mencapai 83,35 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,68 tahun (0,82 persen) dibanding tahun sebelumnya 82,67, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2025 (0,19 persen per tahun).

**Grafik 2. 3 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kabupaten Sidoarjo**

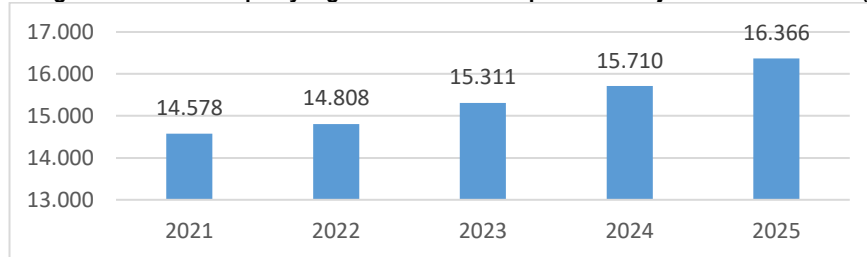


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021 -2025

### 3. Pengeluaran Riil per Kapita

Standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp16,366 juta per tahun. Capaian ini meningkat 656 ribu rupiah (4,18, persen) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 15,710, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2025 yang sebesar 2,49 persen per tahun.

**Grafik 2. 4 Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025 (ribu rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021-2025

#### 2.1.7 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang banyak terjadi baik di skala nasional maupun skala daerah. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 6 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2025**

| Keterangan                          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tingkat Kemiskinan (%)              | 5,93   | 5,36   | 5,00   | 4,53   | 4,40   |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) | 137,15 | 125,69 | 119,15 | 109,39 | 107,57 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2022-2025

Selama periode 2021-2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo berkurang sebanyak 18,12 ribu jiwa, dari 125,69 ribu jiwa pada 2022 menjadi 107,57 ribu jiwa pada 2025 atau mengalami penurunan sebesar 14,42 persen.

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

#### 3.1 Pencapaian Target Keuangan menurut Urusan Pemerintahan

Pencapaian target keuangan menurut urusan pemerintahan bisa dilihat dari dua sisi yaitu pendapatan dan belanja.

**Tabel 3. 1 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan**

| Uraian                                                                        | Anggaran             | Realisasi            | %      | Sumber Dana | Lokasi   | Penjelasan |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------|----------|------------|
| Pajak Daerah                                                                  | 1.696.451.167.743,00 | 1.750.894.046.285,18 | 103,21 | APBD        | Sidoarjo |            |
| Retribusi Daerah                                                              | 899.169.421.000,00   | 919.213.105.670,27   | 102,23 | APBD        | Sidoarjo |            |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                             | 47.821.663.259,00    | 47.730.122.053,50    | 99,81  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Lain - lain PAD yang Sah                                                      | 47.954.690.107,00    | 69.058.638.269,59    | 144,01 | APBD        | Sidoarjo |            |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                          | 2.515.939.170.260,00 | 2.465.790.036.041,00 | 98,01  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                                              | 245.320.556.400,00   | 273.381.847.150,00   | 111,44 | APBD        | Sidoarjo |            |
| Pendapatan Hibah                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | APBD        | Sidoarjo |            |
| Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Pegawai                                                               | 1.914.484.607.621,20 | 1.786.341.122.963,05 | 93,31  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Barang dan Jasa                                                       | 2.073.392.534.605,00 | 1.883.020.460.459,29 | 90,82  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Bunga                                                                 | 3.000.000.000,00     | 2.580.053.896,65     | 86     | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Subsidi                                                               | 5.040.000.000,00     | 2.955.285.939,00     | 58,64  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Hibah                                                                 | 277.433.120.433,00   | 273.391.805.661,44   | 98,54  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Bantuan Sosial                                                        | 107.094.145.000,00   | 91.508.186.500,00    | 85,45  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Modal Tanah                                                           | 52.043.827.186,00    | 23.250.256.678,00    | 44,67  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                             | 223.496.322.012,00   | 206.772.187.050,00   | 92,52  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                             | 357.334.751.113,00   | 252.754.816.360,50   | 70,73  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    | 272.050.633.991,00   | 199.730.563.281,32   | 73,42  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                              | 599.320.840,00       | 584.702.457,00       | 97,56  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Modal Aset Lainnya                                                    | 765.850.000,00       | 244.871.904,00       | 31,97  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Tidak Terduga                                                         | 19.977.358.000,00    | 10.254.834.782,00    | 51,33  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Belanja Bagi Hasil                                                            | 195.803.206.786,00   | 195.803.206.786,00   | 100    | APBD        | Sidoarjo |            |

| Uraian                                                                                | Anggaran           | Realisasi          | %      | Sumber Dana | Lokasi   | Penjelasan |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|----------|------------|
| Belanja Bantuan Keuangan                                                              | 568.629.646.700,00 | 535.161.528.594,00 | 94,11  | APBD        | Sidoarjo |            |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                      | 642.775.655.518,20 | 642.775.655.518,20 | 100    | APBD        | Sidoarjo |            |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | APBD        | Sidoarjo |            |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                                          | 0,00               | 451.046.643,16     | 100,00 | APBD        | Sidoarjo |            |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan  | 0,00               | 0,00               | 0,00   | APBD        | Sidoarjo |            |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00   | APBD        | Sidoarjo |            |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 24.287.000.000,00  | 24.286.058.018,28  | 29,7   | APBD        | Sidoarjo |            |

### 3.1.1 Pencapaian Target Pendapatan menurut Urusan Pemerintahan

Pencapaian target keuangan dari realisasi pendapatan daerah sesuai dengan pembagian urusan dan organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Klasifikasi Pendapatan Menurut Organisasi**

| SKPD                                                            | Anggaran                  | Realisasi 2025            | Realisasi 2024            | Lebih/(Kurang)           | %             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| PENDAPATAN DAERAH                                               | 5.452.656.668.769,00      | 5.526.067.795.469,54      | 5.333.383.466.334,81      | 192.684.329.134,73       | 3,61          |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                           |                           |                           |                          |               |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            | 808.402.000.000,00        | 826.634.826.539,71        | 794.990.688.366,76        | 31.644.138.172,95        | 3,98          |
| <i>Dinas Kesehatan</i>                                          | <i>90.002.000.000,00</i>  | <i>98.096.542.183,26</i>  | <i>89.709.496.914,01</i>  | <i>8.387.045.269,25</i>  | <i>9,35</i>   |
| <i>RSUD RTN</i>                                                 | <i>658.400.000.000,00</i> | <i>660.985.141.350,32</i> | <i>647.898.935.071,51</i> | <i>13.086.206.278,81</i> | <i>2,02</i>   |
| <i>RSUD SIDOARJO BARAT</i>                                      | <i>60.000.000.000,00</i>  | <i>67.553.143.006,13</i>  | <i>57.382.256.381,24</i>  | <i>10.170.886.624,89</i> | <i>17,72</i>  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN     | 7.337.800.000,00          | 7.745.105.150,07          | 7.841.850.979,00          | (96.745.828,93)          | (1,23)        |
| <i>Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang</i>  | <i>7.337.800.000,00</i>   | <i>7.745.105.150,07</i>   | <i>7.841.850.979,00</i>   | <i>(96.745.828,93)</i>   | <i>(1,23)</i> |
| URUSAN PEMERINTAHAN                                             | 64.054.895.535,00         | 65.984.933.460,49         | 40.447.338.361,16         | 25.537.595.099,33        | 63,14         |

| SKPD                                                                                                              | Anggaran          | Realisasi 2025    | Realisasi 2024    | Lebih/(Kurang)    | %        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| WAJIB YANG<br>TIAK BERKAITAN<br>DENGAN<br>PELAYANAN<br>DASAR                                                      |                   |                   |                   |                   |          |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KETENTERAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT | 0,00              | 0,00              | 2.508.300,00      | (2.508.300,00)    | (100,00) |
| <i>Badan<br/>Penanggulangan<br/>Bencana Daerah</i>                                                                | 0,00              | 0,00              | 2.508.300,00      | (2.508.300,00)    | (100,00) |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG TENAGA<br>KERJA                                                                  | 5.078.392.000,00  | 5.752.641.000,00  | 2.378.154.800,00  | 3.374.486.200,00  | 141,90   |
| <i>Dinas Tenaga<br/>Kerja</i>                                                                                     | 5.078.392.000,00  | 5.752.641.000,00  | 2.378.154.800,00  | 3.374.486.200,00  | 141,90   |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PANGAN                                                                           | 1.131.905.000,00  | 1.006.112.151,00  | 995.987.800,00    | 10.124.351,00     | 1,02     |
| <i>Dinas Pangan dan<br/>Pertanian</i>                                                                             | 1.131.905.000,00  | 1.006.112.151,00  | 995.987.800,00    | 10.124.351,00     | 1,02     |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                           | 13.155.859.000,00 | 12.588.945.270,49 | 11.500.025.230,16 | 1.088.920.040,33  | 9,47     |
| <i>Dinas Lingkungan<br/>Hidup dan<br/>Kebersihan</i>                                                              | 13.155.859.000,00 | 12.588.945.270,49 | 11.500.025.230,16 | 1.088.920.040,33  | 9,47     |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERHUBUNGAN                                                                   | 9.890.000.000,00  | 0,00              | 10.717.000,00     | (10.717.000,00)   | (100,00) |
| <i>Dinas<br/>Perhubungan</i>                                                                                      | 9.890.000.000,00  | 0,00              | 10.717.000,00     | (10.717.000,00)   | (100,00) |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KOPERASI,<br>USAHA KECIL,<br>DAN MENENGAH                                     | 3.449.535,00      | 6.550.000,00      | 3.720.000,00      | 2.830.000,00      | 76,08    |
| <i>Dinas Koperasi<br/>dan Usaha Mikro</i>                                                                         | 3.449.535,00      | 6.550.000,00      | 3.720.000,00      | 2.830.000,00      | 76,08    |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PENANAMAN<br>MODAL                                                            | 31.250.000.000,00 | 43.305.142.404,00 | 24.014.344.362,00 | 19.290.798.042,00 | 80,33    |
| <i>Dinas Penanaman<br/>Modal dan<br/>Pelayanan<br/>Terpadu Satu<br/>Pintu</i>                                     | 31.250.000.000,00 | 43.305.142.404,00 | 24.014.344.362,00 | 19.290.798.042,00 | 80,33    |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KEPEMUDAAN<br>DAN OLAHRAGA                                                    | 3.545.290.000,00  | 3.325.542.635,00  | 1.541.880.869,00  | 1.783.661.766,00  | 115,68   |
| <i>Dinas<br/>Kepemudaan,<br/>Olahraga dan<br/>Pariwisata</i>                                                      | 3.545.290.000,00  | 3.325.542.635,00  | 1.541.880.869,00  | 1.783.661.766,00  | 115,68   |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>PILIHAN                                                                                 | 19.300.675.000,00 | 18.846.782.031,00 | 18.690.568.254,00 | 156.213.777,00    | 0,84     |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG                                                                                  | 226.060.000,00    | 211.060.000,00    | 219.245.000,00    | (8.185.000,00)    | (3,73)   |

| SKPD                                              | Anggaran                    | Realisasi 2025              | Realisasi 2024              | Lebih/(Kurang)            | %           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                     |                             |                             |                             |                           |             |
| <i>Dinas Perikanan</i>                            | 226.060.000,00              | 211.060.000,00              | 219.245.000,00              | (8.185.000,00)            | (3,73)      |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>     |                             |                             |                             |                           |             |
| <i>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>        | 19.074.615.000,00           | 18.635.722.031,00           | 18.471.323.254,00           | 164.398.777,00            | 0,89        |
| <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>        |                             |                             |                             |                           |             |
| <i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i> | 4.553.561.298.234,00        | 4.606.856.148.288,27        | 4.470.295.524.427,32        | 136.560.623.860,95        | 3,05        |
| <i>Badan Pelayanan Pajak Daerah</i>               | 4.553.479.798.234,00        | 4.606.845.698.288,27        | 4.470.257.824.427,32        | 136.587.873.860,95        | 3,06        |
| <i>KEPEGAWAIAN</i>                                | 2.854.819.936.769,00        | 2.851.381.512.223,09        | 3.054.154.142.278,92        | (202.772.630.055,83)      | (6,64)      |
| <i>Badan Kepegawaian Daerah</i>                   | 1.698.659.861.465,00        | 1.755.464.186.065,18        | 1.416.103.682.148,40        | 339.360.503.916,78        | 23,96       |
| <i>KEPEGAWAIAN</i>                                | 8.850.000,00                | 3.800.000,00                | 0,00                        | 3.800.000,00              | 100,00      |
| <i>Badan Kepegawaian Daerah</i>                   | 8.850.000,00                | 3.800.000,00                | 0,00                        | 3.800.000,00              | 100,00      |
| <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                          | 72.650.000,00               | 6.650.000,00                | 37.700.000,00               | (31.050.000,00)           | (82,36)     |
| <b>KECAMATAN</b>                                  | 72.650.000,00               | 6.650.000,00                | 37.700.000,00               | (31.050.000,00)           | (82,36)     |
| <i>Kecamatan Krian</i>                            | 72.650.000,00               | 6.650.000,00                | 37.700.000,00               | (31.050.000,00)           | (82,36)     |
|                                                   | <b>5.452.656.668.769,00</b> | <b>5.526.067.795.469,54</b> | <b>5.333.383.466.334,81</b> | <b>192.684.329.134,73</b> | <b>3,61</b> |

### 3.1.2 Pencapaian Target Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Pencapaian target keuangan dari realisasi belanja daerah sesuai dengan pembagian urusan dan organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi**

| SKPD                                                                   | Anggaran             | Realisasi 2025       | Realisasi 2024       | Lebih/(Kurang)       | %       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                      |                      |                      |                      |         |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |                      |                      |                      |                      |         |
| <i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>                                 | 1.543.681.661.106,00 | 1.457.610.693.737,29 | 1.394.772.793.746,00 | 62.837.899.991,29    | 4,51    |
| <i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>                                 | 1.543.681.661.106,00 | 1.457.610.693.737,29 | 1.394.772.793.746,00 | 62.837.899.991,29    | 4,51    |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |                      |                      |                      |                      |         |
| <i>Dinas Kesehatan</i>                                                 | 1.640.754.494.779,00 | 1.478.420.744.244,31 | 1.474.889.231.092,42 | 3.531.513.151,89     | 0,24    |
| <i>Dinas Kesehatan</i>                                                 | 753.765.826.217,00   | 676.366.127.356,40   | 534.495.419.692,50   | 141.870.707.663,90   | 26,54   |
| <b>RSUD</b>                                                            | 751.983.857.318,00   | 683.780.733.027,86   | 792.505.203.219,92   | (108.724.470.192,06) | (13,72) |
| <b>RSUD SIDOARJO BARAT</b>                                             | 135.004.811.244,00   | 118.273.883.860,05   | 147.888.608.180,00   | (29.614.724.319,95)  | (20,03) |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>    |                      |                      |                      |                      |         |
| <i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>    | 395.025.799.951,00   | 286.210.111.013,00   | 313.577.284.420,00   | (27.367.173.407,00)  | (8,73)  |

| SKPD                                                                                      | Anggaran                  | Realisasi 2025            | Realisasi 2024            | Lebih/(Kurang)            | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air                                       | 395.025.799.951,00        | 286.210.111.013,00        | 313.577.284.420,00        | (27.367.173.407,00)       | (8,73)       |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 134.308.077.091,00        | 111.445.965.285,72        | 86.600.461.519,00         | 24.845.503.766,72         | 28,69        |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang                                   | 134.308.077.091,00        | 111.445.965.285,72        | 86.600.461.519,00         | 24.845.503.766,72         | 28,69        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 65.310.151.278,00         | 58.600.805.665,00         | 49.338.385.675,05         | 9.262.419.989,95          | 18,77        |
| Satuan Polisi Pamong Praja                                                                | 33.736.349.819,00         | 30.158.702.306,00         | 27.431.936.415,00         | 2.726.765.891,00          | 9,94         |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                       | 31.573.801.459,00         | 28.442.103.359,00         | 21.906.449.260,05         | 6.535.654.098,95          | 29,83        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         | 47.516.576.003,00         | 42.470.363.503,00         | 45.591.691.652,00         | (3.121.328.149,00)        | (6,85)       |
| Dinas Sosial                                                                              | 47.516.576.003,00         | 42.470.363.503,00         | 45.591.691.652,00         | (3.121.328.149,00)        | (6,85)       |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>              | <b>730.711.252.160,00</b> | <b>648.164.255.625,05</b> | <b>543.201.740.575,00</b> | <b>104.962.515.050,05</b> | <b>19,32</b> |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                   | 24.294.751.474,00         | 22.844.969.766,00         | 14.748.002.335,00         | 8.096.967.431,00          | 54,90        |
| Dinas Tenaga Kerja                                                                        | 24.294.751.474,00         | 22.844.969.766,00         | 14.748.002.335,00         | 8.096.967.431,00          | 54,90        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   | 49.672.544.448,00         | 45.369.277.491,00         | 35.220.358.661,00         | 10.148.918.830,00         | 28,82        |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                    | 49.672.544.448,00         | 45.369.277.491,00         | 35.220.358.661,00         | 10.148.918.830,00         | 28,82        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                         | 48.400.837.409,00         | 44.829.216.327,00         | 37.953.999.308,00         | 6.875.217.019,00          | 18,11        |
| Dinas Pangan dan Pertanian                                                                | 48.400.837.409,00         | 44.829.216.327,00         | 37.953.999.308,00         | 6.875.217.019,00          | 18,11        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                               | 182.889.051.408,00        | 152.681.150.033,00        | 117.510.899.604,00        | 35.170.250.429,00         | 29,93        |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                                                     | 182.889.051.408,00        | 152.681.150.033,00        | 117.510.899.604,00        | 35.170.250.429,00         | 29,93        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 | 19.812.326.838,00         | 17.927.637.308,00         | 15.492.665.809,00         | 2.434.971.499,00          | 15,72        |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                                      | 19.812.326.838,00         | 17.927.637.308,00         | 15.492.665.809,00         | 2.434.971.499,00          | 15,72        |

| SKPD                                                           | Anggaran                 | Realisasi 2025           | Realisasi 2024           | Lebih/(Kurang)          | %            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA    | 85.108.197.655,00        | 82.161.352.807,00        | 82.003.025.493,00        | 158.327.314,00          | 0,19         |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                         | 85.108.197.655,00        | 82.161.352.807,00        | 82.003.025.493,00        | 158.327.314,00          | 0,19         |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                         | 138.266.106.326,00       | 121.509.872.457,00       | 112.036.317.338,00       | 9.473.555.119,00        | 8,46         |
| Dinas Perhubungan                                              | 138.266.106.326,00       | 121.509.872.457,00       | 112.036.317.338,00       | 9.473.555.119,00        | 8,46         |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          | 45.673.179.742,00        | 42.173.294.911,00        | 31.094.753.106,00        | 11.078.541.805,00       | 35,63        |
| Dinas Komunikasi dan Informatika                               | 45.673.179.742,00        | 42.173.294.911,00        | 31.094.753.106,00        | 11.078.541.805,00       | 35,63        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 19.774.316.425,00        | 17.757.595.523,05        | 16.268.486.738,00        | 1.489.108.785,05        | 9,15         |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                                 | 19.774.316.425,00        | 17.757.595.523,05        | 16.268.486.738,00        | 1.489.108.785,05        | 9,15         |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     | 16.049.572.862,00        | 13.859.932.031,00        | 16.518.952.610,00        | (2.659.020.579,00)      | (16,10)      |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu         | 16.049.572.862,00        | 13.859.932.031,00        | 16.518.952.610,00        | (2.659.020.579,00)      | (16,10)      |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA             | 87.150.995.403,00        | 74.803.080.130,00        | 53.010.216.866,00        | 21.792.863.264,00       | 41,11        |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                      | 87.150.995.403,00        | 74.803.080.130,00        | 53.010.216.866,00        | 21.792.863.264,00       | 41,11        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                        | 13.619.372.170,00        | 12.246.876.841,00        | 11.344.062.707,00        | 902.814.134,00          | 7,96         |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               | 13.619.372.170,00        | 12.246.876.841,00        | 11.344.062.707,00        | 902.814.134,00          | 7,96         |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                             | <b>90.116.780.020,00</b> | <b>83.268.129.331,34</b> | <b>74.880.987.554,00</b> | <b>8.387.141.777,34</b> | <b>11,20</b> |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN              | 30.672.966.877,00        | 27.963.214.918,00        | 15.621.460.465,00        | 12.341.754.453,00       | 79,01        |
| Dinas Perikanan                                                | 30.672.966.877,00        | 27.963.214.918,00        | 15.621.460.465,00        | 12.341.754.453,00       | 79,01        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                         | 59.443.813.143,00        | 55.304.914.413,34        | 59.259.527.089,00        | (3.954.612.675,66)      | (6,67)       |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan                            | 59.443.813.143,00        | 55.304.914.413,34        | 59.259.527.089,00        | (3.954.612.675,66)      | (6,67)       |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH         | 214.858.102.377,00       | 189.158.010.872,98       | 195.669.205.836,00       | (6.511.194.963,02)      | (3,33)       |
| Sekretariat Daerah                                             | 119.072.563.128,00       | 107.202.734.258,98       | 92.147.237.440,00        | 15.055.496.818,98       | 16,34        |
| Sekretariat Daerah                                             | 119.072.563.128,00       | 107.202.734.258,98       | 92.147.237.440,00        | 15.055.496.818,98       | 16,34        |
| SEKRETARIAT DPRD                                               | 95.785.539.249,00        | 81.955.276.614,00        | 103.521.968.396,00       | (21.566.691.782,00)     | (20,83)      |

| SKPD                                       | Anggaran           | Realisasi 2025     | Realisasi 2024     | Lebih/(Kurang)      | %       |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Sekretariat DPRD                           | 95.785.539.249,00  | 81.955.276.614,00  | 103.521.968.396,00 | (21.566.691.782,00) | (20,83) |
| UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN               | 903.884.614.730,20 | 841.314.055.809,62 | 749.480.749.924,00 | 91.833.305.885,62   | 12,25   |
| PERENCANAAN                                | 22.242.796.113,00  | 20.599.075.537,00  | 19.813.882.962,00  | 785.192.575,00      | 3,96    |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       | 22.242.796.113,00  | 20.599.075.537,00  | 19.813.882.962,00  | 785.192.575,00      | 3,96    |
| KEUANGAN                                   | 859.351.469.683,20 | 801.396.791.233,62 | 712.104.402.587,00 | 89.292.388.646,62   | 12,54   |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 817.443.359.349,20 | 768.572.458.435,62 | 672.198.616.441,00 | 96.373.841.994,62   | 14,34   |
| Badan Pelayanan Pajak Daerah               | 41.908.110.334,00  | 32.824.332.798,00  | 39.905.786.146,00  | (7.081.453.348,00)  | (17,75) |
| KEPEGAWAIAN                                | 22.290.348.934,00  | 19.318.189.039,00  | 17.562.464.375,00  | 1.755.724.664,00    | 10,00   |
| Badan Kepegawaian Daerah                   | 22.290.348.934,00  | 19.318.189.039,00  | 17.562.464.375,00  | 1.755.724.664,00    | 10,00   |
| UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAHAN              | 28.309.841.480,00  | 24.962.636.526,00  | 19.621.388.267,00  | 5.341.248.259,00    | 27,22   |
| INSPEKTORAT DAERAH                         | 28.309.841.480,00  | 24.962.636.526,00  | 19.621.388.267,00  | 5.341.248.259,00    | 27,22   |
| Inspektorat                                | 28.309.841.480,00  | 24.962.636.526,00  | 19.621.388.267,00  | 5.341.248.259,00    | 27,22   |
| UNSUR KEWILAYAHAN                          | 197.847.668.108,00 | 171.041.920.130,50 | 149.433.444.645,00 | 21.608.475.485,50   | 14,46   |
| KECAMATAN                                  | 197.847.668.108,00 | 171.041.920.130,50 | 149.433.444.645,00 | 21.608.475.485,50   | 14,46   |
| Kecamatan Sidoarjo                         | 45.320.835.592,00  | 39.547.243.548,00  | 30.593.089.472,00  | 8.954.154.076,00    | 29,27   |
| Kecamatan Candi                            | 6.087.249.618,00   | 5.094.705.404,00   | 5.195.007.088,00   | (100.301.684,00)    | (1,93)  |
| Kecamatan Buduran                          | 7.874.484.580,00   | 6.637.463.473,00   | 5.857.744.555,00   | 779.718.918,00      | 13,31   |
| Kecamatan Wonoayu                          | 6.152.257.784,00   | 5.097.113.296,00   | 5.093.213.121,00   | 3.900.175,00        | 0,08    |
| Kecamatan Krian                            | 16.569.613.941,00  | 15.239.238.219,00  | 11.727.267.592,00  | 3.511.970.627,00    | 29,95   |
| Kecamatan Porong                           | 12.182.811.162,00  | 10.925.831.206,00  | 10.382.695.978,00  | 543.135.228,00      | 5,23    |
| Kecamatan Krembung                         | 6.073.832.284,00   | 4.760.201.575,00   | 5.086.972.837,00   | (326.771.262,00)    | (6,42)  |
| Kecamatan Jabon                            | 6.007.872.310,00   | 5.035.676.903,00   | 4.340.625.302,00   | 695.051.601,00      | 16,01   |
| Kecamatan Balongbendo                      | 6.658.998.943,00   | 5.833.369.835,00   | 5.827.558.657,00   | 5.811.178,00        | 0,10    |
| Kecamatan Tarik                            | 6.273.345.209,00   | 5.177.819.276,00   | 5.117.131.431,00   | 60.687.845,00       | 1,19    |
| Kecamatan Taman                            | 28.452.627.966,00  | 25.252.263.588,00  | 20.357.457.606,00  | 4.894.805.982,00    | 24,04   |
| Kecamatan Waru                             | 7.694.297.539,00   | 6.141.303.367,00   | 5.719.512.247,00   | 421.791.120,00      | 7,37    |
| Kecamatan Gedangan                         | 7.877.051.047,00   | 6.844.044.665,00   | 5.501.000.726,00   | 1.343.043.939,00    | 24,41   |
| Kecamatan Sedati                           | 6.880.717.635,00   | 5.766.075.377,00   | 5.247.888.145,00   | 518.187.232,00      | 9,87    |
| Kecamatan Tanggulangin                     | 6.297.358.150,00   | 5.262.082.249,00   | 5.586.190.254,00   | (324.108.005,00)    | (5,80)  |
| Kecamatan Tulangan                         | 6.656.957.364,00   | 5.910.688.038,00   | 5.766.188.255,00   | 144.499.783,00      | 2,51    |
| Kecamatan Prambon                          | 6.991.063.843,00   | 5.942.142.816,00   | 6.108.666.967,00   | (166.524.151,00)    | (2,73)  |
| Kecamatan Sukodono                         | 7.796.293.141,00   | 6.574.657.295,50   | 5.925.234.412,00   | 649.422.883,50      | 10,96   |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                    | 78.820.305.204,00  | 71.686.191.568,44  | 154.285.625.396,00 | (82.599.433.827,56) | (53,54) |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                | 78.820.305.204,00  | 71.686.191.568,44  | 154.285.625.396,00 | (82.599.433.827,56) | (53,54) |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          | 78.820.305.204,00  | 71.686.191.568,44  | 154.285.625.396,00 | (82.599.433.827,56) | (53,54) |

| SKPD | Anggaran             | Realisasi 2025       | Realisasi 2024       | Lebih/(Kurang)      | %      |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|
|      | 6.071.145.324.287,20 | 5.464.353.883.312,25 | 5.251.342.990.301,47 | (82.599.433.827,56) | (1,57) |

### 3.2 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio atas laporan keuangan. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan daerah yang biasa digunakan adalah (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Kesenjangan dan (4) Rasio Pertumbuhan.

#### 3.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya transfer pusat atau provinsi maupun pinjaman. Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}}$$

**Tabel 3. 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Transfer  | Pinjaman | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah |
|-------|------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|
| 2024  | 2.353.061.651.973,76   | 2.979.896.625.006,00 | 0,00     | 78,96%                            |
| 2025  | 2.786.895.912.278,54   | 2.739.171.883.191,00 | 0,00     | 101,74%                           |

#### 3.2.2 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan sesuai potensi daerah}}$$

Rasio efektivitas Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Rasio Efektivitas**

| Tahun | Target Pendapatan Asli Daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah | Rasio Efektifitas |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 2024  | 2.118.076.054.462,00          | 2.353.061.651.973,76             | 111,09%           |
| 2025  | 2.691.396.942.109,00          | 2.786.895.912.278,54             | 103,55            |

### 3.2.3 Rasio Jenis Belanja Terhadap Total Belanja

Rasio Jenis Belanja Terhadap Total Belanja merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada anggaran belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Rasio belanja operasi dibanding total belanja pada TA 2025 dan TA 2024 di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Rasio Belanja Operasi dibanding Total Belanja**

| Tahun | Belanja Operasi      | Total Belanja        | Rasio  |
|-------|----------------------|----------------------|--------|
| 2024  | 3.935.999.993.833,47 | 5.251.342.990.301,47 | 74,95% |
| 2025  | 4.039.796.915.419,43 | 5.464.353.883.312,25 | 73,93% |

Sedangkan rasio belanja modal dibanding total APBD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 7 Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja**

| Tahun | Belanja Modal      | Total Belanja        | Rasio  |
|-------|--------------------|----------------------|--------|
| 2024  | 668.077.999.318,00 | 5.251.342.990.301,47 | 12,72% |
| 2025  | 683.337.397.730,82 | 5.464.353.883.312,25 | 12,51% |

#### 3.2.3.1 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}}$$

Adapun perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan pada Tahun 2025 sampai Tahun 2024 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan**

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan     | Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah | Rasio Pertumbuhan Pendapatan |
|-------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 2024  | 2.353.061.651.973,76   | 5.333.383.466.334,81 | 14,74%                                   | 6,14%                        |
| 2025  | 2.786.895.912.278,54   | 5.526.067.795.469,54 | 18,44%                                   | 3,70%                        |

Selanjutnya, untuk perhitungan rasio pertumbuhan belanja tergambar sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Rasio Pertumbuhan Belanja**

| Tahun | Belanja Operasi      | Belanja Modal      | Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi | Rasio Pertumbuhan Belanja Modal |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2024  | 3.935.999.993.833,47 | 668.077.999.318,00 | 12,22%                            | (6,59)%                         |
| 2025  | 4.039.796.915.419,43 | 683.337.397.730,82 | 2,64%                             | 2,28%                           |

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **4.2 Kebijakan Akuntansi Akun**

Kebijakan akuntansi akun yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

##### **4.2.1 Kas**

###### **1. Pengakuan Kas**

Kas dan setara kas yang diakui mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara BLUD, bendahara dana BOS di sekolah negeri (SDN dan SMPN), dan *cash in transit*. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah melalui pihak ketiga (misalnya penerimaan pajak daerah melalui jasa layanan pembayaran pada minimarket) diakui pada saat kas diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tunai dan non tunai.

###### **2. Pengukuran Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

###### **3. Penyajian dan Pengungkapan**

Kas disajikan di neraca sebagai aset lancar. Pengungkapan kas meliputi:

- a. Rincian Kas dan Setara Kas;
- b. Kebijakan Manajemen Kas;
- c. Penyebab Timbulnya Kas Lainnya; dan
- d. Rincian dan Nilai Kas yang ada dalam RKUD namun merupakan Kas Transitoris;

##### **4.2.2 Piutang**

###### **1. Pengakuan Piutang**

- a. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
- b. Piutang Pajak diakui pada saat hak daerah untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau dokumen lainnya yang dipersamakan, namun Pemerintah Daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Dalam hal

pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak dengan memperhitungkan nominal perhitungan dari otoritas perpajakan terkait atas selisih nominal antara SPTPD dengan perhitungan otoritas terkait.

- c. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya, misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.
- d. Pengakuan piutang pemberian pinjaman dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap tanggal pelaporan keuangan, diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai pendapatan.
- e. Apabila terdapat penjualan secara cicilan atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Piutang kemitraan pemerintah daerah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.
- g. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.
- h. Piutang Transfer Pemerintah Pusat diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- i. Piutang Transfer Antar Daerah diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan transfer.

## **2. Pengukuran Piutang**

- a. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
- b. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut:
  - 1) Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat

penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan

- 2) Untuk *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

c. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
- 5) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen Lain yang Dipersamakan.

d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat diukur sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

e. Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

### 3. Penyisihan Piutang

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada Tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang. Terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima persen).

- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
  - 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
  - 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- b. Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima persen).
  - 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
  - 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
  - 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- c. Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima persen).
  - 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
  - 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
  - 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
- d. Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5% (lima persen).

- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

#### **4. Penyajian dan Pengungkapan Piutang**

Piutang disajikan pada Neraca.

Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam Aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.

Informasi yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Rincian Jenis dan Jumlah Piutang;
- b. Jumlah Piutang dengan Pihak-Pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- c. Jumlah Penyisihan Kerugian Piutang yang dibentuk; dan
- d. Jumlah Piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank;

#### **4.2.3 Beban Dibayar Dimuka**

##### **1. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas telah dikeluarkan kepada pihak ketiga, tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan jumlah hari yang dimulai pada saat perikatan dan kas telah dikeluarkan.

##### **2. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka diukur dan dicatat sebesar nilai pembayaran. Nilai pembayaran artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat pengeluaran kas dalam bentuk valuta asing, maka harus dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembayaran.

##### **3. Penyajian dan Pengungkapan**

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada Neraca pada kelompok Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Rincian beban dibayar dimuka;
- b. Tanggal transaksi, masa manfaat, dan tujuan penggunaan; dan
- c. Penjelasan timbulnya beban dibayar dimuka.

#### 4.2.4 Persediaan

##### 1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras) diakui sebagai persediaan.

Barang yang dibayar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah diakui ketika barang diterima, walaupun belum ada pembayaran.

##### 2. Pengukuran Persediaan

a. Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

b. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- 1) Metode Perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan dan asbuton dan sejenisnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- 2) Metode Periodik, pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

c. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First in First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

### 3. Penyajian dan Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### 4.2.5 Investasi Jangka Panjang

#### 1. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

#### 2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

#### 3. Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian Investasi Jangka Panjang menggunakan metode:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

#### 4. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca pada aset non lancar.
- b. Hal - hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
  - 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

- 2) Jenis - jenis investasi, baik permanen dan non permanen;
- 3) Perubahan harga pasar;
- 4) Penurunan nilai investasi;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

#### **4.2.6 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir**

##### **1. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir**

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

##### **2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir**

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

##### **3. Penyajian dan Pengungkapan**

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Hal - hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Dasar penilaian dana bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Besarnya suku bunga;
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan, dan saldo akhir; dan
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur.

#### **4.2.7 Aset Tetap**

##### **1. Pengakuan Aset Tetap**

- a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

- 6) Nilai Rupiah pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap semua kriteria dalam huruf a harus dipenuhi.
- c. Pengadaan aset tetap pada huruf a dianggarkan dalam belanja modal

## 2. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

## 3. Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

## 4. Kapitalisasi belanja menjadi aset tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alat angkutan dan alat berat  $\geq$  Rp500.000,00
- b. Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat  $\geq$  Rp300.000,00
- c. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya selain buku-buku perpustakaan  $\geq$  Rp300.000,00
- d. Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan  $\geq$  Rp100.000,00
- e. Aset tetap konstruksi (bangunan)  $\geq$  Rp25.000.000,00
- f. Aset tetap (jalan)  $\geq$  Rp25.000.000,00
- g. Aset tetap (irigasi)  $\geq$  Rp25.000.000,00
- h. Aset tetap (jaringan)  $\geq$  Rp500.000,00

## 5. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

- a. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat dilakukan jika memenuhi dua kriteria, yaitu:
  - 1) Memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
  - 2) Memenuhi jumlah batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) dari penambahan nilai aset tetap setelah perolehan awal adalah:
  - 1) Alat angkutan dan alat berat  $\geq$  Rp500.000,00
  - 2) Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat  $\geq$  Rp300.000,00

- 3) Aset tetap konstruksi bangunan  $\geq$  Rp25.000.000,00
- 4) Aset tetap (jalan)  $\geq$  Rp25.000.000,00
- 5) Aset tetap (irigasi)  $\geq$  Rp25.000.000,00
- 6) Aset tetap (jaringan)  $\geq$  Rp500.000,00

#### **4.2.8 Aset Lainnya**

##### **1. Pengakuan Aset Lainnya**

- a. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat:
  - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - 2) Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **2. Pengukuran Aset Lainnya**

Aset Lainnya dapat diukur sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang
  - 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
  - 2) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  - 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
  - 4) Setiap akhir periode akuntansi, TGRD yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TGRD (aset lancar).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 

Bentuk kemitraan tersebut antara lain:

  - 1) Sewa;
  - 2) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - 3) Kerja Sama Pemanfaatan; dan
  - 4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BGS atau BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk dioperasikan.

c. Aset Tak Berwujud

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi software dari penambahan nilai software setelah perolehan awal adalah Rp50.000.000,00.

d. Aset Lain-Lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

### 3. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya disajikan dalam neraca.

Hal - hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk Aset Lainnya adalah:

- 1) Mutasi yang terjadi selama periode berjalan;
- 2) Rincian masing - masing pos; dan
- 3) Faktor - faktor yang menyebabkan penghentian penggunaan.

## 4.2.9 Properti Investasi

### 1. Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b. Semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
- c. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai beban pemeliharaan.

### 2. Pengukuran Properti Investasi

- a. Saat Pengakuan Awal Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

- c. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- d. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
- e. Pengukuran setelah Pengakuan Awal, Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
- f. Properti investasi disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang diadopsi Pemerintah Daerah.
- g. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- h. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut

### **3. Penyajian dan Pengungkapan Properti Investasi**

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar pada aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Hal-hal yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b. metode penyusutan yang digunakan mengikuti kelompok aset seharusnya;
- a. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- c. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- d. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan aset; (2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; (3). pelepasan; (4). penyusutan; (5). alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan (6). perubahan lain.

#### **4.2.10 Kewajiban**

##### **1. Pengakuan Kewajiban**

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul

## 2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## 3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - 1) Pengurangan pinjaman;
  - 2) Modifikasi persyaratan utang;
  - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
- g. Utang berdasarkan kreditur.
- h. Biaya pinjaman:
  - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
  - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

## 4.2.11 Pendapatan

### 1. Pengakuan

- a. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh Bendahara Penerimaan OPD atau diterima pada rekening Bendahara Penerimaan OPD.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

## **2. Pengukuran**

Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## **3. Penyajian dan Pengungkapan**

- a. Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b. Penjelasan sebab - sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- c. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
- d. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal bersifat khusus.

### **4.2.12 Belanja dan Beban**

#### **1. Pengakuan Belanja dan Beban**

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran melalui rekening bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran.
- c. Beban diakui pada saat:
  - 1) Saat timbulnya kewajiban;
  - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

#### **2. Pengukuran Belanja dan Beban**

- a. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran
- b. Beban diukur berdasarkan:
  - 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - 2) taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **3. Penyajian dan Pengungkapan**

- a. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- c. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai klasifikasi dalam BAS.
- d. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.

#### **4.2.13 Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.**

##### **1. Koreksi Kesalahan**

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Kesalahan yang tidak berulang
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis - jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila laporan keuangan belum terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila laporan keuangan sudah terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **2. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku atau apabila diperkirakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **3. Perubahan Estimasi Akuntansi**

Untuk memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

#### **4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan**

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

## BAB V

### PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan OPD Pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Penjelasan masing-masing pos LRA, diuraikan sebagai berikut:

##### 5.1.1 Pendapatan Daerah

**Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**

| Uraian            | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %      | Realisasi TA 2024    |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| Pendapatan Daerah | 5.452.656.668.769,00 | 5.526.067.795.469,54 | 101,35 | 5.333.383.466.334,81 |

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan.

Nilai realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.526.067.795.469,54 mengalami kenaikan sebesar Rp192.684.329.134,73 atau 3,61% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.333.383.466.334,81.

**Tabel 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**

| Uraian                               | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %             | Realisasi TA 2024           |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)         | 2.691.396.942.109,00        | 2.786.895.912.278,54        | 103,55        | 2.353.387.157.089,76        |
| Pendapatan Transfer                  | 2.761.259.726.660,00        | 2.739.171.883.191,00        | 99,20         | 2.979.896.625.006,00        |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 99.684.239,05               |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>5.452.656.668.769,00</b> | <b>5.526.067.795.469,54</b> | <b>101,35</b> | <b>5.333.383.466.334,81</b> |

##### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

| Uraian                       | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %      | Realisasi TA 2024    |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2.691.396.942.109,00 | 2.786.895.912.278,54 | 103,55 | 2.353.387.157.089,76 |

Nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.786.895.912.278,54 mengalami kenaikan sebesar Rp433.508.755.188,78 atau 15,56% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.353.387.157.089,76. Rincian anggaran dan realisasi PAD terdiri dari:

**Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

| Uraian                                                       | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %             | Realisasi TA 2024           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | 1.696.451.167.743,00        | 1.750.894.046.285,18        | 103,21        | 1.407.663.067.473,40        |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 899.169.421.000,00          | 896.932.667.144,57          | 102,23        | 861.595.661.847,07          |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 47.821.663.259,00           | 47.730.122.053,50           | 99,81         | 38.107.714.620,50           |
| Lain-lain PAD yang Sah                                       | 47.954.690.107,00           | 91.339.076.795,29           | 144,01        | 46.020.713.148,79           |
| <b>Jumlah</b>                                                | <b>2.691.396.942.109,00</b> | <b>2.786.895.912.278,54</b> | <b>103,55</b> | <b>2.353.387.157.089,76</b> |

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

**Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah**

| Uraian                  | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %      | Realisasi TA 2024    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| Pendapatan Pajak Daerah | 1.696.451.167.743,00 | 1.750.894.046.285,18 | 103,21 | 1.407.663.067.473,40 |

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).

Nilai realisasi Pajak Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.750.894.046.285,18 mengalami kenaikan sebesar Rp343.230.978.811,78 atau 24,38% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.407.663.067.473,40.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan pada tanggal 5 Januari 2024, merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat beberapa penyesuaian atas nomenklatur pajak daerah, beberapa penerimaan pajak daerah dicatat menggunakan nomenklatur dan kode rekening yang baru yaitu Pajak PBJT yang terdiri dari PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagai pengganti Pajak Restoran, PBJT Tenaga Listrik sebagai pengganti pajak penerangan jalan, PBJT Jasa Perhotelan sebagai pengganti pajak hotel, PBJT Parkir sebagai pengganti pajak parkir dan PBJT Jasa Kesenian sebagai pengganti pajak hiburan.

**Tabel 5. 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah**

| Uraian                                                  | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| Pajak Hotel                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 89.991.391,00      |
| Pajak Restoran                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 984.299.894,00     |
| Pajak Hiburan                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 4.879.500,00       |
| Pajak Reklame                                           | 20.100.000.000,00  | 23.347.491.952,00  | 116,16 | 22.723.683.536,00  |
| Pajak Penerangan Jalan                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00   | (11.282.695,00)    |
| Pajak Parkir                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 11.199.000,00      |
| Pajak Air Tanah                                         | 6.300.000.000,00   | 7.337.007.536,00   | 116,46 | 7.426.394.234,00   |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 290.000.000.000,00 | 303.909.394.144,00 | 104,80 | 303.732.853.947,00 |

| Uraian                                            | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %             | Realisasi TA 2024           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 425.000.000.000,00          | 423.895.898.344,50          | 99,74         | 509.090.107.338,40          |
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)             | 563.900.000.000,00          | 589.369.495.678,00          | 104,52        | 563.610.941.328,00          |
| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)              | 266.176.607.313,00          | 282.525.833.404,75          | 106,14        | 0,00                        |
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)   | 124.974.560.430,00          | 120.508.925.225,93          | 96,43         | 0,00                        |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>1.696.451.167.743,00</b> | <b>1.750.894.046.285,18</b> | <b>103,21</b> | <b>1.407.663.067.473,40</b> |

#### 5.1.1.1.1 Pajak Hotel

**Tabel 5. 7 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel**

| Uraian      | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|-------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Pajak Hotel | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 89.991.391,00     |

Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, berubah nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan merupakan jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan kegiatan makan/minum kegiatan hiburan dan /atau fasilitas lainnya dengan tarif 10% Nilai realisasi Pajak Hotel pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp89.991.391,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp89.991.391,00. Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2024, realisasi Pajak hotel dicatatkan ke nomenklatur dan kode rekening baru yaitu PBJT jasa perhotelan.

**Tabel 5. 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel**

| Uraian                                                      | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %           | Realisasi TA 2024    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Pajak Hotel                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 84.976.391,00        |
| Pajak Losmen                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 700.000,00           |
| Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                       | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 900.000,00           |
| Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 3.415.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>89.991.391,00</b> |

#### 5.1.1.1.2 Pajak Restoran

**Tabel 5. 9 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran**

| Uraian         | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|----------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Pajak Restoran | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 984.299.894,00    |

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, berubah nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Restoran merupakan PBJT atas makanan dan/atau minuman dikenakan kepada konsumen akhir dan dipungut oleh restoran atau jasa boga dengan tarif 10%. Nilai realisasi Pajak Restoran pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp984.299.894,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar

Rp984.299.894,00. Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2024, realisasi Pajak restoran dicatatkan ke nomenklatur dan kode rekening baru yaitu PBJT makanan dan/atau minuman.

**Tabel 5. 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran**

| Uraian                                  | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %           | Realisasi TA 2024     |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Pajak Restoran dan Sejenisnya           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 277.705.808,00        |
| Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 19.558.199,00         |
| Pajak Kafetaria dan Sejenisnya          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 152.437.073,00        |
| Pajak Warung dan Sejenisnya             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 78.447.075,00         |
| Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 456.151.739,00        |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>984.299.894,00</b> |

#### 5.1.1.1.3 Pajak Hiburan

**Tabel 5. 11 Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan**

| Uraian Pendapatan | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|-------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Pajak Hiburan     | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 4.879.500,00      |

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, berubah nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Hiburan merupakan PBJT untuk jasa hiburan pada diskotek, kelab malam, karaoke, bar, dan mandi uap (spa) paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75%. Sementara itu, untuk jenis hiburan lainnya, tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Nilai realisasi Pajak Hiburan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.879.500,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.879.500,00. Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2024, realisasi Pajak hiburan dicatatkan ke nomenklatur dan kode rekening baru yaitu PBJT jasa hiburan.

**Tabel 5. 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan**

| Uraian                                                           | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %           | Realisasi TA 2024   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 4.879.500,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4.879.500,00</b> |

#### 5.1.1.1.4 Pajak Reklame

**Tabel 5. 13 Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame**

| Uraian Pendapatan | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pajak Reklame     | 20.100.000.000,00 | 23.347.491.952,00 | 116,16 | 22.723.683.536,00 |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi

atau Badan tersebut. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

1. Reklame papan/billboard/ videotron/ megatron
2. Reklame kain
3. Reklame melekat/stiker
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame apung
8. Reklame film/Slide
9. Reklame peragaan

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

1. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi membedakan dari produk sejenis lainnya
3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan
5. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara penghitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan menghitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pajak Reklame dihitung dengan menggunakan sistem official assessment, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Nilai realisasi Pajak Reklame pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp23.347.491.952,00 mengalami kenaikan sebesar Rp623.808.416,00 atau 2,67% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp22.723.683.536,00.

**Tabel 5. 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame**

| Uraian                                           | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %             | Realisasi TA 2024        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 15.140.000.000,00        | 16.196.699.398,00        | 106,98        | 14.868.266.766,00        |
| Pajak Reklame Kain                               | 4.538.000.000,00         | 6.789.314.887,00         | 149,61        | 7.444.664.429,00         |
| Pajak Reklame Berjalan                           | 420.000.000,00           | 345.953.267,00           | 82,37         | 399.064.941,00           |
| Pajak Reklame Film/Slide                         | 2.000.000,00             | 15.524.400,00            | 776,22        | 11.687.400,00            |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>20.100.000.000,00</b> | <b>23.347.491.952,00</b> | <b>116,16</b> | <b>22.723.683.536,00</b> |

#### 5.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

**Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan**

| Uraian Pendapatan      | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Pajak Penerangan Jalan | 0,00             | 0,00              | 0,00 | (11.282.695,00)   |

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, berubah nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu tenaga listrik merupakan PBJT tenaga listrik adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas penggunaan tenaga listrik. Yang dimaksud tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan bersumber dari pembangkit tenaga listrik yang kemudian didistribusikan untuk berbagai macam peralatan listrik. PBJT tenaga listrik ditujukan kepada pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau dihasilkan oleh sumber lain.

Subjek PBJT atas tenaga listrik adalah konsumen atau pengguna akhir tenaga listrik. Ini adalah pihak yang secara langsung menikmati manfaat dari penggunaan tenaga listrik dan oleh karenanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas konsumsi tersebut. Dalam praktiknya, meskipun konsumen akhir adalah subjek pajak, pemungutan dan penyetoran pajak biasanya dilakukan oleh penyedia tenaga listrik (misalnya PT PLN (Persero) atau penyedia listrik swasta) sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Nilai realisasi Pajak Penerangan Jalan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.282.695,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar (Rp11.282.695,00). Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2024, realisasi Pajak penerangan jalan dicatatkan ke nomenklatur dan kode rekening baru yaitu PBJT Listrik.

#### 5.1.1.1.6 Pajak Parkir

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, berubah nomenklatur menjadi Pajak Barang dan Jasa Parkir.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Objek Pajak Parkir adalah penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Tidak termasuk Objek Pajak Parkir adalah:

1. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang karyawannya sendiri;
3. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan;
4. penyelenggaraan tempat parkir untuk keperluan penyelenggaraan ibadah.

**Tabel 5. 16 Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir**

| Uraian       | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|--------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Pajak Parkir | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 11.199.000,00     |

Nilai realisasi Pajak Parkir pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.199.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar

Rp11.199.000,00. Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2024, realisasi Pajak parkir dicatatkan ke nomenklatur dan kode rekening baru yaitu PBJT parkir.

#### 5.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

**Tabel 5. 17 Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah**

| Uraian          | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pajak Air Tanah | 6.300.000.000,00 | 7.337.007.536,00  | 116,46 | 7.426.394.234,00  |

Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retibusi Daerah, bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

1. Jenis sumber air;
2. Lokasi sumber air;
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. Kualitas air;
6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Yang dikecualikan dari Objek PAT adalah pengambilan untuk:

1. keperluan dasar rumah tangga;
2. pengairan pertanian rakyat;
3. perikanan rakyat;
4. peternakan rakyat;
5. keperluan keagamaan serta lembaga sosial; dan
6. pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15%. Pajak Air Tanah dihitung dengan menggunakan sistem official assessment, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Nilai realisasi Pajak Air Tanah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.337.007.536,00 mengalami penurunan sebesar Rp89.386.698,00 atau 1,20% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7.426.394.234,00.

#### 5.1.1.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

**Tabel 5. 18 Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**

| Uraian                                                  | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 290.000.000.000,00 | 303.909.394.144,00 | 104,80 | 303.732.853.947,00 |

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retibusi Daerah, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Menara

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 Tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap Tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,105% per Tahun
2. Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,225% per Tahun

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dihitung dengan menggunakan sistem *official assessment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Nilai realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp303.909.394.144,00 mengalami kenaikan sebesar Rp176.540.197,00 atau 0,06% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp303.732.853.947,00.

#### 5.1.1.1.1.9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

**Tabel 5. 19 Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

| Uraian                                            | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 425.000.000.000,00 | 423.895.898.344,50 | 99,74 | 509.090.107.338,40 |

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retibusi Daerah, bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas

tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah
2. Pemberian hak baru karena:
  - a. Kelanjutan pelepasan hak,
  - b. Diluar pelepasan hak

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak, dalam hal:

1. Jual beli adalah harga transaksi;
2. Tukar menukar adalah nilai pasar;
3. Hibah adalah nilai pasar;
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. Waris adalah nilai pasar;
6. Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
12. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
14. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak 1 sampai dengan 15 tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan bersifat sementara. Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh di Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00.

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% dihitung dengan menggunakan sistem *self assessment*, yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Nilai realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp423.895.898.344,50 mengalami penurunan sebesar Rp85.194.208.993,90 atau 16,73% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp509.090.107.338,40.

| <b>Tabel 5. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b> |                           |                           |              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>Uraian</b>                                                                                       | <b>Anggaran TA 2025</b>   | <b>Realisasi TA 2025</b>  | <b>%</b>     | <b>Realisasi TA 2024</b>  |
| BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                | 382.500.000.000,00        | 386.037.798.018,50        | 100,92       | 469.609.809.097,40        |
| BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                            | 42.500.000.000,00         | 37.858.100.326,00         | 89,08        | 39.480.298.241,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                       | <b>425.000.000.000,00</b> | <b>423.895.898.344,50</b> | <b>99,74</b> | <b>509.090.107.338,40</b> |

#### 5.1.1.1.10 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

| <b>Tabel 5. 21 Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</b> |                         |                          |          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Uraian</b>                                                                   | <b>Anggaran TA 2025</b> | <b>Realisasi TA 2025</b> | <b>%</b> | <b>Realisasi TA 2024</b> |
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                                           | 563.900.000.000,00      | 589.369.495.678,00       | 104,52   | 563.610.941.328,00       |

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan nomenklatur pajak baru yang ditentukan pada UU HKPD. PBJT sebagai integrasi 5 jenis pajak daerah pada UU PDRD yang berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Nilai realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp589.369.495.678,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.758.554.350,00 atau 4,57% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp563.610.941.328,00.

| <b>Tabel 5. 22 Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</b> |                           |                           |               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Uraian</b>                                                                   | <b>Anggaran TA 2025</b>   | <b>Realisasi TA 2025</b>  | <b>%</b>      | <b>Realisasi TA 2024</b>  |
| PBJT-Makanan dan/atau Minuman                                                   | 122.900.000.000,00        | 153.173.791.549,00        | 124,63        | 125.799.453.444,00        |
| PBJT-Tenaga Listrik                                                             | 400.000.000.000,00        | 391.328.076.337,00        | 97,83         | 392.667.730.184,00        |
| PBJT-Jasa Perhotelan                                                            | 22.000.000.000,00         | 23.337.136.052,00         | 106,08        | 23.971.253.233,00         |
| PBJT-Jasa Parkir                                                                | 11.000.000.000,00         | 13.080.721.919,00         | 118,92        | 12.829.322.536,00         |
| PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan                                                  | 8.000.000.000,00          | 8.449.769.821,00          | 105,62        | 8.343.181.931,00          |
| <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>563.900.000.000,00</b> | <b>589.369.495.678,00</b> | <b>104,52</b> | <b>563.610.941.328,00</b> |

| <b>Tabel 5. 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</b> |                         |                          |          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Uraian</b>                                                                           | <b>Anggaran TA 2025</b> | <b>Realisasi TA 2025</b> | <b>%</b> | <b>Realisasi TA 2024</b> |
| PBJT-Restoran                                                                           | 112.900.000.000,00      | 136.202.695.938,00       | 120,64   | 111.617.574.554,00       |
| PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                   | 10.000.000.000,00       | 16.971.095.611,00        | 169,71   | 14.181.878.890,00        |
| PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                           | 369.600.000.000,00      | 376.803.647.759,00       | 101,95   | 378.583.984.567,00       |

| Uraian                                                                                                                                                  | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %             | Realisasi TA 2024         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                    | 30.400.000.000,00         | 14.524.428.578,00         | 47,78         | 14.083.745.617,00         |
| PBJT-Hotel                                                                                                                                              | 20.869.000.000,00         | 22.493.397.122,00         | 107,78        | 23.148.498.021,00         |
| PBJT-Losmen                                                                                                                                             | 750.000.000,00            | 466.808.582,00            | 62,24         | 489.274.973,00            |
| PBJT-Wisma Pariwisata                                                                                                                                   | 250.000.000,00            | 178.547.127,00            | 71,42         | 194.341.628,00            |
| PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalow/Resort/Cottage                                                                                                | 95.000.000,00             | 101.145.608,00            | 106,47        | 92.482.272,00             |
| PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel                                                                                              | 36.000.000,00             | 97.237.613,00             | 270,10        | 46.656.339,00             |
| PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                      | 10.950.000.000,00         | 13.080.721.919,00         | 119,46        | 12.829.322.536,00         |
| PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)                                                                                                     | 50.000.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      |
| PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                               | 4.150.000.000,00          | 2.762.647.109,00          | 66,57         | 3.225.654.910,00          |
| PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana                                                                                                  | 46.000.000,00             | 8.560.000,00              | 18,61         | 34.268.696,00             |
| PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                | 400.000.000,00            | 918.151.616,00            | 229,54        | 597.435.077,00            |
| PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | 2.684.000.000,00          | 3.767.612.277,00          | 140,37        | 3.431.758.033,00          |
| PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                     | 370.000.000,00            | 592.536.911,00            | 160,15        | 632.180.892,00            |
| PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                             | 350.000.000,00            | 400.261.908,00            | 114,36        | 421.884.323,00            |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                           | <b>563.900.000.000,00</b> | <b>589.369.495.678,00</b> | <b>104,52</b> | <b>563.610.941.328,00</b> |

#### 5.1.1.1.11 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

**Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

| Uraian                               | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|
| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 266.176.607.313,00 | 282.525.833.404,75 | 106,14 | 0,00              |

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang, saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Tarif opsen PKB sebesar 66% sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024. Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan tarif.

Nilai realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp282.525.833.404,75 mengalami kenaikan sebesar Rp282.525.833.404,75 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.1.1.12 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

**Tabel 5. 25 Anggaran dan Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

| Uraian                                          | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 124.974.560.430,00 | 120.508.925.225,93 | 96,43 | 0,00              |

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang, saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB. Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Tarif opsen BBNKB sebesar 66% sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024. Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan tarif. Nilai realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp120.508.925.225,93 mengalami kenaikan sebesar Rp120.508.925.225,93 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

**Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah**

| Uraian                      | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Pendapatan Retribusi Daerah | 899.169.421.000,00 | 896.932.667.144,57 | 99,75 | 861.595.661.847,07 |

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Terdapat tiga objek Retribusi Daerah yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Nilai realisasi Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp896.932.667.144,57 mengalami kenaikan sebesar Rp35.337.005.297,50 atau 3.94% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp861.595.661.847,07.

**Tabel 5. 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah**

| Uraian                       | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Retribusi Jasa Umum          | 851.688.695.000,00        | 836.754.250.070,21        | 98,25        | 825.516.010.764,07        |
| Retribusi Jasa Usaha         | 11.402.334.000,00         | 11.411.395.170,36         | 100,08       | 9.929.768.721,00          |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 36.078.392.000,00         | 48.767.021.904,00         | 135,17       | 26.149.882.362,00         |
| <b>Jumlah</b>                | <b>899.169.421.000,00</b> | <b>896.932.667.144,57</b> | <b>99,75</b> | <b>861.595.661.847,07</b> |

#### 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

**Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum**

| Uraian              | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Retribusi Jasa Umum | 851.688.695.000,00 | 836.754.250.070,21 | 98,25 | 825.516.010.764,07 |

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 mulai tanggal 5 Januari 2025, pencatatan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan termasuk juga pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Nilai realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp836.754.250.070,21 mengalami kenaikan sebesar Rp11.238.239.306,14 atau 1,34% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp825.516.010.764,07.

**Tabel 5. 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum**

| Uraian                                                      | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan                               | 808.402.000.000,00        | 804.399.091.684,21        | 99,50        | 794.687.576.501,86        |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                  | 13.000.020.000,00         | 12.317.712.775,00         | 94,75        | 0,00                      |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum               | 9.890.000.000,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| Retribusi Pelayanan Pasar                                   | 19.296.675.000,00         | 18.842.782.031,00         | 97,65        | 18.469.950.254,00         |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 430.000,00                |
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 2.508.300,00              |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 232.220.000,00            |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan                              | 1.100.000.000,00          | 1.194.663.580,00          | 108,61       | 12.123.325.708,21         |
| <b>Jumlah</b>                                               | <b>851.688.695.000,00</b> | <b>836.754.250.070,21</b> | <b>98,25</b> | <b>825.516.010.764,07</b> |

#### 5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

**Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan**

| Uraian                        | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 808.402.000.000,00 | 804.399.091.684,21 | 99,50 | 794.687.576.501,86 |

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan di Puskesmas, Puskemas Keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pendapatan BLUD dan terdapat pada RSUD RT Notopuro, RSUD Sidoarjo Barat, 31 (tiga puluh satu) Puskesmas dan Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan BLUD Puskesmas nilai sebesar Rp97.712.913.823,00
2. Pendapatan BLUD RSUD RTN Notopuro sebesar Rp640.019.867.833,21

3. Pendapatan BLUD RSUD Sidoarjo Barat sebesar Rp66.665.235.028,00  
 4. Pendapatan Dinas Kesehatan (Griya Sehat) sebesar Rp1.075.000,00

**Tabel 5. 31 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan**

| Uraian                                                                           | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                       | 90.002.000.000,00         | 97.712.913.823,00         | 108,57       | 89.435.783.841,91         |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                         | 718.400.000.000,00        | 706.685.102.861,21        | 98,37        | 705.176.117.659,95        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 0,00                      | 1.075.000,00              | 0,00         | 75.675.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                                                                    | <b>808.402.000.000,00</b> | <b>804.399.091.684,21</b> | <b>99,50</b> | <b>794.687.576.501,86</b> |

#### 5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

**Tabel 5. 32 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**

| Uraian                                      | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 13.000.020.000,00 | 12.317.712.775,00 | 94,75 | 0,00              |

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke Lokasi pembuangan sementara;
- Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau Lokasi pembuangan sementara ke Lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- Penyediaan Lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
- Penyedotan dan pengolahan limbah domestik.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Jasa Umum atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah domestik.

#### 5.1.1.1.2.1.3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

**Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

| Uraian                                        | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 9.890.000.000,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00              |

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikelola oleh Dinas Perhubungan, Retribusi Pelayanan Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Tidak ada realisasi retribusi parkir pada tahun anggaran 2024 dan 2025, karena sampai saat ini terdapat permasalahan hukum terkait penyelenggaraan Layanan Parkir Berlangganan antara Dinas Perhubungan dan PT ISS. Posisi saat ini telah keluar hasil banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 349/PDT/2026/PT SBY tanggal 5 Mei 2026, dengan hasil putusan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak perlu mengembalikan kelebihan

bayar yang telah dibayar oleh PT ISS serta Dinas Perhubungan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Sidoarjo (Aamaning) terkait sisa yang belum di bayar oleh PT ISS. Putusan pengadilan ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda. Urutan kronologi kejadian sebagai berikut :

| NO. | KRONOLOGI KEGIATAN                                                                                                                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan dengan PT.ISS tanggal 25 April 2022                                                                        | 1. Penyelenggaraan Layanan Perparkiran dengan 359 Titik Parkir;<br>2. Nilai bagi hasil Rp32.090.000.000.                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Akta Perdamaian tanggal 29 November 2023                                                                                                                  | 1. Sebagai dasar dilakukanya Addendum PKS.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | Adendum Perjanjian Kerjasama tanggal 13 Desember 2023                                                                                                     | 1. Penyelenggaraan layanan Perparkiran dengan 87 Titik Parkir;<br>2. Nilai Bagi Hasil RP6.669.052.744;<br>3. Untuk tahun ke dua dan ke tiga nilai bagi hasil naik 7,5 persen tiap tahun.                                                                                                                 |
| 4   | Putusan Pengadilan tentang akta Perdamaian tanggal 18 Desember 2023                                                                                       | Menetapkan akta perdamaian                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5   | Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Sidoarjo Terkait tagihan imbal jasa layanan parkir tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024                               | 1. Menyatakan termohon eksekusi telah melakukan Tindakan inkar janji (Wanprestasi);<br>2. Memerintahkan untuk termohon eksekusi mengembalikan penguasaan atas obyek perjanjian;<br>3. Memerintahkan kepada termohon untuk menyetorkan imbal jasa layanan perparkiran tahun ke 2 sebesar Rp7.169.231.699. |
| 6   | Putusan Annmaning tanggal 28 Oktober 2024                                                                                                                 | Penetapan annaming<br>1. Agar penggugat dan tergugat untuk mentaati akta perdamaian                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | Gugatan Perlawanan PT.ISS terhadap Putusan Annmaning 15 November 2024                                                                                     | 1. PT. ISS mengajukan perlawanan terhadap penetapan Annmaning                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8   | Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara tanggal 29 November 2024                                                                                 | Kepala dinas perhubungan mengajukan surat kuasa khusus kepada Kajari Sidoarjo untuk permohonan pendampingan hukum                                                                                                                                                                                        |
| 9   | Gugatan PT.ISS Kepada Dishub dan Bupati tanggal 2 Mei 2025                                                                                                | Gugatan cidera janji (wanprestasi)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10  | Putusan Pengadilan terhadap gugatan Perlawanan Annmaning 30 Juni 2025                                                                                     | 1. Menolak eksepsi terlawan;<br>2. Menyatan bantahan pelawan tidak dapat di terima                                                                                                                                                                                                                       |
| 11  | Rapat koordinasi membahas permasalahan Kerjasama perparkiran di sidoarjo, dihadiri oleh TKKSD dan FOKOPIMDA di ruang transit pendopo tanggal 19 Juni 2025 | Bahwa terkait penyelesaian perkara dengan PT.ISS melalui proses di pengadilan sidoarjo                                                                                                                                                                                                                   |
| 12  | Saat ini sedang dalam masa persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dikarenakan Pemda menolak permohonan mediasi PT.ISS                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| NO. | KRONOLOGI KEGIATAN                                                                                                                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14  | Dinas Perhubungan mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi melalui E-Court PN tanggal 9 Maret 2026 dan dikirim pada tanggal 11 Maret 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15  | Keluar inkra dari Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 349/PDT/2025/PT SBY tanggal 5 Mei 2026                                                       | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak perlu mengembalikan kelebihan bayar yang telah dibayar oleh PT ISS serta Dinas Perhubungan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Sidoarjo (Aamaning) terkait sisa yang belum di bayar oleh PT ISS. Putusan putusan pengadilan ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda |

Tarif flat retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sepeda Rp1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir
2. Sepeda Motor atau Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir sejenisnya (R2)
3. Sedan, Minibus, atau Rp4.000,- (empat ribu rupiah) per sekali parkir sejenisnya (R4)
4. Bus, truk atau sejenisnya Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir (R6)
5. Kereta Tempelan, Kereta Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir Gandengan, atau sejenisnya

#### 5.1.1.1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar

**Tabel 5. 34 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar**

| Uraian                                        | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 19.296.675.000,00 | 18.842.782.031,00 | 97,65 | 18.469.950.254,00 |

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh Pemerintah Kabupaten. Dasar Pemungutannya adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa pelataran, los, kios, dan toko gudang (togu) serta fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah. SKPD yang menangani Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan dan Pertanian untuk pasar hewan dan Dinas Perikanan untuk pasar ikan.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

**Tabel 5. 35 Rincian Retribusi Pelayanan Pasar**

| Uraian              | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Retribusi Pelataran | 1.215.085.000,00         | 1.625.679.005,00         | 133,79       | 1.720.771.849,00         |
| Retribusi Los       | 10.585.125.000,00        | 9.646.695.868,00         | 91,13        | 6.850.548.200,00         |
| Retribusi Kios      | 7.496.465.000,00         | 7.570.407.158,00         | 100,99       | 9.898.630.205,00         |
| <b>Jumlah</b>       | <b>19.296.675.000,00</b> | <b>18.842.782.031,00</b> | <b>97,65</b> | <b>18.469.950.254,00</b> |

#### 5.1.1.2.1.5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

**Tabel 5. 36 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

| Uraian                                 | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 430.000,00        |

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. SKPD yang menangani Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Dinas Perhubungan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk retribusi yang dihapus dan layanan yang tidak dipungut.

#### 5.1.1.2.1.6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

**Tabel 5. 37 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

| Uraian                                       | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 2.508.300,00      |

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk retribusi yang dihapus dan layanan yang tidak dipungut.

#### 5.1.1.2.1.7 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

**Tabel 5. 38 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

| Uraian                                                      | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 232.220.000,00    |

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk retribusi yang dihapus dan layanan yang tidak dipungut.

#### 5.1.1.2.1.8 Retribusi Pelayanan Kebersihan

**Tabel 5. 39 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan**

| Uraian                         | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Kebersihan | 1.100.000.000,00 | 1.194.663.580,00  | 108,61 | 12.123.325.708,21 |

Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah. SKPD yang menangani Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan dan BLUD UPTD IPALD pada Dinas Perkim CKTR. Pengenaan tarif atas Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan BLUD atas pelayanan kebersihan meliputi :

1. Pelayanan Persampahan merupakan pembayaran piutang oleh Wajib Retribusi atas piutang yang dikelola oleh DLHK yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun
2. Pelayanan Pengelolaan Limbah air merupakan retribusi pelayanan sedot tinja yang dikelola oleh BLUD UPTD IPALD pada Dinas Perkim CKTR

**Tabel 5. 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

| Uraian                                                                   | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %             | Realisasi TA 2024        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| Retribusi Pelayanan Persampahan                                          | 0,00                    | 8.196.000,00            | 100           | 11.268.873.708,21        |
| Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri | 1.100.000.000,00        | 1.186.467.580,00        | 107,86        | 854.452.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                                            | <b>1.100.000.000,00</b> | <b>1.194.663.580,00</b> | <b>108,61</b> | <b>12.123.325.708,21</b> |

#### 5.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

**Tabel 5. 41 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha**

| Uraian               | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Retribusi Jasa Usaha | 11.402.334.000,00 | 11.411.395.170,36 | 100,08 | 9.929.768.721,00  |

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

SKPD yang menangani Retribusi jasa usaha adalah Dinas Koperasi, Dinas Pangan & Pertanian, Dinas Pemuda & Olahraga, Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim CKTR Sesuai

Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat retribusi Jasa Usaha yang diganti menjadi nomenklatur baru dan kode rekening baru.

**Tabel 5. 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha**

| Uraian                                                                                                        | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %             | Realisasi TA 2024       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 1.750.000,00            |
| Retribusi Terminal                                                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 10.287.000,00           |
| Retribusi Rumah Potong Hewan                                                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 10.163.000,00           |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.327.000,00            |
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 8.520.000,00             | 5.473.000,00             | 64,24         | 220.679.000,00          |
| Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak                                                             | 1.094.175.000,00         | 952.429.151,00           | 87,05         | 922.190.800,00          |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                 | 3.545.290.000,00         | 3.324.551.124,00         | 93,77         | 1.533.262.142,00        |
| Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah                                                    | 0,00                     | 21.055.000,00            | 100,00        | 0,00                    |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah                                                                             | 6.754.349.000,00         | 7.107.886.895,36         | 105,23        | 7.225.109.779,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                 | <b>11.402.334.000,00</b> | <b>11.411.395.170,36</b> | <b>100,08</b> | <b>9.929.768.721,00</b> |

#### 5.1.1.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

**Tabel 5. 43 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

| Uraian                              | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 1.750.000,00      |

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah dihapus sebagaimana Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan penerimaan periode 1 sampai dengan 4 Januari 2024 sebelum penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 5 Januari 2024. Setelah Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 nomenklatur dan kode rekening beralih menjadi retribusi pemanfaatan aset.

#### 5.1.1.1.2.2.2 Retribusi Terminal

**Tabel 5. 44 Anggaran dan Realisasi Retribusi Terminal**

| Uraian             | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|--------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Retribusi Terminal | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 10.287.000,00     |

Retribusi Terminal adalah pungutan atas pembayaran penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Terminal termasuk retribusi yang dihapus dan layanan yang tidak dipungut.

#### 5.1.1.1.2.2.3 Retribusi Rumah Potong Hewan

**Tabel 5. 45 Anggaran dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan**

| Uraian                                 | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 10.163.000,00     |

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta bahan lainnya asal hewan ternak yang diperjualbelikan dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan beralih menjadi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

#### 5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

**Tabel 5. 46 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

| Uraian                                           | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 6.327.000,00      |

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga beralih menjadi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

#### 5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

**Tabel 5. 47 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

| Uraian                                                                                                        | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 202 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|
| Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya | 8.520.000,00     | 5.473.000,00     | 64,24 | 220.679.000,00    |

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha,

frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dipungut oleh Dinas Koperasi (dipungut pada PKL Gajahmada) dan Dinas Pangan & Pertanian dengan dasar pemungutan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2025.

#### 5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

**Tabel 5. 48 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak**

| Uraian                                          | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Rumah Potongan Hewan Ternak | 1.094.175.000,00 | 952.429.151,00    | 87,05 | 922.190.800,00    |

Pelayanan rumah Potongan Hewan Ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas potongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah yang dpungut oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

#### 5.1.1.1.2.2.7 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

**Tabel 5. 49 Anggaran dan Belanja Retribusi Pelayanan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

| Uraian                                                        | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga | 3.545.290.000,00 | 3.324.551.124,00  | 93,77 | 1.533.262.142,00  |

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- pemakaian kolam renang;
- pemakaian lapangan voli pantai;
- pemakaian gedung lapangan bulu tangkis, futsal;
- pemakaian lapangan tenis;
- pemakaian stadion gelora delta;
- pemakaian gedung serba guna;
- pemakaian stadion jenggolo;
- pemakaian fasilitas penunjang pada gedung dan areal tempat olahraga;
- pemakaian lapangan sepak bola pada fasum kelurahan;
- pemakaian tempat olahraga dan fasilitas penunjang pada fasilitas umum perumahan (lapangan basket, lapangan tenis, gedung lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan olahraga, kolam renang, balai tempat olahraga, aula tempat olahraga);
- pemakaian lapangan olahraga pada area rumah susun sederhana sewa.

#### 5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Tabel 5. 50 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

| Uraian                                                     | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah | 0,00             | 21.055.000,00     | 100,00 | 0,00              |

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdapat pada pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo di pungut oleh Dinas Kesehatan.

#### 5.1.1.1.2.2.9 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Tabel 5. 51 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah

| Uraian                            | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 6.754.349.000,00 | 7.107.886.895,36  | 105,23 | 7.225.109.779,00  |

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. jasa pelayanan laboratorium lingkungan;
- b. penggunaan bangunan gedung;
- c. penggunaan tanah;
- d. pemakaian rumah susun sederhana sewa;
- e. pemanfaatan pemakaman umum estate;
- f. pemakaian fasilitas penunjang pada area fasum kelurahan dan perumahan;
- g. penggunaan peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di klinik/ puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan;
- h. penggunaan peralatan dan laboratorium untuk pengujian bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- i. pemanfaatan aset penunjang di puskesmas;
- j. pemanfaatan aset penunjang di RSUD;
- k. pemanfaatan aset penunjang di puskesmas;
- l. pelayanan pemeriksaan di laboratorium kesehatan lingkungan milik daerah kabupaten Sidoarjo;
- m. penanganan penyakit/ wabah tertentu pada RSUD;
- n. pemanfaatan mall pelayanan publik
- o. pemanfaatan tanah di atas pengairan/ sempadan pengairan;
- p. pemanfaatan ruang milik jalan untuk pendirian dan operasional *fiber optic*;

**Tabel 5. 52 Retribusi Pelayanan Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah per OPD**

| OPD                                                     | 2025                    | 2024                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dinas Kesehatan                                         | 1.850.000,00            | 0,00                    |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | 6.557.144.395,36        | 6.755.178.979,00        |
| Dinas Pangan dan Pertanian                              | 50.250.000,00           | 57.510.000,00           |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                   | 197.431.000,00          | 132.104.000,00          |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 290.761.500,00          | 242.616.800,00          |
| Badan Kepegawaian Daerah                                | 3.800.000,00            | 0,00                    |
| Kecamatan Krian                                         | 6.650.000,00            | 37.700.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>7.107.886.895,36</b> | <b>7.225.109.779,00</b> |

#### 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

**Tabel 5. 53 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu**

| Uraian                       | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Retribusi Perizinan Tertentu | 36.078.392.000,00 | 48.767.021.904,00 | 135,17 | 26.149.882.362,00 |

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. Nilai realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp48.767.021.904,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.617.139.542,00 atau 86,49% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp26.149.882.362,00.

**Tabel 5. 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu**

| Uraian                                        | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %             | Realisasi TA 2024        |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung         | 31.000.000.000,00        | 43.014.380.904,00        | 138,76        | 23.771.727.562,00        |
| Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 5.078.392.000,00         | 5.752.641.000,00         | 113,28        | 2.378.154.800,00         |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>36.078.392.000,00</b> | <b>48.767.021.904,00</b> | <b>135,17</b> | <b>26.149.882.362,00</b> |

#### 5.1.1.1.2.3.1 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

**Tabel 5. 55 Anggaran dan Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 31.000.000.000,00 | 43.014.380.904,00 | 138,76 | 23.771.727.562,00 |

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, bahwa sejak bulan Januari 2022 Izin Mendirikan Bangunan berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Cara pengukuran tingkat penggunaan retribusi persetujuan bangunan gedung sudah di jelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

#### 5.1.1.1.2.3.2 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

**Tabel 5. 56 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**

| Uraian                                        | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 5.078.392.000,00 | 5.752.641.000,00  | 113,28 | 2.378.154.800,00  |

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan pelayanan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Retribusi atas pelayanan yang dikecualikan yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi dibayarkan dimuka dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

#### 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

**Tabel 5. 57 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

| Uraian                                            | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 47.821.663.259,00 | 47.730.122.053,50 | 99,81 | 38.107.714.620,50 |

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian dari PAD, yang bersumber dari Bagian Laba dari Perusahaan Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Nilai realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp47.730.122.053,50 mengalami penurunan sebesar Rp9.622.407.433,00 atau 25,25% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp38.107.714.620,50

**Tabel 5. 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

| Uraian                                                                                                           | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 29.158.571.750,00 | 29.067.030.544,50 | 99,69  | 28.575.037.290,50 |
| a. BPR Delta Artha                                                                                               |                   | 8.815.803.991,00  |        | 8.442.260.609,00  |
| b. Bank Jatim                                                                                                    |                   | 20.251.226.553,50 |        | 20.132.776.681,50 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)      | 8.528.275,00      | 8.528.275,00      | 100,00 | 879.203.017,00    |

| Uraian                                                                                                           | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 18.654.563.234,00        | 18.654.563.234,00        | 100,00       | 8.653.474.313,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                    | <b>47.821.663.259,00</b> | <b>47.730.122.053,50</b> | <b>99,81</b> | <b>38.107.714.620,50</b> |

#### 5.1.1.1.3.1 PT BPR Delta Artha (Perseroda)

PT BPR Delta Artha (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo yang bergerak di bidang perbankan, khususnya bank perkreditan rakyat. PT BPR Delta Artha (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 78 Tahun 2021 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda). Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada BUMD tersebut sebesar 95%. Perhitungan pembagian dividen diatur pada Peraturan Daerah Nomor 78 Tahun 2021 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda).

#### 5.1.1.1.3.2 PT Bank Jatim

Kepemilikan saham Pemkab Sidoarjo pada PT. Bank Jatim sebesar 2,47% dengan nilai investasi sebesar Rp92.538.962.500,00.

#### 5.1.1.1.3.3 PT. Aneka Usaha (Perseroda)

Kepemilikan saham Pemda Sidoarjo sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT. Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda), Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada BUMD tersebut sebesar 100%. Bidang usaha yang dijalankan PT. Aneka Usaha (Perseroda) meliputi percetakan, pengelolaan properti, dan Pembesaran ayam DOC.

#### 5.1.1.1.3.4 Perumda Delta Tirta

PDAM Delta Tirta didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo. Sesuai SK Bupati Sidoarjo No. 5 Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022.

#### 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

**Tabel 5. 59 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**

| Uraian                 | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Lain-lain PAD yang Sah | 47.954.690.107,00 | 91.339.076.795,29 | 190,47 | 46.020.713.148,79 |

Nilai realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp91.339.076.795,29 mengalami kenaikan sebesar Rp45.318.363.646,50 atau 99,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp46.020.713.148,79.

**Tabel 5. 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**

| Uraian                                      | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %         | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan   | 4.000.000,00      | 1.264.010.069,00  | 31.600,25 | 1.743.144.135,00  |
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 9.317.271.603,00  | 10.027.493.477,00 | 107,62    | 11.511.479.825,00 |
| Jasa Giro                                   | 3.305.531.683,00  | 3.316.293.683,86  | 100,33    | 3.358.624.443,29  |
| Pendapatan Bunga                            | 13.794.215.117,00 | 19.915.766.280,92 | 144,38    | 14.288.010.231,18 |

| Uraian                                                    | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %             | Realisasi TA 2024        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah   | 2.124.955.698,00         | 3.330.847.354,45         | 156,75        | 3.521.655.581,80         |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain             | 80.525.045,00            | 8.310.134.447,96         | 10.319,94     | 73.846.832,18            |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 69.477.148,00            | 943.614.083,40           | 1.358,16      | 483.851.538,86           |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah                             | 2.208.693.722,00         | 4.570.139.780,00         | 206,92        | 8.440.614.675,00         |
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah                         | 0,00                     | 991.511,00               | 100,00        | 3.969.727,00             |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 116.003.153,00           |
| Pendapatan dari Pengembalian                              | 16.248.640.556,00        | 16.577.217.582,00        | 102,02        | 956.102.673,06           |
| Pendapatan BLUD                                           | 0,00                     | 22.280.438.525,70        | 100,00        | 1.518.290.333,42         |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir                | 3.449.535,00             | 4.000.000,00             | 115,96        | 3.720.000,00             |
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah        | 797.930.000,00           | 798.130.000,00           | 100,03        | 1.400.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                                             | <b>47.954.690.107,00</b> | <b>91.339.076.795,29</b> | <b>190,47</b> | <b>46.020.713.148,79</b> |

#### 5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

**Tabel 5. 61 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

| Uraian                                    | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %         | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 4.000.000,00     | 1.264.010.069,00  | 31.600,25 | 1.743.144.135,00  |

Nilai realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.264.010.069,00 mengalami penurunan sebesar Rp479.134.066,00 atau 27,49% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.743.144.135,00.

**Tabel 5. 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

| Uraian                              | Anggaran TA 2025    | Realisasi TA 2025       | %                | Realisasi TA 2024       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Hasil Penjualan Tanah               | 0,00                | 0,00                    | 0,00             | 763.776.000,00          |
| Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 0,00                | 179.596.274,00          | 100,00           | 326.670.199,00          |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 0,00                | 1.080.413.795,00        | 100,00           | 648.697.936,00          |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya  | 4.000.000,00        | 4.000.000,00            | 100,00           | 4.000.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>4.000.000,00</b> | <b>1.264.010.069,00</b> | <b>31.600,25</b> | <b>1.743.144.135,00</b> |

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdapat pada:

- Hasil penjualan peralatan dan mesin merupakan penjualan, kendaraan operasional rusak berat, dan kendaraan operasional dalam kondisi apa adanya dijual scrap di Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Kepegawaian Daerah dan Kecamatan Jabon melalui Lelang KPKNL.

- Hasil penjualan Gedung dan bangunan merupakan penjualan Gedung BMD, Gedung perpustakaan, dan sisa bongkaran Gedung yang terdapat di Puskesmas Sedati, Dinas Perpustakaan, dan RSUD RT Notopuro melalui Lelang KPKNL.
- Dinas Perikanan mengelola penjualan biota perikanan sebesar Rp4.000.000,00.

#### 5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

**Tabel 5. 63 Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

| Uraian                                      | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 9.317.271.603,00 | 10.027.493.477,00 | 107,62 | 11.511.479.825,00 |

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan realisasi atas pendapatan dari hasil sewa BMD dan hasil kerja sama pemanfaatan BMD. Nilai realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.027.493.477,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.483.986.348,00 atau 12,89% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp11.509.088.705,00.

**Tabel 5. 64 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025        | %             | Realisasi TA 2024        |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Hasil Sewa BMD                   | 8.461.383.203,00        | 9.784.495.066,00         | 115,64        | 11.038.349.768,00        |
| Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 855.888.400,00          | 242.998.411,00           | 28,39         | 473.130.057,00           |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>9.317.271.603,00</b> | <b>10.027.493.477,00</b> | <b>107,62</b> | <b>11.511.479.825,00</b> |

Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dikelola OPD dengan penjelasan sebagai berikut:

- Hasil Sewa BMD sebesar Rp9.784.495.066,00 merupakan pendapatan dari aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang disewakan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh BPKAD.
- Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp242.998.411,00 merupakan penerimaan dari kerjasama kemitraan dengan rincian sebagai berikut:
  - PT. Eatertainment sebesar Rp333.628.468,00 dikelola oleh BPKAD;
  - PT. Bumi Citra Properindo sebesar Rp169.000.000,00 dikelola oleh BPKAD;
  - PT. Indraco (Suncity) sebesar Rp213.500.000,00 dikelola oleh BPKAD.

#### 5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

**Tabel 5. 65 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro**

| Uraian    | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|-----------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Jasa Giro | 3.305.531.683,00 | 3.316.293.683,86  | 100,33 | 3.358.624.443,29  |

Penerimaan Jasa Giro merupakan hak Pemerinah Kabupaten Sidoarjo atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat jasa giro yang berlaku. Nilai realisasi Jasa Giro pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.316.293.683,86 mengalami penurunan sebesar Rp42.330.759,43 atau 1,26% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.358.624.443,29.

**Tabel 5. 66 Rincian Anggaran dan Realisasi Jasa Giro**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %             | Realisasi TA 2024       |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Jasa Giro pada Kas Daerah        | 3.305.531.683,00        | 2.858.263.805,08        | 86,47         | 2.485.210.059,70        |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara  | 0,00                    | 210.274.807,28          | 100,00        | 673.477.704,02          |
| Jasa Giro pada Rekening Dana BOS | 0,00                    | 247.755.071,50          | 100,00        | 199.936.679,57          |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>3.305.531.683,00</b> | <b>3.316.293.683,86</b> | <b>100,33</b> | <b>3.358.624.443,29</b> |

Pendapatan Jasa Giro dikelola oleh BPKAD dengan penjelasan:

1. Jasa Giro pada Kas Daerah adalah jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di rekening Kas Daerah pada Bank Jatim dengan nomor rekening 261000011 (Rek. Penerimaan), 261005500 (Rek. Umum Daerah) dan 0261013657 (Rek. Pengeluaran);
2. Jasa Giro pada Kas di Bendahara adalah jasa giro atas penempatan dana pada rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPTK SKPD;
3. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS adalah jasa giro atas penempatan dana pada rekening bendahara Sekolah se-Kabupaten Sidoarjo.

#### 5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

**Tabel 5. 67 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga**

| Uraian           | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pendapatan Bunga | 13.794.215.117,00 | 19.915.766.280,92 | 144,38 | 14.288.010.231,18 |

Pendapatan bunga dikelola oleh BPKAD, merupakan bunga atas penempatan deposito pada bank Jatim. Nilai realisasi Pendapatan Bunga pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp19.915.766.280,92 mengalami kenaikan sebesar Rp5.627.756.049,74 atau 39,39% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp14.288.010.231,18. Selain itu terdapat Reklas remunerasi TDF Tahun 2025 yang merupakan pendapatan Lain-lain PAD yang sah (Pendapatan bunga) sebesar Rp 8.232.035,00.

**Tabel 5. 68 Rincian Pendapatan Bunga**

| BANK          | NO. BILYET | NOMINAL DEPOSITO          | TANGGAL PENEMPATAN | TANGGAL PENCAIRAN | BUNGA DEPOSITO           |
|---------------|------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| BANK JATIM    | DB.579881  | 50.000.000.000,00         | 02 Januari 2025    | 05 Desember 2025  | 1.940.068.493,09         |
| BANK JATIM    | DB.579882  | 50.000.000.000,00         | 02 Januari 2025    | 05 Desember 2025  | 1.940.068.493,09         |
| BANK JATIM    | DB.579883  | 50.000.000.000,00         | 02 Januari 2025    | 05 Desember 2025  | 1.940.068.493,09         |
| BANK JATIM    | DB.579884  | 50.000.000.000,00         | 02 Januari 2025    | 05 Desember 2025  | 1.940.068.493,09         |
| BANK JATIM    | DB.579885  | 50.000.000.000,00         | 02 Januari 2025    | 05 Desember 2025  | 2.082.534.246,51         |
| BANK JATIM    | DB.579886  | 50.000.000.000,00         | 02 Januari 2025    | 05 Desember 2025  | 2.082.534.246,51         |
| BANK JATIM    | DB.699257  | 50.000.000.000,00         | 21 Februari 2025   | 31 Desember 2025  | 1.797.945.205,42         |
| BANK JATIM    | DB.699258  | 50.000.000.000,00         | 21 Februari 2025   | 31 Desember 2025  | 1.797.945.205,42         |
| BANK JATIM    | DB.699342  | 50.000.000.000,00         | 26 Maret 2025      | 31 Desember 2025  | 1.607.534.246,52         |
| BANK JATIM    | DB.699341  | 50.000.000.000,00         | 26 Maret 2025      | 31 Desember 2025  | 1.607.534.246,52         |
| BANK JATIM    | DB.617233  | 50.000.000.000,00         | 17 September 2025  | 31 Desember 2025  | 585.616.438,33           |
| BANK JATIM    | DB.617234  | 50.000.000.000,00         | 17 September 2025  | 31 Desember 2025  | 585.616.438,33           |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>600.000.000.000,00</b> |                    |                   | <b>19.907.534.245,92</b> |

#### 5.1.1.1.4.5 Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

**Tabel 5. 69 Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

| Uraian                                                  | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 2.124.955.698,00 | 3.330.847.354,45  | 156,75 | 3.521.655.581,80  |

Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan penerimaan atas penyetoran tuntutan ganti kerugian daerah karena kehilangan barang milik daerah. OPD pengelola Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah BPKAD. Nilai realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.330.847.354,45 mengalami penurunan sebesar Rp190.808.227,35 atau 5,42% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.521.655.581,80.

Rincian Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan secara rinci dalam **lampiran 1** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 70 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

| Uraian                                                                                   | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %             | Realisasi TA 2024       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                                        | 2.017.720.789,00        | 200.000,00              | 0,01          | 0,00                    |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 107.234.909,00          | 3.330.647.354,45        | 3.105,94      | 3.521.655.581,80        |
| <b>Jumlah</b>                                                                            | <b>2.124.955.698,00</b> | <b>3.330.847.354,45</b> | <b>156,75</b> | <b>3.521.655.581,80</b> |

#### 5.1.1.1.4.6 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

**Tabel 5. 71 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

| Uraian                                        | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %         | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 80.525.045,00    | 8.310.134.447,96  | 10.319,94 | 73.846.832,18     |

Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain adalah penerimaan untuk menampung pendapatan yang belum teridentifikasi dan belum tersedia kodefikasi pendapatannya. Pendapatan tersebut dicatat sebagai penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain karena pada saat disusunnya Laporan Keuangan informasi terhadap jenis belanja penerimaan belum diketahui dan/atau belum tersedia klasifikasi dan nomenklatur yang sesuai pada APBD. Nilai realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp8.310.134.447,96 mengalami kenaikan sebesar Rp8.236.287.615,78 atau 11.153,20% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp73.846.832,18.

Rincian Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagai berikut :

1. Pengembalian Deposito yang ditempatkan di BPR Delta Artha oleh 14 Kelurahan pada 3 Kecamatan sebesar Rp7.978.185.934,65. Rincian sebagai berikut :

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN KETEGAN    | 500.000.000,00 |
| JAGIR KELURAHAN KETEGAN                 | 72.192.876,80  |
| SETOR PENUTUPAN KELURAHAN KETEGAN       | 6.349.550,45   |
| PENCAIRAN DEPO KELURAHAN JUWET KENONGO  | 360.000.000,00 |
| SETOR PENUTUPAN KELURAHAN JUWET KENONGO | 3.398.637,64   |

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| KELURAHAN GEDANG PORONG                               | 3.644.922,41            |
| SETOR PENCAIRAN PENUTUPAN DEPOSITO KELURAHAN KETEGAN  | 500.000.000,00          |
| PENYETORAN PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN GEDANG PORONG | 426.100.000,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN SIDOKUMPUL               | 800.000.000,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN PUCANGANOM               | 230.000.000,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN MAGERSARI                | 500.000.000,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN PUCANG                   | 1.146.400.000,00        |
| SETORAN PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN BULUSIDOKARE     | 569.175.000,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN LEMAH PUTRO              | 498.340.500,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN CEMENGKALANG             | 600.000.000,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN CELEP                    | 604.948.000,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN SEKARDANGAN              | 844.920.000,00          |
| PENCAIRAN DEPOSITO KELURAHAN GEBANG                   | 200.000.000,00          |
| KELURAHAN MAGERSARI                                   | 10.622.642,15           |
| KELURAHAN PUCANGANOM                                  | 5.059.599,51            |
| KELURAHAN PUCANG                                      | 30.122.327,01           |
| KELURAHAN SIDOKUMPUL                                  | 6.849.067,91            |
| KELURAHAN BULU SIDOKARE                               | 12.389.965,87           |
| KELURAHAN LEMAH PUTRO                                 | 3.411.266,50            |
| KELURAHAN GEBANG                                      | 2.722.315,76            |
| KELURAHAN CEMENGKALANG                                | 7.758.510,74            |
| KELURAHAN SEKARDANGAN                                 | 13.438.000,98           |
| KELURAHAN CELEP                                       | 20.342.750,92           |
|                                                       | <b>7.978.185.934,65</b> |

2. Setoran melalui ATM Bersama dan melalui transfer beda bank (BI-Fast) yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp311.553.213,31
3. MPP Beasiswa sebesar Rp16.140.000,00
4. Penjualan Kartu Flazz Daerah (yg tidak dipakai) sebesar Rp4.250.000,00
5. Pengembalian Biaya Admin PBB BPPD sebesar Rp2.900,00
6. Setoran Uji coba Aplikasi MyRetribusi sebesar Rp2.400,00

#### 5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

**Tabel 5. 72 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

| Uraian                                                    | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %        | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 69.477.148,00    | 943.614.083,40    | 1.358,16 | 483.851.538,86    |

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan dari denda terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SPK/Kontrak untuk semua pelaksanaan pekerjaan fisik. OPD yang mengelola Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah BPKAD.

Nilai realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp943.614.083,40 mengalami kenaikan sebesar Rp459.762.544,54 atau 95,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp483.851.538,86.

#### 5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah

**Tabel 5. 73 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah**

| Uraian                        | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 2.208.693.722,00 | 4.570.139.780,00  | 206,92 | 8.440.614.675,00  |

Pendapatan denda pajak untuk jenis pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PAT, PPJ, PBB merupakan pendapatan yang diperoleh atas pembayaran sanksi administrasi berupa bunga oleh Wajib Pajak karena keterlambatan pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar 2% per bulan.

Sedangkan pendapatan denda pajak BPHTB merupakan pendapatan yang diperoleh atas pembayaran sanksi administrasi berupa bunga oleh Wajib Pajak karena keterlambatan pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar 2% per bulan dan/atau sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan oleh PPAT/Notaris dan Kepala KPKNL sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Nilai realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.570.139.780,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.870.474.895,00 atau 45,86% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8.440.614.675,00.

**Tabel 5. 74 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah**

| Uraian                                                                   | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %             | Realisasi TA 2024       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Pendapatan Denda Pajak Hotel                                             | 2.829.197,00            | 5.853.780,00            | 206,91        | 4.440.705,00            |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran                                          | 25.322.204,00           | 318.169.812,00          | 1.256,49      | 405.880.512,00          |
| Pendapatan Denda Pajak Hiburan                                           | 368.330,00              | 3.061.003,00            | 831,05        | 6.417.099,00            |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame                                           | 3.515.589,00            | 10.995.768,00           | 312,77        | 26.388.141,00           |
| Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan                                  | 50.160,00               | 298.566,00              | 595,23        | 265.308,00              |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir                                            | 3.646.196,00            | 10.753.345,00           | 294,92        | 13.732.353,00           |
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                         | 5.425.734,00            | 9.729.017,00            | 179,31        | 10.442.023,00           |
| Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 2.118.853.160,00        | 4.129.803.337,00        | 194,91        | 7.887.436.458,00        |
| Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 48.683.152,00           | 81.475.152,00           | 167,36        | 85.612.076,00           |
| <b>Jumlah</b>                                                            | <b>2.208.693.722,00</b> | <b>4.570.139.780,00</b> | <b>206,92</b> | <b>8.440.614.675,00</b> |

#### 5.1.1.1.4.9 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

**Tabel 5. 75 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

| Uraian                            | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 0,00             | 991.511,00        | 100,00 | 3.969.727,00      |

Pendapatan Denda Retribusi merupakan pendapatan denda keterlambatan atas jatuh tempo penetapan Retribusi. Nilai realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp991.511,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.978.216,00 atau 75,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.969.727,00.

**Tabel 5. 76 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %             | Realisasi TA 2024   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 1.678.000,00        |
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 0,00             | 991.511,00        | 100,00        | 2.291.727,00        |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>991.511,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3.969.727,00</b> |

#### 5.1.1.4.10 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

**Tabel 5. 77 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

| Uraian                                 | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 116.003.153,00    |

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah pendapatan yang direncanakan dari pencairan jaminan-jaminan dalam proses tender/lelang pengadaan barang dan jasa pada Tahun anggaran berjalan. Nilai realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp116.003.153,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp116.003.153,00.

#### 5.1.1.4.11 Pendapatan dari Pengembalian

**Tabel 5. 78 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian**

| Uraian                       | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pendapatan dari Pengembalian | 16.248.640.556,00 | 16.577.217.582,00 | 102,02 | 956.102.673,06    |

Pendapatan dari Pengembalian merupakan pengembalian atas belanja Tahun anggaran sebelumnya. Nilai realisasi Pendapatan dari Pengembalian pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp16.577.217.582,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.621.114.908,94 atau 1.633,83% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp956.102.673,06.

**Tabel 5. 79 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian**

| Uraian                                                                           | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas               | 0,00             | 13.472.706,00     | 100,00 | 19.644.670,00     |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 0,00             | 46.594,00         | 100,00 | 56.716,00         |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)         | 0,00             | 99.180,00         | 100,00 | 170.145,00        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 232.895.592,00   | 511.221.230,00    | 219,51 | 547.816.556,00    |

| Uraian                                                                                                                                                                                  | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %             | Realisasi TA 2024     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                                                                                      | 54.293.486,00            | 54.556.427,00            | 100,48        | 14.832.654,00         |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 22.879.262,00         |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang                                                                                                                        | 4.215.623,00             | 3.025.623,00             | 71,77         | 0,00                  |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa                                                                                                                          | 14.265.000,00            | 14.265.000,00            | 100,00        | 0,00                  |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD                                                                                                           | 12.033.334,00            | 19.860.001,00            | 165,04        | 277.700.003,00        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                          | 15.921.337.521,00        | 15.921.337.521,00        | 100,00        | 980.825,00            |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial - Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)             | 9.600.000,00             | 9.600.000,00             | 100,00        | 27.905.179,00         |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi - Bangunan Air                                                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 66.201.663,06         |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 1.720.000,00          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 0,00                     | 29.733.300,00            | 1000,00       | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                           | <b>16.248.640.556,00</b> | <b>16.577.217.582,00</b> | <b>102,02</b> | <b>979.907.673,06</b> |

#### 5.1.1.1.4.12 Pendapatan BLUD

**Tabel 5. 80 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD**

| Uraian          | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pendapatan BLUD | 0,00             | 22.280.438.525,70 | 100,00 | 1.518.290.333,42  |

Nilai realisasi Pendapatan BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.518.290.333,42 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.518.290.333,42.

#### 5.1.1.1.4.13 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

**Tabel 5. 81 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

| Uraian                                     | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 3.449.535,00     | 4.000.000,00      | 115,96 | 3.720.000,00      |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar merupakan pendapatan bunga atas pemberian kredit dana bergulir UMKM Pada Dinas Koperasi dan UMKM. Nilai realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp280.000,00 atau 7,53% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.720.000,00.

#### 5.1.1.1.4.14 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan

**Tabel 5. 82 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**

| Uraian                                             | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 797.930.000,00   | 798.130.000,00    | 100,03 | 1.400.000,00      |

Realisasi atas Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun dikelola oleh BPKAD. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah terdiri dari:

1. Denda prasarana, sarana dan utilitas (PSU) PT Nusantara Indor Rp722.930.000,00
2. Denda pengunduran diri PPPK Rp75.000.000,000
3. Setoran Masyarakat yang mengambil KTP (pandemic covid 19) Rp200.000,00

Nilai realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp798.130.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp796.730.000,00 atau 56.909,29% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.400.000,00.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

**Tabel 5. 83 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**

| Uraian              | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %     | Realisasi TA 2024    |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Pendapatan Transfer | 2.761.259.726.660,00 | 2.739.171.883.191,00 | 99,20 | 2.979.896.625.006,00 |

Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang dianggarkan dan direalisasi melalui BPKAD selaku PPKD. Nilai realisasi Pendapatan Transfer pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.739.171.883.191,00 mengalami penurunan sebesar

Rp511.301.918,00 atau 8,08% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.979.896.625.006,00.

**Tabel 5. 84 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**

| Uraian                               | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %            | Realisasi TA 2024           |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.515.939.170.260,00        | 2.465.790.036.041,00        | 98,01        | 2.466.301.337.959,00        |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah     | 245.320.556.400,00          | 273.381.847.150,00          | 111,44       | 513.595.287.047,00          |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>2.761.259.726.660,00</b> | <b>2.739.171.883.191,00</b> | <b>99,20</b> | <b>2.979.896.625.006,00</b> |

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

**Tabel 5. 85 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

| Uraian                               | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %     | Realisasi TA 2024    |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.515.939.170.260,00 | 2.465.790.036.041,00 | 98,01 | 2.466.301.337.959,00 |

Transfer pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk membantu mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik, demi mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh wilayah Indonesia.

Penganggaran pendapatan transfer pusat berdasarkan:

1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2025, dan KMK Nomor 29 Tahun 2025;
2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berdasarkan KMK Nomor 138 Tahun 2025.
3. Transfer Pemerintah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/66/013/2025; 100.3.3.1/99/013/2025; 100.3.3.1/113/013/2025; 100.3.3.1/394/013/2025.

Nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.465.790.036.041,00 mengalami penurunan sebesar Rp511.301.918,00 atau 0,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.466.301.337.959,00.

**Tabel 5. 86 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat**

| Uraian           | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %            | Realisasi TA 2024           |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Dana Perimbangan | 4.145.584.000,00            | 5.414.602.000,00            | 130,61       | 0,00                        |
| Dana Desa        | 340.770.181.000,00          | 307.367.596.442,00          | 90,20        | 328.647.743.000,00          |
| Insentif Fiskal  | 14.428.969.000,00           | 14.428.969.000,00           | 100,00       | 0,00                        |
| DBH              | 217.175.557.000,00          | 209.289.086.700,00          | 96,37        | 209.922.496.000,00          |
| DAU              | 1.317.451.887.000,00        | 1.311.742.341.100,00        | 99,57        | 1.272.254.530.355,00        |
| DAK              | 621.966.992.260,00          | 617.547.440.799,00          | 99,29        | 655.476.568.604,00          |
| <b>Jumlah</b>    | <b>2.515.939.170.260,00</b> | <b>2.465.790.036.041,00</b> | <b>98,01</b> | <b>2.466.301.337.959,00</b> |

#### 5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

**Tabel 5. 87 Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan**

| Uraian           | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Dana Perimbangan | 4.145.584.000,00 | 5.414.602.000,00  | 130,61 | 0,00              |

Dana Perimbangan adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah otonom untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, bertujuan menciptakan kesetaraan keuangan antar daerah dan mendanai urusan daerah.

Nilai realisasi Dana Perimbangan berupa DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.414.602.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.414.602.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.1.2.1.2 Dana Desa

**Tabel 5. 88 Anggaran dan Realisasi Dana Desa**

| Uraian    | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %    | Realisasi TA 2024  |
|-----------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| Dana Desa | 340.770.181.000,00 | 307.367.596.442,00 | 90,2 | 328.647.743.000,00 |

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Nilai realisasi Dana Desa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp307.367.596.442,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.280.146.558,00 atau 6,48% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp328.647.743.000,00.

Pendapatan dana desa ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke Rekening desa pada 318 desa se-Kabupaten Sidoarjo.

#### 5.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal

**Tabel 5. 89 Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal**

| Uraian          | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %   | Realisasi TA 2024 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Insentif Fiskal | 14.428.969.000,00 | 14.428.969.000,00 | 100 | 0,00              |

Insentif fiskal adalah kebijakan pemerintah berupa fasilitas atau keringanan finansial (bisa dana langsung atau pembebasan/pengurangan pajak/bea) yang diberikan kepada individu, perusahaan, atau daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu, meningkatkan kinerja, atau mencapai tujuan strategis nasional.

Nilai realisasi Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp14.428.969.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.428.969.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

#### 5.1.1.2.1.4 DBH

**Tabel 5. 90 Anggaran dan Realisasi DBH**

| Uraian | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|--------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| DBH    | 217.175.557.000,00 | 209.289.086.700,00 | 96,37 | 209.922.496.000,00 |

DBH adalah Dana Bagi Hasil, yaitu bagian dari pendapatan negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara (pajak atau sumber daya alam) yang berasal dari wilayah tersebut, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi ketimpangan fiskal. Tujuannya adalah memberikan kompensasi kepada daerah penghasil untuk pembangunan dan pemerataan.

Nilai realisasi DBH pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp209.289.086.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp633.409.300,00 atau 0,30% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp209.922.496.000,00.

**Tabel 5. 91 Rincian Anggaran dan Realisasi DBH**

| Uraian                                             | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| DBH PBB                                            | 11.274.724.000,00         | 10.210.170.600,00         | 90,56        | 14.295.792.000,00         |
| DBH PPh Pasal 21                                   | 124.777.342.000,00        | 116.275.300.800,00        | 93,19        | 115.920.278.000,00        |
| DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN               | 11.671.047.000,00         | 11.875.584.300,00         | 101,75       | 7.390.016.000,00          |
| DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                     | 40.522.143.000,00         | 41.665.168.000,00         | 102,82       | 33.874.073.000,00         |
| DBH SDA Minyak Bumi                                | 26.295.914.000,00         | 26.295.914.000,00         | 101,15       | 31.247.637.000,00         |
| DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 4.920.156.000,00          |
| DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi                     | 14.679.000,00             | 16.779.000,00             | 100,00       | 24.341.000,00             |
| DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty               | 1.578.910.000,00          | 1.893.339.000,00          | 114,31       | 925.920.000,00            |
| DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 87.520.000,00             | 103.553.000,00            | 119,91       | 96.612.000,00             |
| DBH SDA Perikanan                                  | 953.278.000,00            | 953.278.000,00            | 118,32       | 1.227.671.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>217.175.557.000,00</b> | <b>209.289.086.700,00</b> | <b>96,37</b> | <b>209.922.496.000,00</b> |

#### 5.1.1.2.1.5 DAU

**Tabel 5. 92 Anggaran dan Realisasi DAU**

| Uraian | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %     | Realisasi TA 2024    |
|--------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| DAU    | 1.317.451.887.000,00 | 1.311.742.341.100,00 | 99,57 | 1.272.254.530.355,00 |

DAU adalah singkatan dari Dana Alokasi Umum, yaitu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai realisasi Dana Desa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.311.742.341.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.487.810.745,00 atau 3,10% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.272.254.530.355,00.

#### 5.1.1.2.1.6 DAK

**Tabel 5. 93 Anggaran dan Realisasi DAK**

| Uraian | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|--------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| DAU    | 621.966.992.260,00 | 617.547.440.799,00 | 99,29 | 655.476.568.604,00 |

DAK adalah singkatan dari Dana Alokasi Khusus, yaitu dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang bersumber dari APBN untuk membantu membiayai kegiatan atau program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, baik fisik (infrastruktur) maupun nonfisik (layanan publik), sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dana ini bertujuan mengurangi kesenjangan dan mendukung pembangunan daerah sesuai prioritas nasional.

Nilai realisasi Dana Desa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp617.547.440.799,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.929.127.805,00 atau 5,79% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp655.476.568.604,00.

**Tabel 5. 94 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK**

| Uraian                                                                     | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD                               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 3.543.304.424,00   |
| DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI dan AKB    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.520.300.000,00   |
| DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP                                    | 228.000.000,00     | 218.310.360,00     | 95,75  | 0,00               |
| DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan - Jalan                               | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 58.961.210.794,00  |
| DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler                                         | 14.179.569.000,00  | 11.369.836.196,00  | 80,18  | 0,00               |
| DAK Fisik - Bidang Air Minum - Penugasan                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 11.767.128.151,00  |
| DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler                                          | 3.137.181.000,00   | 2.920.629.492,00   | 93,10  | 0,00               |
| DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 9.056.986.000,00   |
| DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Keluarga Berencana       | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 1.228.770.086,00   |
| DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 25.414.984.751,00  |
| DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan                      | 11.005.086.000,00  | 10.479.595.451,00  | 95,23  | 0,00               |
| DAK Non Fisik-BOS Reguler                                                  | 237.422.750.000,00 | 237.416.416.600,00 | 100,00 | 237.812.403.600,00 |
| DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                                  | 4.543.750.000,00   | 4.543.750.000,00   | 100,00 | 4.630.000.000,00   |
| DAK Non Fisik-TPG PNSD                                                     | 251.549.566.000,00 | 252.562.699.900,00 | 100,40 | 195.952.922.739,00 |
| DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD                                             | 3.861.000.000,00   | 2.616.500.000,00   | 67,77  | 7.283.204.000,00   |
| DAK Non Fisik-PK2UKM                                                       | 785.600.000,00     | 785.600.000,00     | 100,00 | 0,00               |
| DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal                                  |                    |                    |        | 395.646.200,00     |
| DAK Non Fisik - BOKB - KB                                                  |                    |                    |        | 15.221.403.300,00  |
| DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak               | 400.660.000,00     | 391.893.610,00     | 97,81  | 363.988.450,00     |

| Uraian                                                           | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 452.773.949,00            |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler                         | 39.215.460.000,00         | 39.005.971.759,00         | 99,47        | 40.247.199.157,00         |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja                         | 780.000.000,00            | 780.000.000,00            | 100,00       | 960.000.000,00            |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler                   | 4.853.760.000,00          | 4.657.463.971,00          | 95,96        | 4.129.507.214,00          |
| DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja                   | 270.000.000,00            | 270.000.000,00            | 100,00       | 135.000.000,00            |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota              | 14.817.639.263,00         | 14.817.639.263,00         | 100,00       | 13.865.699.554,00         |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan | 463.059.000,00            | 463.059.000,00            | 100,00       | 0,00                      |
| DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                             | 18.161.471.997,00         | 18.161.471.997,00         | 100,00       | 22.534.136.235,00         |
| DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana             | 15.932.200.000,00         | 15.726.363.200,00         | 98,71        | 0,00                      |
| DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian             | 360.240.000,00            | 360.240.000,00            | 100,00       | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                                                    | <b>621.966.992.260,00</b> | <b>617.547.440.799,00</b> | <b>99,29</b> | <b>655.476.568.604,00</b> |

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

**Tabel 5. 95 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 245.320.556.400,00 | 273.381.847.150,00 | 111,44 | 513.595.287.047,00 |

Nilai realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp273.381.847.150,00 mengalami penurunan sebesar Rp240.213.439.897,00 atau 46,77% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp513.595.287.047,00.

**Tabel 5. 96 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah**

| Uraian                | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %             | Realisasi TA 2024         |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil | 234.071.479.400,00        | 262.332.020.150,00        | 112,07        | 502.620.091.047,00        |
| Bantuan Keuangan      | 11.249.077.000,00         | 11.049.827.000,00         | 98,23         | 10.975.196.000,00         |
| <b>Jumlah</b>         | <b>245.320.556.400,00</b> | <b>273.381.847.150,00</b> | <b>111,44</b> | <b>513.595.287.047,00</b> |

#### 5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

**Tabel 5. 97 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil**

| Uraian                | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil | 234.071.479.400,00 | 262.332.020.150,00 | 112,07 | 502.620.091.047,00 |

Nilai realisasi Pendapatan Bagi Hasil pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp262.332.020.150,00 mengalami penurunan sebesar Rp240.288.070.897,00 atau 47,81% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp502.620.091.047,00.

**Tabel 5. 98 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

| Uraian                                                     | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %             | Realisasi TA 2024         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor             | 1.721.493.700,00          | 17.585.267.100,00         | 1.021,51      | 175.673.096.400,00        |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | 1.049.985.700,00          | 12.069.439.200,00         | 1.149,49      | 102.039.515.300,00        |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 145.000.000.000,00        | 141.913.589.900,00        | 97,87         | 147.613.806.500,00        |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                  | 1.300.000.000,00          | 1.249.025.450,00          | 96,08         | 1.199.679.400,00          |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                          | 85.000.000.000,00         | 89.514.698.500,00         | 105,31        | 76.093.993.447,00         |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>234.071.479.400,00</b> | <b>262.332.020.150,00</b> | <b>112,07</b> | <b>502.620.091.047,00</b> |

#### 5.1.1.2.2 Bantuan Keuangan

**Tabel 5. 99 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan**

| Uraian           | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Bantuan Keuangan | 11.249.077.000,00 | 11.049.827.000,00 | 98,23 | 10.975.196.000,00 |

Nilai realisasi Bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.049.827.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp74.631.000,00 atau 0,68% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10.975.196.000,00

Dasar penganggaran Bantuan Keuangan adalah:

1. Bidang Pendidikan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tanggal 14 Februari 2025.
2. Bidang Kesehatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tanggal 3 Februari 2025.
3. Puspa Agro sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/013/2025 tanggal 12 Februari 2025.
4. Honorarium Pemerintah Desa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/394/013/2025 tanggal 25 Juni 2025.

Dana BK TA 2025 yang diterima di RKUD sebesar Rp11.049.827.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan sebesar Rp10.736.542.779,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp313.284.221,00. Atas sisa tersebut akan dicatat sebagai Utang Transfer di Neraca dan akan disetorkan ke Kasda Provinsi Jawa Timur melalui Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2026.

#### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

**Tabel 5. 100 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

| Uraian                        | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 99.684.239,05     |

Nilai realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp99.684.239,05 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp99.684.239,05.

### 5.1.2 Belanja Daerah

**Tabel 5. 101 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**

| Uraian         | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %     | Realisasi TA 2024    |
|----------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Belanja Daerah | 6.071.145.324.287,20 | 5.464.353.883.312,25 | 90,01 | 5.251.342.990.301,47 |

Belanja adalah Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Belanja ini dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Nilai realisasi Belanja Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.464.353.883.312,25 mengalami kenaikan sebesar Rp213.010.893.010,78 atau 4,06% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.251.342.990.301,47.

**Tabel 5. 102 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**

| Uraian                | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %            | Realisasi TA 2024           |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Belanja Operasi       | 4.380.444.407.659,20        | 4.039.796.915.419,43        | 92,22        | 3.935.999.993.833,47        |
| Belanja Modal         | 906.290.705.142,00          | 683.337.397.730,82          | 75,40        | 668.077.999.318,00          |
| Belanja Tidak Terduga | 19.977.358.000,00           | 10.254.834.782,00           | 51,33        | 26.568.948.044,00           |
| Belanja Transfer      | 764.432.853.486,00          | 730.964.735.380,00          | 95,62        | 620.696.049.106,00          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>6.071.145.324.287,20</b> | <b>5.464.353.883.312,25</b> | <b>90,01</b> | <b>5.251.342.990.301,47</b> |

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

**Tabel 5. 103 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

| Uraian          | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %     | Realisasi TA 2024    |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Belanja Operasi | 4.380.444.407.659,20 | 4.039.796.915.419,43 | 92,22 | 3.935.999.993.833,47 |

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Nilai realisasi Belanja Operasi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.039.797.915.419,43 mengalami kenaikan sebesar Rp103.797.921.585,96 atau 2,64% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.935.999.993.833,47.

**Tabel 5. 104 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

| Uraian                  | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %     | Realisasi TA 2024    |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Belanja Pegawai         | 1.914.484.607.621,20 | 1.786.341.122.963,05 | 93,31 | 1.778.430.605.560,10 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.073.392.534.605,00 | 1.883.020.460.459,29 | 90,82 | 1.690.376.003.896,45 |
| Belanja Bunga           | 3.000.000.000,00     | 2.580.053.896,65     | 86,00 | 345.719.188,92       |
| Belanja Subsidi         | 5.040.000.000,00     | 2.955.285.939,00     | 58,64 | 1.767.853.335,00     |
| Belanja Hibah           | 277.433.120.433,00   | 273.391.805.661,44   | 98,54 | 362.111.796.853,00   |

| Uraian                 | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %            | Realisasi TA 2024           |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Belanja Bantuan Sosial | 107.094.145.000,00          | 91.508.186.500,00           | 85,45        | 102.968.015.000,00          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>4.380.444.407.659,20</b> | <b>4.039.796.915.419,43</b> | <b>92,22</b> | <b>3.935.999.993.833,47</b> |

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**Tabel 5. 105 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

| Uraian Pendapatan | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %     | Realisasi TA 2024    |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Belanja Pegawai   | 1.914.484.607.621,20 | 1.786.341.122.963,05 | 93,31 | 1.778.430.605.560,10 |

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Nilai realisasi Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.786.341.122.963,05 mengalami kenaikan sebesar Rp7.910.517.402,95 atau 0,44% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.778.430.605.560,10.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per OPD disajikan secara rinci dalam **lampiran 2** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 106 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

| Uraian                                                             | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %            | Realisasi TA 2024           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 919.730.474.904,20          | 876.462.101.508,00          | 95,30        | 874.548.162.084,00          |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 737.776.719.605,00          | 666.441.728.831,00          | 90,33        | 422.872.751.596,00          |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 245.518.515.361,00          |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                    | 33.974.500.000,00           | 33.093.293.386,00           | 97,41        | 30.760.045.840,00           |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH                              | 2.267.313.526,00            | 2.007.636.026,00            | 88,55        | 983.894.838,00              |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH          | 4.373.741.941,00            | 4.134.051.774,00            | 94,52        | 2.502.900.063,00            |
| Belanja Pegawai BLUD                                               | 216.361.857.645,00          | 204.202.311.438,05          | 94,38        | 201.244.335.778,10          |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>1.914.484.607.621,20</b> | <b>1.786.341.122.963,05</b> | <b>93,31</b> | <b>1.778.430.605.560,10</b> |

Penjelasan tambahan terkait belanja pegawai:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Belanja Tambahan Penghasilan ASN berupa Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) merupakan belanja pegawai yang bersumber dari Pendapatan DAK Non Fisik yang disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening masing-masing penerima (Guru) dengan

- mekanisme pencatatan pada LRA dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja;
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD ditetapkan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH ditetapkan berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengacu pada ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, Serta Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  7. Belanja Pegawai BOS terdiri dari Belanja Pegawai BOSDA dan Belanja Pegawai BOSREG, Belanja Pegawai BOSDA merupakan belanja pegawai yang bersumber dari APBD dengan besaran diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Dasar Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 Sedangkan Belanja Pegawai BOSREG merupakan belanja pegawai yang bersumber dari Pendapatan DAK Non Fisik yang langsung turun ke Satuan Pendidikan (SDN dan SMPN) dengan mekanisme pencatatan pada LRA dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja;
  8. Pencatatan realisasi Belanja Pegawai BLUD berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran yang disusun BLUD RSUD, TPA Griyo Mulyo dan Puskesmas. Atas LRA BLUD tersebut telah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan menjadi dasar pengakuan belanja pada LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

**Tabel 5. 107 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

| Uraian                         | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 919.730.474.904,20 | 876.462.101.508,00 | 95,30 | 874.548.162.084,00 |

Nilai realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun anggaran 2025 sebesar 876.462.101.508,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.913.939.424,00 atau 0,22% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp874.548.162.084,00.

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagai berikut:

**Tabel 5. 108 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

| Uraian                  | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Gaji Pokok PNS  | 446.819.858.797,20 | 436.511.481.926,00 | 97,69 |                    |
| Belanja Gaji Pokok PPPK | 232.050.797.696,00 | 221.471.368.060,00 | 95,44 | 201.913.022.700,00 |

| Uraian                                                        | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                | 41.228.189.695,00         | 40.118.797.502,00         | 97,31        | 42.405.510.280,00         |
| Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                               | 22.249.835.272,00         | 20.297.201.919,00         | 91,22        | 18.331.324.334,00         |
| Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                 | 5.990.911.581,00          | 5.320.560.000,00          | 88,81        | 5.346.620.000,00          |
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS                              | 32.357.642.863,00         | 31.555.712.500,00         | 97,52        | 35.149.743.524,00         |
| Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                             | 42.844.200,00             | 29.880.000,00             | 69,74        | 0,00                      |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                         | 5.081.028.959,00          | 4.843.691.000,00          | 95,33        | 5.453.407.000,00          |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                        | 13.480.684.750,00         | 12.729.435.000,00         | 94,43        | 11.714.600.000,00         |
| Belanja Tunjangan Beras PNS                                   | 22.447.862.460,00         | 21.844.849.786,00         | 97,31        | 23.326.844.100,00         |
| Belanja Tunjangan Beras PPPK                                  | 14.964.257.738,00         | 13.777.398.060,00         | 92,07        | 12.529.094.520,00         |
| Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS                  | 17.338.089.343,00         | 14.146.921.264,00         | 81,59        | 3.793.222.263,00          |
| Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PPPK                 | 909.886.816,00            | 280.816.268,00            | 30,86        | 83.706.665,00             |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS                                   | 10.959.062,00             | 5.543.922,00              | 50,59        | 6.473.589,00              |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                  | 5.826.540,00              | 3.352.008,00              | 57,53        | 3.977.090,00              |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                           | 37.647.742.269,00         | 33.571.018.206,00         | 89,17        | 34.542.448.950,00         |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                          | 17.950.907.153,00         | 14.530.874.109,00         | 80,95        | 9.007.814.351,00          |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                    | 1.001.310.490,00          | 894.201.786,00            | 89,30        | 954.190.520,00            |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                   | 934.779.584,00            | 461.483.389,00            | 49,37        | 416.365.638,00            |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                            | 2.980.284.194,00          | 2.682.307.210,00          | 89,30        | 2.862.486.634,00          |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                           | 1.894.590.255,00          | 1.385.207.593,00          | 49,37        | 1.249.024.904,00          |
| Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS  | 1.560.412.245,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 781.772.942,00            | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>919.730.474.904,20</b> | <b>876.462.101.508,00</b> | <b>95,30</b> | <b>874.548.162.084,00</b> |

#### 5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

**Tabel 5. 109 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 737.776.719.605,00 | 666.441.728.831,00 | 90,33 | 422.872.751.596,00 |

Nilai realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp666.441.728.831,00 mengalami kenaikan sebesar Rp243.568.977.235,00 atau 36,55% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp422.872.751.596,00.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 110 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

| Uraian                                                                                                | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                      | 145.270.263.301,00 | 128.384.514.122,00 | 88,38 | 239.656.303.545,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                                     | 3.896.913.125,00   | 2.523.165.175,00   | 64,75 | 33.700.170.081,00  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                                    | 69.858.886.884,00  | 67.970.908.353,00  | 97,30 | 15.356.895.245,00  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK                                                   | 8.560.933.376,00   | 8.190.079.785,00   | 95,67 | 865.584.991,00     |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN                                               | 500.000.000,00     | 484.642.861,00     | 96,93 | 0.00               |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                                                   | 169.405.554.039,00 | 152.709.016.212,00 | 90,14 | 126.649.431.842,00 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK                                                  | 35.150.629.829,00  | 32.871.415.524,00  | 93,52 | 6.644.365.892,00   |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame                                  | 304.208.639,00     | 251.021.863,00     | 82,52 | 0.00               |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah                                | 127.455.856,00     | 105.171.945,00     | 82,52 | 0.00               |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 3.974.290.004,00   | 3.698.769.843,00   | 93,07 | 0.00               |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan      | 7.294.930.256,00   | 5.157.795.318,00   | 70,70 | 0.00               |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)          | 2.689.601.375,00   | 2.219.361.035,00   | 82,52 | 0.00               |

| Uraian                                                                                                              | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                         | 2.267.583.315,00          | 1.631.709.081,00          | 71,96        | 10,00                     |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)              | 1.399.756.149,00          | 897.239.214,00            | 64,10        | 0,00                      |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar                      | 264.835.565,00            | 264.835.565,00            | 100,00       | 0,00                      |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 254.961.203,00            | 254.961.203,00            | 100,00       | 0,00                      |
| Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah   | 272.148.788,00            | 97.088.559,00             | 35,67        | 0,00                      |
| Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                                                           | 154.798.371.600,00        | 153.543.019.400,00        | 99,19        | 0,00                      |
| Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD                                                                            | 23.588.111.600,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00                      |
| Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                                                     | 1.101.000.000,00          | 792.500.000,00            | 71,98        | 0,00                      |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                                           | 2.303.498.000,00          | 2.295.533.528,00          | 99,65        | 0,00                      |
| Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                                                           | 369.035.328,00            | 369.035.145,00            | 100,00       | 0,00                      |
| Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK                                                                           | 100.629.944.878,00        | 99.237.445.100,00         | 98,62        | 0,00                      |
| Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK                                                                     | 3.493.806.495,00          | 2.492.500.000,00          | 71,34        | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                       | <b>737.776.719.605,00</b> | <b>666.441.728.831,00</b> | <b>90,33</b> | <b>422.872.751.596,00</b> |

#### 5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

**Tabel 5. 111 Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

| Uraian                                                             | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 305.133.539.051,00 | 273.307.986.799,00 | 89,57 | 245.518.515.361,00 |

Nilai realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp305.133.539.051,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.789.471.438,00 atau 10,17% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp245.518.515.361,00.

**Tabel 5. 112 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

| SKPD                                                    | ANGGARAN                  | REALISASI                 | Keterangan                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Badan Pelayanan Pajak Daerah                            | 18.057.825.594,00         | 13.961.068.299,00         | Insentif pajak daerah       |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah              | 369.035.328,00            | 369.035.145,00            | Insentif pemanfaatan aset   |
| Dinas Kesehatan                                         | 2.303.498.000,00          | 2.295.533.528,00          | Jasa Pelayanan Kesehatan    |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 254.961.203,00            | 254.961.203,00            | Insentif retribusi PBG      |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                         | 283.611.234.573,00        | 256.065.464.500,00        | Tunjangan Profesi Guru      |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan                     | 264.835.565,00            | 264.835.565,00            | Insentif retribusi pasar    |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | 260.043.500,00            | 84.983.271,00             | Insentif retribusi rusunawa |
| Dinas Tenaga Kerja                                      | 12.105.288,00             | 12.105.288,00             | Insentif izin TKA           |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>305.133.539.051,00</b> | <b>273.307.986.799,00</b> |                             |

#### 5.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

**Tabel 5. 113 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

| Uraian                          | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 33.974.500.000,00 | 33.093.293.386,00 | 97,41 | 30.760.045.840,00 |

Nilai realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp33.093.293.386,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.333.247.546,00 atau 97,41% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp30.760.045.840,00.

**Tabel 5. 114 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

| Uraian                                                          | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024s |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Belanja Uang Representasi DPRD                                  | 1.115.000.000,00 | 1.104.810.000,00  | 99,09 | 1.100.610.000,00   |
| Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 160.000.000,00   | 114.578.100,00    | 71,61 | 110.552.400,00     |
| Belanja Tunjangan Beras DPRD                                    | 175.000.000,00   | 126.517.740,00    | 72,30 | 126.952.260,00     |
| Belanja Uang Paket DPRD                                         | 113.000.000,00   | 95.025.000,00     | 84,09 | 94.290.000,00      |
| Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 1.620.000.000,00 | 1.599.538.500,00  | 98,74 | 1.595.732.250,00   |
| Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 163.800.000,00   | 130.782.750,00    | 79,84 | 110.350.800,00     |
| Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 35.000.000,00    | 15.255.450,00     | 43,59 | 11.708.025,00      |
| Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 8.820.000.000,00 | 8.761.200.000,00  | 99,33 | 8.717.100.000,00   |

| Uraian                                                  | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024s       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Tunjangan Reses DPRD                            | 2.205.000.000,00         | 2.190.300.000,00         | 99,33        | 1.455.300.000,00         |
| Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 150.000.000,00           | 109.724.113,00           | 73,15        | 3.881.457,00             |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD               | 100.000.000,00           | 91.115.598,00            | 91,12        | 87.823.890,00            |
| Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                   | 7.500.000,00             | 6.957.831,00             | 92,77        | 6.681.220,00             |
| Belanja Jaminan Kematian DPRD                           | 10.000.000,00            | 8.697.304,00             | 86,97        | 8.351.538,00             |
| Belanja Tunjangan Perumahan DPRD                        | 11.700.000.000,00        | 11.613.216.000,00        | 99,26        | 10.447.272.000,00        |
| Belanja Tunjangan Transportasi DPRD                     | 7.565.200.000,00         | 7.124.000.000,00         | 94,17        | 6.450.000.000,00         |
| Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD                       | 35.000.000,00            | 1.575.000,00             | 4,50         | 433.440.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>33.974.500.000,00</b> | <b>33.093.293.386,00</b> | <b>97,41</b> | <b>30.760.045.840,00</b> |

#### 5.1.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

**Tabel 5. 115 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

| Uraian                              | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 2.267.313.526,00 | 2.007.636.026,00  | 88,55 | 983.894.838,00    |

Nilai realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.007.636.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.023.741.188,00 atau 50,99% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp983.894.838,00. Kenaikan dikarenakan pada tahun anggaran 2024 belanja insentif tidak dibayarkan kepada Bupati karena Bupati Sidoarjo terjerat kasus hukum (OTT KPK) pada bulan Januari 2025.

**Tabel 5. 116 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

| Uraian                                              | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH                       | 111.930.000,00   | 52.500.000,00     | 46,90 | 54.965.342,00     |
| Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH               | 7.835.100,00     | 6.888.000,00      | 87,91 | 7.644.000,00      |
| Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH                | 100.717.000,00   | 86.940.000,00     | 86,32 | 69.660.000,00     |
| Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH                  | 8.313.816,00     | 7.024.740,00      | 84,49 | 8.111.040,00      |
| Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH / WKDH | 1.256.038.376,00 | 1.072.310.955,00  | 85,37 | 98.369.576,00     |
| Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH                  | 1.148,00         | 440,00            | 38,33 | 1.040,00          |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH     | 5.641.395,00     | 5.184.480,00      | 91,90 | 4.358.880,00      |

| Uraian                                                                                           | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %            | Realisasi TA 2024     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH                                                | 127.640,00              | 112.320,00              | 88,00        | 112.320,00            |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH                                                        | 370.920,00              | 336.960,00              | 90,84        | 336.960,00            |
| Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 5.409.307,00          |
| Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 25.581.450,00         |
| Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 1.256.510,00          |
| Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame                                   | 14.111.760,00           | 14.111.760,00           | 100,00       | 17.331.191,00         |
| Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 5.144.039,00          |
| Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                 | 2.830.615,00            | 2.830.615,00            | 100,00       | 3.272.545,00          |
| Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 223.058.764,00          | 223.058.764,00          | 100,00       | 253.656.789,00        |
| Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan       | 304.086.642,00          | 304.086.642,00          | 100,00       | 308.726.797,00        |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)             | 94.377.592,00           | 94.377.592,00           | 100,00       | 119.957.052,00        |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)              | 78.784.433,00           | 78.784.433,00           | 100,00       | 0,00                  |
| Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)   | 59.088.325,00           | 59.088.325,00           | 100,00       | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                                                                                    | <b>2.267.313.526,00</b> | <b>2.007.636.026,00</b> | <b>88,55</b> | <b>983.894.838,00</b> |

#### 5.1.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

| Tabel 5. 117 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH |                  |                   |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Uraian                                                                                      | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                                     | 4.373.741.941,00 | 4.134.051.774,00  | 94,52 | 2.502.900.063,00  |

Nilai realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.134.051.774,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.631.151.711,00 atau 39,46% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.502.900.063,00.

| Tabel 5. 118 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH |                         |                         |              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Uraian                                                                                              | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %            | Realisasi TA 2024       |
| Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD                                                              | 400.000.000,00          | 393.120.000,00          | 98,28        | 360.360.000,00          |
| Belanja Dana Operasional KDH/WKDH                                                                   | 3.973.741.941,00        | 3.740.931.774,00        | 94,14        | 2.142.540.063,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                       | <b>4.373.741.941,00</b> | <b>4.134.051.774,00</b> | <b>94,52</b> | <b>2.502.900.063,00</b> |

#### 5.1.2.1.1.7 Belanja Pegawai BLUD

| Tabel 5. 119 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD |                    |                    |       |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Uraian                                                   | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
| Belanja Pegawai BLUD                                     | 216.361.857.645,00 | 204.202.311.438,05 | 94,38 | 201.244.335.778,10 |

Nilai realisasi Belanja Pegawai BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp204.202.311.438,05 mengalami kenaikan sebesar Rp2.957.975.659,95 atau 1,45% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp201.244.335.778,10.

| Tabel 5. 120 Rincian Belanja Pegawai BLUD               |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| SKPD                                                    | JUMLAH                    |
| Dinas Kesehatan                                         | 49.153.754.344,00         |
| RSUD R.T. Notopuro                                      | 134.704.673.588,00        |
| RSUD Sidoarjo Barat                                     | 20.305.963.506,05         |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                   | 37.920.000,00             |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | 0,00                      |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>204.202.311.438,05</b> |

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

| Tabel 5. 121 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa |                      |                      |       |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Uraian                                                      | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %     | Realisasi TA 2024    |
| Belanja Barang dan Jasa                                     | 2.073.392.534.605,00 | 1.883.020.460.459,29 | 90,82 | 1.690.376.003.896,45 |

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.883.020.460.459,29 mengalami kenaikan sebesar Rp192.644.456.562,84 atau 10,23% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.690.376.003.896,45. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD disajikan secara rinci dalam **lampiran 3** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 122 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

| Uraian                                                                                     | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %            | Realisasi TA 2024           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Belanja Barang                                                                             | 362.104.902.142,00          | 314.677.514.533,40          | 86,90        | 223.555.781.125,00          |
| Belanja Jasa                                                                               | 648.374.246.090,00          | 585.186.030.811,00          | 90,25        | 509.386.424.750,05          |
| Belanja Pemeliharaan                                                                       | 100.516.760.329,00          | 92.092.913.817,56           | 91,62        | 61.508.913.930,00           |
| Belanja Perjalanan Dinas                                                                   | 67.520.971.789,00           | 59.440.203.225,00           | 88,03        | 95.363.921.190,00           |
| Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat | 113.360.128.400,00          | 111.249.092.500,00          | 98,14        | 115.747.125.650,00          |
| Belanja Barang dan Jasa BOS                                                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00         | 66.592.044.800,00           |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                               | 208.109.591.150,00          | 208.026.953.150,00          | 99,96        | 142.104.093.300,00          |
| Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                      | 16.638.105.000,00           | 16.387.630.061,00           | 98,49        | 19.404.129.769,00           |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                               | 556.767.829.705,00          | 495.960.122.361,33          | 89,08        | 456.713.569.382,40          |
| <b>Jumlah</b>                                                                              | <b>2.073.392.534.605,00</b> | <b>1.883.020.460.459,29</b> | <b>90,82</b> | <b>1.690.376.003.896,45</b> |

**Tabel 5. 123 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD**

| Nama OPD                                                               | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                        | 248.630.188.582,00 | 244.815.249.224,00 | 98,47 | 242.437.174.092,00 |
| Dinas Kesehatan                                                        | 262.592.036.618,00 | 256.359.574.992,40 | 97,63 | 237.348.109.588,40 |
| RSUD R.T. Notopuro                                                     | 481.228.767.110,00 | 432.376.674.155,93 | 89,85 | 404.471.264.205,00 |
| RSUD Sidoarjo Barat                                                    | 56.777.217.826,00  | 46.875.837.807,00  | 82,56 | 44.629.931.350,00  |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air                    | 114.071.951.927,00 | 100.459.820.695,00 | 88,07 | 56.480.750.374,00  |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang                | 92.997.480.971,00  | 79.063.942.649,40  | 85,02 | 55.612.445.404,00  |
| Satuan Polisi Pamong Praja                                             | 17.998.416.300,00  | 16.204.007.535,00  | 90,03 | 14.180.458.031,00  |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 13.166.931.831,00  | 11.790.934.014,00  | 89,55 | 10.866.011.874,05  |
| Dinas Sosial                                                           | 24.968.184.252,00  | 22.107.207.460,00  | 88,54 | 24.423.176.282,00  |
| Dinas Tenaga Kerja                                                     | 16.658.388.780,00  | 15.868.228.059,00  | 95,26 | 8.106.902.062,00   |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 44.526.431.767,00  | 41.079.094.558,00  | 92,26 | 29.214.804.162,00  |
| Dinas Pangan dan Pertanian                                             | 23.769.884.207,00  | 22.051.496.408,00  | 92,77 | 12.857.649.902,00  |

| Nama OPD                                               | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                  | 101.962.094.232,00 | 83.047.627.786,00 | 81,45 | 64.521.699.105,00 |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                   | 8.039.520.179,00   | 7.399.867.053,00  | 92,04 | 6.279.963.266,00  |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                 | 79.980.578.973,00  | 77.535.904.872,00 | 96,94 | 76.869.532.857,00 |
| Dinas Perhubungan                                      | 93.100.828.629,00  | 81.927.947.657,00 | 88,00 | 87.938.963.758,00 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika                       | 25.482.192.156,00  | 24.278.584.958,00 | 95,28 | 17.159.397.960,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                         | 12.781.114.565,00  | 12.102.964.328,06 | 94,69 | 10.663.112.708,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.456.971.463,00   | 6.935.865.363,00  | 93,01 | 9.493.938.831,00  |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              | 44.618.866.433,00  | 41.739.477.675,00 | 93,55 | 31.775.713.612,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | 5.526.767.012,00   | 5.243.535.823,00  | 94,88 | 4.795.691.763,00  |
| Dinas Perikanan                                        | 22.626.550.015,00  | 21.052.751.480,00 | 93,04 | 9.892.528.735,00  |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan                    | 19.482.079.686,00  | 18.488.323.264,00 | 94,90 | 23.246.608.493,00 |
| Sekretariat Daerah                                     | 65.521.895.190,00  | 58.192.791.286,00 | 88,81 | 49.741.171.970,00 |
| Sekretariat DPRD                                       | 48.116.760.692,00  | 37.165.500.638,00 | 77,24 | 59.907.984.782,00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | 10.819.409.410,00  | 10.222.772.399,00 | 94,49 | 9.373.738.513,00  |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah             | 10.277.588.271,00  | 8.779.850.215,00  | 85,43 | 8.303.326.719,00  |
| Badan Pelayanan Pajak Daerah                           | 15.115.687.461,00  | 11.085.553.012,00 | 73,34 | 10.917.729.549,00 |
| Badan Kepegawaian Daerah                               | 7.809.848.824,00   | 7.122.024.800,00  | 91,19 | 6.229.820.910,00  |
| Inspektorat                                            | 8.609.878.418,00   | 6.867.464.303,00  | 79,76 | 3.724.332.372,00  |
| Kecamatan Sidoarjo                                     | 15.544.912.663,00  | 14.148.891.630,00 | 91,02 | 12.503.219.564,00 |
| Kecamatan Candi                                        | 2.107.398.835,00   | 1.685.291.323,00  | 79,97 | 1.508.281.161,00  |
| Kecamatan Buduran                                      | 2.233.380.842,00   | 1.844.853.755,00  | 82,60 | 2.242.827.563,00  |
| Kecamatan Wonoayu                                      | 2.259.605.000,00   | 2.142.529.130,00  | 94,82 | 1.782.523.879,00  |
| Kecamatan Krian                                        | 5.177.460.713,00   | 4.671.934.071,00  | 90,24 | 3.933.285.779,00  |
| Kecamatan Porong                                       | 4.312.988.256,00   | 3.873.702.027,00  | 89,81 | 3.562.902.752,00  |
| Kecamatan Krembung                                     | 2.018.940.785,00   | 1.773.576.931,00  | 87,85 | 1.479.595.739,00  |
| Kecamatan Jabon                                        | 1.794.834.220,00   | 1.326.041.722,00  | 73,88 | 1.382.987.287,00  |
| Kecamatan Balongbendo                                  | 1.938.051.959,00   | 1.605.606.882,00  | 82,85 | 1.362.071.265,00  |
| Kecamatan Tarik                                        | 1.792.433.201,00   | 1.289.287.820,00  | 71,93 | 1.389.061.716,00  |
| Kecamatan Taman                                        | 10.035.341.996,00  | 9.283.483.979,00  | 92,51 | 7.850.723.233,00  |
| Kecamatan Waru                                         | 2.354.055.844,00   | 2.034.159.919,00  | 86,41 | 1.697.476.378,00  |
| Kecamatan Gedangan                                     | 2.725.146.393,00   | 2.365.168.824,00  | 86,79 | 1.950.244.922,00  |
| Kecamatan Sedati                                       | 2.569.750.398,00   | 2.078.759.586,00  | 80,89 | 1.644.472.855,00  |
| Kecamatan Tanggulangin                                 | 2.219.886.220,00   | 1.693.624.395,00  | 76,29 | 1.526.225.395,00  |
| Kecamatan Tulangan                                     | 2.347.204.903,00   | 2.142.537.385,00  | 91,28 | 1.701.107.658,00  |
| Kecamatan Prambon                                      | 1.911.440.332,00   | 1.719.855.586,00  | 89,98 | 1.350.377.862,00  |
| Kecamatan Sukodono                                     | 2.780.802.087,00   | 2.440.646.542,50  | 87,77 | 1.976.846.817,00  |

| Nama OPD                          | Anggaran TA 2025            | Realisasi TA 2025           | %            | Realisasi TA 2024           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 22.554.388.178,00           | 16.659.634.482,00           | 73,86        | 8.067.838.842,00            |
|                                   | <b>2.073.392.534.605,00</b> | <b>1.883.020.460.459,29</b> | <b>90,82</b> | <b>1.690.376.003.896,45</b> |

Penjelasan tambahan terkait belanja barang dan jasa:

1. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 termasuk kedalam klasifikasi belanja barang dan jasa. Belanja tersebut dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b. penghargaan atas suatu prestasi;
  - c. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
  - g. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan belanja BOSREG yang bersumber dari APBN (DAK Non Fisik) dan BOSDA yang bersumber APBD. Pencatatan realisasi Belanja barang dan jasa BOSREG berdasarkan pada Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Atas SP3B tersebut telah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dan menjadi dasar pengakuan belanja pada LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
3. Pencatatan realisasi Belanja barang dan jasa BLUD berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran yang disusun BLUD RSUD dan Puskesmas. Atas LRA BLUD tersebut telah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan menjadi dasar pengakuan belanja pada LRA Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
4. Terdapat pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan dan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dirinci pada **Lampiran 4** yang merupakan bagian dari LKPD.

#### 5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

**Tabel 5. 124 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang**

| Uraian         | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Barang | 362.104.902.142,00 | 314.677.514.533,40 | 86,90 | 223.555.735.125,00 |

Nilai realisasi Belanja Barang pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp314.677.514.533,40 mengalami kenaikan sebesar Rp91.121.779.408,40 atau 28,96% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp223.555.735.125,00. Rincian Realisasi Belanja Barang disajikan secara rinci dalam **lampiran 5** yang merupakan bagian dari LKPD.

#### 5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

**Tabel 5. 125 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa**

| Uraian       | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Jasa | 648.374.246.090,00 | 585.186.030.811,00 | 90,25 | 509.397.832.850,05 |

Nilai realisasi Belanja Jasa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp585.186.030.811,00 mengalami penurunan sebesar Rp75.788.197.960,95 atau 12,95% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp509.397.832.850,05. Rincian Realisasi Belanja Jasa disajikan secara rinci dalam **lampiran 6** yang merupakan bagian dari LKPD.

#### 5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

**Tabel 5. 126 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan**

| Uraian               | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Pemeliharaan | 100.516.760.329,00 | 92.092.913.817,56 | 91,63 | 61.508.913.930,00 |

Nilai realisasi Belanja Pemeliharaan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp92.092.913.817,56 mengalami kenaikan sebesar 30.583.999.887,56 atau 33,21% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp61.508.913.930,00.

Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan disajikan secara rinci dalam **lampiran 7** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 127 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan**

| Uraian                                            | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          | 30.081.395.163,00         | 27.204.767.227,00        | 90,44        | 22.858.672.446,00        |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          | 8.311.984.853,00          | 7.827.002.819,56         | 94,17        | 5.376.597.860,00         |
| Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 59.790.380.313,00         | 54.813.035.517,00        | 91,68        | 32.875.567.794,00        |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya           | 1.145.000.000,00          | 1.103.280.740,00         | 96,36        | 24.625.000,00            |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud          | 1.188.000.000,00          | 1.144.827.514,00         | 96,37        | 373.450.830,00           |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>100.516.760.329,00</b> | <b>92.092.913.817,56</b> | <b>91,63</b> | <b>61.508.913.930,00</b> |

#### 5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

**Tabel 5. 128 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas**

| Uraian                   | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas | 67.520.971.789,00 | 59.440.203.225,00 | 88,03 | 95.363.921.190,00 |

Nilai realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp59.440.203.225,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.923.717.965,00 atau 60,44% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp95.352.421.190,00. Penurunan ini dikarenakan adanya himbauan efisiensi dari Pemerintah Pusat.

**Tabel 5. 129 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 67.520.971.789,00        | 59.440.203.225,00        | 88,03        | 94.563.921.190,00        |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 800.000.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>67.520.971.789,00</b> | <b>59.440.203.225,00</b> | <b>88,03</b> | <b>95.363.921.190,00</b> |

**Tabel 5. 130 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas**

| Uraian                                            | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 34.684.042.938,00        | 29.232.203.575,00        | 84,28        | 62.113.809.428,00        |
| Belanja Perjalanan Dinas Tetap                    | 914.355.000,00           | 894.170.000,00           | 97,79        | 1.061.005.000,00         |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 19.013.473.851,00        | 17.707.862.200,00        | 93,13        | 21.123.622.055,00        |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 898.800.000,00           | 851.124.430,00           | 94,70        | 1.787.033.381,00         |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 12.010.300.000,00        | 10.754.843.020,00        | 89,55        | 8.478.451.326,00         |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 800.000.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>67.520.971.789,00</b> | <b>59.440.203.225,00</b> | <b>88,03</b> | <b>95.363.921.190,00</b> |

#### 5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

**Tabel 5. 131 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

| Uraian                                                                               | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 113.360.128.400,00 | 111.249.092.500,00 | 98,14 | 115.747.125.650,00 |

Nilai realisasi Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat pada tahun anggaran 2025 sebesar 111.249.092.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.498.033.150,00 atau 4,04% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp115.747.125.650,00.

**Tabel 5. 132 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

| Uraian                                                                | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 113.053.878.400,00        | 110.966.364.300,00        | 98,15        | 115.602.208.000,00        |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 306.250.000,00            | 282.728.200,00            | 92,32        | 144.917.650,00            |
| <b>Jumlah</b>                                                         | <b>113.360.128.400,00</b> | <b>111.249.092.500,00</b> | <b>98,14</b> | <b>115.747.125.650,00</b> |

**Tabel 5. 133 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

| Uraian                                                             | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                            | 19.696.032.400,00         | 19.247.143.300,00         | 97,72        | 18.457.575.000,00         |
| Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                            | 4.585.000.000,00          | 4.336.125.000,00          | 94,57        | 5.560.000.000,00          |
| Belanja Beasiswa                                                   | 11.410.000.000,00         | 10.320.000.000,00         | 90,45        | 7.943.150.000,00          |
| Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan                    | 247.150.000,00            | 209.300.000,00            | 84,69        | 220.800.000,00            |
| Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)                   | 9.811.800.000,00          | 9.695.400.000,00          | 98,81        | 17.998.233.000,00         |
| Belanja uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain     | 53.136.000.000,00         | 53.043.500.000,00         | 99,83        | 52.998.000.000,00         |
| Belanja uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain     | 12.522.000.000,00         | 12.469.000.000,00         | 99,58        | 12.424.450.000,00         |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 1.645.896.000,00          | 1.645.896.000,00          | 100,00       | 0,00                      |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat                      | 306.250.000,00            | 282.728.200,00            | 92,32        | 144.917.650,00            |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>113.360.128.400,00</b> | <b>111.249.092.500,00</b> | <b>98,14</b> | <b>115.747.125.650,00</b> |

#### 5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS

**Tabel 5. 134 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS**

| Uraian                      | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Belanja Barang dan Jasa BOS | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 66.592.044.800,00 |

Dana BOS Daerah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 Rekening Belanja Barang dan Jasa BOS tidak lagi digunakan dan dirubah menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP.

Nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp66.592.044.800,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp66.592.044.800,00.

#### 5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOSP

**Tabel 5. 135 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP**

| Uraian                       | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Barang dan Jasa BOSP | 208.109.591.150,00 | 208.026.953.150,00 | 99,96 | 142.104.139.300,00 |

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan. Dana ini merupakan salah satu bagian dari Transfer ke Daerah. Ada 3 jenis Dana BOSP yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS Reguler, BOS Afirmasi, Bos Kinerja), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Pendidikan Kesetaraan).

Nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp208.026.953.150,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.922.813.850,00 atau 31,69% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp142.104.139.300,00.

**Tabel 5. 136 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP**

| Uraian                                                | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOS Reguler            | 204.834.679.650,00        | 204.756.001.650,00        | 99,96        | 138.797.472.300,00        |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOS Kinerja            | 2.900.500.000,00          | 2.900.500.000,00          | 100,00       | 2.997.500.000,00          |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOP PAUD Reguler       | 167.573.000,00            | 167.573.000,00            | 100,00       | 145.666.000,00            |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOP Kesetaraan Reguler | 206.838.500,00            | 202.878.500,00            | 98,09        | 118.455.000,00            |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 45.000.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>208.109.591.150,00</b> | <b>208.026.953.150,00</b> | <b>99,96</b> | <b>142.104.093.300,00</b> |

#### 5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

**Tabel 5. 137 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 16.638.105.000,00 | 16.387.630.061,00 | 98,49 | 19.404.129.769,00 |

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp16.387.630.061,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.016.499.708,00 atau 18,41% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp19.404.129.769,00.

**Tabel 5. 138 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**

| URAIAN                   | TOTAL BELANJA            |
|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Barang           | 42.623.500,00            |
| Belanja Jasa             | 8.596.606.561,00         |
| Belanja Perjalanan Dinas | 7.748.400.000,00         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>16.387.630.061,00</b> |

#### 5.1.2.1.2.9 Belanja Barang dan Jasa BLUD

**Tabel 5. 139 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD**

| Uraian                       | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Barang dan Jasa BLUD | 556.767.829.705,00 | 495.960.122.361,33 | 89,08 | 456.713.569.382,40 |

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Belanja barang dan jasa BLUD terdapat pada 4 SKPD di Kabupaten Sidoarjo yaitu Dinas Kesehatan, RSUD R.T. Notopuro, RSUD Sidoarjo Barat, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan.

Nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp495.960.122.361,33 mengalami kenaikan sebesar Rp39.246.552.978,93 atau 7,91% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp456.713.569.382,40.

**Tabel 5. 140 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD**

| SKPD                                                    | JUMLAH                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dinas Kesehatan                                         | 38.069.291.099,40         |
| RSUD R.T. Notopuro                                      | 432.376.674.155,93        |
| RSUD Sidoarjo Barat                                     | 20.505.157.309,00         |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                   | 3.936.586.777,00          |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | 1.072.413.020,00          |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>495.960.122.361,33</b> |

#### 5.1.2.1.3 Belanja Bunga

**Tabel 5. 141 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga**

| Uraian        | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Bunga | 3.000.000.000,00 | 2.580.053.896,65  | 86,00 | 345.719.188,92    |

Nilai realisasi Belanja Bunga pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.580.053.896,65 mengalami kenaikan sebesar Rp2.234.334.707,73 atau 86,60% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp345.719.188,92.

Belanja Bunga digunakan untuk Utang Pinjaman melalui BLUD oleh RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dengan PT. Bank Jatim sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 17 Mei 2025, memberikan fasilitas pinjaman Kredit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 17 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2026. Pinjaman dengan bunga pembayaran sebesar 7% per annum efektif floating rate.

#### 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Tabel 5. 142 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi

| Uraian          | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-----------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Subsidi | 5.040.000.000,00 | 2.955.285.939,00  | 58,64 | 1.767.853.335,00  |

Nilai realisasi Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.955.285.939,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.187.432.604,00 atau 40,18% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.767.853.335,00.

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah subsidi bunga yang diberikan sebagai insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, subsidi bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KURDA yang dilaksanakan oleh PT BPR Delta Artha (Persero) dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Skema suku bunga KURDA sebagai berikut :

1. Plafon kredit sampai dengan Rp10.000.000,00 beban bunga debitur sebesar 2% per tahun;
2. Plafon kredit diatas Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 beban bunga debitur sebesar 2% per tahun untuk periode 1-3 dan sebesar 3% untuk periode 4;
3. Plafon kredit diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 beban bunga debitur sebesar 3% per tahun;
4. Plafon kredit diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 beban bunga debitur sebesar 4% per tahun.

#### 5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Tabel 5. 143 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

| Uraian        | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|---------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Hibah | 277.433.120.433,00 | 273.391.805.661,44 | 98,54 | 362.111.796.853,00 |

Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Belanja Hibah diatur dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Nilai realisasi Belanja Hibah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp273.391.805.661,44 mengalami penurunan sebesar Rp88.719.991.191,56 atau 32,45% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp362.111.796.853,00. Rincian Realisasi Belanja Hibah berupa uang dan berupa barang disajikan secara rinci dalam **lampiran 8** dan **lampiran 9** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 144 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**

| Uraian                                                                                       | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                        | 41.512.357.189,00         | 41.256.108.551,00         | 99,38        | 111.714.687.103,00        |
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 26.203.069.244,00         | 22.838.100.780,44         | 87,16        | 42.856.946.779,00         |
| Belanja Hibah Dana BOS                                                                       | 76.827.294.000,00         | 76.813.758.000,00         | 99,98        | 150.463.441.000,00        |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                         | 10.861.860.000,00         | 10.861.860.000,00         | 100,00       | 10.329.902.000,00         |
| Belanja Hibah Dana BOSP                                                                      | 122.028.540.000,00        | 121.621.978.330,00        | 99,67        | 46.746.819.971,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                | <b>277.433.120.433,00</b> | <b>273.391.805.661,44</b> | <b>98,54</b> | <b>362.111.796.853,00</b> |

**Tabel 5. 145 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 41.512.357.189,00 | 41.256.108.551,00 | 99,38 | 111.714.687.103,00 |

Nilai realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp41.256.108.551,00 mengalami penurunan sebesar Rp70.458.578.552,00 atau 170,78% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp111.714.687.103,00.

**Tabel 5. 146 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

| Uraian                                       | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024         |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat   | 37.500.000.000,00        | 37.495.665.224,00        | 99,99        | 74.308.238.300,00         |
| Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 4.012.357.189,00         | 3.760.443.327,00         | 93,72        | 37.406.448.803,00         |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>41.512.357.189,00</b> | <b>41.256.108.551,00</b> | <b>99,38</b> | <b>111.714.687.103,00</b> |

**Tabel 5. 147 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

| Uraian                                                                                       | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 26.203.069.244,00 | 22.838.100.780,44 | 87,16 | 42.856.946.779,00 |

Nilai realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp22.838.100.780,44 mengalami penurunan sebesar Rp20.018.845.998,56 atau 87,66% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42.856.946.779,00.

**Tabel 5. 148 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

| Uraian                                                                                                                                          | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan | 22.575.000.000,00 | 19.276.105.787,44 | 85,39 | 13.737.377.442,00 |

| Uraian                                                                                                                  | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.858.000.000,00         | 1.794.133.178,00         | 96,56        | 25.960.661.728,00        |
| Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                            | 1.770.069.244,00         | 1.767.861.815,00         | 99,88        | 2.988.907.609,00         |
| Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 120.000.000,00           |
| Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 50.000.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                           | <b>26.203.069.244,00</b> | <b>22.838.100.780,44</b> | <b>87,16</b> | <b>42.856.946.779,00</b> |

**Tabel 5. 149 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOS**

| Uraian                 | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024  |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Belanja Hibah Dana BOS | 76.827.294.000,00 | 76.813.758.000,00 | 99,98 | 150.463.441.000,00 |

Nilai realisasi Belanja Hibah Dana BOS pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp76.813.758.000,00 mengalami penurunan sebesar 73.649.683.000,00 atau 95,88% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp150.463.441.000,00.

Belanja Hibah Dana BOS merupakan belanja hibah kepada sekolah-sekolah swasta.

**Tabel 5. 150 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

| Uraian                                               | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 10.861.860.000,00 | 10.861.860.000,00 | 100,00 | 10.329.902.000,00 |

Nilai realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.861.860.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp531.958.000,00 atau 4,90% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10.329.902.000,00. Hibah Bantuan Partai Politik hanya terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Tabel 5. 151 Daftar Penerima Hibah Bantuan Partai Politik**

| Nomor SK Bupati              | Nomor BAST            | Penerima Hibah                                | Nominal          |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2088/438.6.5/2025 | Partai Amanat Nasional (PAN)                  | 946.370.000,00   |
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2089/438.6.5/2025 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1.985.610.000,00 |
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2085/438.6.5/2025 | Partai Demokrat                               | 593.550.000,00   |
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2195/438.6.5/2025 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)      | 1.883.070.000,00 |
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2086/438.6.5/2025 | Partai Golongan Karya (GOLKAR)                | 936.900.000,00   |
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2084/438.6.5/2025 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)               | 646.200.000,00   |
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2090/438.6.5/2025 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)               | 2.987.350.000,00 |

| Nomor SK Bupati              | Nomor BAST            | Penerima Hibah                     | Nominal                  |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2087/438.6.5/2025 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM)  | 604.810.000,00           |
| 100.3.3.2/285/438.1.1.3/2025 | 200/2083/438.6.5/2025 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 278.000.000,00           |
| <b>JUMLAH</b>                |                       |                                    | <b>10.861.860.000,00</b> |

**Tabel 5. 152 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP**

| Uraian                  | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|
| Belanja Hibah Dana BOSP | 122.028.540.000,00 | 121.621.978.330,00 | 99,67 | 46.746.819.971,00 |

Nilai realisasi Belanja Hibah Dana BOSP pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp121.621.978.330,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.875.158.359,00 atau 61,56% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp46.746.819.971,00.

**Tabel 5. 153 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP**

| Uraian                                   | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024        |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Hibah Dana BOSP - BOS            | 77.416.410.000,00         | 77.410.122.600,00         | 99,99        | 1.635.262.600,00         |
| Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD       | 39.784.320.000,00         | 39.574.831.759,00         | 99,47        | 41.016.759.157,00        |
| Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan | 4.827.810.000,00          | 4.637.023.971,00          | 96,05        | 4.094.798.214,00         |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>122.028.540.000,00</b> | <b>121.621.978.330,00</b> | <b>99,67</b> | <b>46.746.819.971,00</b> |

#### 5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

**Tabel 5. 154 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**

| Uraian                 | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024  |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------|
| Belanja Bantuan Sosial | 107.094.145.000,00 | 91.508.186.500,00 | 85,45 | 102.968.015.000,00 |

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Nilai realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp91.508.186.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.459.828.500,00 atau 12,52% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp102.968.015.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan secara rinci dalam **lampiran 10** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 155 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**

| Uraian                                 | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 101.861.325.000,00 | 86.280.906.500,00 | 84,70 | 97.735.225.000,00 |

| Uraian                                                                                                   | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga                                                                   | 1.000.000.000,00          | 994.520.000,00           | 99,45        | 999.970.000,00            |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 4.232.820.000,00          | 4.232.760.000,00         | 100,00       | 4.232.820.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                                                                                            | <b>107.094.145.000,00</b> | <b>91.508.186.500,00</b> | <b>85,45</b> | <b>102.968.015.000,00</b> |

**Tabel 5. 156 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**

| Uraian                                 | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 101.861.325.000,00 | 91.508.186.500,00 | 85,45 | 97.735.225.000,00 |

Nilai realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp91.508.186.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.227.038.500,00 atau 6,80% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp97.735.225.000,00.

**Tabel 5. 157 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**

| Uraian                                                          | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu   | 92.861.325.000,00         | 77.882.985.000,00        | 83,87        | 84.964.000.000,00        |
| Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 9.000.000.000,00          | 8.397.921.500,00         | 93,31        | 12.771.225.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                   | <b>101.861.325.000,00</b> | <b>86.280.906.500,00</b> | <b>84,70</b> | <b>97.735.225.000,00</b> |

**Tabel 5. 158 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**

| Uraian                                 | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 1.000.000.000,00 | 994.520.000,00    | 99,45 | 999.970.000,00    |

Nilai realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp994.520.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.450.000,00 atau 0,55% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp999.970.000,00.

**Tabel 5. 159 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

| Uraian                                                                                                   | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 4.232.820.000,00 | 4.232.760.000,00  | 100,00 | 4.232.820.000,00  |

Nilai realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.232.760.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp60.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.232.820.000,00.

### 5.1.2.2 Belanja Modal

**Tabel 5. 160 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

| Uraian        | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|---------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| BELANJA MODAL | 906.290.705.142,00 | 683.337.397.730,82 | 75,40 | 668.077.999.318,00 |

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp683.337.397.730,82 mengalami kenaikan sebesar Rp15.259.398.412,82 atau 2,28% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp668.077.999.318,00

**Tabel 5. 161 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

| Uraian                                     | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Tanah                        | 52.043.827.186,00         | 23.250.256.678,00         | 44,67        | 822.965.280,00            |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 223.496.322.012,00        | 206.772.187.050,00        | 92,52        | 191.438.182.917,00        |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 357.334.751.113,00        | 252.754.816.360,50        | 70,73        | 193.594.456.481,00        |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 272.050.633.991,00        | 199.730.563.281,32        | 73,42        | 281.538.154.853,00        |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 599.320.840,00            | 584.702.457,00            | 97,56        | 128.568.760,00            |
| Belanja Modal Aset Lainnya                 | 765.850.000,00            | 244.871.904,00            | 31,97        | 555.671.027,00            |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>906.290.705.142,00</b> | <b>683.337.397.730,82</b> | <b>75,40</b> | <b>668.077.999.318,00</b> |

Terdapat Pekerjaan Fisik yang tidak dapat dilaksanakan yang dianggarkan pada belanja modal yang dirinci pada **Lampiran 11** yang merupakan bagian dari LKPD.

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

**Tabel 5. 162 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah**

| Uraian              | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Tanah | 52.043.827.186,00 | 23.250.256.678,00 | 44,67 | 822.965.280,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp23.250.256.678,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.427.291.398,00 atau 2.725,18% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp822.965.280,00. Terdapat Belanja Modal Tanah untuk Jalan yang tidak terealisasi yaitu pembebasan lahan berupa tanah makam milik Desa Waru dikarenakan masih terdapat kendala administrasi kelengkapan dokumen

**Tabel 5. 163 Rincian Belanja Modal Tanah**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga | 223.827.186,00    | 214.542.452,00    | 95,85 | 0,00              |
| Belanja Modal Tanah untuk Jalan       | 40.000.000.000,00 | 11.836.826.134,00 | 29,59 | 822.965.280,00    |

| Uraian                          | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024     |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| Belanja Modal Tanah untuk Makam | 270.000.000,00           | 248.818.092,00           | 92,15        | 0,00                  |
| Belanja Modal Tanah BLUD        | 11.550.000.000,00        | 10.950.070.000,00        | 94,81        | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>52.043.827.186,00</b> | <b>23.250.256.678,00</b> | <b>44,67</b> | <b>822.965.280,00</b> |

Rincian dari Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut :

1. Belanja modal tanah lapangan olahraga terdapat di Kecamatan Jabon merupakan Pembangunan pagar pembatas lapangan;
2. Belanja modal tanah untuk makam merupakan peninggian tanah makam di Kelurahan Tambak Kemerakan Kecamatan Krian dan Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman;
3. Belanja modal tanah untuk jalan merupakan pembebasan lahan di Desa Waru untuk Pembangunan jalan frontage dan pengurusan penerbitan dokumen tanah di Desa Banjarkemantren oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Belanja modal tanah BLUD merupakan pengadaan tanah oleh RSUD R.T. Notopuro.

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Mesin

**Tabel 5. 164 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

| Uraian Pendapatan                 | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 223.496.322.012,00 | 206.772.187.050,00 | 92,52 | 191.438.182.917,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp206.772.187.050,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.334.004.133,00 atau 92,52% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp191.438.182.917,00.

**Tabel 5. 165 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

| Uraian                                                 | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Besar                               | 19.133.585.610,00 | 16.929.112.286,00 | 88,48 | 1.715.095.500,00  |
| Belanja Modal Alat Angkutan                            | 21.313.008.791,00 | 18.871.208.630,00 | 88,54 | 9.726.821.066,00  |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur               | 134.676.598,00    | 123.211.500,00    | 91,49 | 3.140.411.000,00  |
| Belanja Modal Alat Pertanian                           | 935.851.665,00    | 838.375.483,00    | 89,58 | 157.700.000,00    |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga             | 15.131.162.614,00 | 13.342.656.132,00 | 88,18 | 4.909.331.552,00  |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar    | 4.322.043.699,00  | 3.765.037.755,00  | 87,11 | 996.648.200,00    |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan            | 12.513.459.167,00 | 11.924.834.207,00 | 95,30 | 59.727.211.238,00 |
| Belanja Modal Alat Laboratorium                        | 7.765.438.523,00  | 7.446.838.145,00  | 95,90 | 2.160.451.438,00  |
| Belanja Modal Komputer                                 | 18.793.304.720,00 | 17.406.108.334,00 | 92,62 | 8.456.764.808,00  |
| Belanja Modal Alat Pengeboran                          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 3.691.860,00      |
| Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 236.000.000,00    |
| Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                   | 59.118.600,00     | 52.555.520,00     | 88,90 | 110.695.000,00    |
| Belanja Modal Alat Peraga                              | 75.000.000,00     | 74.786.250,00     | 99,72 | 0,00              |
| Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi                | 123.410.000,00    | 123.228.315,00    | 99,85 | 0,00              |

| Uraian                                 | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Rambu-Rambu              | 5.088.876.000,00          | 4.642.411.660,00          | 91,23        | 246.700.465,00            |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga       | 1.529.280.520,00          | 1.513.909.892,00          | 98,99        | 58.120.000,00             |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 34.707.545.900,00         |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP | 33.099.687.850,00         | 33.093.184.250,00         | 99,98        | 47.774.000,00             |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 83.478.417.655,00         | 76.624.728.691,00         | 91,79        | 65.037.220.890,00         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>223.496.322.012,00</b> | <b>206.772.187.050,00</b> | <b>92,52</b> | <b>191.438.182.917,00</b> |

#### 5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar

**Tabel 5. 166 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar**

| Uraian                   | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Besar | 19.133.585.610,00 | 16.929.112.286,00 | 88,48 | 1.715.095.500,00  |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Besar pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp16.929.112.286,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.214.016.786,00 atau 887,07% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.715.095.500,00.

**Tabel 5. 167 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar**

| Uraian                         | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024       |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Alat Besar Darat | 12.300.572.699,00        | 10.344.948.005,00        | 84,10        | 927.200.000,00          |
| Belanja Modal Alat Bantu       | 6.833.012.911,00         | 6.584.164.281,00         | 96,36        | 787.895.500,00          |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>19.133.585.610,00</b> | <b>16.929.112.286,00</b> | <b>88,48</b> | <b>1.715.095.500,00</b> |

**Tabel 5. 168 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024       |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Excavator               | 2.396.123.392,00         | 2.059.108.000,00         | 85,93        | 0,00                    |
| Belanja Modal Compacting Equipment    | 498.298.203,00           | 320.500.005,00           | 64,32        | 0,00                    |
| Belanja Modal Loader                  | 7.424.179.504,00         | 5.990.040.000,00         | 80,68        | 868.000.000,00          |
| Belanja Modal Mesin Proses            | 1.981.971.600,00         | 1.975.300.000,00         | 99,66        | 59.200.000,00           |
| Belanja Modal Compressor              | 3.019.999,00             | 2.900.000,00             | 96,03        | 0,00                    |
| Belanja Modal Electric Generating Set | 1.424.073.890,00         | 1.390.830.000,00         | 97,67        | 444.000.000,00          |
| Belanja Modal Pompa                   | 5.400.924.022,00         | 5.186.234.281,00         | 96,02        | 343.895.500,00          |
| Belanja Modal Mesin Bor               | 4.995.000,00             | 4.200.000,00             | 84,08        | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>19.133.585.610,00</b> | <b>16.929.112.286,00</b> | <b>88,48</b> | <b>1.715.095.500,00</b> |

**Tabel 5. 169 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan**

| Uraian                      | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Angkutan | 21.313.008.791,00 | 18.871.208.630,00 | 88,54 | 9.726.821.066,00  |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Angkutan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp18.871.208.630,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.144.387.564,00 atau 94,01% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9.726.821.066,00.

**Tabel 5. 170 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan**

| Uraian                                         | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024       |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor     | 21.310.514.621,00        | 18.870.383.630,00        | 88,55        | 9.430.321.066,00        |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 2.494.170,00             | 825.000,00               | 33,08        | 296.500.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>21.313.008.791,00</b> | <b>18.871.208.630,00</b> | <b>88,54</b> | <b>9.726.821.066,00</b> |

**Tabel 5. 171 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan**

| Uraian                                                 | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan      | 5.368.254.000,00         | 4.813.500.000,00         | 89,67        | 3.227.400.000,00        |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang       | 1.459.089.000,00         | 1.167.885.143,00         | 80,04        | 2.145.500.000,00        |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua            | 11.122.399.911,00        | 9.568.286.987,00         | 86,03        | 426.471.066,00          |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga           | 259.074.710,00           | 238.157.500,00           | 91,93        | 90.600.000,00           |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                | 152.847.000,00           | 147.630.000,00           | 96,59        | 3.540.350.000,00        |
| Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang   | 2.948.850.000,00         | 2.934.924.000,00         | 99,53        | 98.500.000,00           |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya | 2.494.170,00             | 825.000,00               | 33,08        | 198.000.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>21.313.008.791,00</b> | <b>18.871.208.630,00</b> | <b>88,54</b> | <b>9.726.821.066,00</b> |

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

**Tabel 5. 172 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**

| Uraian                                   | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 134.676.598,00   | 123.211.500,00    | 91,49 | 3.140.411.000,00  |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp123.211.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.017.199.500,00 atau 96,08% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.140.411.000,00.

**Tabel 5. 173 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**

| Uraian                                  | Anggaran TA 2025      | Realisasi TA 2025     | %            | Realisasi TA 2024       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin     | 52.106.710,00         | 48.841.500,00         | 93,73        | 54.011.000,00           |
| Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | 12.647.895,00         | 12.487.500,00         | 98,73        | 18.200.000,00           |
| Belanja Modal Alat Ukur                 | 69.921.993,00         | 61.882.500,00         | 88,50        | 3.068.200.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>134.676.598,00</b> | <b>123.211.500,00</b> | <b>91,49</b> | <b>3.140.411.000,00</b> |

**Tabel 5. 174 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**

| Uraian                                          | Anggaran TA 2025      | Realisasi TA 2025     | %            | Realisasi TA 2024       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik          | 16.201.560,00         | 16.095.000,00         | 99,34        | 18.686.000,00           |
| Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 17.675.000,00           |
| Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya     | 35.905.150,00         | 32.746.500,00         | 91,20        | 17.650.000,00           |
| Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 18.200.000,00           |
| Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya | 12.647.895,00         | 12.487.500,00         | 98,73        | 0,00                    |
| Belanja Modal Alat Ukur / Pembanding            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 780.000,00              |
| Belanja Modal Alat Ukur Lain - Lain             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 64.200.000,00           |
| Belanja Modal Alat Timbangan / Biara            | 9.936.942,00          | 9.546.000,00          | 96,07        | 1.750.000,00            |
| Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 1.602.170.000,00        |
| Belanja Modal Alat Ukur Lainnya                 | 59.985.051,00         | 52.336.500,00         | 87,25        | 1.399.300.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>134.676.598,00</b> | <b>123.211.500,00</b> | <b>91,49</b> | <b>3.140.411.000,00</b> |

### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Alat Pertanian

**Tabel 5. 175 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian**

| Uraian                       | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Pertanian | 935.851.665,00   | 838.375.483,00    | 89,58 | 157.700.000,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Pertanian pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp838.375.483,00 mengalami kenaikan sebesar Rp680. 675.483,00 atau 431,63% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp157.700.000,00.

**Tabel 5. 176 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian**

| Uraian                                                  | Anggaran TA 2025      | Realisasi TA 2025     | %            | Realisasi TA 2024     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman         | 488.428.375,00        | 440.373.338,00        | 90,16        | 0,00                  |
| Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman / Ikan / Ternak | 156.225.890,00        | 144.172.150,00        | 92,28        | 61.700.000,00         |
| Belanja Modal Alat Produksi Perikanan                   | 184.637.400,00        | 169.830.000,00        | 91,98        | 0,00                  |
| Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya                   | 106.560.000,00        | 83.999.995,00         | 78,83        | 0,00                  |
| Belanja Modal Alat - Alat Peternakan                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 96.000.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>935.851.665,00</b> | <b>838.375.483,00</b> | <b>89,58</b> | <b>157.700.000,00</b> |

#### 5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

**Tabel 5. 177 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**

| Uraian                                     | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 15.131.162.614,00 | 13.342.656.132,00 | 88,18 | 4.909.331.552,00  |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp13.342.656.132,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.433.324.580,00 atau 171,78% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.909.331.552,00.

**Tabel 5. 178 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**

| Uraian                                           | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Alat Kantor                        | 3.470.896.038,00         | 3.206.412.130,00         | 92,38        | 1.369.098.255,00        |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga                  | 11.364.959.884,00        | 9.867.135.621,00         | 86,82        | 3.512.433.297,00        |
| Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 295.306.692,00           | 269.108.381,00           | 91,13        | 27.800.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                    | <b>15.131.162.614,00</b> | <b>13.342.656.132,00</b> | <b>88,18</b> | <b>4.909.331.552,00</b> |

**Tabel 5. 179 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**

| Uraian                                             | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Mesin Ketik                          | 4.245.750,00             | 1.529.580,00             | 36,03        | 0,00                    |
| Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor   | 1.038.059.947,00         | 914.286.289,00           | 88,08        | 271.950.000,00          |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                  | 2.428.590.341,00         | 2.290.596.261,00         | 94,32        | 1.097.148.255,00        |
| Belanja Modal Mebel                                | 5.286.961.119,00         | 4.332.625.690,00         | 81,95        | 1.486.188.616,00        |
| Belanja Modal Alat Pembersih                       | 37.624.160,00            | 31.612.500,00            | 84,02        | 58.700.000,00           |
| Belanja Modal Alat Pendingin                       | 2.782.068.095,00         | 2.571.180.229,00         | 92,42        | 717.439.200,00          |
| Belanja Modal Alat Dapur                           | 93.477.856,00            | 84.941.706,00            | 90,87        | 16.482.171,00           |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 3.040.553.054,00         | 2.733.903.246,00         | 89,91        | 1.126.853.310,00        |
| Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran               | 124.275.600,00           | 112.872.250,00           | 90,82        | 106.770.000,00          |
| Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                   | 42.991.632,00            | 42.328.000,00            | 98,46        | 0,00                    |
| Belanja Modal Meja Rapat Pejabat                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 9.500.000,00            |
| Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                  | 252.315.060,00           | 226.780.381,00           | 89,88        | 18.300.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>15.131.162.614,00</b> | <b>13.342.656.132,00</b> | <b>88,18</b> | <b>4.909.331.552,00</b> |

#### 5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

**Tabel 5. 180 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**

| Uraian                                              | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 4.322.043.699,00 | 3.765.037.755,00  | 87,11 | 996.648.200,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.765.037.755,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.768.389.555,00 atau 277,77% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp996.648.200,00.

| <b>Uraian</b>                    | <b>Anggaran TA 2025</b> | <b>Realisasi TA 2025</b> | <b>%</b>     | <b>Realisasi TA 2024</b> |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Modal Alat Studio        | 2.828.204.179,00        | 2.475.776.872,00         | 87,54        | 665.944.000,00           |
| Belanja Modal Alat Komunikasi    | 831.429.260,00          | 744.245.233,00           | 89,51        | 330.704.200,00           |
| Belanja Modal Peralatan Pemancar | 662.410.260,00          | 545.015.650,00           | 82,28        | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>4.322.043.699,00</b> | <b>3.765.037.755,00</b>  | <b>87,11</b> | <b>996.648.200,00</b>    |

| <b>Uraian</b>                                     | <b>Anggaran TA 2025</b> | <b>Realisasi TA 2025</b> | <b>%</b>     | <b>Realisasi TA 2024</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Modal Peralatan Studio Audio              | 935.087.690,00          | 754.712.709,00           | 80,71        | 285.832.000,00           |
| Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film     | 1.891.166.489,00        | 1.721.064.163,00         | 91,01        | 164.412.000,00           |
| Belanja Modal Alat Studio Lainnya                 | 1.950.000,00            | 0,00                     | 0,00         | 215.700.000,00           |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone           | 235.308.270,00          | 195.904.230,00           | 83,25        | 161.954.200,00           |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF           | 165.182.100,00          | 137.841.003,00           | 83,45        | 168.750.000,00           |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial              | 390.350.000,00          | 380.000.000,00           | 97,35        | 0,00                     |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus              | 19.500.000,00           | 15.000.000,00            | 76,92        | 0,00                     |
| Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya             | 21.088.890,00           | 15.500.000,00            | 73,50        | 0,00                     |
| Belanja Modal Peralatan Translator UHF/UHF        | 100.122.000,00          | 78.765.000,00            | 78,67        | 0,00                     |
| Belanja Modal Peralatan Translator UHF/VHF        | 324.475.200,00          | 291.758.650,00           | 89,92        | 0,00                     |
| Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF | 222.000.000,00          | 174.492.000,00           | 78,60        | 0,00                     |
| Belanja Modal Sumber Tenaga                       | 15.813.060,00           | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>4.322.043.699,00</b> | <b>3.765.037.755,00</b>  | <b>87,11</b> | <b>996.648.200,00</b>    |

#### 5.1.2.2.6 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

| <b>Uraian</b>                               | <b>Anggaran TA 2025</b> | <b>Realisasi TA 2025</b> | <b>%</b> | <b>Realisasi TA 2024</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 12.513.459.167,00       | 11.924.834.207,00        | 95,30    | 59.727.211.238,00        |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.924.834.207,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.802.377.031,00 atau 80,03% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp59.727.211.238,00.

**Tabel 5. 184 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**

| Uraian                                                        | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum                            | 10.748.948.492,00        | 10.240.615.924,00        | 95,27        | 29.985.386.684,00        |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi                            | 477.151.438,00           | 474.432.000,00           | 99,43        | 1.088.945.794,00         |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah                           | 1.002.000,00             | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 47.171.479,00            | 44.455.531,00            | 94,24        | 0,00                     |
| Belanja Modal Alat Kedokteran THT                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 3.003.810.000,00         |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Mata                            | 1.180.998.000,00         | 1.117.989.352,00         | 94,66        | 1.942.500.000,00         |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1.088.347.000,00         |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Anak                            | 58.187.758,00            | 47.341.400,00            | 81,36        | 124.120.160,00           |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 990.167.700,00           |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 12.911.000.000,00        |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 40.975.000,00            |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1.267.458.900,00         |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 670.000.000,00           |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 6.614.500.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>12.513.459.167,00</b> | <b>11.924.834.207,00</b> | <b>95,30</b> | <b>59.727.211.238,00</b> |

#### 5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Laboratorium

**Tabel 5. 185 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium**

| Uraian                          | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Laboratorium | 7.765.438.523,00 | 7.446.838.145,00  | 95,90 | 2.160.451.438,00  |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.446.838.145,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.286.386.707,00 atau 244,69% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.160.451.438,00.

**Tabel 5. 186 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium**

| Uraian                                       | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Laboratorium Umum         | 3.829.917.923,00 | 3.733.734.145,00  | 97,49 | 2.151.151.438,00  |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi | 3.779.027.000,00 | 3.570.000.000,00  | 94,47 | 0,00              |
| Belanja Modal Alat Laboratorium Lain         | 0,00             | 0,00              | 0,00  | 9.300.000,00      |

| Uraian                            | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %            | Realisasi TA 2024       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal System/Power Supply | 156.493.600,00          | 143.104.000,00          | 91,44        | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>7.765.438.523,00</b> | <b>7.446.838.145,00</b> | <b>95,90</b> | <b>2.160.451.438,00</b> |

#### 5.1.2.2.8 Belanja Modal Komputer

**Tabel 5. 187 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer**

| Uraian                 | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Komputer | 18.793.304.720,00 | 17.406.108.334,00 | 92,62 | 8.456.764.808,00  |

Nilai realisasi Belanja Modal Komputer pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp17.406.108.334,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.949.343.526,00 atau 105,82% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8.456.764.808,00.

**Tabel 5. 188 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024       |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Komputer Unit      | 10.699.188.588,00        | 9.802.780.638,00         | 91,62        | 3.826.290.008,00        |
| Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.094.116.132,00         | 7.603.327.696,00         | 93,94        | 4.630.474.800,00        |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>18.793.304.720,00</b> | <b>17.406.108.334,00</b> | <b>92,62</b> | <b>8.456.764.808,00</b> |

**Tabel 5. 189 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer**

| Uraian                                    | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024       |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Komputer Jaringan           | 709.588.000,00           | 700.840.000,00           | 98,77        | 937.350.000,00          |
| Belanja Modal Personal Computer           | 9.989.600.588,00         | 9.101.940.638,00         | 91,11        | 2.888.940.008,00        |
| Belanja Modal Peralatan Mainframe         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 1.891.610.800,00        |
| Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 2.606.769.284,00         | 2.301.782.124,00         | 88,30        | 1.437.787.000,00        |
| Belanja Modal Peralatan Jaringan          | 5.172.087.898,00         | 5.014.356.861,00         | 96,95        | 1.097.257.000,00        |
| Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya  | 315.258.950,00           | 287.188.711,00           | 91,10        | 203.820.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>18.793.304.720,00</b> | <b>17.406.108.334,00</b> | <b>92,62</b> | <b>8.456.764.808,00</b> |

#### 5.1.2.2.9 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

**Tabel 5. 190 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**

| Uraian Pendapatan                    | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 59.118.600,00    | 52.555.520,00     | 88,90 | 110.695.000,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp52.555.520,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.139.480,00 atau 52,52% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp110.695.000,00.

**Tabel 5. 191 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**

| Uraian                     | Anggaran TA 2025     | Realisasi TA 2025    | %            | Realisasi TA 2024       |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Alat Deteksi | 5.172.600,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.826.290.008,00        |
| Belanja Modal Alat SAR     | 53.946.000,00        | 52.555.520,00        | 97,42        | 4.630.474.800,00        |
| <b>Jumlah</b>              | <b>59.118.600,00</b> | <b>52.555.520,00</b> | <b>88,90</b> | <b>8.456.764.808,00</b> |

**5.1.2.2.10 Belanja Modal Alat Peraga****Tabel 5. 192 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengeboran**

| Uraian Pendapatan         | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Alat Peraga | 75.000.000,00    | 74.786.250,00     | 99,72 | 0,00              |

Nilai realisasi Belanja Modal Alat Peraga pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp74.786.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.786.250,00 jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

**5.1.2.2.11 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi****Tabel 5. 193 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi**

| Uraian Pendapatan                       | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi | 123.410.000,00   | 123.228.315,00    | 99,85 | 0,00              |

Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp123.228.315,00 mengalami kenaikan sebesar Rp123.228.315,00 jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

**5.1.2.2.12 Belanja Modal Rambu-Rambu****Tabel 5. 194 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu**

| Uraian                    | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Rambu-Rambu | 5.088.876.000,00 | 4.642.411.660,00  | 91,23 | 246.700.465,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Rambu - Rambu pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.642.411.660,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.395.711.195,00 jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp246.700.465,00.

**Tabel 5. 195 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu**

| Uraian                                                | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %            | Realisasi TA 2024     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Belanja Modal Rambu Bersuar                           | 2.844.318.000,00        | 2.734.673.201,00        | 96,15        | 0,00                  |
| Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar                     | 911.080.000,00          | 750.344.460,00          | 82,36        | 4.200.465,00          |
| Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 1.333.478.000,00        | 1.157.393.999,00        | 86,80        | 242.500.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>5.088.876.000,00</b> | <b>4.642.411.660,00</b> | <b>91,23</b> | <b>246.700.465,00</b> |

#### 5.1.2.2.13 Belanja Modal Peralatan Olahraga

**Tabel 5. 196 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Peralatan Olahraga | 1.529.280.520,00 | 1.513.909.892,00  | 98,99 | 58.120.000,00     |

Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.513.909.892,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.455.789.892,00 jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp58.120.000,00

**Tabel 5. 197 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga**

| Uraian                                   | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %            | Realisasi TA 2024    |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| Belanja Modal Peralatan Permainan        | 1.084.994.520,00        | 1.075.937.192,00        | 99,17        | 10.730.000,00        |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | 444.286.000,00          | 437.972.700,00          | 98,58        | 47.390.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>1.529.280.520,00</b> | <b>1.513.909.892,00</b> | <b>98,99</b> | <b>58.120.000,00</b> |

#### 5.1.2.2.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

**Tabel 5. 198 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 34.707.545.900,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.707.545.900,00 jika dibandingkan tahun 2024.

#### 5.1.2.2.15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP

**Tabel 5. 199 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**

| Uraian Pendapatan                      | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP | 33.099.687.850,00 | 33.093.184.250,00 | 99,98 | 44.520.000,00     |

Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp33.093.184.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.048.664.250,00 jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp44.520.000,00

**Tabel 5. 200 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP**

| Uraian                                                  | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS              | 32.967.009.350,00        | 32.962.055.750,00        | 99,98        | 0,00                 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP - BOP PAUD       | 43.567.000,00            | 43.567.000,00            | 100,00       | 41.520.000,00        |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP - BOP Kesetaraan | 89.111.500,00            | 87.561.500,00            | 98,26        | 3.000.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>33.099.687.850,00</b> | <b>33.093.184.250,00</b> | <b>99,98</b> | <b>44.520.000,00</b> |

#### 5.1.2.2.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

**Tabel 5. 201 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**

| Uraian                                 | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 83.478.417.655,00 | 76.624.728.691,00 | 91,79 | 65.037.220.890,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp76.624.728.691,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.587.507.801,00 atau 17,82% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp33.147.381.164,00.

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**Tabel 5. 202 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| Uraian                            | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 357.334.751.113,00 | 252.754.816.360,50 | 70,73 | 193.594.456.481,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp252.754.816.360,50 mengalami kenaikan sebesar Rp59.160.359.879,50 atau 30,56% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp193.594.456.481,00. Berikut rincian belanja modal gedung dan bangunan:

**Tabel 5. 203 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| Uraian                                   | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Bangunan Gedung            | 276.736.952.991,00        | 179.435.656.189,22        | 64,84        | 149.444.425.254,00        |
| Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti | 4.430.528.518,00          | 4.119.347.271,00          | 92,98        | 1.735.829.539,00          |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD   | 76.167.269.604,00         | 69.199.812.900,28         | 90,85        | 42.414.201.688,00         |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>357.334.751.113,00</b> | <b>252.754.816.360,50</b> | <b>70,73</b> | <b>193.594.456.481,00</b> |

#### 5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

**Tabel 5. 204 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung**

| Uraian                        | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Modal Bangunan Gedung | 276.736.952.991,00 | 179.435.656.189,22 | 64,84 | 149.444.425.254,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp179.435.656.189,22 mengalami kenaikan sebesar Rp29.991.230.935,22 atau 20,07% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp149.444.425.254,00. Berikut rincian realisasi belanja modal bangunan gedung:

**Tabel 5. 205 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung**

| Uraian                               | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 32.271.079.923, 00 | 28.712.641.554,11 | 88,97 | 9.643.323.297,00  |
| Belanja Modal Bangunan Gudang        | 1.658.483.500,00   | 1.415.008.839,62  | 85,32 | 0,00              |

| Uraian                                                     | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi                    | 750.000.000,00            | 645.615.186,00            | 86,08        | 116.494.545,00            |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium                 | 2.827.726,00              | 2.827.726,00              | 100,00       | 441.589.276,00            |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan                           | 78.421.086.782,00         | 25.285.110.037,00         | 32,24        | 73.921.222.102,00         |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah                | 2.779.706.932,00          | 2.717.518.976,86          | 97,76        | 83.296.948,00             |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan             | 147.595.680,00            | 144.457.496,00            | 97,87        | 140.881.107,00            |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan            | 103.333.569.491,00        | 79.086.876.769,29         | 76,54        | 46.960.399.160,00         |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga              | 7.460.316.662,00          | 2.402.136.229,00          | 32,20        | 474.118.451,00            |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar | 6.596.912.816,00          | 5.636.862.792,34          | 85,45        | 5.973.520.660,00          |
| Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga               | 850.037.600,00            | 669.182.552,00            | 78,72        | 94.839.137,00             |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara   | 512.485.000,00            | 492.794.900,00            | 96,16        | 0,00                      |
| Belanja Modal Bangunan Terbuka                             | 150.000.000,00            | 136.052.845,00            | 90,70        | 0,00                      |
| Belanja Modal Bangunan Industri                            | 5.080.000.000,00          | 4.367.543.769,00          | 85,98        | 3.905.825.858,00          |
| Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan                | 761.587.000,00            | 738.826.088,00            | 97,01        | 0,00                      |
| Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum                      | 466.000.000,00            | 293.379.595,00            | 62,96        | 0,00                      |
| Belanja Modal Bangunan Parkir                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 9.411.839,00              |
| Belanja Modal Taman                                        | 33.859.899.966,00         | 26.555.638.393,00         | 78,43        | 7.679.502.874,00          |
| Belanja Modal Rumah Negara Golongan I                      | 1.635.363.913,00          | 133.182.441,00            | 8,14         | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>276.736.952.991,00</b> | <b>179.435.656.189,22</b> | <b>64,84</b> | <b>149.444.425.254,00</b> |

#### 5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

**Tabel 5. 206 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**

| Uraian                                   | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti | 4.430.528.518,00 | 4.119.347.271,00  | 92,98 | 1.735.829.539,00  |

Nilai realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.119.347.271,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.383.517.732,00 atau 137,31% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.735.829.539,00.

**Tabel 5. 207 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**

| Uraian                                     | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Pilar / Tugu / Tanda Lainnya | 270.000.000,00   | 268.027.500,00    | 99,27 | 420.900.000,00    |
| Belanja Modal Pagar                        | 4.027.922.879,00 | 3.727.182.556,00  | 92,53 | 1.171.905.147,00  |

| Uraian                                   | Anggaran TA 2025        | Realisasi TA 2025       | %            | Realisasi TA 2024       |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Belanja Modal Tugu / Tanda Batas Lainnya | 132.605.639,00          | 124.137.215,00          | 93,61        | 143.024.392,00          |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>4.430.528.518,00</b> | <b>4.119.347.271,00</b> | <b>92,98</b> | <b>1.735.829.539,00</b> |

#### 5.1.2.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

| Tabel 5. 208 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD |                   |                   |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Uraian                                                                     | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD                                     | 76.167.269.604,00 | 69.199.812.900,28 | 90,85 | 42.414.201.688,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp69.199.812.900,28 mengalami kenaikan sebesar Rp26.785.611.212,28 atau 63,15% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42.414.201.688,00.

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

| Tabel 5. 209 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |                    |                    |       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Uraian                                                                         | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                     | 272.050.633.991,00 | 199.730.563.281,32 | 73,42 | 281.538.154.853,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp199.730.563.281,32 mengalami penurunan sebesar Rp81.807.591.571,68 atau 29,06% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp281.538.154.853,00.

| Tabel 5. 210 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |                           |                           |              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Uraian                                                                                 | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                                       | 186.156.031.342,00        | 129.226.272.714,00        | 69,42        | 241.023.514.115,00        |
| Belanja Modal Bangunan Air                                                             | 45.272.699.633,00         | 37.264.445.007,00         | 82,31        | 16.723.001.940,00         |
| Belanja Modal Instalasi                                                                | 565.580.000,00            | 540.276.633,00            | 95,53        | 347.231.132,00            |
| Belanja Modal Jaringan                                                                 | 37.615.923.016,00         | 31.740.084.202,32         | 84,38        | 22.131.490.231,00         |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD                                        | 2.440.400.000,00          | 959.484.725,00            | 39,32        | 1.312.917.435,00          |
| <b>Jumlah</b>                                                                          | <b>272.050.633.991,00</b> | <b>199.730.563.281,32</b> | <b>73,42</b> | <b>281.538.154.853,00</b> |

#### 5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

| Tabel 5. 211 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan |                    |                    |       |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Uraian                                                               | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
| Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                     | 186.156.031.342,00 | 129.226.272.714,00 | 69,42 | 241.023.514.115,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp129.226.272.714,00 mengalami penurunan sebesar Rp111.797.241.401,00 atau 46,38% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp241.023.514.115,00.

**Tabel 5. 212 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan**

| Uraian                 | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Jalan    | 160.592.074.531,00        | 125.159.633.769,00        | 77,94        | 231.502.213.054,00        |
| Belanja Modal Jembatan | 25.563.956.811,00         | 4.066.638.945,00          | 15,91        | 9.521.301.061,00          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>186.156.031.342,00</b> | <b>129.226.272.714,00</b> | <b>69,42</b> | <b>241.023.514.115,00</b> |

**Tabel 5. 213 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan**

| Uraian                                      | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Modal Jalan Kabupaten               | 144.026.240.906,00        | 111.064.972.263,00        | 77,11        | 220.228.253.678,00        |
| Belanja Modal Jalan Desa                    | 2.484.285.241,00          | 2.142.951.866,00          | 86,26        | 4.434.218.943,00          |
| Belanja Modal Jalan Lainnya                 | 14.081.548.384,00         | 11.951.709.640,00         | 84,87        | 6.839.740.433,00          |
| Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 25.213.956.811,00         | 4.047.989.303,00          | 16,05        | 9.518.966.749,00          |
| Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 557.886,00                |
| Belanja Modal Jembatan Penyeberangan        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 1.776.426,00              |
| Belanja Modal Jembatan Lainnya              | 350.000.000,00            | 18.649.642,00             | 5,33         | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                               | <b>186.156.031.342,00</b> | <b>129.226.272.714,00</b> | <b>69,42</b> | <b>241.023.514.115,00</b> |

#### 5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air

**Tabel 5. 214 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air**

| Uraian                     | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Bangunan Air | 45.272.699.633,00 | 37.264.445.007,00 | 82,31 | 16.723.001.940,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Bangunan Air pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp37.264.445.007,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.541.443.067,00 atau 122,83% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp16.723.001.940,00.

**Tabel 5. 215 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air**

| Uraian                                                                          | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Modal Bangunan Air Irigasi                                              | 4.932.564.739,00         | 4.606.491.194,00         | 93,39        | 1.965.954.580,00         |
| Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut                                   | 7.861.773.427,00         | 7.364.212.721,00         | 93,67        | 5.021.264.376,00         |
| Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 32.478.361.467,00        | 25.293.741.092,00        | 77,88        | 9.735.782.984,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>45.272.699.633,00</b> | <b>37.264.445.007,00</b> | <b>82,31</b> | <b>16.723.001.940,00</b> |

#### 5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi

**Tabel 5. 216 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi**

| Uraian                  | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Instalasi | 565.580.000,00   | 540.276.633,00    | 95,53 | 347.231.132,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Instalasi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp540.276.633,00 mengalami kenaikan sebesar Rp193.045.501,00 atau 55,60% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp347.231.132,00.

**Tabel 5. 217 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi**

| Uraian                                        | Anggaran TA 2025      | Realisasi TA 2025     | %            | Realisasi TA 2024     |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Belanja Modal Instalasi Air Bersih / Air Baku | 165.580.000,00        | 151.448.571,00        | 91,47        | 214.859.813,00        |
| Belanja Modal Instalasi Air Kotor             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 42.078.694,00         |
| Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah     | 400.000.000,00        | 388.828.062,00        | 97,21        | 90.292.625,00         |
| Belanja Modal Instalasi Lain                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>565.580.000,00</b> | <b>540.276.633,00</b> | <b>95,53</b> | <b>347.231.132,00</b> |

#### 5.1.2.2.4.4 Belanja Modal Jaringan

**Tabel 5. 218 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan**

| Uraian                 | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Jaringan | 37.615.923.016,00 | 31.740.084.202,32 | 84,38 | 22.131.490.231,00 |

Nilai realisasi Belanja Modal Jaringan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp31.740.084.202,32 mengalami kenaikan sebesar Rp9.608.593.971,32 atau 43,42% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp22.131.490.231,00.

**Tabel 5. 219 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %            | Realisasi TA 2024        |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Belanja Modal Jaringan Air Minum | 14.211.593.016,00        | 11.274.671.832,32        | 79,33        | 12.007.308.268,00        |
| Belanja Modal Jaringan Listrik   | 23.404.330.000,00        | 20.465.412.370,00        | 87,44        | 10.049.514.463,00        |
| Belanja Modal Jaringan Gas       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 74.667.500,00            |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>37.615.923.016,00</b> | <b>31.740.084.202,32</b> | <b>84,38</b> | <b>22.131.490.231,00</b> |

#### 5.1.2.2.4.5 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

**Tabel 5. 220 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**

| Uraian                                          | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD | 2.440.400.000,00 | 959.484.725,00    | 39,32 | 1.312.917.435,00  |

Nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp959.484.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp353.432.710,00 atau 26,92% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.312.917.435,00.

#### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

**Tabel 5. 221 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 599.320.840,00   | 584.702.457,00    | 97,56 | 128.568.760,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp584.702.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp456.133.697,00 atau 354,78% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp128.568.760,00

**Tabel 5. 222 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025      | Realisasi TA 2025     | %            | Realisasi TA 2024     |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan      | 555.820.840,00        | 542.022.000,00        | 97,52        | 100.768.760,00        |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 43.500.000,00         | 42.680.457,00         | 98,12        | 27.800.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>599.320.840,00</b> | <b>584.702.457,00</b> | <b>97,56</b> | <b>128.568.760,00</b> |

#### 5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

**Tabel 5. 223 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan**

| Uraian                           | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 555.820.840,00   | 542.022.000,00    | 97,52 | 100.768.760,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp542.022.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp441.253.240,00 atau 437,89% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp100.768.760,00

**Tabel 5. 224 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan**

| Uraian                                                    | Anggaran TA 2025      | Realisasi TA 2025     | %            | Realisasi TA 2024     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak                 | 500.000.000,00        | 487.000.000,00        | 97,40        | 100.269.760,00        |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 50.000.000,00         | 49.250.000,00         | 98,50        | 499.000,00            |
| Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan             | 5.820.840,00          | 5.772.000,00          | 99,16        | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                                             | <b>555.820.840,00</b> | <b>542.022.000,00</b> | <b>97,52</b> | <b>100.768.760,00</b> |

#### 5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

**Tabel 5. 225 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 43.500.000,00    | 42.680.457,00     | 98,12 | 27.800.000,00     |

Nilai realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp42.680.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.880.457,00 atau 53,53% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp27.800.000,00.

#### 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

**Tabel 5. 226 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya**

| Uraian                     | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Modal Aset Lainnya | 765.850.000,00   | 244.871.904,00    | 31,97 | 555.671.027,00    |

Nilai realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp244.871.904,00 mengalami penurunan sebesar Rp310.799.123,00 atau 55,93% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp555.671.027,00.

Terdapat Belanja Modal Aset Lainnya BLUD berupa *software* PACS nilai sebesar Rp418.500.000,00 karena ada kendala perpindahan *server*, semula dilaksanakan oleh pihak ketiga diganti pelaksanaan sendiri oleh tim IT RSUD RTN.

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

**Tabel 5. 227 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga**

| Uraian              | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Belanja Tak Terduga | 19.977.358.000,00 | 10.254.834.782,00 | 51,33 | 26.568.948.044,00 |

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Nilai realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.254.834.782,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.314.113.262,00 atau 61,40% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp26.568.948.044,00.

Penjelasan lebih lanjut Penggunaan BTT pada tahun 2025 terdapat pada **Lampiran 12** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

**Tabel 5. 228 Rincian Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 :**

| NO | OPD              | KEGIATAN                                                                      | NILAI            |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Satpol PP        | Bantuan Transport                                                             | 595.000.000,00   |
| 2  | Satpol PP        | Perjalanan Dinas                                                              | 64.455.000,00    |
| 3  | PUCKTR           | Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi - Peninggian Jalan Desa              | 2.327.123.000,00 |
| 4  | PUBM SDA         | Pengadaan Bronjong                                                            | 117.093.000,00   |
| 5  | PUBM SDA         | Pasang Batu                                                                   | 238.379.000,00   |
| 6  | PUBM SDA         | Sewa Excavator                                                                | 399.600.000,00   |
| 7  | Kec Tanggulangin | Honorarium petugas posko tanggap darurat bencana                              | 21.000.000,00    |
| 8  | Dinas Sosial     | Permakanan-Natura                                                             | 14.250.000,00    |
| 9  | Dinas Sosial     | Bantrans                                                                      | 32.000.000,00    |
| 10 | Dinas Sosial     | BBM                                                                           | 3.800.000,00     |
| 11 | Dinas Sosial     | Bantuan Sosial                                                                | 24.000.000,00    |
| 12 | Dinas Kesehatan  | Pemeliharaan Gedung Puskesmas Porong                                          | 261.389.204,00   |
| 13 | Dinas Kesehatan  | pembayaran klaim rawat jalan dan rawat inap PP Al-Khoziny                     | 200.451.623,00   |
| 14 | Dinas Kesehatan  | Bantrans                                                                      | 58.300.000,00    |
| 15 | BPKAD            | Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 | 70.203.800,00    |
| 16 | BPBD             | Bantrans                                                                      | 42.060.000,00    |
| 17 | BPBD             | Bantuan Sosial                                                                | 2.193.365.200,00 |
| 18 | BPBD             | Honor Bencana Hidrometeorologi                                                | 271.600.000,00   |
| 19 | BPBD             | Pekerjaan Turap Bambu                                                         | 127.975.000,00   |
| 20 | BPBD             | Bahan Dapur Umum                                                              | 282.920.000,00   |
| 21 | BPBD             | BBM                                                                           | 1.800.000,00     |

| NO           | OPD  | KEGIATAN                               | NILAI                    |
|--------------|------|----------------------------------------|--------------------------|
| 22           | BPBD | Pengadaan Alat Ukur Ketinggian Air     | 49.950.000,00            |
| 23           | BPBD | Peninggian Jalan                       | 112.996.000,00           |
| 24           | BPBD | Perbaikan Jalan, Saluran dan Pintu Air | 2.152.931.955,00         |
| 25           | BPBD | Sewa Toilet                            | 369.630.000,00           |
| 26           | BPBD | Sewa Blower                            | 128.271.000,00           |
| 27           | BPBD | Suku Cadang                            | 94.291.000,00            |
| <b>TOTAL</b> |      |                                        | <b>10.254.834.782,00</b> |

#### 5.1.2.4 Belanja Transfer

**Tabel 5. 229 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer**

| Uraian           | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Transfer | 764.432.853.486,00 | 730.964.735.380,00 | 95,62 | 620.696.049.106,00 |

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Nilai realisasi Belanja Transfer pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp730.964.735.380,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.268.686.274,00 atau 17,77% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp620.696.049.106,00.

**Tabel 5. 230 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer**

| Uraian                   | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Bagi Hasil       | 195.803.206.786,00        | 195.803.206.786,00        | 100,00       | 136.681.078.556,00        |
| Belanja Bantuan Keuangan | 568.629.646.700,00        | 535.161.528.594,00        | 94,11        | 484.014.970.550,00        |
| <b>Jumlah</b>            | <b>764.432.853.486,00</b> | <b>730.964.735.380,00</b> | <b>95,62</b> | <b>620.696.049.106,00</b> |

##### 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

**Tabel 5. 231 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil**

| Uraian                                                                      | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %             | Realisasi TA 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 186.786.423.521,00        | 186.786.423.521,00        | 100,00        | 132.387.660.544,00        |
| Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa   | 9.016.783.265,00          | 9.016.783.265,00          | 100,00        | 4.293.418.012,00          |
| <b>Jumlah</b>                                                               | <b>195.803.206.786,00</b> | <b>195.803.206.786,00</b> | <b>100,00</b> | <b>136.681.078.556,00</b> |

##### 5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

**Tabel 5. 232 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**

| Uraian                                                                      | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 186.786.423.521,00 | 186.786.423.521,00 | 100,00 | 132.387.660.544,00 |

Nilai realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten / Kota dan Desa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp186.786.423.521,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.398.762.977,00 atau 41,09% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp132.387.660.544,00.

#### 5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

**Tabel 5. 233 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**

| Uraian                                                                    | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 9.016.783.265,00 | 9.016.783.265,00  | 100,00 | 4.293.418.012,00  |

Nilai realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Kepada Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp9.016.783.265,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.723.365.253,00 atau 110,01% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.293.418.012,00.

#### 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

**Tabel 5. 234 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan**

| Uraian                                                                   | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %     | Realisasi TA 2024  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 568.629.646.700,00 | 535.161.528.594,00 | 94,11 | 484.014.970.550,00 |

Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada desa terdiri dari belanja bantuan keuangan umum dan belanja bantuan keuangan khusus yang tata caranya diatur dengan:

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.
3. Penetapan nilai alokasi diatur dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2025 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.

Nilai realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp535.161.528.594,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.146.558.044,00 atau 10,57% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp484.014.970.550,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan disajikan secara rinci dalam **lampiran 13** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 235 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan**

| Uraian                          | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Bantuan Keuangan Umum   | 72.644.000.000,00         | 72.644.000.000,00         | 100,00       | 9.875.000.000,00          |
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus | 495.985.646.700,00        | 462.517.528.594,00        | 93,25        | 474.139.970.550,00        |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>568.629.646.700,00</b> | <b>535.161.528.594,00</b> | <b>94,11</b> | <b>484.014.970.550,00</b> |

#### 5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum

**Tabel 5. 236 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

| Uraian                                                     | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %      | Realisasi TA 2024 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten / Kota kepada Desa | 72.644.000.000,00 | 72.644.000.000,00 | 100,00 | 9.875.000.000,00  |

#### 5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus

**Tabel 5. 237 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

| Uraian                                                                                             | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %            | Realisasi TA 2024         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa                                       | 4.480.000.000,00          | 4.414.466.452,00          | 98,54        | 1.878.483.750,00          |
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa         | 340.770.181.000,00        | 307.367.596.442,00        | 90,20        | 328.647.743.000,00        |
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa | 150.735.465.700,00        | 150.735.465.700,00        | 100,00       | 143.613.743.800,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                      | <b>495.985.646.700,00</b> | <b>462.517.528.594,00</b> | <b>93,25</b> | <b>474.139.970.550,00</b> |

### 5.1.3 Pembiayaan Daerah

**Tabel 5. 238 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah**

| Uraian            | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| Pembiayaan Daerah | 618.488.655.518,20 | 618.940.644.143,08 | 100,07 | 560.735.179.484,86 |

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Nilai realisasi Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp618.940.644.143,08 mengalami kenaikan sebesar Rp58.205.464.658,22 atau 10,38% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp560.735.179.484,86.

**Tabel 5. 239 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah**

| Uraian                        | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %             | Realisasi TA 2024         |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Penerimaan Pembiayaan Daerah  | 642.775.655.518,20        | 643.226.702.161,36        | 100,07        | 563.408.107.589,27        |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | (24.287.000.000,00)       | (24.286.058.018,28)       | 100,00        | (2.672.928.104,41)        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>618.488.655.518,20</b> | <b>618.940.644.143,08</b> | <b>100,07</b> | <b>560.735.179.484,86</b> |

### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

**Tabel 5. 240 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**

| Uraian                | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| Penerimaan Pembiayaan | 642.775.655.518,20 | 643.226.702.161,36 | 100,07 | 563.407.407.589,27 |

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Nilai realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp643.226.702.161,36 mengalami kenaikan sebesar Rp79.819.294.572,09 atau 14,17% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp563.407.407.589,27.

**Tabel 5. 241 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**

| Uraian                                                                               | Anggaran TA 2025          | Realisasi TA 2025         | %             | Realisasi TA 2024         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                     | 642.775.655.518,20        | 642.775.655.518,20        | 100,00        | 511.902.365.548,05        |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                                         | 0,00                      | 451.046.643,16            | 0,00          | 260.697.900,22            |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          | 51.245.044.141,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                        | <b>642.775.655.518,20</b> | <b>643.226.702.161,36</b> | <b>100,07</b> | <b>563.408.107.589,27</b> |

#### 5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

**Tabel 5. 242 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**

| Uraian                                           | Anggaran TA 2025   | Realisasi TA 2025  | %      | Realisasi TA 2024  |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 642.775.655.518,20 | 642.775.655.518,20 | 100,00 | 511.902.365.548,05 |

SILPA Tahun lalu adalah Sisa lebih perhitungan anggaran TA 2024 yang menjadi sumber pembiayaan TA 2025 sebesar Rp642.775.655.518,20.

Nilai realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp642.775.655.518,20 mengalami kenaikan sebesar Rp130.873.289.970,15 atau 25,57% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp511.902.365.548,05.

### 5.1.3.1.2 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir

**Tabel 5. 243 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir**

| Uraian                                | Anggaran TA 2025 | Realisasi TA 2025 | %    | Realisasi TA 2024 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir | 0,00             | 451.046.643,16    | 0,00 | 260.697.900,22    |

Nilai realisasi Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp451.046.643,16 mengalami kenaikan sebesar Rp190.348.742,94 atau 73,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp260.697.900,22.

Penerimaan kembali dana bergulir merupakan penerimaan kembali atas pokok pinjaman dana bergulir yang telah disetor ke kas daerah oleh debitur dengan rincian :

1. Dagulir UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp209.601.125,16 yang terdiri dari *channeling* (yang dikelola oleh Bank Jatim) sebesar Rp 65.200.991,16 dan *non channeling* (yang dikelola oleh SKPD Teknis) sebesar Rp144.400.134,00.
2. Dagulir gabah petani *channeling* pada Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp234.439.591,00.
3. Dagulir P3EL pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp813.127,00 yang terdiri dari *channeling* (yang dikelola oleh Bank Jatim).
4. Dagulir IKM Ex Disperindag non *channeling* (yang dikelola oleh SKPD Teknis) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp6.192.800,00.

### 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

**Tabel 5. 244 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

| Uraian                 | Anggaran TA 2025  | Realisasi TA 2025 | %     | Realisasi TA 2024 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Pengeluaran Pembiayaan | 24.287.000.000,00 | 24.286.058.018,28 | 99,99 | 2.672.928.104,41  |

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Nilai realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp24.286.058.018,28 mengalami kenaikan sebesar Rp21.613.129.913,87 atau 808,59% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.672.928.104,41.

**Tabel 5. 245 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

| Uraian                                                                                | Anggaran TA 2025         | Realisasi TA 2025        | %             | Realisasi TA 2024       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Penyertaan Modal Daerah                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                    |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 24.287.000.000,00        | 24.286.058.018,28        | 99,99         | 2.672.928.104,41        |
| <b>Jumlah</b>                                                                         | <b>24.287.000.000,00</b> | <b>24.286.058.018,28</b> | <b>100,00</b> | <b>2.672.928.104,41</b> |

Nilai realisasi Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp24.286.058.018,28 mengalami kenaikan sebesar Rp21.613.129.913,87 atau 808,59% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.672.928.104,41. Merupakan pengeluaran pembiayaan pada BLUD RSUD Notoputro untuk pembayaran pinjaman pada Bank Jatim selama tahun 2025 sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 17 Mei 2025, fasilitas pinjaman Kredit

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 17 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2026. Pinjaman dengan bunga pembayaran sebesar 7% per annum efektif floating rate.

#### 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

**Tabel 5. 246 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

| <b>Uraian</b>                          | <b>Realisasi TA 2025</b> | <b>Realisasi TA 2024</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 680.654.556.300,37       | Rp642.775.655.518,20     |

SiLPA adalah selisih lebih antara nilai realisasi pendapatan dikurangi nilai realisasi belanja daerah, ditambah pembiayaan neto selama satu periode pelaporan.

SiLPA TA 2025 sebesar Rp680.654.556.300,37 mengalami kenaikan sebesar Rp37.878.900.782,17 atau 5,89% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp642.775.655.518,20.

| <b>No</b>     | <b>Uraian</b>             | <b>Nilai (Rp)</b>         |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1             | Kas di KAS DAERAH         | 573.120.409.199,45        |
| 2             | Kas di BLUD RSUD          | 70.316.192.622,56         |
| 3             | Kas di BLUD RSUD SIBAR    | 22.940.206.588,03         |
| 4             | Kas di BLUD PUSKESMAS     | 11.125.864.658,69         |
| 5             | Kas di BLUD TPA JABON     | 2.779.686.085,93          |
| 6             | Kas di BLUD IPALD         | 113.757.734,71            |
| 7             | Kas Dana BOK di PUSKESMAS | 258.439.411,00            |
| <b>Jumlah</b> |                           | <b>680.654.556.300,37</b> |

## 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah.

Nilai saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5. 247 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024**

| Uraian                                                      | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Kenaikan/<br>Penurunan   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | 642.775.655.518,20        | 511.902.365.548,05        | 130.873.289.970,15       |
| Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan | 642.775.655.518,20        | 511.902.365.548,05        | 130.873.289.970,15       |
| <b>Sub Total</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)         | 680.654.556.300,37        | 642.775.655.518,20        | 37.878.900.782,17        |
| <b>Sisa Anggaran Lebih Akhir</b>                            | <b>680.654.556.300,37</b> | <b>642.775.655.518,20</b> | <b>37.878.900.782,17</b> |

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp680.654.556.300,37 merupakan saldo SiLPA Tahun 2025. SAL awal Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp130.873.289.970,15 atau 25,57% apabila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp511.902.365.548,05.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

**Tabel 5. 248 Saldo Anggaran Lebih Awal**

| Uraian                    | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | Kenaikan/<br>Penurunan |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 642.775.655.518,20 | 511.902.365.548,05 | 130.873.289.970,15     |

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp642.775.655.518,20. Nilai penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp130.873.289.970,15 atau 25,57% apabila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp511.902.365.548,05.

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

**Tabel 5. 249 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

| Uraian         | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | Kenaikan/<br>Penurunan |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Penggunaan SAL | 642.775.655.518,20 | 511.902.365.548,05 | 130.873.289.970,15     |

SiLPA adalah selisih lebih antara nilai realisasi pendapatan dikurangi nilai realisasi belanja daerah, ditambah pembiayaan netto selama satu periode pelaporan. SiLPA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp642.775.655.518,20 mengalami kenaikan Rp130.873.289.970,15 atau 25,57% dari TA 2024 sebesar Rp511.902.365.548,05.

### 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tabel 5. 250 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

| Uraian                                 | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | Kenaikan/<br>Penurunan |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 680.654.556.300,37 | 642.775.655.518,20 | 37.878.900.782,17      |

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp680.654.556.300,37 mengalami kenaikan Rp38.878.900.782,17 atau 5,89% dari TA 2024 sebesar Rp642.775.655.518,20.

Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berasal dari :

| NO       | URAIAN                                                                         | TAHUN 2025                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>PELAMPAUAN PENDAPATAN</b>                                                   |                             |
|          | <b>Pelampauan PAD - Pendapatan Asli Daerah</b>                                 | <b>95.498.970.169,54</b>    |
|          | Pelampauan PAD - Pajak Daerah                                                  | 54.442.878.542,18           |
|          | Pelampauan PAD - Retribusi Daerah                                              | 20.043.684.670,27           |
|          | Pelampauan PAD - Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   | (91.541.205,50)             |
|          | Pelampauan PAD - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                     | 21.103.948.162,59           |
|          | <b>Pelampauan - Dana Perimbangan</b>                                           | <b>(50.149.134.219,00)</b>  |
|          | Pelampauan - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                      | (6.617.452.300,00)          |
|          | Pelampauan - Dana Alokasi Umum                                                 | (5.709.545.900,00)          |
|          | Pelampauan - Dana Alokasi Khusus                                               | (4.419.551.461,00)          |
|          | Pelampauan Dana Desa                                                           | (33.402.584.558,00)         |
|          | Pelampauan - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               |                             |
|          | <b>Pelampauan - Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>                           | <b>28.061.290.750,00</b>    |
|          | Pelampauan - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 28.260.540.750,00           |
|          | Pelampauan - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya     | (199.250.000,00)            |
|          | <b>Pelampauan - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                       | <b>0,00</b>                 |
|          | Pelampauan - Pendapatan Hibah                                                  | 0,00                        |
|          | Pelampauan - Pendapatan Lainnya                                                | 0,00                        |
|          | <b>Jumlah Pelampauan Pendapatan</b>                                            | <b>73.411.126.700,54</b>    |
| <b>2</b> | <b>Penghematan Belanja - Belanja Daerah</b>                                    |                             |
|          | <b>Penghematan Belanja - Belanja Operasional</b>                               | <b>(340.647.492.239,77)</b> |
|          | Penghematan Belanja - Belanja Pegawai                                          | (128.143.484.658,15)        |
|          | Penghematan Belanja - Belanja Barang dan Jasa                                  | (190.372.074.145,71)        |
|          | Penghematan Belanja - Belanja Subsidi                                          | (2.084.714.061,00)          |
|          | Penghematan Belanja - Belanja Bunga                                            | (419.946.103,35)            |
|          | Penghematan Belanja - Belanja Hibah                                            | (4.041.314.771,56)          |
|          | Penghematan Belanja - Belanja Bantuan Sosial                                   | (15.585.958.500,00)         |
|          | <b>Penghematan Belanja - Belanja Modal</b>                                     | <b>(222.953.307.411,18)</b> |
|          | Penghematan Belanja - Belanja Modal                                            | (222.953.307.411,18)        |
|          | <b>Penghematan Belanja - Belanja Tak terduga</b>                               | <b>(9.722.523.218,00)</b>   |
|          | Penghematan Belanja - Belanja Tak terduga                                      | (9.722.523.218,00)          |

|            |                                                                                                                             |                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            | <b>Penghematan Belanja - Transfer</b>                                                                                       | <b>(33.468.118.106,00)</b>  |
|            | <i>Penghematan Belanja - Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</i>                          | <i>0,00</i>                 |
|            | <i>Penghematan Belanja - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik</i> | <i>(33.468.118.106,00)</i>  |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                                                                                                       | <b>(606.791.440.974,95)</b> |
|            | <b>Surplus/Defisit</b>                                                                                                      | <b>680.202.567.675,49</b>   |
| <b>3</b>   | <b>PENGHEMATAN PEMBIAYAAN</b>                                                                                               |                             |
| <b>3.1</b> | <b>PELAMPAUAN - PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                                            | <b>451.046.643,16</b>       |
|            | <i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</i>                                                            | <i>0,00</i>                 |
|            | <i>Pelampauan- Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir</i>                                                                    | <i>451.046.643,16</i>       |
|            | <i>Pelampauan- Penerimaan Utang BLUD</i>                                                                                    | <i>0,00</i>                 |
|            | <b>Jumlah</b>                                                                                                               | <b>451.046.643,16</b>       |
| <b>3.2</b> | <b>PENGHEMATAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                                          | <b>(941.981,72)</b>         |
|            | <i>Penghematan - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</i>                                                         | <i>0,00</i>                 |
|            | <i>Penghematan - Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang</i>                                                                   | <i>(941.981,72)</i>         |
|            | <b>Jumlah</b>                                                                                                               | <b>(941.981,72)</b>         |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                                                                     | <b>451.988.624,88</b>       |
|            | <b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b>                                                                                      | <b>680.654.556.300,37</b>   |

#### 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp680.654.556.300,37 dengan rincian sebagai berikut:

| <b>Rincian Saldo Anggaran Lebih – Akhir Tahun 2025 sebesar Rp680.654.556.300,37</b> |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kas di KAS DAERAH                                                                   | Rp573.120.409.199,45        |
| Kas di BLUD RSUD                                                                    | Rp70.316.192.622,56         |
| Kas di BLUD RSUD SIBAR                                                              | Rp22.940.206.588,03         |
| Kas di BLUD PUSKESMAS                                                               | Rp11.125.864.658,69         |
| Kas di BLUD TPA JABON                                                               | Rp2.779.686.085,93          |
| Kas di BLUD IPALD                                                                   | Rp113.757.734,71            |
| Kas Dana BOK di PUSKESMAS                                                           | Rp258.439.411,00            |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>Rp680.654.556.300,37</b> |

### 5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 251 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

| Uraian                              | Per 31 Des 2025 (Rp)         | Per 31 Des 2024 (Rp)         |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ASET</b>                         | <b>23.600.900.823.442,32</b> | <b>23.213.233.721.800,60</b> |
| Aset Lancar                         | 1.146.161.856.502,26         | 1.054.825.042.986,58         |
| Investasi Jangka Panjang            | 687.596.591.941,65           | 643.507.483.845,75           |
| Aset Tetap                          | 21.232.411.248.692,05        | 20.972.246.200.489,90        |
| Aset Lainnya                        | 444.529.100.279,00           | 451.701.572.348,69           |
| Properti Investasi                  | 90.202.026.027,36            | 90.953.422.129,68            |
| <b>JUMLAH ASET</b>                  | <b>23.600.900.823.442,32</b> | <b>23.213.233.721.800,60</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                    | <b>152.605.409.600,81</b>    | <b>204.378.954.952,78</b>    |
| Kewajiban Jangka Pendek             | 152.605.409.600,81           | 204.378.954.952,78           |
| Kewajiban Jangka Panjang            | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>EKUITAS</b>                      | <b>23.448.295.413.841,51</b> | <b>23.008.854.766.847,82</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> | <b>23.600.900.823.442,32</b> | <b>23.213.233.721.800,60</b> |

#### 5.3.1 Aset

**Tabel 5. 252 Rincian Aset**

| Uraian      | Per 31 Des 2025              | Per 31 Des 2024              | +/( -)       |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Aset</b> | <b>23.600.900.823.442,32</b> | <b>23.213.233.721.800,60</b> | <b>1,67%</b> |

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.600.900.823.442,32 mengalami kenaikan sebesar Rp387.667.101.641,72 atau 1,67% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp23.213.233.721.800,60.

Saldo Aset pada per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 253 Rincian Aset**

| Uraian                   | Per 31 Des 2025              | Per 31 Des 2024              | +/( -)       |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Aset Lancar              | 1.146.161.856.502,27         | 1.054.825.042.986,58         | 8,66%        |
| Investasi Jangka Panjang | 687.596.591.941,65           | 643.507.483.845,75           | 6,85%        |
| Aset Tetap               | 21.232.411.248.692,05        | 20.972.246.200.489,90        | 1,24%        |
| Aset Lainnya             | 444.529.100.278,99           | 451.701.572.348,69           | (1,59%)      |
| Properti Investasi       | 90.202.026.027,36            | 90.953.422.129,68            | (0,83%)      |
| <b>Jumlah</b>            | <b>23.600.900.823.442,32</b> | <b>23.213.233.721.800,60</b> | <b>1,67%</b> |

### 5.3.1.1 Aset Lancar

**Tabel 5. 254 Aset Lancar**

| Uraian      | Per 31 Des 2025      | Per 31 Des 2024      | +/( -) |
|-------------|----------------------|----------------------|--------|
| Aset Lancar | 1.146.161.856.502,26 | 1.054.825.042.986,58 | 8,66%  |

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.146.161.856.502,26 mengalami kenaikan sebesar Rp91.336.813.515,68 atau 8,66% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.054.825.042.986,58.

**Tabel 5. 255 Rincian Aset Lancar**

| Uraian                            | Per 31 Des 2025             | Per 31 Des 2024             | +/( -)       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Kas di Kas Daerah                 | 573.120.409.199,45          | 489.907.723.902,60          | 16,99%       |
| Kas di Bendahara Pengeluaran      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%        |
| Kas di Bendahara Penerimaan       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%        |
| Kas di BLUD                       | 107.275.707.689,92          | 152.087.754.612,60          | (29,46%)     |
| Kas di Bendahara BOS              | 15.000,00                   | 46.000,00                   | (67,39%)     |
| Kas Lainnya                       | 750.797.940,00              | 198.401.605,00              | 278,42%      |
| Kas di Bendahara BOK              | 258.439.411,00              | 780.131.003,00              | (66,87%)     |
| Piutang Pajak                     | 548.440.297.183,10          | 539.130.907.186,10          | 1,73%        |
| Piutang Retribusi                 | 95.423.064.590,00           | 82.716.866.436,52           | 15,36%       |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah    | 13.198.079.532,81           | 13.620.031.450,97           | (3,10%)      |
| Piutang Transfer Antar Daerah     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00%        |
| Piutang Lainnya                   | 10.787.648.000,00           | 18.942.507.000,00           | (43,05%)     |
| Penyisihan Piutang                | (342.168.215.123,58)        | (331.001.473.652,83)        | 3,37%        |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 4.921.407.085,06            | 5.044.597.058,26            | (2,44%)      |
| Beban Dibayar Dimuka              | 506.791.355,00              | 600.441.573,00              | (15,60%)     |
| Persediaan                        | 133.647.414.639,50          | 82.797.108.811,36           | 61,42%       |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>1.146.161.856.502,26</b> | <b>1.054.825.042.986,58</b> | <b>8,66%</b> |

#### 5.3.1.1.1 Kas

Kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan berada dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara BOS, dan BLUD dan Kas Lainnya.

Saldo Aset Lancar pada per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

##### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

**Tabel 5. 256 Rincian Kas di Kas Daerah**

| Uraian            | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/( -) |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Kas di Kas Daerah | 573.120.409.199,45 | 489.907.723.902,60 | 16,99% |

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp573.120.409.199,45 mengalami kenaikan sebesar Rp83.212.685.296,85 atau 16,99% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp489.907.723.902,60

|                                                            |    |                    |
|------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Saldo di Bank Jatim No. 0261000011 (Rek. Penerimaan Kasda) | Rp | 0,00               |
| Saldo di Bank Jatim 0261005500 (RKUD)                      | Rp | 473.637.574.705,45 |
| Saldo di Bank Jatim 0261013657 (Rek. Pengeluaran Kasda)    | Rp | 99.482.834.494,00  |

Rincian Saldo Kas di Kasda terdiri dari:

|    | JENIS SUMBER DANA           | NILAI (Rp)                | PADA  | KETERANGAN                               |
|----|-----------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1  | BANTUAN KEUANGAN PROVINSI   | 313.284.221,00            | Kasda | Dikembalikan TA 2026                     |
| 2  | PAJAK ROKOK                 | 74.421.754.723,00         | Kasda | Dianggarkan Kembali Pak TA 2026          |
| 3  | DANA DAERAH                 | 451.885.206.624,65        | Kasda | Bebas                                    |
| 4  | CUKAI                       | 3.340.050.351,00          | Kasda | Dianggarkan Kembali Pak TA 2026          |
| 5  | DAK FISIK AIR MINUM         | 453.718.532,09            | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 6  | DAK FISIK FARMASI           | 3.332,00                  | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 7  | DAK FISIK JALAN             | 25.007.369,00             | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 8  | DAK FISIK KB                | 599                       | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 9  | DAK FISIK LH                | 3.310,00                  | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 10 | DAK FISIK PELKES RUJUKAN    | 13.800,00                 | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 11 | DAK FISIK SANITASI          | 100.992.325,00            | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 12 | DAK FISIK PENDIDIKAN SMP    | 2.100,00                  | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 13 | DAK FISIK PENDIDIKAN SD     | 11                        | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 14 | DAK FISIK PERTANIAN         | 208.911,00                | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 15 | DAK FISIK SISTEM KESEHATAN  | 20.770.995,00             | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 16 | DAU T - KELURAHAN           | 2.959.227.860,00          | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 17 | DAU SG - KESEHATAN          | 105.982.615,00            | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 18 | DAU SG - PENDIDIKAN         | 9.818.954.977,71          | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 19 | DAU SG - PU                 | 69.008.829,00             | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 20 | DANA INSENTIF FISKAL        | 1.822.355.773,00          | Kasda | Dianggarkan Kembali Pak TA 2026          |
| 21 | DAK NON F- KETAHANAN PANGAN | 28.500.000,00             | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 22 | DAK NON F-TPG               | 3.660.985.878,00          | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 23 | DAK NON F- TAMSIL GURU      | 65.306.495,00             | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 24 | DAK NON F- TKG              | 23.588.111.600,00         | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 25 | DAK NON F- UKM              | 320.290,00                | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 26 | DAK NON F-BOK DINKES        | 155.104.827,00            | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 27 | DAK NON F-BOK KB            | 277.665.666,00            | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 28 | DAK NON F-POM               | 672.844,00                | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
| 29 | DAK NON F-BOK PPA           | 7.194.341,00              | Kasda | Menunggu Juknis Pusat Untuk Dikembalikan |
|    | <b>TOTAL</b>                | <b>573.120.409.199,45</b> |       |                                          |

#### 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

**Tabel 5. 257 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**

| Uraian                       | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/( -) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00            | 0,00            | 0,00   |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah jumlah sisa UP/GU/TU/LS yang belum disetor ke Kasda per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Sisa kas di rekening Bendahara Pengeluaran dilakukan auto debet untuk dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah setiap akhir Tahun Anggaran.

#### 5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

**Tabel 5. 258 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**

| Uraian                      | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/( -) |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00            | 0,00            | 0,00   |

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan adalah jumlah PAD yang belum disetor ke Kasda per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

#### 5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

**Tabel 5. 259 Kas di BLUD**

| Uraian      | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/( -)   |
|-------------|--------------------|--------------------|----------|
| Kas di BLUD | 107.275.707.689,92 | 152.087.754.612,60 | (29,46%) |

Saldo Kas di BLUD merupakan sisa kas di rekening BLUD RSUD RT Notopuro, BLUD RSUD Sidoarjo Barat, BLUD 31 Puskesmas, BLUD TPA Jabon, dan BLUD UPTD PALD per 31 Desember 2025 sebesar Rp107.275.707.689,92 turun sebesar Rp44.812.046.922,68 atau 29,46% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp152.087.754.612,60. Rincian Kas di BLUD terdapat pada **Lampiran 14** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

Dengan rincian :

- 1) Kas di BLUD RSUD RT Notopuro sebesar Rp70.316.192.622,56, rincian :
  - Bank Jatim 0261019205 Rp25.200.490.008,20
  - Bendahara Penerimaan Rp16.328.887,00
  - Bank BTN 0006201300006910 Rp61.112.583,65
  - Bank Mandiri 1410000024562 Rp5.657.576,71
  - Bank BNI 1117887991 Rp32.603.567,00
  - Setara Kas (Deposito di Bank BTN Rp20.000.000.000,00
  - Setara Kas (Deposito di Bank BRI) Rp15.000.000.000,00
  - Setara Kas (Deposito di Bank Mandiri) Rp5.000.000.000,00
  - Setara Kas (Deposito di Bank Jatim) Rp5.000.000.000,00
2. Kas di BLUD RSUD Sibar sebesar Rp22.940.206.588,03 rincian :
  - Bank Jatim 0631003150 Rp12.939.330.726,61

- Bank BRI 055301001500307 Rp839.606,00
  - Bank BTN 002220130000918 Rp36.255,42
  - Setara Kas (Deposito di Bank BTN) Rp10.000.000.000,00
3. Kas di BLUD TPA Griyo Mulyo sebesar Rp2.779.686.085,93 di Bank Jatim 0261084228
  4. Kas di BLUD 31 Puskesmas Dinas Kesehatan di giro Bank Jatim sebesar Rp11.123.459.658,69 dan tunai di bendahara Puskesmas sebesar Rp2.405.000,00 rincian:

| Puskesmas    | Rekening Bank Jatim | Saldo Bank               | Saldo Kas Tunai Di Bendahara Penerimaan BLUD |
|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Ganting      | 0261 038 781        | 217.910.892,22           | 0,00                                         |
| Sidoarjo     | 0261 038 595        | 338.825.386,82           | 0,00                                         |
| Sekardangan  | 0261 038 617        | 353.204.962,99           | 0,00                                         |
| Urangagung   | 0261 038 609        | 505.476.029,74           | 0,00                                         |
| Buduran      | 0261 038 625        | 290.709.332,49           | 0,00                                         |
| Candi        | 0261 038 633        | 445.919.476,11           | 0,00                                         |
| Porong       | 0261 038 641        | 537.657.839,33           | 280.000,00                                   |
| Kedungsolo   | 0261 038 650        | 65.033.584,96            | 0,00                                         |
| Jabon        | 0261 038 668        | 396.292.905,28           | 530.000,00                                   |
| Kremlung     | 0261 038 676        | 222.658.262,51           | 60.000,00                                    |
| Tanggulangin | 0261 038 684        | 229.998.860,33           | 0,00                                         |
| Tulangan     | 0261 038 692        | 100.028.733,74           | 60.000,00                                    |
| Kepadangan   | 0261 038 706        | 119.124.234,77           | 0,00                                         |
| Taman        | 0261 038 714        | 621.654.335,03           | 880.000,00                                   |
| Trosobo      | 0261 038 731        | 312.991.803,18           | 0,00                                         |
| Waru         | 0261 038 757        | 680.674.403,83           | 240.000,00                                   |
| Medaeng      | 0261 038 765        | 251.660.478,82           | 0,00                                         |
| Sedati       | 0261 038 749        | 192.461.941,37           | 0,00                                         |
| Gedangan     | 0261 038 773        | 378.316.831,75           | 0,00                                         |
| Sukodono     | 0261 038 722        | 494.191.021,67           | 0,00                                         |
| Krian        | 0261 038 790        | 543.155.564,78           | 35.000,00                                    |
| Barengkrajan | 0261 038 803        | 400.219.505,55           | 85.000,00                                    |
| Balongbendo  | 0261 038 820        | 400.807.007,55           | 0,00                                         |
| Wonoayu      | 0261 038 838        | 535.263.260,31           | 235.000,00                                   |
| Tarik        | 0261 038 811        | 510.673.076,78           | 0,00                                         |
| Prambon      | 0261 038 846        | 990.963.151,18           | 0,00                                         |
| Sidodadi     | 026 1082 454        | 263.216.625,20           | 0,00                                         |
| Wonokasian   | 073 1092 532        | 189.182.573,65           | 0,00                                         |
| Tarik 2      | 063 1003 206        | 229.294.629,76           | 0,00                                         |
| Tambakrejo   | 026 1084 279        | 177.956.633,23           | 0,00                                         |
| Urangagung 2 | 026 1089092         | 127.936.313,76           | 0,00                                         |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>11.123.459.658,69</b> | <b>2.405.000,00</b>                          |

5. Kas di BLUD UPTD PALD sebesar Rp113.757.734,71 di Bank Jatim 0261099951

#### 5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

**Tabel 5. 260 Rincian Kas di Bendahara BOS**

| Uraian               | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/(-)    |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kas di Bendahara BOS | 15.000,00       | 46.000,00       | (67.39%) |

Saldo Kas di Bendahara BOS adalah jumlah dana BOS yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp15.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.000,00 atau 67,39% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar sebesar Rp46.000,00. Sesuai BA Pemeriksaan Kas No. 400.3.5.5/280/438.5.1.1.40/2026 terdapat Sisa kas BOSDA SMP Negeri 1 Gedangan yang merupakan pemungutan pajak honor tugas tambahan tahun 2025 senilai Rp15.000,00 atas nama Yudha Permana Rahmadani S.Pd, yang disetorkan pada tanggal 15 April 2026.

#### 5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

**Tabel 5. 261 Kas Lainnya**

| Uraian      | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/(-)   |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| Kas Lainnya | 750.797.940,00  | 198.401.605,00  | 278,42% |

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp750.797.940,00 mengalami kenaikan sebesar Rp552.396.335,00 atau 278,42% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp198.401.605,00. Kas Lainnya merupakan saldo e-money untuk pembelian BBM ambulance pada RSUD RT Notopuro, saldo uang titipan atas pembayaran TOP UP kartu untuk pelayanan persampahan BLUD TPA Jabon yang terdapat pada Bank Jatim norek 0261084236 dan saldo uang titipan atas jaminan rusunawa. Rincian saldo Kas Lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 262 Rincian Kas Lainnya**

| SKPD                                  | Uraian Rekening | Jenis                         | 2025                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| RSUD RT NOTOPURO                      | Kas Lainnya     | Saldo e money Flazz           | 22.425.090,00         |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | Kas Lainnya     | Saldo e-money Top UP          | 189.590.450,00        |
| Dinas P2CKTR                          | Kas Lainnya     | Titipan Uang Jaminan Rusunawa | 538.782.400,00        |
| <b>Jumlah</b>                         |                 |                               | <b>750.797.940,00</b> |

#### 5.3.1.1.1.7 Kas di Bendahara BOK

**Tabel 5. 263 Kas di Bendahara BOK**

| Uraian               | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/(-)    |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Kas di Bendahara BOK | 258.439.411,00  | 780.131.003,00  | (66,87%) |

Saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2025 sebesar Rp258.439.411,00 mengalami penurunan sebesar Rp521.691.592,00 atau 100,00% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp780.131.003,00. Rincian saldo BOK per Puskesmas sebagai berikut :

Tabel 5. 264 Rincian Kas di Bendahara BOK

| PUSKESMAS    | BANK | NOMOR REKENING | JUMLAH                |
|--------------|------|----------------|-----------------------|
| BALONGBENDO  | BNI  | 1590087366     | 630.500,00            |
| BARENGKRAJAN | BNI  | 1590087208     | 9.839.527,00          |
| BUDURAN      | BNI  | 1590087300     | 6.031.500,00          |
| CANDI        | BNI  | 1590087311     | 23.019.500,00         |
| GANTING      | BNI  | 1590087184     | 11.434,00             |
| GEDANGAN     | BNI  | 1590087264     | 1.551.690,00          |
| JABON        | BNI  | 1590087333     | 411.495,00            |
| KEDUNGSOLO   | BNI  | 1590087195     | 749.065,00            |
| KEPADANGAN   | BNI  | 1590087231     | 3.811.127,00          |
| KREMBUNG     | BNI  | 1590087355     | 1.705.265,00          |
| KRIAN-BNI    | BNI  | 1590087322     | 2.671.500,00          |
| MEDAENG      | BNI  | 1590087220     | 52.934.127,00         |
| PORONG       | BNI  | 1590087286     | 40.000,00             |
| PRAMBON      | BNI  | 1590087388     | 2.117.000,00          |
| SEDATI       | BNI  | 1590087377     | 2.885.117,00          |
| SEKARDANGAN  | BNI  | 1590087162     | 8.302.000,00          |
| SIDOARJO     | BNI  | 1590087297     | 108.500,00            |
| SIDODADI     | BNI  | 1590087173     | 119.853,00            |
| SUKODONO     | BNI  | 1590087402     | 21.389.000,00         |
| TAMAN        | BNI  | 1590087399     | 1.523.355,00          |
| TAMBAKREJO   | BNI  | 1808722818     | 5.138.000,00          |
| TANGGULANGIN | BNI  | 1590087344     | 154.000,00            |
| TARIK        | BNI  | 1590087413     | 35.742.500,00         |
| TARIK 2      | BNI  | 1808722794     | 2.925.928,00          |
| TROSOBO      | BNI  | 1590087253     | 2.178.714,00          |
| TULANGAN     | BNI  | 1590087275     | 9.404.680,00          |
| URANGAGUNG   | BNI  | 1590087219     | 9.797.566,00          |
| WARU         | BNI  | 1590087435     | 18.385.000,00         |
| WONOAYU      | BNI  | 1590087424     | 24.207.468,00         |
| WONOKASIAN   | BNI  | 1808722807     | 1.942.000,00          |
| URANGAGUNG 2 | BNI  | 1905781400     | 8.712.000,00          |
| <b>TOTAL</b> |      |                | <b>258.439.411,00</b> |

### 5.3.1.1.2 Piutang

Tabel 5. 265 Piutang

| Uraian  | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/( - ) |
|---------|--------------------|--------------------|---------|
| Piutang | 330.602.281.267,39 | 328.453.435.479,02 | 0,65%   |

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang

sah. Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang terdapat pada **Lampiran 15** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

Saldo Piutang Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp330.602.281.267,40 mengalami kenaikan sebesar Rp2.148.845.788,38 atau 0,65% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp328.453.435.479,02 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 266 Rincian Piutang**

| Uraian                            | Per 31 Des 2025           | Per 31 Des 2024           | +/(-)        |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Piutang Pajak Daerah              | 548.440.297.183,10        | 539.130.907.186,10        | 1,73%        |
| Piutang Retribusi Daerah          | 95.423.064.590,00         | 82.716.866.436,52         | 15,36%       |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah    | 13.198.079.532,81         | 13.620.031.450,97         | (3,37%)      |
| Piutang Lainnya                   | 10.787.648.000,00         | 18.942.507.000,00         | (43,05%)     |
| Penyisihan Piutang                | (342.168.215.123,58)      | (331.001.473.652,83)      | 3,37%        |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 4.921.407.085,06          | 5.044.597.058,26          | (2,06%)      |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>330.602.281.267,39</b> | <b>328.453.435.479,02</b> | <b>0,65%</b> |

Pada Tahun 2025 terdapat penyerahan atas piutang retribusi dan piutang lainnya (dana bergulir) ke KPKNL Sidoarjo yang dirinci dalam **Lampiran 16** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

#### 5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

**Tabel 5. 267 Piutang Pajak**

| Uraian        | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/(-) |
|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| Piutang Pajak | 548.440.297.183,10 | 539.130.907.186,10 | 1,73% |

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas Pendapatan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perpajakan atau Peraturan Daerah Tentang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024 yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masih belum diterima.

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp548.440.297.183,10 mengalami kenaikan sebesar Rp9.309.389.997,00 atau 1,73% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp539.130.907.186,10.

**Tabel 5. 268 Rincian Piutang Pajak**

| Uraian                         | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Piutang Pajak Hotel            | 187.403.398,50    | 187.403.398,50    |
| Piutang Pajak Restoran         | 1.227.266.053,06  | 1.695.503.580,06  |
| Piutang Pajak Hiburan          | 143.204.364,71    | 143.204.364,71    |
| Piutang Pajak Reklame          | 1.178.670.905,00  | 714.207.488,00    |
| Piutang Pajak Penerangan Jalan | 33.751.381.276,83 | 32.869.894.911,83 |
| Piutang Pajak Parkir           | 362.254.018,00    | 362.224.250,00    |

| Uraian                            | Per 31 Des 2025             | Per 31 Des 2024             |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Piutang Pajak Pajak Air Tanah     | 749.854.993,20              | 727.472.120,20              |
| Piutang Pajak PBB-P2              | 510.651.271.614,80          | 502.430.997.072,80          |
| Piutang Pajak BPHTB               | 188.990.559,00              | 0,00                        |
| <b>Piutang Pajak Bruto</b>        | <b>548.440.297.183,10</b>   | <b>539.130.907.186,10</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang Pajak</b>   | <b>(316.238.527.352,96)</b> | <b>(303.437.916.269,90)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak</b> | <b>232.201.769.830,14</b>   | <b>235.692.990.916,20</b>   |

1. Piutang Pajak Hotel

Merupakan Piutang Pajak hotel yang belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian Piutang Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 269 Rincian Piutang Pajak Hotel**

| Uraian                                  | Per 31 Des 2025         | Per 31 Des 2024         |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Piutang Pajak Hotel Th 2010             | 580.000,00              | 580.000,00              |
| Piutang Pajak Hotel Th 2011             | 10.125.000,00           | 10.125.000,00           |
| Piutang Pajak Hotel Th 2012             | 26.540.000,00           | 26.540.000,00           |
| Piutang Pajak Hotel Th 2013             | 21.957.452,60           | 21.957.452,60           |
| Piutang Pajak Hotel Th 2014             | 11.404.000,00           | 11.404.000,00           |
| Piutang Pajak Hotel Th 2015             | 31.432.945,90           | 31.432.945,90           |
| Piutang Pajak Hotel Th 2016             | 65.345.000,00           | 65.345.000,00           |
| Piutang Pajak Hotel Th 2017             | 13.535.000,00           | 13.535.000,00           |
| Piutang Pajak Hotel Th 2018             | 1.350.000,00            | 1.350.000,00            |
| Piutang Pajak Hotel Th 2019             | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| Piutang Pajak Hotel Th 2020             | 4.134.000,00            | 4.134.000,00            |
| <b>Piutang Pajak Hotel Bruto</b>        | <b>187.403.398,50</b>   | <b>187.403.398,50</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>               | <b>(187.403.398,50)</b> | <b>(185.336.398,50)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Hotel</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.067.000,00</b>     |

2. Piutang Pajak Restoran

Merupakan Piutang Pajak Restoran yang belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian Piutang Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 270 Rincian Piutang Pajak Restoran**

| Uraian                         | Per 31 Des 2025 (Rp) | Per 31 Des 2024 (Rp) |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Piutang Pajak Restoran Th 2004 | 4.312.500,00         | 4.312.500,00         |
| Piutang Pajak Restoran Th 2005 | 7.903.000,00         | 7.903.000,00         |
| Piutang Pajak Restoran Th 2006 | 11.570.950,00        | 11.570.950,00        |
| Piutang Pajak Restoran Th 2007 | 86.385.000,00        | 86.385.000,00        |
| Piutang Pajak Restoran Th 2008 | 131.256.437,00       | 131.556.437,00       |
| Piutang Pajak Restoran Th 2009 | 43.867.000,00        | 44.467.000,00        |
| Piutang Pajak Restoran Th 2010 | 69.652.070,00        | 69.652.070,00        |
| Piutang Pajak Restoran Th 2011 | 73.961.953,20        | 73.961.953,20        |
| Piutang Pajak Restoran Th 2012 | 96.671.200,10        | 96.671.200,10        |
| Piutang Pajak Restoran Th 2013 | 157.323.987,00       | 157.323.987,00       |

| Uraian                                     | Per 31 Des 2025 (Rp)      | Per 31 Des 2024 (Rp)      |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Piutang Pajak Restoran Th 2014             | 145.280.929,20            | 145.280.929,20            |
| Piutang Pajak Restoran Th 2015             | 49.164.691,46             | 49.464.691,46             |
| Piutang Pajak Restoran Th 2016             | 125.929.403,10            | 125.929.403,10            |
| Piutang Pajak Restoran Th 2017             | 31.892.972,00             | 31.892.972,00             |
| Piutang Pajak Restoran Th 2018             | 139.124.386,00            | 139.124.386,00            |
| Piutang Pajak Restoran Th 2019             | 10.000.000,00             | 10.000.000,00             |
| Piutang Pajak Restoran Th 2020             | 22.298.028,00             | 22.298.028,00             |
| Piutang Pajak Restoran Th 2021             | 20.671.546,00             | 20.671.546,00             |
| Piutang Pajak Restoran Th 2024             | 0,00                      | 467.037.527,00            |
| <b>Piutang Pajak Restoran Bruto</b>        | <b>1.227.266.053,06</b>   | <b>1.695.503.580,06</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                  | <b>(1.216.930.280,06)</b> | <b>(1.230.333.142,31)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Restoran</b> | <b>10.335.773,00</b>      | <b>465.170.437,75</b>     |

### 3. Piutang Pajak Hiburan

Merupakan kewajiban pajak untuk wajib pajak hiburan yang belum dibayar. Rincian Piutang Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 271 Rincian Piutang Pajak Hiburan**

| Uraian                                    | Per 31 Des 2025         | Per 31 Des 2024         |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Piutang Pajak Hiburan Th 2005             | 75.000,00               | 75.000,00               |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2006             | 55.000,00               | 55.000,00               |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2007             | 1.020.000,00            | 1.020.000,00            |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2008             | 2.902.300,00            | 2.902.300,00            |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2009             | 3.450.000,00            | 3.450.000,00            |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2010             | 7.905.000,00            | 7.905.000,00            |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2011             | 12.310.000,00           | 12.310.000,00           |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2012             | 12.875.000,00           | 12.875.000,00           |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2013             | 42.093.843,50           | 42.093.843,50           |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2014             | 10.633.517,92           | 10.633.517,92           |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2015             | 8.231.415,79            | 8.231.415,79            |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2016             | 22.970.000,50           | 22.970.000,50           |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2018             | 500.000,00              | 500.000,00              |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2019             | 120.000,00              | 120.000,00              |
| Piutang Pajak Hiburan Th 2020             | 18.063.287,00           | 18.063.287,00           |
| <b>Piutang Pajak Hiburan Bruto</b>        | <b>143.204.364,71</b>   | <b>143.204.364,71</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                 | <b>(143.204.364,71)</b> | <b>(134.172.721,21)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Hiburan</b> | <b>0,00</b>             | <b>9.031.643,50</b>     |

### 4. Piutang Pajak Reklame

Merupakan Piutang Pajak Reklame yang belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian Piutang Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 272 Rincian Piutang Pajak Reklame**

| Uraian                                    | Per 31 Des 2025         | Per 31 Des 2024        |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Piutang Pajak Reklame Th 2020             | 1.292.500,00            | 1.292.500,00           |
| Piutang Pajak Reklame Th 2021             | 351.600,00              | 351.600,00             |
| Piutang Pajak Reklame Th 2022             | 14.448.800,00           | 14.448.800,00          |
| Piutang Pajak Reklame Th 2023             | 108.810.220,00          | 108.810.220,00         |
| Piutang Pajak Reklame Th 2024             | 194.906.407,00          | 589.304.368,00         |
| Piutang Pajak Reklame Th 2025             | 858.861.378,00          | 0,00                   |
| <b>Piutang Pajak Reklame Bruto</b>        | <b>1.178.670.905,00</b> | <b>714.207.488,00</b>  |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                 | <b>(82.007.431,60)</b>  | <b>(42.613.170,40)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Reklame</b> | <b>1.096.663.473,40</b> | <b>671.594.317,60</b>  |

5. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Merupakan tagihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum pada PT PLN yang belum disetor ke RKUD. Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 273 Rincian Pajak Penerangan Jalan**

| Uraian                                             | Per 31 Des 2025          | Per 31 Des 2024          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang PPJ TH 2004                                | 22.107.336,36            | 22.107.336,36            |
| Piutang PPJ TH 2005                                | 170.500,00               | 170.500,00               |
| Piutang PPJ TH 2006                                | 179.628,00               | 179.628,00               |
| Piutang PPJ TH 2007                                | 5.949.139,20             | 5.949.139,20             |
| Piutang PPJ TH 2008                                | 6.408.679,89             | 6.408.679,89             |
| Piutang PPJ TH 2009                                | 1.999.910,00             | 1.999.910,00             |
| Piutang PPJ TH 2010                                | 3.725.580,09             | 3.725.580,09             |
| Piutang PPJ TH 2011                                | 2.034.756,00             | 2.034.756,00             |
| Piutang PPJ TH 2012                                | 9.526.188,24             | 9.526.188,24             |
| Piutang PPJ TH 2013                                | 14.486.553,86            | 14.486.553,86            |
| Piutang PPJ TH 2014                                | 5.097.028,88             | 5.097.028,88             |
| Piutang PPJ TH 2015                                | 3.348.430,75             | 3.348.430,75             |
| Piutang PPJ TH 2016                                | 1.379.195,93             | 1.379.195,93             |
| Piutang PPJ TH 2017                                | 79.094,63                | 79.094,63                |
| Piutang PPJ TH 2018                                | 30.103,00                | 30.103,00                |
| Piutang PPJ TH 2019                                | 77.687,00                | 77.687,00                |
| Piutang PPJ TH 2020                                | 8,00                     | 8,00                     |
| Piutang PPJ TH 2021                                | 113.845,00               | 113.845,00               |
| Piutang PPJ TH 2022                                | 0,00                     | 0,00                     |
| Piutang PPJ TH 2023                                | 0,00                     | 0,00                     |
| Piutang PPJ TH 2024                                | 0,00                     | 32.793.181.247,00        |
| Piutang PPJ TH 2025                                | 33.674.667.612,00        | 0,00                     |
| <b>Piutang Pajak Penerangan Jalan Bruto</b>        | <b>33.751.381.276,83</b> | <b>32.869.894.911,83</b> |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                          | <b>76.656.742,33</b>     | <b>(76.656.738,33)</b>   |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Penerangan Jalan</b> | <b>33.674.724.534,50</b> | <b>32.793.238.173,50</b> |

6. Piutang Pajak Parkir

Merupakan Piutang Pajak Parkir yang belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian Piutang Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 274 Rincian Pajak Parkir**

| Uraian                                   | Per 31 Des 2025         | Per 31 Des 2024         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Piutang Pajak Parkir Th 2004             | 600.000,00              | 600.000,00              |
| Piutang Pajak Parkir Th 2005             | 0,00                    | 0,00                    |
| Piutang Pajak Parkir Th 2006             | 1.180.000,00            | 1.180.000,00            |
| Piutang Pajak Parkir Th 2007             | 323.500,00              | 323.500,00              |
| Piutang Pajak Parkir Th 2008             | 7.366.250,00            | 7.366.250,00            |
| Piutang Pajak Parkir Th 2009             | 17.093.250,00           | 17.093.250,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2010             | 42.635.250,00           | 42.635.250,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2011             | 46.403.750,00           | 46.403.750,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2012             | 37.837.000,00           | 37.837.000,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2013             | 30.337.000,00           | 30.337.000,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2014             | 29.982.500,00           | 29.982.500,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2015             | 24.383.500,00           | 24.383.500,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2016             | 34.759.500,00           | 34.759.500,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2017             | 1.495.000,00            | 1.495.000,00            |
| Piutang Pajak Parkir Th 2018             | 1.250.000,00            | 1.250.000,00            |
| Piutang Pajak Parkir Th 2019             | 10.500.250,00           | 10.500.250,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2020             | 75.557.500,00           | 75.557.500,00           |
| Piutang Pajak Parkir Th 2021             | 520.000,00              | 520.000,00              |
| Piutang Pajak Parkir Th 2025             | 29.768,00               | 0,00                    |
| <b>Piutang Pajak Parkir Bruto</b>        | <b>362.254.018,00</b>   | <b>362.224.250,00</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                | <b>(361.965.738,40)</b> | <b>(324.185.500,00)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Parkir</b> | <b>288.279,60</b>       | <b>38.038.750,00</b>    |

7. Piutang Pajak Air Tanah

Merupakan Piutang Air Tanah yang belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian Piutang Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 275 Rincian Pajak Air Tanah**

| Uraian              | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Piutang PAT TH 2011 | 46.359.395,00   | 46.359.395,00   |
| Piutang PAT TH 2012 | 58.497.363,00   | 58.497.363,00   |
| Piutang PAT TH 2013 | 59.144.350,00   | 59.144.350,00   |
| Piutang PAT TH 2014 | 28.473.494,00   | 28.473.494,00   |
| Piutang PAT TH 2015 | 18.644.097,00   | 18.644.097,00   |
| Piutang PAT TH 2016 | 20.610.610,60   | 20.610.610,60   |
| Piutang PAT TH 2017 | 18.427.117,60   | 18.427.117,60   |
| Piutang PAT TH 2018 | 24.821.332,00   | 24.821.332,00   |
| Piutang PAT TH 2019 | 38.100.924,00   | 38.100.924,00   |
| Piutang PAT TH 2020 | 41.393.204,00   | 41.538.024,00   |

| Uraian                                      | Per 31 Des 2025         | Per 31 Des 2024         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Piutang PAT TH 2021                         | 48.447.964,00           | 49.416.064,00           |
| Piutang PAT TH 2022                         | 39.283.544,00           | 39.752.784,00           |
| Piutang PAT TH 2023                         | 46.456.464,00           | 50.290.724,00           |
| Piutang PAT TH 2024                         | 114.645.501,00          | 233.395.841,00          |
| Piutang PAT TH 2025                         | 146.549.633,00          | 0,00                    |
| <b>Piutang Pajak Air Tanah Bruto</b>        | <b>749.854.993,20</b>   | <b>727.472.120,20</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                   | <b>(421.775.319,35)</b> | <b>(379.229.870,05)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Air Tanah</b> | <b>328.079.673,85</b>   | <b>348.242.250,15</b>   |

8. Piutang Pajak PBB-P2

Merupakan Piutang Pajak PBB-P2 yang belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian Piutang Pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 276 Rincian Pajak PBB-P2**

| Uraian                 | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Piutang PBB-P2 TH 1994 | 20.238.217,00     | 23.256.047,00     |
| Piutang PBB-P2 TH 1995 | 145.214.756,00    | 162.755.939,00    |
| Piutang PBB-P2 TH 1996 | 758.970.211,00    | 848.431.992,00    |
| Piutang PBB-P2 TH 1997 | 951.836.315,00    | 1.060.149.978,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 1998 | 912.505.734,00    | 1.005.168.911,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 1999 | 1.241.593.711,00  | 1.391.003.669,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2000 | 2.120.489.344,00  | 2.389.425.698,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2001 | 2.550.573.465,00  | 2.879.648.265,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2002 | 1.536.453.953,00  | 1.718.207.429,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2003 | 1.779.506.221,00  | 1.954.942.799,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2004 | 1.826.722.279,00  | 2.004.179.364,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2005 | 2.818.846.265,00  | 3.044.167.964,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2006 | 3.176.286.510,00  | 3.456.988.379,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2007 | 4.455.235.488,00  | 4.886.009.413,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2008 | 5.323.717.907,00  | 5.729.675.121,00  |
| Piutang PBB-P2 TH 2009 | 10.669.486.857,00 | 11.164.419.981,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2010 | 14.279.830.934,00 | 14.873.658.459,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2011 | 9.419.873.269,00  | 10.052.902.104,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2012 | 9.917.692.764,00  | 10.665.517.296,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2013 | 14.708.664.228,00 | 15.848.660.677,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2014 | 15.754.424.882,00 | 17.008.574.845,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2015 | 16.549.349.614,00 | 17.919.240.589,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2016 | 17.785.657.193,00 | 19.324.339.225,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2017 | 23.650.502.874,80 | 25.831.266.798,80 |
| Piutang PBB-P2 TH 2018 | 29.400.411.509,00 | 32.330.033.632,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2019 | 32.134.595.295,00 | 35.427.100.879,00 |
| Piutang PBB-P2 TH 2020 | 35.902.818.359,00 | 39.655.743.134,00 |

| Uraian                                              | Per 31 Des 2025             | Per 31 Des 2024             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Piutang PBB-P2 TH 2021                              | 44.666.361.490,00           | 50.068.491.147,00           |
| Piutang PBB-P2 TH 2022                              | 37.049.018.632,00           | 43.369.243.041,00           |
| Piutang PBB-P2 TH 2023                              | 41.498.354.463,00           | 50.994.642.315,00           |
| Piutang PBB-P2 TH 2024                              | 51.156.178.884,00           | 75.343.151.982,00           |
| Piutang PBB-P2 TH 2025                              | 76.489.859.991,00           | 0,00                        |
| <b>Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Bruto</b>        | <b>510.651.271.614,80</b>   | <b>502.430.997.072,80</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                           | <b>(313.739.134.550,06)</b> | <b>(301.065.388.729,00)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Bumi dan Bangunan</b> | <b>196.912.137.064,75</b>   | <b>201.365.608.343,80</b>   |

9. Piutang Pajak BPHTB

Merupakan Piutang Pajak PBB-P2 yang belum dibayar oleh wajib pajak. Rincian Piutang Pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 277 Rincian Piutang Pajak BPHTB**

| Uraian                                   | Per 31 Des 2025       | Per 31 Des 2024 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Piutang Pajak BPHTB                      | 188.990.559,00        | 0,00            |
| Total Penyisihan Piutang Pajak           | (9.449.527,95)        | 0,00            |
| <b>Total Piutang Bersih Pajak Daerah</b> | <b>179.541.031,05</b> | <b>0,00</b>     |

### 5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

**Tabel 5. 278 Piutang Retribusi Daerah**

| Uraian                   | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   | +/( -) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Piutang Retribusi Daerah | 95.423.064.590,00 | 82.716.866.436,52 | 15,36% |

Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode dalam pelaporan keuangan. Dalam piutang daerah yang tidak dapat tertagih, terdapat keringan utang oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jendral Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2025.

*Crash Program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian keringanan utang kepada penanggung utang. Keringanan Utang adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh penanggung utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos/biaya lainnya.

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp95.423.064.590,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.706.198.153,48 atau 15,36% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp82.716.866.436,52 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 279 Rincian Piutang Retribusi Daerah**

| Uraian                                                   | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Piutang Retribusi Jasa Umum                              | 88.737.685.647,00 | 76.286.962.805,52 |
| Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan setelah resiprokal | 81.383.842.502,00 | 72.805.121.373,00 |
| Piutang Retribusi - Dinkes                               | 1.150.224.800,00  | 1.542.545.800,00  |
| Piutang Retribusi - RSUD RTN                             | 71.080.854.429,00 | 65.440.416.086,00 |

| Uraian                                                                            | Per 31 Des 2025          | Per 31 Des 2024          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Piutang Retribusi - RSUD SIBAR                                                    | 9.152.763.273,00         | 5.822.159.487,00         |
| Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan                              | 6.044.810.545,00         | 1.838.900.332,52         |
| Piutang Retribusi - DLHK                                                          | 24.258.720,00            | 31.944.720,00            |
| Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan TPA Jabon                                 | 6.020.551.825,00         | 1.806.955.612,52         |
| Piutang Retribusi Pelayanan Pasar                                                 | 1.234.150.000,00         | 1.602.115.000,00         |
| Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri  | 34.056.500,00            | 0,00                     |
| Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 40.826.100,00            | 40.826.100,00            |
| Piutang Retribusi Jasa Usaha                                                      | 5.710.735.893,00         | 5.455.260.581,00         |
| Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                       | 2.423.952.199,00         | 2.278.551.671,00         |
| Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga                                   | 3.286.783.694,00         | 3.176.708.910,00         |
| Piutang Retribusi Perizinan Tertentu                                              | 974.643.050,00           | 974.643.050,00           |
| Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan                              | 974.643.050,00           | 974.643.050,00           |
| <b>Total Piutang Retribusi Bruto</b>                                              | <b>95.423.064.590,00</b> | <b>82.716.866.436,52</b> |

1. Piutang Retribusi Jasa Umum

a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp81.592.416.502,00 yang dikelola oleh OPD yang berupa Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

- i. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp1.272.348.800,00
- ii. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sidoarjo Barat sebesar Rp9.152.763.273,00
- iii. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro sebesar Rp71.167.304.429,00 dengan rincian:

Tabel 5. 280 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

| Uraian                                                              | Per 31 Des 2025 (Rp)    | Per 31 Des 2024 (Rp)    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tahun 2025                                                          | 1.272.348.800,00        | 1.542.245.800,00        |
| <b>Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bruto</b> | <b>1.272.348.800,00</b> | <b>1.542.245.800,00</b> |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                                           | <b>(0,00)</b>           | <b>(0,00)</b>           |
| <b>Total Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas</b>        | <b>1.272.348.800,00</b> | <b>1.542.245.800,00</b> |

| Uraian                                                                        | Per 31 Des 2025 (Rp)    | Per 31 Des 2024 (Rp)    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tahun 2025                                                                    | 9.152.763.273,00        | 5.822.159.487,00        |
| <b>Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Sidoarjo Barat Bruto</b> | <b>9.152.763.273,00</b> | <b>5.822.159.487,00</b> |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                                                     | <b>(54.304.080,85)</b>  | <b>(0,00)</b>           |
| <b>Total Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Sidoarjo Barat</b>        | <b>9.098.459.192,15</b> | <b>5.822.159.487,00</b> |

| Uraian                                                         | Per 31 Des 2025 (Rp)      | Per 31 Des 2024 (Rp)      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tahun 2025                                                     | 71.167.304.429,00         | 65.440.416.086,00         |
| <b>Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Bruto</b> | <b>71.167.304.429,00</b>  | <b>65.440.416.086,00</b>  |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                                      | <b>(2.488.688.021,55)</b> | <b>(2.438.250.824,20)</b> |
| <b>Total Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD</b>        | <b>68.678.616.407,45</b>  | <b>63.002.165.261,80</b>  |

Terdapat Reciprokal Utang Puskesmas dan RSUD Sidoarjo Barat dengan piutang pada RSUD RTN, Puskesmas dengan nilai sebesar Rp208.574.000,00 sebagaimana rincian berikut :

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Piutang RSUD RTN – Utang RSUD Sidoarjo Barat | 2.624.000,00          |
| Piutang RSUD RTN – Utang Dinas Kesehatan     | 105.950.000,00        |
| Piutang Puskesmas – Utang Dinas Kesehatan    | 100.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>208.574.000,00</b> |

- b) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan  
Piutang Retribusi Persampahan / Kebersihan dikelola oleh DLHK. Saldo per 31 Desember 2025 yang disajikan sebesar Rp6.085.636.645,00

**Tabel 5. 281 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan**

| Uraian                                                                   | Per 31 Des 2025 (Rp)    | Per 31 Des 2024 (Rp)    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                          | 6.085.636.645,00        | 1.879.726.432,52        |
| <b>Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Bruto</b> | <b>6.085.636.645,00</b> | <b>1.879.726.432,52</b> |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                                                | <b>(65.084.820,00)</b>  | <b>(72.770.820,00)</b>  |
| <b>Total Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan</b>        | <b>6.020.551.825,00</b> | <b>1.806.955.612,52</b> |

- c) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar  
Piutang Retribusi Pasar dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang retribusi pada Pasar Krian sebesar Rp1.234.150,00.

**Tabel 5. 282 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**

| Uraian                                                | Per 31 Des 2025 (Rp)      | Per 31 Des 2024 (Rp)      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                       | 1.234.150.000,00          | 1.602.115.000,00          |
| <b>Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Bruto</b> | <b>1.234.150.000,00</b>   | <b>1.602.115.000,00</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                             | <b>(1.234.150.000,00)</b> | <b>(1.602.115.000,00)</b> |
| <b>Total Piutang Retribusi Pelayanan Pasar</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

- d) Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair  
Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dikelola oleh BLUD UPTD PALD pada Dinas P2CKTR. Saldo per 31 Desember 2025 yang disajikan sebesar Rp34.056.500,00.

Tabel 5. 283 Rincian Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

| Uraian                                                       | Per 31 Des 2025 (Rp) | Per 31 Des 2024 (Rp) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              | 34.056.500,00        | 0,00                 |
| <b>Jumlah Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Bruto</b> | <b>34.056.500,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                                    | <b>(285.050,00)</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair</b>        | <b>33.771.450,00</b> | <b>0,00</b>          |

## 2. Piutang Retribusi Jasa Usaha

## a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.423.952.199,00 yang dikelola oleh OPD terdiri atas :

- i. Pemakaian kekayaan daerah pada DPMPTSP sebesar Rp254.184.000,00 dengan rincian:

Tabel 5. 284 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

| Uraian                                                          | Per 31 Des 2025 (Rp)    | Per 31 Des 2024 (Rp)    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tahun 2014                                                      | 25.200.000,00           | 25.200.000,00           |
| Tahun 2013                                                      | 7.080.000,00            | 7.080.000,00            |
| Tahun 2012                                                      | 87.762.000,00           | 87.762.000,00           |
| Tahun 2011                                                      | 11.970.000,00           | 11.970.000,00           |
| Tahun 2010                                                      | 122.172.000,00          | 122.172.000,00          |
| <b>Jumlah Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bruto</b> | <b>254.184.000,00</b>   | <b>254.184.000,00</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                                       | <b>(254.184.000,00)</b> | <b>(254.184.000,00)</b> |
| <b>Total Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

- ii. Piutang rusunawa pada Dinas P2CKTR sebesar Rp1.442.910.849,00 dengan rincian:

Tabel 5. 285 Rincian Piutang Rusunawa

| Uraian                               | Per 31 Des 2025 (Rp)    | Per 31 Des 2024 (Rp)    |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Piutang Rusunawa Tahun 2018          | 1.723.000,00            | 1.723.000,00            |
| Piutang Rusunawa Tahun 2019          | 53.200.600,00           | 53.200.600,00           |
| Piutang Rusunawa Tahun 2020          | 69.383.000,00           | 69.383.000,00           |
| Piutang Rusunawa Tahun 2021          | 106.750.000,00          | 108.556.000,00          |
| Piutang Rusunawa Tahun 2022          | 149.115.000,00          | 157.030.500,00          |
| Piutang Rusunawa Tahun 2023          | 80.800.000,00           | 88.484.000,00           |
| Piutang Rusunawa Tahun 2024          | 365.159.912,00          | 819.133.221,00          |
| Piutang Rusunawa Tahun 2025          | 616.779.337,00          |                         |
| <b>Jumlah Piutang Rusunawa Bruto</b> | <b>1.442.910.849,00</b> | <b>1.297.510.321,00</b> |
| <b>Penyisihan Piutang</b>            | <b>(488.133.558,05)</b> | <b>(162.424.513,55)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Rusunawa</b> | <b>954.777.290,95</b>   | <b>1.135.085.807,45</b> |

- iii. Piutang Retribusi Izin Gangguan Merupakan Piutang Retribusi izin Gangguan yang belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang Izin Gangguan dikelola oleh DPMPTSP dengan rincian sebagai berikut :

| Tahun                                     | Total Piutang           |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Tahun 2016                                | 570.140.700,00          |
| Tahun 2014                                | 5.766.800,00            |
| Tahun 2013                                | 11.375.800,00           |
| Tahun 2012                                | 58.769.350,00           |
| Tahun 2011                                | 9.181.650,00            |
| Tahun 2010                                | 1.549.950,00            |
| Tahun 2009                                | 453.600,00              |
| Tahun 2008                                | 50.395.500,00           |
| Tahun 2007                                | 19.224.000,00           |
| <b>Jumlah Piutang Izin Gangguan Bruto</b> | <b>726.857.350,00</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                 | <b>(726.857.350,00)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Izin Gangguan</b> | <b>0,00</b>             |

- b. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga  
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah sebesar Rp3.286.783.694,00 yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dengan rincian :

**Tabel 5. 286 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

| Uraian                                                                        | Per 31 Des 2025 (Rp)      | Per 31 Des 2024 (Rp)      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tahun 2011                                                                    | 99.033.085,00             | 99.033.085,00             |
| Tahun 2012                                                                    | 90.333.750,00             | 90.333.750,00             |
| Tahun 2013                                                                    | 146.506.725,00            | 146.506.725,00            |
| Tahun 2014                                                                    | 142.186.725,00            | 142.186.725,00            |
| Tahun 2015                                                                    | 59.176.575,00             | 59.176.575,00             |
| Tahun 2016                                                                    | 80.692.200,00             | 80.692.200,00             |
| Tahun 2017                                                                    | 115.805.700,00            | 115.805.700,00            |
| Tahun 2018                                                                    | 495.148.478,00            | 495.375.750,00            |
| Tahun 2019                                                                    | 644.883.728,00            | 645.111.000,00            |
| Tahun 2020                                                                    | 169.454.228,00            | 169.681.500,00            |
| Tahun 2023                                                                    | 731.486.700,00            | 731.486.700,00            |
| Tahun 2024                                                                    | 256.673.600,00            | 294.319.200,00            |
| Tahun 2025                                                                    | 255.402.200,00            | 107.000.000,00            |
| <b>Jumlah Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga Bruto</b> | <b>3.286.783.694,00</b>   | <b>3.176.708.910,00</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                                                     | <b>(2.256.184.934,00)</b> | <b>(2.170.848.964,50)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b> | <b>1.030.598.760,00</b>   | <b>1.005.859.945,50</b>   |

3. Piutang Izin Mendirikan Bangunan  
Merupakan piutang IMB yang belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang Izin Mendirikan Bangunan dikelola oleh DPMPTSP dengan rincian :

Tabel 5. 287 Piutang Izin Mendirikan Bangunan

| Uraian                                               | Per 31 Des 2025 (Rp)    | Per 31 Des 2024 (Rp)    |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tahun 2014                                           | 138.743.650,00          | 138.743.650,00          |
| Tahun 2013                                           | 105.003.800,00          | 105.003.800,00          |
| Tahun 2012                                           | 324.462.450,00          | 324.462.450,00          |
| Tahun 2011                                           | 27.640.950,00           | 27.640.950,00           |
| Tahun 2010                                           | 64.826.000,00           | 64.826.000,00           |
| Tahun 2009                                           | 190.344.800,00          | 190.344.800,00          |
| Tahun 2008                                           | 23.058.850,00           | 23.058.850,00           |
| Tahun 2007                                           | 100.562.550,00          | 100.562.550,00          |
| <b>Jumlah Piutang Izin Mendirikan Bangunan Bruto</b> | <b>974.643.050,00</b>   | <b>974.643.050,00</b>   |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                            | <b>(974.643.050,00)</b> | <b>(974.643.050,00)</b> |
| <b>Total Piutang Bersih Izin Mendirikan Bangunan</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

### 5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.160.909.807,81 mengalami penurunan sebesar Rp459.121.643,16 atau 3,37% dari Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.620.031.450,97.

Tabel 5. 288 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

| Uraian                                                | Per 31 Des 2025 (Rp)     | Per 31 Des 2024 (Rp)     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Peternak - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | 0,00                     | 8.075.000,00             |
| Piutang Bunga Dana Bergulir Dinas Koperasi            | 44.273.840,00            | 44.273.840,00            |
| Piutang Denda Pajak                                   | 147.297.827,00           | 147.297.827,00           |
| Piutang atas lebih bayar belanja                      | 37.169.725,00            | 0,00                     |
| <b>Piutang Lainnya Dagulir :</b>                      |                          |                          |
| UPPKS (Dinas PMD) Non Channeling                      | 78.222.000,00            | 78.222.000,00            |
| P3EL(Dinas PMD) Non Channeling                        | 40.972.000,00            | 40.972.000,00            |
| UPPKS (Dinas PMD) Channeling                          | 53.581.894,83            | 53.581.894,83            |
| P3EL (Dinas PMD) Channeling                           | 54.343.681,44            | 55.156.808,44            |
| EX PERINDAG (IKM Disperindag) Non Channeling          | 151.339.745,75           | 157.532.545,75           |
| UMKM (Dinkop) Non Channeling                          | 2.747.470.229,74         | 2.891.870.363,74         |
| UMKM (Dinkop) Channeling                              | 8.118.439.905,73         | 8.183.640.896,89         |
| GABAH PETANI (Dinas Pangan) (Dinkop) Channeling       | 1.724.968.683,32         | 1.959.408.274,32         |
| <b>Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah Bruto</b>    | <b>13.198.079.532,81</b> | <b>13.620.031.450,97</b> |

#### 5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

**Tabel 5. 289 Piutang Transfer Antar Daerah**

| Uraian                        | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/( -) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Piutang Transfer Antar Daerah | 0,00            | 0,00            | 0,00%  |

Tidak adanya Piutang Transfer Antar Daerah per dengan 31 Desember 2025 karena belum mencatat nilai piutang transfer antar daerah karena menunggu hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024 nilai piutang transfer antar daerah sebesar 0,00.

#### 5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

**Tabel 5. 290 Piutang Lainnya**

| Uraian          | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   | +/( -)   |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| Piutang Lainnya | 10.787.648.000,00 | 18.942.507.000,00 | (43,05%) |

Piutang lainnya pada tahun 2025 adalah nilai dari pokok Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang belum diterima pada tahun 2025 sesuai KMK Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 291 Rincian Piutang Lainnya**

| Piutang Transfer |                          |
|------------------|--------------------------|
| PPh Pasal 21     | 5.259.241.000,00         |
| PPh Pasal 25/29  | 1.814.476.000,00         |
| PBB              | 83.233.000,00            |
| CHT              | 1.512.050.000,00         |
| SDA Kehutanan    | 21.209.000,00            |
| SDA Minerba      | 415.943.000,00           |
| SDA Minyak       | 0,00                     |
| SDA Gas          | 1.678.718.000,00         |
| SDA Panas        | 2.778.000,00             |
| SDA Perikanan    | 0,00                     |
|                  | <b>10.787.648.000,00</b> |

Terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

#### 5.3.1.1.2.6 Penyisihan Piutang

**Tabel 5. 292 Penyisihan Piutang**

| Uraian             | Per 31 Des 2025      | Per 31 Des 2024      | +/( -) |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Penyisihan Piutang | (342.168.215.123,58) | (331.001.473.652,83) | 3,37%  |

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp342.168.215.123,58) mengalami kenaikan sebesar (Rp11.166.741.470,75) atau 3,37% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar (Rp331.142.300.331,23).

**Tabel 5. 293 Rincian Penyisihan Piutang**

| Uraian                                    | Per 31 Des 2025           | Per 31 Des 2024           |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Penyisihan Piutang Pajak                  | 316.238.527.352,96        | 303.437.916.269,90        |
| Penyisihan Piutang Retribusi              | 8.542.514.864,45          | 10.811.042.082,81         |
| Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 13.160.909.807,81         | 13.620.031.450,79         |
| Penyisihan Piutang Lainnya                | 0,00                      | 0,00                      |
| Penyisihan Piutang TGR                    | 4.226.263.098,36          | 3.132.483.849,33          |
| <b>Total Penyisihan Piutang</b>           | <b>342.168.215.123,58</b> | <b>331.001.473.652,83</b> |

#### 5.3.1.1.2.7 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

**Tabel 5. 294 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**

| Uraian                            | Per 31 Des 2025  | Per 31 Des 2024  | +/(-)   |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 4.921.407.085,06 | 5.044.597.058,26 | (2,44%) |

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.921.407.085,06 mengalami penurunan sebesar Rp123.189.973,20 atau 2,44% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.044.597.058,26. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi terdapat pada **Lampiran 17** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

#### 5.3.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

**Tabel 5. 295 Belanja Dibayar Dimuka**

| Uraian                 | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/(-)    |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Belanja Dibayar Dimuka | 506.791.355,00  | 600.441.573,00  | (15,60%) |

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp506.791.355,00 mengalami penurunan sebesar Rp93.650.218,00 atau 15,60% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp600.441.573,00. Rincian Beban Dibayar Dimuka terdapat pada **Lampiran 18** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

**Tabel 5. 296 Rincian Belanja Dibayar Dimuka**

| SKPD               | URAIAN               | JUMLAH        |
|--------------------|----------------------|---------------|
| BPKAD              | Google Drive Storage | 2.232.846,00  |
| BPKAD              | Subsidi              | 9.504.193,00  |
| BPPD               | Lisensi Fortigate    | 8.420.760,00  |
| Dinas Koperasi     | Lisensi Canva        | 312.919,00    |
| Dinas Koperasi     | Lisensi Zoom meeting | 2.775.732,00  |
| Dinas Koperasi     | Premi Asuransi       | 4.781.556,00  |
| Dinas Perhubungan  | Premi Asuransi       | 59.813.565,00 |
| Dinas Perpus&Arsip | Premi Asuransi       | 2.295.255,00  |
| Dinas Perpus&Arsip | Sewa                 | 29.668.660,00 |
| Dinkes             | Google Drive Storage | 940.261,00    |

| SKPD                  | URAIAN               | JUMLAH                |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dinkes                | Lisensi Zoom meeting | 739.710,00            |
| Dinkes                | Sewa                 | 31.759.236,00         |
| Diskominfo            | Lisensi Canva        | 1.387.866,00          |
| Diskominfo            | Lisensi Capcut       | 38.265.044,00         |
| DP2CKTR               | Sewa                 | 32.875.700,00         |
| DP3AKB                | Lisensi Canva        | 1.250.000,00          |
| Inspektorat           | Premi Asuransi       | 6.823.315,00          |
| Kecamatan Balongbendo | Lisensi Google       | 264.924,00            |
| RSUD SIBAR            | Lisensi Zoom meeting | 2.947.833,00          |
| Sekretariat Dewan     | Premi Asuransi       | 269.731.980,00        |
| <b>TOTAL</b>          |                      | <b>506.791.355,00</b> |

#### 5.3.1.1.4 Persediaan

Tabel 5. 297 Persediaan

| Uraian     | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024   | +/( -) |
|------------|--------------------|-------------------|--------|
| Persediaan | 133.647.414.639,50 | 82.797.108.811,36 | 61,42% |

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp133.647.414.639,50 mengalami kenaikan sebesar Rp50.850.305.828,14 atau 61,42% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp82.797.108.811,36. Rincian Persediaan terdapat pada **Lampiran 19** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

Terdapat persediaan dalam kondisi usang senilai Rp3.892.468.738,70 yang telah dikeluarkan dari nilai persediaan dan diusulkan untuk dihapuskan/dimusnahkan sesuai dengan surat pengajuan usulan penghapusan oleh masing-masing OPD terkait. Rincian Persediaan terdapat pada **Lampiran 20** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

Tabel 5. 298 Rincian Persediaan dalam Kondisi Usang

| OPD                                  | Nilai                   | Keterangan | Surat usulan                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| Dinas Perhubungan                    | 264.322.000,00          | Usang      | 000.2.4/55/438.5.13/2025       |
| Dinas Pangan Pertanian               | 9.618.500,00            | Usang      | 000.981/438.5.10/2026          |
| RSUD RT Notopuro                     | 51.688.674,71           | Usang      | 000.2.4/2931/438.5.2.1.1/2026  |
| RSUD Sidoarjo Barat                  | 358.548.948,66          | Usang      | 400.7.18/1405/438.5.2.1.2/2026 |
| RSUD Sidoarjo Barat                  | 134.073,38              | Rusak      | 400.7.18/1405/438.5.2.1.2/2026 |
| Dinas Kesehatan                      | 1.991.597.207,96        | Usang      | 000.2.3.1/1576/438.5.2/2026    |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1.216.559.334,00        | Usang      | 030/2318/438/5/12/2023         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>3.892.468.738,71</b> |            |                                |

Tabel 5. 299 Rincian Persediaan

| Nama Akun          | Saldo Akhir        | Saldo Awal        |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Barang Pakai Habis | 133.647.414.639,50 | 82.797.108.811,36 |

| Nama Akun              | Saldo Akhir               | Saldo Awal               |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Barang Tak Habis Pakai | 0,00                      | 0,00                     |
| Barang Bekas Dipakai   | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>          | <b>133.647.414.639,50</b> | <b>82.797.108.811,36</b> |

**Tabel 5. 300 Rincian Persediaan per OPD**

| Nama OPD                                                               | JUMLAH            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                        | 193.261.763,00    |
| Dinas Kesehatan                                                        | 42.024.979.232,31 |
| RSUD R.T. NOTOPURO                                                     | 20.258.344.677,53 |
| RSUD SIDOARJO BARAT                                                    | 9.947.022.940,88  |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air                    | 9.983.538.247,78  |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang                | 402.522.737,00    |
| Satuan Polisi Pamong Praja                                             | 35.423.080,00     |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 5.008.473.554,00  |
| Dinas Sosial                                                           | 65.674.049,00     |
| Dinas Tenaga Kerja                                                     | 366.725,00        |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 159.006.278,00    |
| Dinas Pangan dan Pertanian                                             | 1.523.055.820,00  |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                                  | 31.981.598.060,11 |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                   | 1.782.999.829,00  |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                                 | 3.871.825,00      |
| Dinas Perhubungan                                                      | 8.942.798.613,28  |
| Dinas Komunikasi dan Informatika                                       | 4.034.166,00      |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                                         | 14.315.350,00     |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 | 781.064,00        |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                              | 8.329.087,00      |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                       | 16.022.174,00     |
| Dinas Perikanan                                                        | 13.166.881,00     |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                    | 126.460.000,00    |
| Sekretariat Daerah                                                     | 63.714.096,00     |
| Sekretariat DPRD                                                       | 8.498.860,00      |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | 131.235.300,00    |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                             | 327.269.060,00    |
| Badan Pelayanan Pajak Daerah                                           | 1.147.000,00      |
| Badan Kepegawaian Daerah                                               | 288.369.130,00    |
| Inspektorat                                                            | 166.414.673,61    |
| Kecamatan Sidoarjo                                                     | 21.832.267,00     |
| Kecamatan Candi                                                        | 6.166.605,00      |
| Kecamatan Buduran                                                      | 34.054.730,00     |
| Kecamatan Wonoayu                                                      | 440.000,00        |
| Kecamatan Krian                                                        | 2.316.300,00      |
| Kecamatan Porong                                                       | 9.485.683,00      |
| Kecamatan Krembung                                                     | 2.637.870,00      |
| Kecamatan Jabon                                                        | 2.813.500,00      |
| Kecamatan Balongbendo                                                  | 12.020.030,00     |

| Nama OPD                          | JUMLAH                    |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kecamatan Tarik                   | 0,00                      |
| Kecamatan Taman                   | 4.692.650,00              |
| Kecamatan Waru                    | 0,00                      |
| Kecamatan Gedangan                | 38.474.974,00             |
| Kecamatan Sedati                  | 3.575.000,00              |
| Kecamatan Tanggulangin            | 5.913.525,00              |
| Kecamatan Tulangan                | 2.863.800,00              |
| Kecamatan Prambon                 | 478.687,00                |
| Kecamatan Sukodono                | 16.886.200,00             |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 68.545,00                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>133.647.414.639,50</b> |

**Tabel 5. 301 Rincian Persediaan per Jenis Barang**

| URAIAN                          | JUMLAH            |
|---------------------------------|-------------------|
| Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 12.281.962.834,58 |
| Bahan Kimia                     | 2.171.501.294,20  |
| Bahan Bakar dan Pelumas         | 1.883.869.303,88  |
| Bahan Baku                      | 590.742,00        |
| Bahan / Bibit Tanaman           | 40.137.500,00     |
| Isi Tabung Gas                  | 76.993.020,00     |
| Bahan Lainnya                   | 73.992.608,00     |
| Suku Cadang Alat Angkutan       | 2.249.637.708,30  |
| Suku Cadang Alat Besar          | 216.105.230,00    |
| Suku Cadang Alat Laboratorium   | 15.721.300,00     |
| Suku Cadang Alat Pertanian      | 32.563.850,00     |
| Suku Cadang Alat Bengkel        | 231.985.080,00    |
| Suku Cadang Lainnya             | 84.874.770,00     |
| Alat Tulis Kantor               | 3.878.306.889,23  |
| Kertas dan Cover                | 1.470.556.094,39  |
| Bahan Cetak                     | 536.896.110,00    |
| Benda Pos                       | 39.564.000,00     |
| Bahan Komputer                  | 963.173.604,53    |
| Perabot Kantor                  | 3.823.435.535,25  |
| Alat Listrik                    | 10.186.046.025,97 |
| Perlengkapan Dinas              | 241.514.030,00    |
| Perlengkapan Pendukung Olahraga | 1.778.220,00      |

| URAIAN                                                        | JUMLAH                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Suvenir / Cendera Mata                                        | 121.715.000,00            |
| Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                    | 62.819.581,00             |
| Obat                                                          | 59.760.014.423,76         |
| Obat - obatan Lainnya                                         | 5.459.707.022,61          |
| Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat        | 26.422.999.349,00         |
| Natura                                                        | 722.904.566,00            |
| Pakan                                                         | 495.000,00                |
| Natura dan Pakan Lainnya                                      | 4.460.564,80              |
| Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 64.302.698,00             |
| Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                        | 4.305.600,00              |
| Komponen Rambu-Rambu                                          | 522.485.084,00            |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>133.647.414.639,50</b> |

Terdapat sisa persediaan sebesar Rp2.953.301.602 yang belum dilakukan Pengesahan SP2B barang dan belum tercatat pada Laporan Keuangan. Rincian Persediaan terdapat pada **Lampiran 36** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

**Tabel 5. 302 Rincian Investasi Jangka Panjang**

| Uraian                   | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/(-) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Investasi Jangka Panjang | 687.596.591.941,65 | 643.507.483.845,75 | 6,85% |

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp687.596.591.941,65 mengalami kenaikan sebesar Rp44.089.108.095,90 atau 6,85% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp643.507.483.845,75.

Saldo Investasi Jangka Panjang pada per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 303 Rincian Investasi Jangka Panjang**

| Uraian                | Per 31 Des 2025           | Per 31 Des 2024           | +/(-)        |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Investasi Nonpermanen | 0,00                      | 0,00                      | 0,00%        |
| Investasi Permanen    | 687.596.591.941,65        | 643.507.483.845,75        | 6,85%        |
| <b>Jumlah</b>         | <b>687.596.591.941,65</b> | <b>643.507.483.845,75</b> | <b>6,85%</b> |

### 5.3.1.2.1 Investasi Permanen

**Tabel 5. 304 Investasi Permanen**

| Uraian             | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/( -) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Investasi Permanen | 687.596.591.941,65 | 643.507.483.845,75 | 6,85%  |

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp687.596.591.941,65 mengalami kenaikan sebesar Rp44.089.108.095,90 atau 6,85% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp643.507.483.845,75.

**Tabel 5. 305 Rincian Investasi Permanen**

| Uraian                                                  | Uraian Investasi                          | Dasar Hukum                                                                                                                                                             | 31 Desember 2025          | 31 Desember 2024          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Penyertaan Modal di PD Aneka Usaha        | Perda Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Sidoarjo                                                                 | 6.132.153.238,00          | 6.704.406.917,00          |
| Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Penyertaan Modal pada Perumda Delta Tirta | Perda Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo dan terakhir diubah namanya menjadi Perumda Delta Tirta Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2021 | 498.020.006.008,00        | 451.360.783.652,00        |
| Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Penyertaan Modal pada PT BPR Delta Artha  | Peraturan Daerah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha                                                                                        | 90.905.470.195,65         | 92.903.330.776,75         |
| Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim      |                                                                                                                                                                         | 92.538.962.500,00         | 92.538.962.500,00         |
|                                                         |                                           |                                                                                                                                                                         | <b>687.596.591.941,65</b> | <b>643.507.483.845,75</b> |

#### 5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

**Tabel 5. 306 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

| Uraian                             | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/( -) |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 687.596.591.941,65 | 643.507.483.845,75 | 6,85%  |

Penyertaan Modal merupakan bentuk investasi berupa kepemilikan surat berharga atau saham pada suatu perseroan terbatas dan/atau non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp687.596.591.941,65 mengalami kenaikan sebesar Rp44.089.108.095,90 atau 6,85% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp643.507.483.845,75.

**Tabel 5. 307 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2025**

| NAMA PERUSAHAAN     | JENIS PERUSAHAAN | METODE PENILAIAN | JENIS SAHAM YANG DIMILIKI                    | NILAI INVESTASI TAHUN INI | NILAI INVESTASI TAHUN LALU | % KEPEMILIKAN TAHUN INI | % KEPEMILIKAN TAHUN LALU |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Bank Jatim          | Persero          | Biaya            | Investasi dalam saham                        | 92.538.962.500,00         | 92.538.962.500,00          | 2,47                    | 2,47                     |
| PT. BPR Delta Artha | Perseroda        | Ekuitas          | Investasi dalam saham                        | 92.903.330.776,75         | 92.903.330.776,75          | 95                      | 95                       |
| PD. Aneka Usaha     | Perseroda        | Ekuitas          | Investasi dalam aset & investasi dalam saham | 6.704.406.917,00          | 6.704.406.917,00           | 100                     | 100                      |
| Perumda Delta Tirta | Perseroda        | Ekuitas          | Investasi dalam aset & investasi dalam saham | 451.360.783.652,00        | 451.360.783.652,00         | 100                     | 100                      |
|                     |                  |                  |                                              | <b>643.507.483.845,75</b> | <b>643.507.483.845,75</b>  |                         |                          |

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
2. PT. BPR Delta Artha dahulu bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Primayasa Pertiwi, didirikan berdasarkan akta notaris Nyonya Sukarini, S.H. No.16 tanggal 14 Februari 2000. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C- 4643.HT.01.04-Th.2000 tanggal 2 Maret 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.30 tanggal 14 April 2000, Tambahan No.229. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Santi Mina, S.H., M.Kn. No.3 tanggal 11 Januari 2022 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0004553.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022 dan surat efektif dari Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-52/KR.04/2022 tentang persetujuan pengalihan izin usaha BPR dari PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Perseroda.
3. PD. Aneka Usaha atau PD. Delta Grafika Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo didirikan dan berkedudukan di Sidoarjo, pada tanggal 1 September 1976 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo no.4 tahun 1975, dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 1 September 1976 no. HKII/187/76, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo Seri C pada tanggal 6 Janurai 1977, sesuai Peraturan Daerah pasal 4 ayat 2. PD.
4. Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, merupakan Perusahaan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tanggal 5 Juli 1978, dan diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1987

yang dikukuhkan dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 4 November 1978 Nomor HW498178 serta diundang dalam Lembaran Daerah tahun 1978 serf C tanggal 23 Desember 1978 Nomor 6, dan dirubah dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo tanggal 12 November 2021.

### 5.3.1.3 Aset Tetap

**Tabel 5. 308 Rincian Aset Tetap**

| Uraian     | Per 31 Des 2025       | Per 31 Des 2024       | +/( -) |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Aset Tetap | 21.232.411.248.692,05 | 20.972.246.200.489,90 | 1,24%  |

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.232.411.248.692,05 mengalami kenaikan sebesar Rp260.165.048.202,10 atau 1,24% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp20.972.246.200.489,90.

Saldo Aset Tetap pada per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 309 Rincian Aset Tetap**

| Uraian                       | Per 31 Des 2025              | Per 31 Des 2024              | +/( -)       |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Tanah                        | 15.757.085.153.809,10        | 15.713.692.534.667,10        | 0,28%        |
| Peralatan dan Mesin          | 2.669.347.345.799,57         | 2.498.456.465.952,11         | 6,84%        |
| Gedung dan Bangunan          | 4.256.006.445.175,76         | 4.014.815.377.925,16         | 6,01%        |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.872.559.729.290,86         | 5.579.548.037.374,28         | 5,25%        |
| Aset Tetap Lainnya           | 72.449.003.327,19            | 71.241.179.972,19            | 1,70%        |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan  | 166.108.736.831,90           | 143.179.847.170,59           | 16,01%       |
| Akumulasi Penyusutan         | (7.561.145.165.542,33)       | (7.048.687.242.571,53)       | 7,27%        |
| <b>Jumlah</b>                | <b>21.232.411.248.692,05</b> | <b>20.972.246.200.489,90</b> | <b>1,24%</b> |

#### 5.3.1.3.1 Tanah

**Tabel 5. 310 Tanah**

| Uraian | Per 31 Des 2025       | Per 31 Des 2024       | +/( -) |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Tanah  | 15.757.085.153.809,10 | 15.713.692.534.667,10 | 0,28%  |

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.757.085.153.809,10 mengalami kenaikan sebesar Rp43.392.619.142,00 atau 0,28% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp15.713.692.534.667,10.

#### **Rincian Saldo Tanah sebagai berikut:**

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)           | 15.757.085.153.809,10    |
| Aset Tetap Tanah 2024 (Neraca)                     | 15.713.692.534.667,10    |
| <b>Naik (Turun)</b>                                | <b>43.392.619.142,00</b> |
| <b>Penambahan</b>                                  |                          |
| Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA) | 23.250.256.678,00        |

|                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Penambahan tanah dari hibah                                                                            | 13.073.097.000,00        |
| Inventarisasi                                                                                          | 833.704.000,00           |
| Kapitalisasi barang jasa                                                                               | 20.879.100,00            |
| Reklase KIB tahun berjalan                                                                             | 43.689.600,00            |
| Reklase dari gedung                                                                                    | 2.389.553.400,00         |
| Jurnal Audit No 7 - Belum tercatat Tukar Menukar Tanah sesuai BAST<br>No. 900.1.13.4/9260/438.6.2/2024 | 7.537.097.000,00         |
| <b>Pengurangan</b>                                                                                     |                          |
| Penghapusan                                                                                            | (2.385.744.351,00)       |
| Reklase ke Bangunan Gedung                                                                             | (214.542.452,00)         |
| Reklase Ke KDP                                                                                         | (54.967.200,00)          |
| Jurnal Audit No 7 - Belum tercatat Tukar Menukar Tanah sesuai BAST<br>No. 900.1.13.4/9260/438.6.2/2024 | (1.100.403.633,00)       |
|                                                                                                        | <b>43.392.619.142,00</b> |

Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sebanyak 1.629 bidang pada 46 OPD dan yang belum bersertifikat sebanyak 1.180 bidang pada 22 OPD.

Bahwa sampai saat ini terdapat permasalahan hukum terkait status tanah di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon dengan penjelasan yang kami kutip dari surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 000/1680/438.5.1/2026 tanggal 4 Mei 2026 sebagai berikut :

**Tabel 5. 311 Rincian Permasalahan Hukum Status Tanah SMKN Prambon**

| NOMOR |                           | TANGGAL          | JENIS BERKAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO    | SURAT                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 05/FKKD/VIII/2022         | 12 Agustus 2022  | Permohonan pembangunan gedung SMA Negeri Prambon sederajat dari Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Prambon                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | 188.4/16/438.7.14.03/2022 | 20 Desember 2022 | Penetapan status tanah hak pakai yang berasal dari gogol tidak tetap menjadi gogol tetap (diatok) atas tanah seluas ±21.000 m2 yang terletak di Blok Stasiun Depan SDN Kedungwonokerto Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon. Penetapan status tanah dilakukan oleh Kepala Desa Kedungwonokerto melalui Surat Keputusan Kepala Desa. |
| 3     | 425/271/438.7.14/2023     | 01 Maret 2023    | Permohonan Pendirian SMA Negeri dari Kecamatan Prambon                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4     | 421/3006/438.5.1/2023     | 24 Maret 2023    | Permohonan penambahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sidoarjo dari Bupati Sidoarjo kepada Gubernur Jatim                                                                                                                                                                                                             |
| 5     | 421.3/51/438.5.1/2023     | 03 Mei 2023      | Nota Dinas Koordinasi ke Dinas Provinsi Jawa Timur terkait rencana penambahan SMA/SMK Negeri di Kecamatan Prambon dan Seda dari Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo                                                                                 |
| 6     | 005/1493/438.5.1/2023     | 04 Mei 2023      | Undangan Rapat Koordinasi 9 Mei 2023: rencana pembangunan SMA/SMK Negeri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada OPD terkait (ada notulen rapat)                                                                                                                                                                                  |
| 7     | 421.3/150.1/438.5.1/2023  | 05 Mei 2023      | Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo Kepada Kadis Pendik Jatim perihal Kordinasi penambahan SMA/SMK Negeri di Kecamatan Prambon dan Kecamatan Sedati                                                                                                                                                            |
| 8     | 2096/2023                 | 14 Juni 2023     | PETA BIDANG TANAH ATAS NAMA SUGIONO dari BPN Sidoarjo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOMOR |                                                                      | TANGGAL                                               | JENIS BERKAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO    | SURAT                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9     | Surat Perintah Kerja (SPK)<br>No: 027/PPK/SMP/05.22.01/438.5.1 /2023 | 24 Mei 2023<br>sampai<br>dengan 21<br>Agustus<br>2023 | FS SMKN PRAMBON oleh Konsultan PT. KONSALTA KUATORIAL Malang,(dengan nilai kontrak Rp99.035.000,00) berdasarkan kompetensi perusahaan melalui proses e-PL (elektronik pengadaan langsung) oleh pejabat pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan masa pelaksanaan (90 hari). Rekomendasi hasil FS : Berdasarkan aspek teknis, ekonomi, keuangan, sosial, lingkungan dan kelembagaan dapat direkomendasikan lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kecamatan Prambon:<br>(1). Desa Kedung Wonokerto paling potensial 1<br>(2). Desa Pejangkungan Potensial 2<br>(3). Desa Kedungsugo Potensial 3<br>(4). Desa Cangkringturi Potensial 4 |
| 10    | 01007/2.0004/PI/11/0378/1/X I/ 2023                                  | 13 November 2023                                      | Laporan Penilaian Aset Tanah Milik Masyarakat Desa Kedung Wonokerto Prambon Oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan Surabaya (nilai jasa appraisal Rp70.104.511,00) dengan hasil appraisal Rp25.497.203.638,00 (Rp1.208.054,75 x 21.106 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11    | -                                                                    | 21 November 2023                                      | Surat pernyataan menjual tanah dari pemilik SUGIONO dengan nilai permintaan Rp2.200.000,00 per m <sup>2</sup> , luasan 21.106 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12    | 04/PPL/XI/2023                                                       | 28 November 2023                                      | Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Pemilik Tanah (dari 76 ancer tanah sawah gogol gilir menjadi gogol tetap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13    | 421.3/210.1/438.5.1/2023                                             | 06 Desember 2023                                      | Undangan Rapat koordinasi SMKN Prambon dan Sedati (ada notulen rapat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14    | 00761/SPP-LS/1010100/2023                                            | 11 Desember 2023                                      | SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) dari Bidang Dalwas Sarpras sebesar : Rp25.497.103.300,00 (Pagu DPA Rp37.150.100.000,00) dengan lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15    | -                                                                    | 13 Desember 2023                                      | BERITA ACARA NEGOSIASI JUAL BELI Nomor: 027/441/438.5.1/2023 tanggal 13 Desember 2023 antara SUGIONO (Pemilik tanah dengan PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16    | 05                                                                   | 13 Desember 2023                                      | PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI diterbitkan Notaris An. DIDIT ADITYA HERMAWANTO, SH, M.Kn Nomer :04, tanggal 13 Desember 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17    | 05                                                                   | 13 Desember 2023                                      | KUASA JUAL diterbitkan Notaris An. DIDIT ADITYA HERMAWANTO, SH, M.Kn Nomer : 5 tanggal 13 Desember 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18    | 00698/SPM-LS/1010100/2023                                            | 14 Desember 2023                                      | SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) sebesar Rp25.497.103.300,00 (harga dibawah nilai Appraisal & terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp11.652.996.700,00) berupa SILPA dikembalikan ke Kas Daerah pada 31 Desember 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19    | DD/009242/SP2D-LS/2023                                               | 27 Desember 2023                                      | SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi Selaku Kuasa BUD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20.   | -                                                                    | -                                                     | Rekapitulasi Penerima Jual Beli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21    | 400.3/1680.7/101.2/2024                                              | 18 Maret 2024                                         | Surat balasan perihal permohonan penambahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Sidoarjo dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim (Rekomendasi Kadis Pendidikan Prov. Jatim adalah Pendirian SMK Negeri baru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22    | 500.17.2.3/1539/438.5.1/2024                                         | 25 April 2024                                         | Surat Kepala Dinas Dikbud perihal Permintaan Dokumen Sertipikat Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23    | -                                                                    | 30 April 2024                                         | Surat jawaban Sdr. Sugiono yang memohon Waktu penyelesaian s.d Juli 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24    | 000.2.3.2/1863/438.5.1/2024                                          | 18 Mei 2024                                           | Surat Permohonan persetujuan hibah berupa tanah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NOMOR |                                    | TANGGAL           | JENIS BERKAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO    | SURAT                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                    |                   | kepada Ibu Sekda Kab. Sidoarjo                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25    | 000.2.3.2/1633/438.5.1/2024        | 10 Juni 2024      | Permohonan dokumen kelengkapan pelaksanaan hibah tanah untuk SMKN dari Bapak Wakil Bupati Sidoarjo kepada Pj. Gubernur Jawa Timur                                                                                                                                                             |
| 26    | 101.007/SRT.PRGT/DLF/V/2024        | 10 Juni 2024      | Surat Advokat Sdr. Eko Budi Prasetyo perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Kepala BPPD Kab. Sidoarjo                                                                                                                                                                                 |
| 27    | 000.3/10256/438.5.1/2024           | 31 Agustus 2024   | Undangan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Tanah SMKN Prambon tanggal 2 September 2024                                                                                                                                                                                                 |
| 28    | 500.17/10750/438.5.1/2024          | 11 September 2024 | Undangan Rapat Pembahasan ke-2 tanggal 12 September 2024                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29    | 000.3/12522/438.5.1/2024           | 30 September 2024 | Laporan Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Tanah SMKN Prambon                                                                                                                                                                                                                           |
| 30    | 000.3/5322/438.5.1/2024            | 18 November 2024  | Permohonan Bantuan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah SMK Prambon                                                                                                                                                                                                                           |
| 31    | 900.1.13.1/77/438.6.3/2025         | 6 Januari 2025    | Permohonan Pendapat Hukum (LO) Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember                                                                                                                                                                                                                 |
| 32    | AHU-469.AH.02.01. TAHUN 2011       | 7 Oktober 2024    | AKTA PENEKASAN diterbitkan Notaris An. DIDIT ADITYA HERMAWANTO, SH, M.Kn Nomer : 04 tanggal 07 Oktober 2024 perihal Penuntasan Administrasi/Dokumen Kepemilikan Aset Tanah yang dibeli Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo                                                          |
| 33    | 072/SPR/DLF/I/2025                 | 7 JANUARI 2025    | Surat Defirmasi Law Firm Kepada Kepala BPPD Sidoarjo tentang Pencabutan Surat Peringatan                                                                                                                                                                                                      |
| 34    | 524/SPD/I/2025                     | 7 JANUARI 2025    | Surat Perjanjian Damai antara Eko Budi Prasetyo dengan Sugiono dan Kayan                                                                                                                                                                                                                      |
| 35    |                                    | 20 Januari 2025   | Ringkasan Pendapat Hukum (LO) atas permohonan revisi dan penataan NOP BPP atas obyek tanah di blok stasiun Desa Kedungwonokerto Kec. Prambon                                                                                                                                                  |
| 36    | -                                  | 17 Pebruari 2025  | Surat Sdr. Sugiono tentang proses pensertipikatan tanah                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37    | 400.7.22.2/599/438.5.1/2025        | 18 Pebruari 2025  | Surat Kepala Dinas Dikbud kepada Kantor Pertanahan perihal Permohonan pensertipikatan tanah SMKN Prambon                                                                                                                                                                                      |
| 38    | 707/2025                           | 23 APRIL 2025     | Peta Bidang Tanah An. Pemkab Sidoarjo                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39    | 336/9-35.15/VII/2025               | 15 JULI 2025      | Pertimbangan Teknik Pertanahan untuk Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Non Berusaha                                                                                                                                                                                                    |
| 40    | 500.16.7.2/27.PKKPR/438.5.16/2 025 | 28 JULI 2025      | Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha                                                                                                                                                                                                                               |
| 41    | 122632/2025                        | 3 September 2025  | Bukti Pendaftaran Online Pensertipikatan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42    | 400.3.13/5687/438.5.1/2025         | 18 Desember 2025  | Permohonan Pendampingan Hukum kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga                                                                                                                                                                                                               |
| 43    | 9069/B/UN3.FH/HK.09.02/2025        | 19 Desember 2025  | Surat Tugas Dekan Fakutas Hukum Universitas Airlangga atas nama <b>Dr. Agus Sekarmadji, SH., M.Hum.</b> untuk memberikan pendapat hukum / Legal Opinion (LO) atas Pengadaan Tanah SMKN Prambon melalui dana APBD Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. |
| 44    |                                    | 23 Desember 2025  | Legal Opinion/Pendapat Hukum dari <b>Dr. Agus Sekarmadji, SH., M.Hum</b> Fakultas Hukum Universitas Airlangga.                                                                                                                                                                                |
| 45    | 400.3.13/7/438.5.1/2026            | 2 Januari 2026    | Surat Laporan Kepada Bupati Sidoarjo tentang tindakanlanjut pengadaan tanah SMK Prambon.                                                                                                                                                                                                      |
| 46    | HP.01.01/42-35.15-100/1/2026       | 2 Januari 2026    | Surat Pemberitahuan ke 2 dari BPN terkait permohonan hak pakai tanah SMKN Prambon                                                                                                                                                                                                             |
| 47    | HP.01.01/153-35.15-100/1/2026      | 21 Januari 2026   | Surat Pemberitahuan ke 3 dari BPN terkait permohonan hak pakai tanah SMKN Prambon                                                                                                                                                                                                             |
| 48    | 400.3.13/264/438.5.1/2026          | 28 Januari 2026   | Surat ke Sekda atas surat ke 2 dan ke 3 BPN Tindakanlanjut Permohonan Hak Pakai Aset                                                                                                                                                                                                          |
| 49    | HP.01.01/355-35.15-100/11/2026     | 10 Februari 2026  | Penutupan Permohonan Hak Pakai Aset dari Aplikasi KKP (pengembalian berkas ke BPN)                                                                                                                                                                                                            |
| 50    | 100.2.2.5/811/438.5.1/2026         | 10 Maret 2026     | Surat Ke Sekda tentang tindakanlanjut permohonan hak pakai                                                                                                                                                                                                                                    |

| NOMOR             |       | TANGGAL | JENIS BERKAS |
|-------------------|-------|---------|--------------|
| NO                | SURAT |         |              |
| asset SMK Prambon |       |         |              |

Terdapat serah terima tukar menukar tanah antara Pemkab Sidoarjo dengan PT. Bumi Mitra Sekawan berupa aset Tanah yang terletak di Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo sesuai BAST nomor 900.1.13.4/9260/438.6.2/2024 tanggal 05 Agustus 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| PT Bumi Mitra Sekawan                                                                                                      | Tanah Milik Pemkab Sidoarjo                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eks Tanah Milik Pemkab Sidoarjo seluas 15.570 m <sup>2</sup> status tanah bukan termasuk lahan sawah yang dilindungi (LSD) | Eks Tanah Pengganti seluas 16.292 m <sup>2</sup> status tanah bukan termasuk lahan sawah yang dilindungi (LSD) |
| Rp6.898.682.000,00                                                                                                         | Rp7.537.097.000,00                                                                                             |

### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tabel 5. 312 Peralatan dan Mesin

| Uraian              | Per 31 Des 2025      | Per 31 Des 2024      | +/(-) |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Peralatan dan Mesin | 2.669.347.345.799,57 | 2.498.456.465.952,11 | 6,84% |

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.669.347.345.799,57 mengalami kenaikan sebesar Rp170.890.879.847,46 atau 6,84% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.498.456.465.952,11.

#### Rincian Saldo Peralatan & Mesin sebagai berikut :

|                                                                                                                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)                                                                                                                                            | 2.669.347.345.799,57      |
| Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Neraca)                                                                                                                                                | 2.498.456.465.952,11      |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                                                                                                                                               | <b>170.890.879.847,46</b> |
| <b>Penambahan</b>                                                                                                                                                                                 |                           |
| Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)                                                                                                                                  | 206.772.187.050,00        |
| Penerimaan Hibah Barang                                                                                                                                                                           | 10.514.552.292,00         |
| Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                         | 221.052.348,00            |
| Reklas dari Aset Lain-lain                                                                                                                                                                        | 395.376.200,00            |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari BM Bangunan dan Gedung                                                                                                                                        | 299.133.772,71            |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari BM Jalan, Instalasi, dan Jaringan                                                                                                                             | 5.641.959.915,00          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari BM Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                         | 5.772.000,00              |
| Koreksi Saldo awal                                                                                                                                                                                | 0,30                      |
| jurnal audit 17 - Hibah USG Internal Medicine dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai BAST No. KN.02.07/B.I/1853/2023 tanggal 13 April 2023 | 2.124.000.000,00          |
| <b>Pengurangan</b>                                                                                                                                                                                |                           |
| Pemberian Hibah Barang                                                                                                                                                                            | (109.000.000,00)          |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena -Rusak                                                                                                                                                       | (51.900.390.061,07)       |
| Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya                                                                                                                                                               | (13.600.000,00)           |
| BM yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi AT                                                                                                                                                     | (656.301.878,48)          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Bangunan dan Gedung                                                                                                                                             | (203.151.545,00)          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Jalan, Instalasi, dan Jaringan                                                                                                                                  | (118.626.050,00)          |

|                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Aset Tetap Lainnya                                                                         | (586.360.500,00)          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan                                                                | (36.678.010,00)           |
| Pembayaran Utang tahun 2024 - Aset sudah diakui di 2024                                                                      | (3.014.100,00)            |
| Jurnal Reviu 6f - BM BOS tdk dapat dikapitalisasi                                                                            | (10.092.800,00)           |
| Jurnal Reviu 6g - Reklas BM BOS dari Peralisin                                                                               | (232.975.150,00)          |
| jurnal audit 7 - Reklasifikasi atas Aset Tetap yang telah dijual namun belum ada SK penghapusan, di reklas ke Aset Lain-lain | (1.212.963.636,00)        |
|                                                                                                                              | <b>170.890.879.847,46</b> |

### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

**Tabel 5. 313 Gedung dan Bangunan**

| Uraian              | Per 31 Des 2025      | Per 31 Des 2024      | +/(-) |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Gedung dan Bangunan | 4.256.006.445.175,76 | 4.014.815.377.925,16 | 6,01% |

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.256.006.445.175,76 mengalami kenaikan sebesar Rp241.191.067.250,60 atau 6,01% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp4.014.815.377.925,16.

**Rincian Saldo Gedung & Bangunan sebagai berikut :**

|                                                                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)                                                                          | 4.256.006.445.175,76      |
| Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 (Neraca)                                                                              | 4.014.815.377.925,16      |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                                                                             | <b>241.191.067.250,60</b> |
| <b>Penambahan</b>                                                                                                               |                           |
| Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)                                                                | 252.754.816.360,50        |
| Penerimaan Hibah Barang                                                                                                         | 18.847.123.688,00         |
| Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 307.458.953,00            |
| Utang BM                                                                                                                        | 13.442.558.696,00         |
| Inventarisasi                                                                                                                   | 9.636.348.242,00          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap                                                                                                  | 53.077.150.171,42         |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Tanah                                                                                       | 214.542.452,00            |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Peralatan dan Mesin                                                                         | 203.151.545,00            |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Jalan, Instalasi, dan Jaringan                                                              | 389.259.809,00            |
| <b>Pengurangan</b>                                                                                                              |                           |
| Setor Kembali                                                                                                                   | (56.151.744,33)           |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Rusak                                                                                      | (14.542.685.470,59)       |
| Koreksi Salah Pencatatan                                                                                                        | (0,32)                    |
| Belanja modal yang tidak dapat dikapitalisasi                                                                                   | (3.321.664.801,45)        |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Tanah                                                                                         | (2.389.553.400,00)        |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Peralatan dan Mesin                                                                           | (299.133.772,71)          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Jalan, Instalasi, dan Jaringan                                                                | (1.654.234.696,28)        |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan                                                                   | (91.749.006.497,00)       |
| Utang BM Tahun Lalu                                                                                                             | (758.817.102,00)          |
| Temuan Kurang Volume (Piutang TGR)                                                                                              | (282.653.581,86)          |
| Reklasifikasi ke Properti Investasi                                                                                             | (38.925.068,00)           |
| Jurnal Reviu 4a - Reklas gedung PALD                                                                                            | 26.995.200,00             |
| Jurnal Reviu 5 - penyesuaian piutang TGR                                                                                        | 19.423.702,00             |
| Jurnal Reviu 6c - Koreksi pend hibah musholla                                                                                   | (314.250.000,00)          |
| Jurnal Reviu 6e - Reklas dari KDP                                                                                               | 26.358.302.684,60         |
| Jurnal Reviu 6f - BM BOS yang tdk diakui aset                                                                                   | (33.660.000,00)           |
| Jurnal Reviu 6g - Reklas BM BOS ke JIJ                                                                                          | (3.394.767,00)            |
| Jurnal Reviu 6h - penyesuaian utang                                                                                             | (4.657.941.306,38)        |
| Jurnal Reviu 6i - Penyesuaian ekstrakomptabel                                                                                   | (26.212.525,00)           |
| Jurnal audit no 7 - Reklasifikasi atas Aset Tetap yang telah dijual namun belum ada SK penghapusan, di reklas ke Aset Lain-lain | (13.957.779.520,00)       |

#### 5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 5. 314 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

| Uraian                       | Per 31 Des 2025      | Per 31 Des 2024      | +/( -) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.872.559.729.290,86 | 5.579.548.037.374,28 | 5,25%  |

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.872.559.729.290,86 mengalami kenaikan sebesar Rp293.011.691.916,58 atau 5,25% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp5.579.548.037.374,28.

**Rincian Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut :**

|                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)           | 5.872.559.729.290,86      |
| Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 (Neraca)               | 5.579.548.037.374,28      |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                      | <b>293.011.691.916,58</b> |
| <b>Penambahan</b>                                                        |                           |
| Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA) | 199.730.563.281,32        |
| Penerimaan Hibah Barang                                                  | 110.755.733.884,00        |
| Utang BM Jasa konsultan                                                  | 198.279.005,00            |
| Reklasifikasi dari ALL                                                   | 149.704.300,00            |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Peralatan dan Mesin                  | 118.626.050,00            |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Bangunan dan Gedung                  | 1.654.234.696,28          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan          | 30.207.888.949,40         |
| <b>Pengurangan</b>                                                       |                           |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                            | (2.740.463.295,42)        |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Peralatan dan Mesin                    | (5.641.959.915,00)        |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Bangunan dan Gedung                    | (389.259.809,00)          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap ke Konstruksi dalam Pengerjaan            | (40.246.092.158,00)       |
| Belanja modal tidak dikapitalisasi                                       | (208.208.424,00)          |
| Pembayaran Hutang Tahun Lalu                                             | (592.234.784,00)          |
| Setor Kembali BM Tahun Lalu                                              | (19.143.600,00)           |
| Jurnal Reviu 3a - Koreksi pencatatan utang                               | (21.075.681,00)           |
| Jurnal Reviu 6g - Reklas BM BOS ke JIJ                                   | 55.099.417,00             |
|                                                                          | <b>293.011.691.916,58</b> |

#### 5.3.1.3.1 Aset Tetap Lainnya

Tabel 5. 315 Aset Tetap Lainnya

| Uraian             | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   | +/( -) |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Aset Tetap Lainnya | 72.449.003.327,19 | 71.241.179.972,19 | 1,70%  |

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.449.003.327,19 mengalami kenaikan sebesar Rp1.207.823.355,00 atau 1,70% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp71.241.179.972,19.

**Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :**

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)                      | 72.449.003.327,19       |
| Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 (Neraca)                          | 71.241.179.972,19       |
| <b>Naik (Turun)</b>                                             | <b>1.207.823.355,00</b> |
| <b>Penambahan</b>                                               |                         |
| Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA) | 584.702.457,00          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan     | 586.360.500,00          |
| Penerimaan Hibah Barang                                         | 181.270.500,00          |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan     | 800.000,00              |
| <b>Pengurangan</b>                                              |                         |
| Belanja modal tidak dapat dikapitalisasi                        | (95.415.000,00)         |
| Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan     | (5.772.000,00)          |
| Reklas Ke Aset Lain-Lain                                        | (26.092.645,00)         |
| Software                                                        | (18.030.457,00)         |
|                                                                 | <b>1.207.823.355,00</b> |

### 5.3.1.3.2 Konstruksi Dalam Pengerjaan

**Tabel 5. 316 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| Uraian                      | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/(-)  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 166.108.736.831,90 | 143.179.847.170,59 | 16,01% |

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp166.108.736.831,90 mengalami kenaikan sebesar Rp22.928.889.661,31 atau 16,01% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp143.179.847.170,59. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan secara rinci dalam **lampiran 21** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 317 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD**

| SKPD                                                    | KONSTRUKSI DLM Pengerjaan |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                         | 21.604.171.210,90         |
| Dinas Kesehatan                                         | 8.040.021.722,00          |
| RSUD R.T. NOTOPURO                                      | 23.289.940.215,00         |
| RSUD SIDOARJO BARAT                                     | 223.679.250,00            |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air     | 44.144.881.458,00         |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang | 29.748.200.592,00         |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | 8.677.980,00              |
| Dinas Pangan dan Pertanian                              | 65.944.000,00             |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                   | 24.407.010.270,00         |
| Dinas Perhubungan                                       | 93.036.662,00             |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                          | 19.755.500,00             |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 5.223.245,00              |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata               | 288.899.176,00            |
| Dinas Perikanan                                         | 168.756.834,00            |

| SKPD                                       | KONSTRUKSI DLM Pengerjaan |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan        | 5.743.897.060,00          |
| Sekretariat Daerah                         | 22.800.000,00             |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 8.158.762.000,00          |
| Kecamatan Taman                            | 54.967.200,00             |
| Kecamatan Gedangan                         | 20.112.457,00             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>166.108.736.831,90</b> |

### 5.3.1.3.3 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah akumulasi dari nilai aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2025 telah melakukan penyusutan aset tetap dengan nilai akumulasi sebesar Rp7.569.958.241.759,33.

**Tabel 5. 318 Akumulasi Penyusutan**

| Uraian               | Per 31 Des 2025        | Per 31 Des 2024        | +/(-) |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------|
| Akumulasi Penyusutan | (7.561.145.165.542,33) | (7.048.687.242.571,53) | 7,27% |

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp7.561.145.165.542,33) mengalami kenaikan sebesar Rp512.457.922.970,80 atau 7,27% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar (Rp7.048.687.242.571,53).

#### **Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut :**

|                                                                                                                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)                                                                                                                          | (2.180.165.732.879,50)        |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (Neraca)                                                                                                                              | (1.995.231.738.736,93)        |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>184.933.994.142,57</b>     |
| <b>Penambahan</b>                                                                                                                                                                                    |                               |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)                                                                                                                                             | 229.063.565.534,62            |
| Koreksi Saldo Awal                                                                                                                                                                                   | 0,83                          |
| Penambahan akumulasi penyusutan karena Hibah                                                                                                                                                         | 7.325.110.835,19              |
| Reklas dari Aset Lain-lain                                                                                                                                                                           | 395.376.200,00                |
| jurnal audit no 17 - Hibah USG Internal Medicine dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai BAST No. KN.02.07/B.I/1853/2023 tanggal 13 April 2023 | 1.274.400.000,00              |
| <b>Pengurangan</b>                                                                                                                                                                                   |                               |
| Reklase ke Rusak berat                                                                                                                                                                               | (51.674.397.411,07)           |
| Koreksi Pencatatan - perikanan                                                                                                                                                                       | (27.225.000,00)               |
| Jurnal Reviu 6k - Reklas ke ALL                                                                                                                                                                      | (217.300.000,00)              |
| jurnal audit no 7 - Reklasifikasi atas Aset Tetap yang telah dijual namun belum ada SK penghapusan, di reklas ke Aset Lain-lain                                                                      | (1.205.536.017,00)            |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>184.933.994.142,57</b>     |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)</b>                                                                                                                   | <b>(1.704.821.460.637,91)</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 (Neraca)</b>                                                                                                                       | <b>(1.642.185.769.666,50)</b> |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>62.635.690.971,41</b>      |
| <b>Penambahan</b>                                                                                                                                                                                    |                               |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)                                                                                                                                             | 70.150.046.483,70             |
| Penambahan akumulasi penyusutan karena Hibah                                                                                                                                                         | 15.990.957,32                 |

|                                                                                                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Penambahan akumulasi dari Inventarisasi                                                                                         | 3.294.201.131,48              |
| <b>Pengurangan</b>                                                                                                              |                               |
| Koreksi Saldo Awal                                                                                                              | (0,92)                        |
| Reklase ke Aset rusak berat                                                                                                     | (1.941.465.036,67)            |
| Kurang Volume hasil cek fisik                                                                                                   | (1.142.363,50)                |
| jurnal audit no 7 - Reklasifikasi atas Aset Tetap yang telah dijual namun belum ada SK penghapusan, di reklas ke Aset Lain-lain | (8.881.940.200,00)            |
|                                                                                                                                 | <b>62.635.690.971,41</b>      |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)</b>                                      | <b>(3.662.974.046.509,59)</b> |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 (Neraca)</b>                                          | <b>(3.398.625.418.452,97)</b> |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                                                                             | <b>264.348.628.056,62</b>     |
| <b>Penambahan</b>                                                                                                               |                               |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)                                                     | 254.924.189.273,31            |
| Reklas dari ALL                                                                                                                 | 65.869.892,00                 |
| Inventarisasi - Fasum PSU                                                                                                       | 1.460.220.422,80              |
| Penambahan akumulasi penyusutan karena Hibah                                                                                    | 9.880.432.776,91              |
| <b>Pengurangan</b>                                                                                                              |                               |
| Koreksi saldo awal perhitungan akumulasi penyusutan                                                                             | (0,73)                        |
| Reklase ke Aset Lain-lain                                                                                                       | (1.982.084.307,67)            |
|                                                                                                                                 | <b>264.348.628.056,62</b>     |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)</b>                                                          | <b>(13.183.925.515,33)</b>    |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 (Neraca)</b>                                                              | <b>(12.644.315.715,13)</b>    |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                                                                             | <b>539.609.800,20</b>         |
| <b>Penambahan</b>                                                                                                               |                               |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)                                                                         | 539.609.800,20                |
|                                                                                                                                 | <b>539.609.800,20</b>         |

#### 5.3.1.4 Aset Lainnya

**Tabel 5. 319 Aset Lainnya**

| Uraian       | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/( -) |
|--------------|--------------------|--------------------|--------|
| Aset Lainnya | 458.333.263.039,37 | 451.701.572.348,69 | 1,47%  |

Aset Lainnya adalah aset tetap yang tidak dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp444.529.100.278,99 mengalami penurunan sebesar Rp7.172.472.069,70 atau 1,59% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp451.701.572.348,69.

Saldo Aset Lainnya pada per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 320 Rincian Aset Lainnya**

| Uraian                         | Per 31 Des 2025     | Per 31 Des 2024     | +/( -) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Tuntutan Ganti Rugi            | 0,00                | 0,00                | 0,00%  |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga  | 297.064.192.000,00  | 297.064.192.000,00  | 0,00%  |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan | (43.741.263.892,49) | (40.967.350.498,91) | 6,77%  |

| Uraian                              | Per 31 Des 2025           | Per 31 Des 2024           | +/( -)         |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Aset Tak Berwujud                   | 33.718.798.724,83         | 33.506.521.824,83         | 0,63%          |
| Akumulasi Amortisasi                | (31.837.099.332,60)       | (30.066.229.549,32)       | 5,89%          |
| Aset Lain-Lain                      | 694.139.888.837,35        | 710.688.363.920,54        | (2,33%)        |
| Akumulasi Penyusutan aset Lain-Lain | (504.815.416.058,10)      | (519.162.702.348,45)      | (2,76%)        |
| Dana Treasury Deposit Facility      | 0,00                      | 638.777.000,00            | (100,00%)      |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>444.529.100.278,99</b> | <b>451.701.572.348,69</b> | <b>(1,59%)</b> |

#### 5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi

Tabel 5. 321 Tuntutan Ganti Rugi

| Uraian              | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/( -) |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Tuntutan Ganti Rugi | 0,00            | 0,00            | 0,00%  |

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

#### 5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tabel 5. 322 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

| Uraian                        | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/( -) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 297.064.192.000,00 | 297.064.192.000,00 | 0,00%  |

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara pemerintah dengan mitra yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp256.096.841.501,09 sama dengan Tahun 2024 sebesar Rp256.096.841.501,09.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan secara rinci dalam **lampiran 22** yang merupakan bagian dari LKPD.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dengan 9 (sembilan) aset dengan nilai Rp297.064.192.000,00.

Penjelasan lebih lanjut terkait kemitraan yang dikelola oleh Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan hak pada PT. Bumi Citra Properindo untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan lahan gedung wanita di jalan Diponegoro Sidoarjo sebagai pusat perniagaan Graha Delta Kencana yang meliputi Gedung perniagaan dan gedung convention hall dengan bentuk kerjasama BOT dengan memberikan status lahan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas hak pengelolaan lahan (HPL) untuk jangka waktu 25 Tahun. Pelaksanaan kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Lahan Gedung Wanita Jalan Diponegoro Sidoarjo sebagai Pusat Perniagaan Graha Mutiara Delta Nomor 18 Tahun 2003 dan dilakukan addendum sebanyak dua kali yaitu melalui addendum Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 21 Tahun 2009. Kewajiban PT. Bumi Citra Properindo menyetorkan kontribusi sebagai berikut:
  - lima Tahun pertama sejak dua Tahun terbitnya sertifikat HBG diatas HPL sebesar Rp325.000.000,00 atau Rp65.000.000,00 per Tahun;
  - lima Tahun kedua sebesar Rp357.500.000 atau Rp71.500.000,00 per Tahun;
  - lima Tahun ketiga sebesar Rp390.000.000,00 atau Rp78.000.000,00 per Tahun;

- lima Tahun keempat sebesar Rp422.500.000,00 atau Rp84.500.000,00 per Tahun;
  - lima Tahun kelima sebesar Rp455.000.000,00 atau Rp91.000.000,00 per Tahun.
2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan hak pada PT. Indraco untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan eks lapangan golf di di Jalan Pahlawan Sidoarjo sebagai Hotel & Trade Center "SUN CITY PLAZA" bentuk kerjasama BOT dengan memberikan status lahan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas hak pengelolaan lahan (HPL) untuk jangka waktu 30 Tahun. Pelaksanaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Hotel dan Trade Center "Sun City Plaza" di Lahan eks Lapangan Golf – Jalan Pahlawan Sidoarjo tanggal 29 September 2003. PT. Indraco wajib memberikan kontribusi berupa royalty dengan ketentuan:
    - Dihitung mulai penandatanganan Perjanjian Kerjasama hingga Tahun ketiga masa operasional pembangunan sebesar Rp150.000.000,00 dibayar setiap Tahun Rp50.000.000,00;
    - Dihitung Tahun keempat sampai Tahun ke lima belas masa komersial (operasional) sebesar Rp1.800.000.000,00 dibayar setiap Tahun Rp150.000.000,00;
    - Dihitung mulai Tahun keenam belas sampai ke tiga puluh masa komersial (operasional) sebesar Rp3.000.000.000,00 dibayar setiap Tahun Rp200.000.000,00.
  3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan hak pada PT. Bangun Pilar Perkasa untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan tanah ex TKD sebagai Pasar Kelurahan Krian seluas 19.500 M2 yang terletak di Kelurahan Krian Kec. Krian. Pelaksanaan kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Tanah Eks TKD Kelurahan Krian Kecamatan Krian untuk Pembangunan Pasar Kelurahan Krian Nomor 07 Tahun 2005.
  4. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan hak pada PT. Setiamandiri Mitratama Tbk untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Put-Put Golf & Games dan Ponti Sport Cantina dan Papa Ron's Pizza di lahan sekitar Monumen Ponti Sidoarjo Jl. Pahlawan Sidoarjo seluas +8.000M2 sesuai dengan sertipikat Hak Pakai (Dalam Proses) dengan bentuk kerjasama BOT serta Royalty kepada Pihak Pertama dengan memberikan status lahan kepada Pihak Kedua Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Pelaksanaan kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Papa Ron's Pizza, Ponti Sport Cantina, Putt-Putt Golf & Games di Lahan Monumen Ponti Nomor 18 Tahun 2004. Pemkab Sidoarjo berhak menerima pembayaran royalty untuk Tahun pertama sampai dengan Tahun ke dua puluh lima sebesar 4% per bulan dari penjualan bersih setelah dikurangi pajak dan dibayar setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

#### 5.3.1.4.2.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

| Tabel 5. 323 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga |                     |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Uraian                                                          | Per 31 Des 2025     | Per 31 Des 2024     | +/(-) |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga              | (43.741.263.892,49) | (40.967.350.498,91) | 6,77% |

Penyusutan adalah akumulasi dari nilai kemitraan dengan pihak ketiga yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.741.263.892,49 mengalami peningkatan Rp2.773.913.393,58 atau 6,77% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar

Rp40.967.350.498,91.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Tahun Berjalan (Neraca) | (43.741.263.892,49)       |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Tahun 2022 (Neraca)     | (40.967.350.498,91)       |
| <b>Naik (Turun)</b>                                         | <b>(2.773.913.393,58)</b> |
| <b>Penambahan</b>                                           |                           |
| Beban Penyusutan Tahun Berjalan (LO)                        | 3.169.073.978,75          |
| Reklas ke Properti Investasi                                | (395.160.585,16)          |
| Koreksi Saldo Awal                                          | (0,01)                    |
|                                                             | <b>2.773.913.393,58</b>   |

### 5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

**Tabel 5. 324 Aset Tidak Berwujud**

| Uraian            | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   | +/(-) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Aset Tak Berwujud | 33.718.798.724,83 | 33.506.521.824,83 | 0,63% |

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.718.798.724,83 mengalami kenaikan sebesar Rp212.276.900,00 atau 0,63 % jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp33.506.521.824,83. Rincian Aset Tidak Berwujud terdapat pada **Lampiran 23** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPD.

**Rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :**

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun Berjalan (Neraca) | 33.718.798.724,83     |
| Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 (Neraca)     | 33.506.521.824,83     |
| <b>Naik (Turun)</b>                                        | <b>212.276.900,00</b> |
| <b>Penambahan</b>                                          |                       |
| Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)  | 244.871.904,00        |
| Inventarisasi Software                                     | 98.612.400,00         |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan | 18.030.457,00         |
| <b>Pengurangan</b>                                         |                       |
| Belanja modal tidak dapat dikapitalisasi                   | (149.237.861,00)      |
|                                                            | <b>212.276.900,00</b> |

### 5.3.1.4.3.1 Akumulasi Amortisasi

**Tabel 5. 325 Akumulasi Amortisasi**

| Uraian               | Per 31 Des 2025     | Per 31 Des 2024     | +/(-) |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Akumulasi Amortisasi | (31.837.099.332,60) | (30.066.229.549,32) | 5,89% |

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.837.099.332,60 mengalami kenaikan sebesar Rp1.770.869.783,28 atau 5,89% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp30.066.229.549,32.

**Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca) | (31.837.099.332,60)     |
| Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 (Neraca)     | (30.066.229.549,32)     |
| <b>Naik (Turun)</b>                          | <b>1.770.869.783,28</b> |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Penambahan</b>                    |                         |
| Beban Amortisasi Tahun berjalan (LO) | 1.769.226.243,40        |
| Inventarisasi software RSUD Sibar    | 1.643.540,00            |
| Koreksi Saldo Awal                   | (0,12)                  |
|                                      | <b>1.770.869.783,28</b> |

#### 5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

**Tabel 5. 326 Aset Lain-Lain**

| Uraian         | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/(-)   |
|----------------|--------------------|--------------------|---------|
| Aset Lain-Lain | 694.139.888.837,35 | 710.688.363.920,54 | (2,33%) |

Aset lain lain adalah aset tetap yang tidak dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp694.139.888.837,35 mengalami penurunan sebesar Rp16.548.475.083,19 atau 2,33% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp710.688.363.920,54. Rincian Aset Lain-Lain disajikan secara rinci dalam **lampiran 24** yang merupakan bagian dari LKPD.

Terdapat aset lain-lain yang dilelang dengan rincian sebagai berikut :

| OPD                                                 | NILAI PEROLEHAN   | AKUMULASI PENYUSUTAN | NOMOR LELANG      | TANGGAL LELANG |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| DINAS KESEHATAN                                     | 9.716.508.542,95  | 4.563.250.288,29     | 233/10.02/2025-01 | 25/06/2025     |
| SEKRETARIAT DAERAH                                  | 845.514.000,00    | 823.076.500,00       | 262/10.02/2025-01 | 09/07/2025     |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    | 199.060.000,00    | 199.060.000,00       | 262/10.02/2025-01 | 09/07/2025     |
| DINAS KESEHATAN                                     | 14.088.863.756,11 | 13.768.289.878,50    | 273/10.02/2025-01 | 11/07/2025     |
| DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | 792.701.455,00    | 792.701.455,00       | 414/10.02/2025-01 | 24/09/2025     |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                    | 6.016.409.000,00  | 6.016.409.000,00     | 414/10.02/2025-01 | 24/09/2025     |
| DINAS PERHUBUNGAN                                   | 234.700.000,00    | 229.275.000,00       | 494/10.02/2025-01 | 04/11/2025     |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                 | 482.800.000,00    | 482.800.000,00       | 494/10.02/2025-01 | 04/11/2025     |
| DINAS TENAGA KERJA                                  | 242.090.000,00    | 242.090.000,00       | 494/10.02/2025-01 | 04/11/2025     |
| KECAMATAN JABON                                     | 101.520.000,00    | 101.520.000,00       | 494/10.02/2025-01 | 04/11/2025     |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                            | 59.200.000,00     | 59.200.000,00        | 494/10.02/2025-01 | 04/11/2025     |
| RSUD RT NOTOPURO                                    | 66.060.992.057,60 | 52.671.900.990,49    | 566/10.02/2025-01 | 04/12/2025     |

Terdapat pencatatan atas uang jaminan penyewa rusunawa yang dititipkan ke bendahara penerimaan sebagai jaminan sewa (kas yang dibatasi penggunaannya) dengan rincian sbb:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Rusunawa Pucang       | Rp137.306.800,00        |
| 2. Rusunawa Ngelom       | Rp177.870.600,00        |
| 3. Rusunawa Bulusidokare | Rp 50.755.000,00        |
| 4. Rusunawa Wonocolo     | <u>Rp165.475.000,00</u> |
| Total                    | Rp538.782.400,00        |

**Rincian Aset Lain-lain sebagai berikut :**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Aset Lain-Lain Tahun Berjalan (Neraca) | 694.139.888.837,35 |
| Aset Lain-Lain Tahun 2024 (Neraca)     | 710.688.363.920,54 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Naik (Turun)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(16.548.475.083,19)</b> |
| <b>Penambahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.595.375.823,08          |
| Jurnal Reviu 6a - penghapusan Aset Lain-lain yang ternyata belum terdapat SK Penghapusannya sehingga perlu untuk dikoreksi                                                                                                                                                                                                                       | 28.418.748.283,66          |
| Jurnal audit No 9 - Terdapat Pengenaan premi bagi pengunjung atas pemakaian kolam renang GOR sesuai PKS No. 000.4.7.2/1250/438.5.17/2024 sebesar Rp1.000,00 per pengunjung yang dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pada bulan Desember tahun 2025 terdapat premi sebesar Rp3.356.000 yang disetorkan tanggal 02 Januari 2026. | 3.356.000,00               |
| Jurnal audit No 7 - Reklasifikasi atas Aset Tetap yang telah dijual namun belum ada SK penghapusan, di reklas ke Aset Lain-lain                                                                                                                                                                                                                  | 15.170.743.156,00          |
| <b>Pengurangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (556.353.399,61)           |
| Reklasifikasi ke Aset Tetap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1.535.493.500,00)         |
| penghapusan aset yang terjual sesuai risalah lelang (jurnal audit No 14)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (30.637.046.652,66)        |
| Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (167.445.982,00)           |
| Jurnal audit No 7 - Perhitungan surplus defisit atas penghapusan aset yang terjual sesuai risalah lelang                                                                                                                                                                                                                                         | (98.840.358.811,66)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(16.548.475.083,19)</b> |

#### 5.3.1.4.4.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

**Tabel 5. 327 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**

| Uraian         | Per 31 Des 2025      | Per 31 Des 2024      | +/( -)  |
|----------------|----------------------|----------------------|---------|
| Aset Lain-Lain | (504.815.416.058,09) | (519.162.702.348,45) | (2,76%) |

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp504.815.416.058,09) mengalami penurunan sebesar Rp14.347.286.290,36 atau 2,76% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar (Rp519.162.702.348,45).

#### **Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebagai berikut :**

|                                                                                                                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun Berjalan (Neraca)                                                                                        | (504.815.416.058,10)       |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2024 (Neraca)                                                                                            | (519.162.702.348,45)       |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                                                                                                | <b>(14.347.286.290,35)</b> |
| <b>Penambahan</b>                                                                                                                                  |                            |
| Beban Penyusutan Tahun Berjalan (LO)                                                                                                               | 52.110.430,16              |
| Reklase Akumulasi Penyusutan dari Akm Penyusutan Aset Tetap                                                                                        | 55.597.946.755,41          |
| jurnal Reviu 6k - Pencatatan penyusutan atas Aset Tetap - Peralatan Mesin yang direklas ke Aset Lain-lain (usulan penghapusan) yang belum tercatat | 217.300.000,00             |
| Koreksi Saldo Awal                                                                                                                                 | (0,64)                     |
| Reklase Akumulasi Penyusutan ke Akm Penyusutan Aset Tetap                                                                                          | (352.546.580,00)           |
| jurnal audit no 7 - Perhitungan surplus defisit atas penghapusan aset yang terjual sesuai risalah lelang                                           | (79.949.573.112,28)        |
| jurnal audit no 7 - Reklasifikasi atas Aset Tetap yang telah dijual namun belum ada SK penghapusan, di reklas ke Aset Lain-lain                    | 10.087.476.217,00          |
|                                                                                                                                                    | <b>(14.347.286.290,35)</b> |

#### 5.3.1.4.5 Dana Treasury Deposit Facility

**Tabel 5. 328 Rincian Dana Treasury Deposit Facility**

| Uraian | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | +/( -) |
|--------|-----------------|-----------------|--------|
|--------|-----------------|-----------------|--------|

|                                |      |                          |
|--------------------------------|------|--------------------------|
| Dana Treasury Deposit Facility | 0,00 | 638.777.000,00 (100,00%) |
|--------------------------------|------|--------------------------|

Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Nilai TDF per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp638.777.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp638.777.000,00.

#### 5.3.1.4.6 Properti Investasi

**Tabel 5. 329 Property Investasi**

| Uraian             | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   | +/( -)  |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Properti Investasi | 90.202.026.027,36 | 90.953.422.129,68 | (0,83%) |

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Untuk Tahun 2025, Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.202.026.027,36 mengalami penurunan sebesar Rp751.396.102,32 atau 0,83% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp90.953.422.129,68. Rincian Properti Investasi disajikan secara rinci dalam **lampiran 25** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 330 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

| Uraian             | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/( -) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Properti Investasi | (7.134.000.482,64) | (6.343.679.312,32) | 12,46% |

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.134.000.482,64 mengalami kenaikan sebesar Rp790.321.170,32 atau 12,46% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp6.343.679.312,32.

#### **Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebagai berikut :**

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun Berjalan (Neraca)         | (7.134.000.482,64)      |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024 (Neraca)             | (6.343.679.312,32)      |
| <b>Naik (Turun)</b>                                                     | <b>(790.321.170,32)</b> |
| <b>Penambahan</b>                                                       |                         |
| Beban Penyusutan Tahun Berjalan (LO)                                    | 395.160.585,16          |
| Reklase Akumulasi Penyusutan dari Akm Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga | 395.160.585,16          |
|                                                                         | <b>790.321.170,32</b>   |

#### 5.3.2 Kewajiban

**Tabel 5. 331 Rincian Kewajiban**

| Uraian    | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | %       |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| Kewajiban | 149.774.520.850,27 | 204.378.954.952,78 | (26,72) |

Kewajiban adalah tagihan yang timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp154.398.812.479,65 mengalami penurunan sebesar Rp49.980.142.473,13 atau 24,45% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp204.378.954.952,78.

### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

**Tabel 5. 332 Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

| Uraian                  | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | %       |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Kewajiban Jangka Pendek | 152.605.409.600,81 | 204.378.954.952,78 | (25,33) |

Kewajiban jangka pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp152.605.409.600,81 mengalami penurunan sebesar Rp51.773.545.351,94 atau 25,33% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp204.378.954.952,75. Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 333 Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

| Uraian                               | Per 31 Des 2025           | Per 31 Des 2024           | %               |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Utang Bunga                          | 122.779.515,54            | 169.325.331,97            | (27,49%)        |
| Utang Pajak                          | 15.000,00                 | 0,00                      | 100,00%         |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri LKB | 24.286.058.018,31         | 48.572.116.036,59         | (50,00%)        |
| Pendapatan Diterima Dimuka           | 23.650.658.314,01         | 22.594.087.932,92         | 4,68%           |
| Utang Belanja                        | 79.158.986.563,89         | 94.823.298.433,23         | (16,52%)        |
| Utang Jangka Pendek Lainnya          | 1.290.549.804,00          | 1.574.847.107,00          | (18,05%)        |
| Utang Transfer                       | 24.096.362.385,06         | 36.645.280.111,04         | (34,24%)        |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>152.605.409.600,81</b> | <b>204.378.954.952,75</b> | <b>(25,33%)</b> |

#### 5.3.2.1.1 Utang Bunga

**Tabel Rincian Utang Bunga**

| Uraian      | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | + / (-)  |
|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| Utang Bunga | 122.779.515,54  | 169.325.331,97  | (27,49%) |

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2025 sebesar Rp122.779.515,54 mengalami kenaikan sebesar Rp46.545.816,43 atau 27,49% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp169.325.331,97.

#### 5.3.2.1.2 Utang Pajak

**Tabel 5. 334 Rincian Utang Pajak**

| Uraian      | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | + / (-) |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| Utang Pajak | 15.000,00       | 0,00            | 100%    |

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Sesuai BA Pemeriksaan Kas No. 400.3.5.5/280/438.5.1.1.40/2026 terdapat Sisa kas BOSDA SMP Negeri 1 Gedangan yang merupakan pemungutan pajak honor tugas tambahan tahun 2025 senilai Rp15.000,00 atas nama Yudha Permana Rahmadani S.Pd, yang disetorkan pada tanggal 15 April 2026.

#### 5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank

**Tabel 5. 335 Rincian Utang Bunga**

| Uraian                               | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   | +/(-)   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri LKB | 24.286.058.018,31 | 48.572.116.036,59 | (50,00) |

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank merupakan Pinjaman melalui BLUD oleh RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dengan PT. Bank Jatim sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 17 Mei 2025, memberikan fasilitas pinjaman Kredit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 17 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2026. Pinjaman dengan bunga pembayaran sebesar 7% per *annum efektif floating rate*. Nilai realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp24.286.058.018,31.

#### 5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

**Tabel 5. 336 Pendapatan Diterima Dimuka**

| Uraian                     | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   | +/(-) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Pendapatan Diterima Dimuka | 23.650.658.314,01 | 22.594.087.932,92 | 4,68  |

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.650.658.314,01 mengalami kenaikan sebesar Rp1.056.570.381,09 atau 4,68% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp22.594.087.932,92. Rincian 5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka disajikan secara rinci dalam **lampiran 26** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 337 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

| URAIAN                    | NILAI                    | OPD                                        |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Pendapatan BLUD           | 174.604.067,12           | Dinas Kesehatan                            |
| Pendapatan BLUD           | 407.919.996,77           | RSUD R.T. NOTOPURO                         |
| Pendapatan BLUD           | 183.244.138,78           | RSUD SIDOARJO BARAT                        |
| Retribusi Terminal        | 33.523.670,01            | Dinas Perhubungan                          |
| Retribusi Pelayanan Pasar | 4.343.441.352,03         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan        |
| Sewa BMD                  | 12.146.484.336,21        | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pajak Reklame             | 6.361.440.753,09         | Badan Pelayanan Pajak Daerah               |
|                           | <b>23.650.658.314,01</b> |                                            |

### 5.3.2.1.5 Utang Belanja

**Tabel 5. 338 Utang Belanja**

| Uraian        | Per 31 Des 2025   | Per 31 Des 2024   | +/(-)    |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| Utang Belanja | 79.158.986.563,89 | 94.823.298.433,23 | (16,52%) |

Utang belanja merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 atas kewajiban kepada pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan namun pembayaran belum dilakukan 100% per 31 Desember 2025. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp79.158.986.563,89 mengalami penurunan sebesar Rp15.664.311.869,34 atau 16,52% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp94.823.298.433,23.

**Tabel 5. 339 Rincian Utang Belanja**

| URAIAN                                           | JUMLAH                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Utang Belanja Pegawai                            | 36.232.195.025,00        |
| Utang Belanja Barang dan Jasa                    | 32.602.132.582,39        |
| Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 0,00                     |
| Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 9.013.864.795,74         |
| Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.310.794.160,76         |
| <b>JUMLAH</b>                                    | <b>79.158.986.563,89</b> |

**Tabel 5. 340 Rincian Utang belanja per OPD**

| OPD                                                                    | JUMLAH            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                        | 8.826.734.749,62  |
| Dinas Kesehatan                                                        | 4.788.434.800,00  |
| RSUD R.T. NOTOPURO                                                     | 54.904.167.789,00 |
| RSUD SIDOARJO BARAT                                                    | 3.816.694.532,00  |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air                    | 1.352.536.559,76  |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang                | 540.373.421,00    |
| Satuan Polisi Pamong Praja                                             | 34.129.734,00     |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 19.750.851,80     |
| Dinas Sosial                                                           | 21.251.552,00     |
| Dinas Tenaga Kerja                                                     | 13.429.833,00     |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 25.765.967,00     |
| Dinas Pangan dan Pertanian                                             | 95.976.087,00     |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                                  | 216.677.905,00    |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                   | 24.000.090,00     |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                                 | 0,00              |
| Dinas Perhubungan                                                      | 44.752.532,00     |
| Dinas Komunikasi dan Informatika                                       | 54.584.495,00     |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                                         | 18.999.023,00     |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 | 83.392.794,00     |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                              | 138.496.045,07    |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                       | 18.241.056,00     |
| Dinas Perikanan                                                        | 35.903.025,00     |

| OPD                                        | JUMLAH                   |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan        | 85.866.284,04            |
| Sekretariat Daerah                         | 197.439.106,00           |
| Sekretariat DPRD                           | 132.458.868,00           |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       | 46.562.819,00            |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3.347.485.105,00         |
| Badan Pelayanan Pajak Daerah               | 17.456.771,00            |
| Badan Kepegawaian Daerah                   | 16.748.064,00            |
| Inspektorat                                | 21.278.451,00            |
| Kecamatan Sidoarjo                         | 50.041.855,25            |
| Kecamatan Candi                            | 7.179.608,00             |
| Kecamatan Buduran                          | 7.043.101,00             |
| Kecamatan Wonoayu                          | 15.949.434,00            |
| Kecamatan Krian                            | 2.633.313,35             |
| Kecamatan Porong                           | 16.383.672,00            |
| Kecamatan Krembung                         | 6.269.256,00             |
| Kecamatan Jabon                            | 5.388.841,00             |
| Kecamatan Balongbendo                      | 10.367.648,00            |
| Kecamatan Tarik                            | 7.274.267,00             |
| Kecamatan Taman                            | 33.395.245,00            |
| Kecamatan Waru                             | 10.405.731,00            |
| Kecamatan Gedangan                         | 9.043.078,00             |
| Kecamatan Sedati                           | 1.376.844,00             |
| Kecamatan Tanggulangin                     | 4.525.616,00             |
| Kecamatan Tulangan                         | 6.936.380,00             |
| Kecamatan Prambon                          | 8.767.102,00             |
| Kecamatan Sukodono                         | 16.417.263,00            |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>79.158.986.563,89</b> |

### 5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

**Tabel 5. 341 Utang Jangka Pendek Lainnya**

| Uraian                      | Per 31 Des 2025  | Per 31 Des 2024  | +/(-)    |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 1.290.549.804,00 | 1.574.847.107,00 | (18,05%) |

Merupakan utang jangka pendek atas uang titipan pasien pada BLUD RSUD RT Notopuro, uang titipan *top up* pembayaran pelayanan kebersihan pada BLUD TPA Griyo Mulyo, uang jaminan penyewa rusunawa dan Utang Kartu Kredit Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.290.549.804,00 mengalami penurunan sebesar Rp284.297.303,00 atau 18,05% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.574.847.107,00.

**Tabel 5. 342 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya**

| Uraian Rekening                                             | Pihak ketiga                                                                                                                                                         | Nilai 2025              | Nilai 2024              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD RSUD RT Notopuro | Uang Titipan Pasien                                                                                                                                                  | 51.126.644,00           | 144.905.388,00          |
| Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD TPA              | Uang Titipan Top UP e-money untuk pembayaran non tunai layanan persampahan di TPA Jabon berada di Bank Jatim a/n Rek Dana TPA Griyo Mulyo di Bank Jatim (0261084236) | 189.590.450,00          | 188.059.025,00          |
| Utang Jaminan penyewa rusunawa                              | Uang jaminan penyewa rusunawa yang dititipkan ke bendahara penerimaan sebagai jaminan sewa (kas yang dibatasi penggunaannya)                                         | 538.782.400,00          | 556.353.400,00          |
| Utang Jaminan pemakaian kolam                               | Pengenaan premi bagi pengunjung atas pemakaian kolam renang GOR                                                                                                      | 3.356.000,00            | 0,00                    |
| Utang KKPD                                                  | Bank Mandiri                                                                                                                                                         | 507.694.310,00          | 685.529.294,00          |
|                                                             |                                                                                                                                                                      | <b>1.290.549.804,00</b> | <b>1.574.847.107,00</b> |

**Tabel 5. 343 Rincian Utang KKPD per OPD**

| SKPD                                                                   | UTANG KKPD            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dinas Kesehatan                                                        | 21.572.750,00         |
| RSUD SIDOARJO BARAT                                                    | 4.000.000,00          |
| Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang                | 37.608.750,00         |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 20.376.200,00         |
| Dinas Tenaga Kerja                                                     | 11.083.610,00         |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 2.100.000,00          |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                                  | 61.000.000,00         |
| Dinas Perhubungan                                                      | 22.210.000,00         |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                              | 28.533.150,00         |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                       | 2.000.000,00          |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                    | 18.862.640,00         |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                             | 216.248.992,00        |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | 466.650,00            |
| Inspektorat                                                            | 51.881.653,00         |
| Kecamatan Waru                                                         | 8.521.710,00          |
| Kecamatan Sedati                                                       | 1.228.205,00          |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>507.694.310,00</b> |

### 5.3.2.1.7 Utang Transfer

**Tabel 5. 344 Utang Transfer**

| Uraian | Per 31 Des 2025 | Per 31 Des 2024 | + / (-) |
|--------|-----------------|-----------------|---------|
|--------|-----------------|-----------------|---------|

|                |                   |                   |                     |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Utang Transfer | 24.096.362.385,06 | 36.645.280.111,04 | (12.548.917.725,98) |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|

Utang Transfer merupakan utang bagi hasil pajak dan retribusi ke 322 Desa. Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2025, bahwa dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak dan retribusi daerah pada akhir TA 2025, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025. Serta utang atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025.

Saldo Utang Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.096.362.385,06 mengalami penurunan sebesar Rp12.548.917.725,98 atau 34,24%% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp36.645.280.111,04.

**Tabel 5. 345 Rincian Utang Transfer**

| Jenis Utang           | 2025                     | 2024                     |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bagi Hasil Pajak      | 5.444.287.854,52         | 17.141.306.747,34        |
| Bagi Hasil Retribusi  | 210.391.309,54           | 1.305.370.563,70         |
| DBH - PBB             | 8.619.538.000,00         | 8.619.538.000,00         |
| DBH - CHT             | 1.209.051.221,00         | 895.767.000,00           |
| DBH - SDA Kehutanan   | 1.035.031.000,00         | 63.927.000,00            |
| DBH - SDA Minerba     | 4.585.745.000,00         | 1.889.711.000,00         |
| DBH - SDA Minyak      | 1.883.000,00             | 1.035.031.000,00         |
| DBH - SDA Gas         | 1.889.711.000,00         | 4.585.745.000,00         |
| DBH - SDA Panas       | 63.927.000,00            | 1.883.000,00             |
| DBH - SDA Perikanan   | 1.036.797.000,00         | 1.036.797.000,00         |
| Pengembalian Sisa BKK |                          | 70.203.800,00            |
| <b>Total</b>          | <b>24.096.362.385,06</b> | <b>36.645.280.111,04</b> |

Utang Transfer terdiri dari Utang Bagi Hasil Pajak Daerah, Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke 318 desa, dan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat. Nilai utang bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2024 senilai Rp18.446.677.311,04 telah disalurkan ke desa seluruhnya pada tahun 2025. Nilai utang pengembalian sisa BKK Provinsi Tahun 2024 senilai Rp70.203.800,00 akan dibayarkan dengan mekanisme belanja tak terduga sesuai SK Bupati Nomor 100.3.3.2/170/438.1.1.3/2025. Nilai utang kelebihan pembayaran dana bagi hasil pemerintah pusat tahun 2025 senilai Rp18.128.399.000,00 sesuai KMK 29 Tahun 2025. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025. Nilai utang bagi hasil pajak dan retribusi daerah senilai Rp5.654.679.164,06 sesuai dengan berita acara perhitungan kurang bayar bagi hasil TA 2025 dengan Penjelasan sebagai berikut:

| Uraian           | Anggaran Belanja Bagi Hasil Murni menurut APBD 2025 | Realisasi Kurang Bayar TA 2024 | Total Anggaran Belanja Bagi Hasil menurut APBD 2025 | Realisasi Pendapatan TA 2025 | Perhitungan Definitif (10% dari realisasi) | Kurang Bayar Belanja Bagi Hasil TA 2025 |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                | 2                                                   | 3                              | 4=2+3                                               | 5                            | 6=5*10%                                    | 7=6-2                                   |
| Pajak Daerah     | 169.645.116.774,00                                  | 17.141.306.747,00              | 186.786.423.521,00                                  | 1.750.894.046.285,18         | 175.089.404.628,52                         | 5.444.287.854,52                        |
| Retribusi Daerah | 7.711.412.701,00                                    | 1.305.370.564,00               | 9.016.783.265,00                                    | 79.218.040.105,36            | 7.921.804.010,54                           | 210.391.309,54                          |

### 5.3.3 Ekuitas

**Tabel 5. 346 Ekuitas**

| Uraian  | Per 31 Des 2025       | Per 31 Des 2024       | +/( -)             |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ekuitas | 23.448.295.413.841,51 | 23.008.854.766.847,82 | 439.440.646.993,70 |

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.448.295.413.841,51 mengalami kenaikan sebesar Rp439.440.646.993,70 atau 1,91% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp23.008.854.766.847,82.

Saldo Ekuitas pada per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 347 Rincian Ekuitas**

| Uraian             | Per 31 Des 2025              | Per 31 Des 2024              | +/( -)                    |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Ekuitas            | 23.008.854.766.847,82        | 22.805.036.725.621,60        | 203.818.041.226,19        |
| Surplus/Defisit LO | 439.440.646.993,69           | 202.302.061.152,22           | 237.138.585.841,47        |
| Dampak Kumulatif   | 0,00                         | 1.515.980.074,00             | (1.515.980.074,00)        |
| <b>Jumlah</b>      | <b>23.448.295.413.841,51</b> | <b>23.008.854.766.847,82</b> | <b>439.440.646.993,70</b> |

## 5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Kabupaten Sidoarjo yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

| Uraian                                        | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)              | %             |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Pendapatan-LO                                 | 5.469.957.499.732,15      | 5.029.664.456.440,27      | 440.293.043.291,88        | 8,75          |
| Beban                                         | 5.053.182.085.466,62      | 4.850.161.827.214,85      | 203.020.258.251,77        | 4,19          |
| <b>Surplus/Defisit Operasional</b>            | <b>416.775.414.265,53</b> | <b>179.502.629.225,42</b> | <b>237.272.785.040,11</b> | <b>132,18</b> |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional | 22.665.232.728,16         | 22.799.431.926,80         | (8.720.489.568,66)        | 38,25         |
| <b>Surplus/Defisit-LO</b>                     | <b>439.440.646.993,69</b> | <b>202.302.061.152,22</b> | <b>228.552.295.471,45</b> | <b>112,98</b> |

### 5.4.1 Kegiatan Operasional

#### 5.4.1.1 Pendapatan Daerah-LO

**Tabel 5. 348 Pendapatan Daerah-LO**

| Uraian               | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Naik/(Turun)       | %    |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|
| Pendapatan Daerah-LO | 5.469.957.499.732,15 | 5.029.664.456.440,27 | 440.293.043.291,88 | 8,75 |

Nilai Pendapatan Daerah-LO pada tahun 2025 sebesar Rp5.469.957.499.732,15 mengalami kenaikan sebesar Rp440.293.043.291,88 atau 8.75% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.029.664.456.440,27. Rincian atas Pendapatan Daerah-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 349 Rincian Pendapatan Daerah-LO**

| Uraian                            | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Naik/(Turun)              | %           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Pendapatan Asli Daerah-LO         | 2.848.485.313.342,47        | 2.367.008.521.318,01        | 350.057.044.712,53        | 24,82       |
| Pendapatan Transfer-LO            | 2.422.697.366.528,00        | 2.616.484.344.206,00        | (193.786.977.678,00)      | (7,41)      |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah- LO | 198.774.819.861,68          | 46.171.590.916,26           | 152.603.228.945,42        | 330,52      |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>5.469.957.499.732,15</b> | <b>5.029.664.456.440,27</b> | <b>440.293.043.291,88</b> | <b>8,75</b> |

Perbedaan antara pendapatan Pendapatan Daerah tahun 2025 pada LRA dan LO disajikan secara rinci dalam **lampiran 27** yang merupakan bagian dari LKPD.

##### 5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

**Tabel 5. 350 Pendapatan Asli Daerah-LO**

| Uraian                    | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Naik/(Turun)       | %     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Pendapatan Asli Daerah-LO | 2.848.485.313.342,47 | 2.367.008.521.318,01 | 481.476.792.024,46 | 20,34 |

Nilai Pendapatan Asli Daerah-LO pada tahun 2025 sebesar Rp2.848.485.313.342,47 mengalami kenaikan sebesar Rp481.476.792.024,46 atau 20,34% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.367.008.521.318,01.

**Tabel 5. 351 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO**

| Uraian                                                          | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Naik/(Turun)              | %            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| Pendapatan Pajak Daerah-LO                                      | 1.760.167.463.997,10        | 1.410.110.419.284,57        | 350.057.044.712,53        | 24,82        |
| Pendapatan Retribusi Daerah-LO                                  | 907.277.339.836,02          | 865.259.748.953,02          | 42.017.590.883,01         | 4,86         |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 91.819.230.149,40           | 49.892.315.052,25           | 41.926.915.097,15         | 84,03        |
| Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO                               | 89.221.279.359,94           | 41.746.038.028,17           | 47.475.241.331,77         | 113,72       |
| <b>Jumlah</b>                                                   | <b>2.848.485.313.342,46</b> | <b>2.367.008.521.318,01</b> | <b>481.476.792.024,46</b> | <b>20,34</b> |

#### 5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

**Tabel 5. 352 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

| Uraian                     | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Naik/(Turun)       | %     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|
| Pendapatan Pajak Daerah-LO | 1.760.167.463.997,10 | 1.410.110.419.284,57 | 350.057.044.712,53 | 24,82 |

Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tahun 2025 sebesar Rp1.760.167.463.997,10 mengalami kenaikan sebesar Rp350.057.044.712,53 atau 24,82% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.410.110.419.284,57. Rincian atas Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 353 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO**

| Uraian                                                     | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Naik/(Turun)              | %            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| Pajak Hotel-LO                                             | 23.337.136.052,00           | 24.061.244.624,00           | (724.108.572,00)          | (3,01)       |
| Pajak Restoran-LO                                          | 152.705.554.022,00          | 127.250.790.865,00          | 25.454.763.157,00         | 20,00        |
| Pajak Hiburan-LO                                           | 8.449.769.821,00            | 8.348.061.431,00            | 101.708.390,00            | 1,22         |
| Pajak Reklame-LO                                           | 23.775.983.083,92           | 21.838.406.176,17           | 1.937.576.907,75          | 8,87         |
| Pajak Penerangan Jalan-LO                                  | 392.209.562.702,00          | 395.495.621.586,00          | (3.286.058.884,00)        | (0,83)       |
| Pajak Parkir-LO                                            | 13.080.751.687,00           | 12.840.521.536,00           | 240.230.151,00            | 1,87         |
| Pajak Air Tanah-LO                                         | 7.359.390.409,00            | 7.387.301.078,00            | (27.910.669,00)           | (0,38)       |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO | 312.129.668.686,00          | 303.798.364.650,00          | 8.331.304.036,00          | 2,74         |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO       | 424.084.888.903,50          | 509.090.107.338,40          | (85.005.218.434,90)       | (16,70)      |
| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO                    | 282.525.833.404,75          | 0,00                        | 282.525.833.404,75        | 100,00       |
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO         | 120.508.925.225,93          | 0,00                        | 120.508.925.225,93        | 100,00       |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>1.760.167.463.997,10</b> | <b>1.410.110.419.284,57</b> | <b>350.057.044.712,53</b> | <b>24,82</b> |

Terdapat perbedaan nilai realisasi antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pendapatan Daerah LO sebesar Rp9.273.417.711,92 yang secara rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. 354 Perbedaan Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO

| URAIAN                                                  | LRA                  | LO                   | SELISIH          | PENJELASAN SELISIH             |                            |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
|                                                         |                      |                      |                  | Kenaikan/<br>Penurunan Piutang | Kenaikan/<br>Penurunan PDD | reklasifikasi    |
| Pajak Hotel                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |                                |                            |                  |
| Pajak Restoran                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | (468.237.527,00)               |                            | 468.237.527,00   |
| Pajak Hiburan                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |                                |                            |                  |
| Pajak Reklame                                           | 23.347.491.952,00    | 23.775.983.083,92    | 428.491.131,92   | 464.463.417,00                 | (35.972.285,08)            |                  |
| Pajak Penerangan Jalan                                  | 0,00                 | 881.486.365,00       | 881.486.365,00   | 881.486.365,00                 |                            |                  |
| Pajak Parkir                                            | 0,00                 | 29.768,00            | 29.768,00        | 29.768,00                      |                            |                  |
| Pajak Air Tanah                                         | 7.337.007.536,00     | 7.359.390.409,00     | 22.382.873,00    | 22.382.873,00                  |                            |                  |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 303.909.394.144,00   | 312.129.668.686,00   | 8.220.274.542,00 | 8.220.274.542,00               |                            |                  |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 423.895.898.344,50   | 424.084.888.903,50   | 188.990.559,00   | 188.990.559,00                 |                            |                  |
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                   | 589.369.495.678,00   | 588.901.258.151,00   | (468.237.527,00) |                                |                            | (468.237.527,00) |
| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                    | 282.525.833.404,75   | 282.525.833.404,75   | 0,00             |                                |                            |                  |
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)         | 120.508.925.225,93   | 120.508.925.225,93   | 0,00             |                                |                            |                  |
|                                                         | 1.750.894.046.285,18 | 1.760.167.463.997,10 | 9.273.417.711,92 | 9.309.389.997,00               | (35.972.285,08)            | 0,00             |

#### 5.4.1.1.1.1 Pajak Hotel-LO

Tabel 5. 355 Pajak Hotel-LO

| Uraian         | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %      |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Pajak Hotel-LO | 23.337.136.052,00 | 24.061.244.624,00 | (724.108.572,00) | (3,01) |

Nilai Pajak Hotel-LO pada tahun 2025 sebesar Rp23.337.136.052,00 mengalami penurunan sebesar Rp724.108.572,00 atau 3,01% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp24.061.244.624,00.

Tabel 5. 356 Rincian Pajak Hotel-LO

| Uraian                    | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %      |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Pajak Hotel-LO            | 22.493.397.122,00 | 23.233.474.412,00 | (740.077.290,00) | (3,19) |
| Pajak Losmen-LO           | 466.808.582,00    | 489.974.973,00    | (23.166.391,00)  | (4,73) |
| Pajak Wisma Pariwisata-LO | 178.547.127,00    | 194.341.628,00    | (15.794.501,00)  | (8,13) |

| Uraian                                                         | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)            | %             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO                       | 198.383.221,00           | 140.038.611,00           | 58.344.610,00           | 41,66         |
| Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO | 0,00                     | 3.415.000,00             | (3.415.000,00)          | (100,00)      |
| <b>Jumlah</b>                                                  | <b>23.337.136.052,00</b> | <b>24.061.244.624,00</b> | <b>(724.108.572,00)</b> | <b>(3,01)</b> |

#### 5.4.1.1.1.2 Pajak Restoran-LO

Tabel 5. 357 Pajak Restoran-LO

| Uraian Pendapatan | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Pajak Restoran-LO | 152.705.554.022,00 | 127.250.790.865,00 | 25.454.763.157,00 | 20,00 |

Nilai Pajak Restoran-LO pada tahun 2025 sebesar Rp152.705.554.022,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.454.763.157,00 atau 20,00 % jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp127.250.790.865,00.

Tabel 5. 358 Rincian Pajak Restoran-LO

| Uraian                                     | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)             | %            |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO           | 135.734.458.411,00        | 112.362.317.889,00        | 23.372.140.522,00        | 20,80        |
| Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO        | 0,00                      | 19.558.199,00             | (19.558.199,00)          | (100,00)     |
| Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO          | 0,00                      | 152.437.073,00            | (152.437.073,00)         | (100,00)     |
| Pajak Warung dan Sejenisnya-LO             | 0,00                      | 78.447.075,00             | (78.447.075,00)          | (100,00)     |
| Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO | 16.971.095.611,00         | 14.638.030.629,00         | 2.333.064.982,00         | 15,94        |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>152.705.554.022,00</b> | <b>127.250.790.865,00</b> | <b>25.454.763.157,00</b> | <b>20,00</b> |

#### 5.4.1.1.1.3 Pajak Hiburan-LO

Tabel 5. 359 Pajak Hiburan-LO

| Uraian Pendapatan | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)   | %    |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|------|
| Pajak Hiburan-LO  | 8.449.769.821,00 | 8.348.061.431,00 | 101.708.390,00 | 1,22 |

Nilai Pajak Hiburan - LO pada tahun 2025 sebesar Rp8.449.769.821,00 mengalami kenaikan sebesar Rp101.708.390,00 atau 1,22% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8.348.061.431,00.

Tabel 5. 360 Rincian Pajak Hiburan-LO

| Uraian                                                              | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)     | %       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| Pajak Tontonan Film-LO                                              | 2.762.647.109,00 | 3.225.654.910,00 | (463.007.801,00) | (14,35) |
| Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO                       | 8.560.000,00     | 34.268.696,00    | (25.708.696,00)  | (75,02) |
| Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO              | 400.261.908,00   | 421.884.323,00   | (21.622.415,00)  | (5,13)  |
| Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO | 3.767.612.277,00 | 3.436.637.533,00 | 330.974.744,00   | 9,63    |

| Uraian                                                                              | Tahun 2025              | Tahun 2024              | Naik/(Turun)          | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO | 592.536.911,00          | 632.180.892,00          | (39.643.981,00)       | (6,27)      |
| Pajak Pertandingan Olahraga-LO                                                      | 918.151.616,00          | 597.435.077,00          | 320.716.539,00        | 53,68       |
| <b>Jumlah</b>                                                                       | <b>8.449.769.821,00</b> | <b>8.348.061.431,00</b> | <b>101.708.390,00</b> | <b>1,22</b> |

#### 5.4.1.1.1.4 Pajak Reklame-LO

**Tabel 5. 361 Pajak Reklame-LO**

| Uraian           | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %    |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| Pajak Reklame-LO | 23.775.983.083,92 | 21.838.406.176,17 | 1.937.576.907,75 | 8,87 |

Nilai Pajak Reklame - LO pada tahun 2025 sebesar Rp23.775.983.083,92 mengalami kenaikan sebesar Rp1.937.576.907,75 atau 8,87% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp21.838.406.176,17.

**Tabel 5. 362 Rincian Pajak Reklame-LO**

| Uraian                                                | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)            | %           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/ Megatron-LO | 16.541.753.528,24        | 14.060.367.257,60        | 2.481.386.270,64        | 17,65       |
| Pajak Reklame Kain-LO                                 | 6.794.609.287,71         | 7.420.885.029,29         | (626.275.741,58)        | (8,44)      |
| Pajak Reklame Berjalan-LO                             | 420.354.267,97           | 344.746.489,28           | 75.607.778,69           | 21,93       |
| Pajak Reklame Film/Slide-LO                           | 19.266.000,00            | 12.407.400,00            | 6.858.600,00            | 55,28       |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>23.775.983.083,92</b> | <b>21.838.406.176,17</b> | <b>1.937.576.907,75</b> | <b>8,87</b> |

#### 5.4.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan-LO

**Tabel 5. 363 Pajak Penerangan Jalan-LO**

| Uraian Pendapatan         | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)       | %      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Pajak Penerangan Jalan-LO | 392.209.562.702,00 | 395.495.621.586,00 | (3.286.058.884,00) | (0,83) |

Nilai Pajak Penerangan Jalan - LO pada tahun 2025 sebesar Rp392.209.562.702,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.286.058.884,00 atau 0,83% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp395.495.621.586,00.

**Tabel 5. 364 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO**

| Uraian                                       | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)              | %             |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO | 14.524.428.578,00         | 14.072.462.922,00         | 451.965.656,00            | 3,21          |
| Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO        | 377.685.134.124,00        | 381.423.158.664,00        | (3.738.024.540,00)        | (0,98)        |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>392.209.562.702,00</b> | <b>395.495.621.586,00</b> | <b>(3.286.058.884,00)</b> | <b>(0,83)</b> |

#### 5.4.1.1.1.6 Pajak Parkir-LO

**Tabel 5. 365 Pajak Parkir-LO**

| Uraian          | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)   | %    |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|------|
| Pajak Parkir-LO | 13.080.751.687,00 | 12.840.521.536,00 | 240.230.151,00 | 1,87 |

Nilai Pajak Parkir - LO pada tahun 2025 sebesar Rp13.080.751.687,00 mengalami penurunan sebesar Rp240.230.151,00 atau 1,87% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12.840.521.536,00.

#### 5.4.1.1.1.7 Pajak Air Tanah-LO

**Tabel 5. 366 Pajak Air Tanah-LO**

| Uraian             | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)    | %      |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| Pajak Air Tanah-LO | 7.359.390.409,00 | 7.387.301.078,00 | (27.910.669,00) | (0,38) |

Nilai Pajak Air Tanah - LO pada tahun 2025 sebesar Rp7.359.390.409,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.910.669,00 atau 0,38% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7.387.301.078,00.

#### 5.4.1.1.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

**Tabel 5. 367 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO**

| Uraian                                                     | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)     | %    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO | 312.129.668.686,00 | 303.798.364.650,00 | 8.331.304.036,00 | 2,74 |

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO pada tahun 2025 sebesar Rp312.129.668.686,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.331.304.036,00 atau 2,74% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp303.798.364.650,00.

#### 5.4.1.1.1.9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

**Tabel 5. 368 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO**

| Uraian Pendapatan                                    | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %       |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO | 424.084.888.903,50 | 509.090.107.338,40 | (85.005.218.434,90) | (16,70) |

Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO pada tahun 2025 sebesar Rp424.084.888.903,50 mengalami penurunan sebesar Rp85.005.218.434,90 atau 16,70% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp509.090.107.338,40

**Tabel 5. 369 Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO**

| Uraian                      | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)               | %              |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| BPHTB-Pemindahan Hak-LO     | 386.226.788.577,50        | 469.609.809.097,40        | (83.383.020.519,90)        | (17,76)        |
| BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO | 37.858.100.326,00         | 39.480.298.241,00         | (1.622.197.915,00)         | (4,11)         |
| <b>Jumlah</b>               | <b>424.084.888.903,50</b> | <b>509.090.107.338,40</b> | <b>(85.005.218.434,90)</b> | <b>(16,70)</b> |

#### 5.4.1.1.1.10 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

**Tabel 5. 370 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO**

| Uraian Pendapatan                       | Tahun 2025         | Tahun 2024 | Naik/(Turun)       | %      |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------|
| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO | 282.525.833.404,75 | 0,00       | 282.525.833.404,75 | 100,00 |

Nilai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO pada tahun 2025 sebesar Rp 282.525.833.404,75 mengalami kenaikan sebesar Rp 282.525.833.404,75 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00

#### 5.4.1.1.1.11 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO

| Tabel 5. 371 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO |                    |            |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------|
| Uraian Pendapatan                                               | Tahun 2025         | Tahun 2024 | Naik/(Turun)       | %      |
| Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO              | 120.508.925.225,93 | 0,00       | 120.508.925.225,93 | 100,00 |

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO pada tahun 2025 sebesar Rp120.508.925.225,93 mengalami kenaikan sebesar Rp120.508.925.225,93 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00

#### 5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

| Tabel 5. 372 Pendapatan Retribusi Daerah-LO |                    |                    |                   |      |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|
| Uraian Pendapatan                           | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %    |
| Retribusi Daerah-LO                         | 907.277.339.836,02 | 865.259.748.953,02 | 42.017.590.883,00 | 4,86 |

Nilai Retribusi Daerah - LO pada tahun 2025 sebesar Rp907.277.339.836,02 mengalami kenaikan sebesar Rp42.017.590.883,00 atau 4,86% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp865.259.748.953,02.

| Tabel 5. 373 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO |                           |                           |                          |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Uraian                                              | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)             | %           |
| Retribusi Jasa Umum-LO                              | 846.767.118.297,43        | 828.147.957.364,60        | 18.619.160.932,83        | 2,25        |
| Retribusi Jasa Usaha-LO                             | 11.743.199.634,59         | 10.961.909.226,42         | 781.290.408,17           | 7,13        |
| Retribusi Perizinan Tertentu-LO                     | 48.767.021.904,00         | 26.149.882.362,00         | 22.617.139.542,00        | 86,49       |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>907.277.339.836,02</b> | <b>865.259.748.953,02</b> | <b>42.017.590.883,00</b> | <b>4,86</b> |

Terdapat perbedaan saldo realisasi Retribusi Daerah antara LRA dan LO sebesar (Rp63.157.512.338,55) yang secara rinci disajikan pada **Lampiran 28**.

#### 5.4.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum-LO

| Tabel 5. 374 Retribusi Jasa Umum-LO |                    |                    |                   |      |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|
| Uraian Pendapatan                   | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %    |
| Retribusi Jasa Umum-LO              | 846.767.118.297,43 | 828.147.957.364,60 | 18.619.160.932,83 | 2,25 |

Nilai Retribusi Jasa Umum - LO pada tahun 2025 sebesar Rp846.767.118.297,43 mengalami kenaikan sebesar Rp18.619.160.932,83 atau 2,25% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp828.147.957.364,60.

Tabel 5. 375 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO

| Uraian                                                                              | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)             | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO                                       | 96.932.435.056,15         | 91.073.622.391,57         | 5.858.812.664,58         | 6,43        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO                         | 715.756.567.868,59        | 707.171.807.910,60        | 8.584.759.957,99         | 1,21        |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO | 1.075.000,00              | 75.675.000,00             | (74.600.000,00)          | (98,58)     |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                          | 15.333.199.300,00         | 11.268.873.708,21         | 4.064.325.591,79         | 36,73       |
| Retribusi Pelataran-LO                                                              | 1.625.679.005,00          | 1.720.784.049,00          | (95.105.044,00)          | (5,53)      |
| Retribusi Los-LO                                                                    | 9.646.695.868,00          | 6.849.724.200,00          | 2.796.971.668,00         | 40,83       |
| Retribusi Kios-LO                                                                   | 6.242.746.119,69          | 8.897.859.805,22          | (2.655.113.685,53)       | (29,84)     |
| Retribusi Industri-LO                                                               | (1.493.174,71)            | 854.452.000,00            | (855.945.174,71)         | (100,17)    |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO                                           | 0,00                      | 430.000,00                | (430.000,00)             | (100,00)    |
| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO                                     | 0,00                      | 2.508.300,00              | (2.508.300,00)           | (100,00)    |
| Retribusi Pelayanan Persampahan-LO                                                  | 8.196.000,00              | 0,00                      | 8.196.000,00             | 100,00      |
| Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO         | 1.222.017.254,71          | 0,00                      | 1.222.017.254,71         | 100,00      |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO                      | 0,00                      | 232.220.000,00            | (232.220.000,00)         | (100,00)    |
| <b>Jumlah</b>                                                                       | <b>846.767.118.297,43</b> | <b>828.147.957.364,60</b> | <b>18.619.160.932,83</b> | <b>2,25</b> |

Telah dilakukan resiprokal antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO dan beban jasa LO atas pembayaran dinas Kesehatan kepada RSUD RTN, RSUD Sibar, dan 31 puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan                          | 1.455.205.946,00        |
| Beban terdiri dari:                                               |                         |
| Beban Jasa Tenaga Kesehatan                                       | 339.500.000,00          |
| Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS | 844.012.000,00          |
| Beban Jasa Tenaga Laboratorium                                    | 23.167.000,00           |
| Beban Kursus Singkat / Pelatihan                                  | 110.725.000,00          |
| Beban Medical Check Up                                            | 137.801.946,00          |
| <b>Total</b>                                                      | <b>1.455.205.946,00</b> |

Dengan Rincian antar OPD sebagai berikut:

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Beban Dinkes, Pendapatan RSUD RTN              | 899.512.000,00 |
| Beban Dinkes, Pendapatan 31 Puskesmas          | 283.500.000,00 |
| Beban Dinkes, Pendapatan RSUD Sidoarjo Barat   | 500.000,00     |
| Beban RSUD Sidoarjo Barat, Pendapatan RSUD RTN | 133.892.000,00 |
| Beban Sekretariat DPRD, Pendapatan RSUD RTN    | 137.801.946,00 |

Terdapat juga pendapatan LRA Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa uang titipan pasien pada RSUD RTN yang tercatat pada LRA namun di LO masih belum diakui karena belum menjadi hak senilai Rp190.270.939,00.

#### 5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha-LO

**Tabel 5. 376 Retribusi Jasa Usaha-LO**

| Uraian Pendapatan       | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)   | %    |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------|
| Retribusi Jasa Usaha-LO | 11.743.199.634,59 | 10.961.909.226,42 | 781.290.408,17 | 7,13 |

Nilai Retribusi Jasa Usaha - LO pada tahun 2025 sebesar Rp11.743.199.634,59 mengalami kenaikan sebesar Rp 781.290.408,17 atau 7,13 % jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 10.961.909.226,42.

**Tabel 5. 377 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO**

| Uraian                                                           | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)          | %           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO                         | 6.122.053.934,36         | 7.853.963.900,00         | (1.731.909.965,64)    | (22,05)     |
| Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan - LO                 | 5.473.000,00             | 220.679.000,00           | (215.206.000,00)      | (97,52)     |
| Retribusi Terminal - LO                                          | 76.329.152,23            | 104.348.884,42           | (28.019.732,19)       | (26,85)     |
| Retribusi Rumah Potong Hewan - LO                                | 952.429.151,00           | 932.353.800,00           | 20.075.351,00         | 2,15        |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO                      | 3.373.811.604,00         | 1.850.563.642,00         | 1.523.247.962,00      | 82,31       |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO | 60.814.304,00            | 0,00                     | 60.814.304,00         | 100,00      |
| Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO    | 21.055.000,00            | 0,00                     | 21.055.000,00         | 100,00      |
| Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO                             | 1.131.233.489,00         | 0,00                     | 1.131.233.489,00      | 100,00      |
| <b>Jumlah</b>                                                    | <b>11.743.199.634,59</b> | <b>10.961.909.226,42</b> | <b>781.290.408,17</b> | <b>7,13</b> |

#### 5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu-LO

**Tabel 5. 378 Retribusi Perizinan Tertentu-LO**

| Uraian Pendapatan               | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)      | %     |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 48.767.021.904,00 | 26.149.882.362,00 | 22.617.139.542,00 | 86,49 |

Nilai Retribusi Perizinan Tertentu - LO pada tahun 2025 sebesar Rp48.767.021.904,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.617.139.542,00 atau 86,49% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp26.149.882.362,00.

**Tabel 5. 379 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO**

| Uraian                                             | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)             | %            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO         | 43.014.380.904,00        | 23.771.727.562,00        | 19.242.653.342,00        | 80,95        |
| Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO | 5.752.641.000,00         | 2.378.154.800,00         | 3.374.486.200,00         | 141,90       |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>48.767.021.904,00</b> | <b>26.149.882.362,00</b> | <b>22.617.139.542,00</b> | <b>86,49</b> |

#### 5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

**Tabel 5. 380 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

| Uraian Pendapatan                                               | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)      | %     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 91.819.230.149,40 | 49.892.315.052,25 | 41.926.915.097,15 | 84,03 |

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO pada tahun 2025 sebesar Rp91.819.230.149,40 mengalami kenaikan sebesar Rp41.926.915.097,15 atau 84,03% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp49.892.315.052,25.

Terdapat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dari peningkatan ekuitas pada laporan keuangan BUMD sebesar Rp11.784.600.431,75 karena penyertaan modal diatas 20% sehingga pencatatan pada investasi permanennya dicatat menggunakan metode ekuitas. Tidak terdapat perbedaan nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO.

#### 5.4.1.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO

**Tabel 5. 381 Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO**

| Uraian Pendapatan                 | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)      | %      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO | 89.221.279.359,94 | 41.746.038.028,17 | 47.475.241.331,77 | 113,72 |

Nilai Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO pada tahun 2025 sebesar Rp89.221.279.359,94 mengalami kenaikan sebesar Rp47.475.241.331,77 atau 113,72% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp41.746.038.028,17. Terdapat perbedaan saldo realisasi Retribusi Daerah antara LRA dan LO sebesar (Rp2.117.797.435,35) yang secara rinci disajikan pada **Lampiran 29**.

**Tabel 5. 382 Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO**

| Uraian                                                       | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)       | %         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO                | 4.000.000,00      | 767.756.500,00    | (763.756.500,00)   | (99,48)   |
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO               | 9.792.312.293,54  | 9.704.700.841,60  | 87.611.451,94      | 0,90      |
| Hasil Kerja Sama Daerah-LO                                   | 242.998.411,00    | 473.130.057,00    | (230.131.646,00)   | (48,64)   |
| Jasa Giro-LO                                                 | 3.316.293.683,86  | 3.358.624.443,29  | (42.330.759,43)    | (1,26)    |
| Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO                           | 4.000.000,00      | 7.589.165,00      | (3.589.165,00)     | (47,29)   |
| Pendapatan Bunga-LO                                          | 19.915.766.280,92 | 14.288.010.231,18 | 5.627.756.049,74   | 39,39     |
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO   | 2.465.242.760,56  | 1.475.780.757,37  | 989.462.003,19     | 67,05     |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO             | 8.324.399.447,96  | 73.846.832,18     | 8.250.552.615,78   | 11.172,52 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 943.614.083,40    | 483.851.538,86    | 459.762.544,54     | 95,02     |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO                             | 4.570.139.780,00  | 8.440.614.675,00  | (3.870.474.895,00) | (45,86)   |

| Uraian                                                | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)             | %             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO                  | 991.511,00               | 3.969.727,00             | (2.978.216,00)           | (75,02)       |
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO           | 0,00                     | 116.003.153,00           | (116.003.153,00)         | (100,00)      |
| Pendapatan dari Pengembalian-LO                       | 16.562.952.582,00        | 956.102.673,06           | 15.606.849.908,94        | 1.632,34      |
| Pendapatan dari BLUD-LO                               | 22.280.438.525,70        | 1.594.657.433,63         | 20.685.781.092,07        | 1.297,19      |
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO | 798.130.000,00           | 1.400.000,00             | 796.730.000,00           | 56.909,29     |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>89.221.279.359,94</b> | <b>41.746.038.028,17</b> | <b>47.475.241.331,77</b> | <b>113,72</b> |

#### 5.4.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

**Tabel 5. 383 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO**

| Uraian Pendapatan                             | Tahun 2025   | Tahun 2024     | Naik/(Turun)     | %       |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------|
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO | 4.000.000,00 | 767.756.500,00 | (763.756.500,00) | (99,48) |

Nilai Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO pada tahun 2025 sebesar Rp 4.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp763.756.500,00 atau 99,48% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp767.756.500,00.

**Tabel 5. 384 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO**

| Uraian                                                                                                                                                   | Tahun 2025          | Tahun 2024            | Naik/(Turun)            | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Hasil Penjualan Tanah - LO                                                                                                                               | 0,00                | 763.776.000,00        | (763.776.000,00)        | (100,00)       |
| Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00           |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO                                                                                                                 | 1.080.413.795,00    | 0,00                  | 1.080.413.795,00        | 100,00         |
| Hasil Penjualan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-LO | 4.000.000,00        | 3.980.500,00          | 19.500,00               | 0,49           |
| Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO                                                     | (1.080.413.795,00)  | 0,00                  | (1.080.413.795,00)      | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                            | <b>4.000.000,00</b> | <b>767.756.500,00</b> | <b>(763.756.500,00)</b> | <b>(99,48)</b> |

#### 5.4.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

**Tabel 5. 385 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO**

| Uraian Pendapatan                              | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)  | %    |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO | 9.792.312.293,54 | 9.704.700.841,60 | 87.611.451,94 | 0,90 |

Nilai Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO pada tahun 2025 sebesar Rp9.792.312.293,54 mengalami kenaikan sebesar Rp87.611.451,94 atau 0,90% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9.704.700.841,60.

#### 5.4.1.1.4.3 Hasil Kerja Sama Daerah-LO

**Tabel 5. 386 Hasil Kerja Sama Daerah-LO**

| Uraian Pendapatan          | Tahun 2025     | Tahun 2024     | Naik/(Turun)     | %       |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| Hasil Kerja Sama Daerah-LO | 242.998.411,00 | 473.130.057,00 | (230.131.646,00) | (48,64) |

Nilai Hasil Kerja Sama Daerah-LO pada tahun 2025 sebesar Rp242.998.411,00 mengalami penurunan sebesar Rp230.131.646,00 atau 48,64% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp473.130.057,00.

#### 5.4.1.1.4.4 Jasa Giro-LO

**Tabel 5. 387 Jasa Giro-LO**

| Uraian Pendapatan | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)    | %      |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| Jasa Giro-LO      | 3.316.293.683,86 | 3.358.624.443,29 | (42.330.759,43) | (1,26) |

Nilai Jasa Giro - LO pada tahun 2025 sebesar Rp3.316.293.683,86 mengalami penurunan sebesar Rp42.330.759,43 atau 1,26% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.358.624.443,29.

**Tabel 5. 388 Rincian Jasa Giro-LO**

| Uraian                              | Tahun 2025              | Tahun 2024              | Naik/(Turun)           | %             |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Jasa Giro pada Kas Daerah-LO        | 2.858.263.805,08        | 2.485.210.059,70        | 373.053.745,38         | 15,01         |
| Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO  | 210.274.790,59          | 673.477.704,02          | (463.202.913,43)       | (68,78)       |
| Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO | 247.755.088,19          | 199.936.679,57          | 47.818.408,62          | 23,92         |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>3.316.293.683,86</b> | <b>3.358.624.443,29</b> | <b>(42.330.759,43)</b> | <b>(1,26)</b> |

#### 5.4.1.1.4.5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO

**Tabel 5. 389 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO**

| Uraian Pendapatan                              | Tahun 2025   | Tahun 2024   | Naik/(Turun)   | %       |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------|
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO | 4.000.000,00 | 7.589.165,00 | (3.589.165,00) | (47,29) |

Nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO pada tahun 2025 sebesar Rp4.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.589.165,00 atau 47,29% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7.589.165,00.

#### 5.4.1.1.4.6 Pendapatan Bunga-LO

**Tabel 5. 390 Pendapatan Bunga-LO**

| Uraian Pendapatan   | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %     |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| Pendapatan Bunga-LO | 19.915.766.280,92 | 14.288.010.231,18 | 5.627.756.049,74 | 39,39 |

Nilai Pendapatan Bunga - LO pada tahun 2025 sebesar Rp19.915.766.280,92 mengalami kenaikan sebesar Rp5.627.756.049,74 atau 39,39% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp14.288.010.231,18.

#### 5.4.1.1.4.7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

**Tabel 5. 391 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO**

| Uraian Pendapatan                                          | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)   | %     |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO | 2.465.242.760,56 | 1.475.780.757,37 | 989.462.003,19 | 67,05 |

Nilai Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO pada tahun 2025 sebesar Rp2.465.242.760,56 mengalami kenaikan sebesar Rp989.462.003,19 atau 67,05% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.475.780.757,37.

**Tabel 5. 392 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO**

| Uraian                                                                                      | Tahun 2025              | Tahun 2024              | Naik/(Turun)          | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO                                        | 200.000,00              | 0,00                    | 200.000,00            | 100,00       |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO | 2.465.042.760,56        | 1.475.780.757,37        | 989.262.003,19        | 67,03        |
| <b>Jumlah</b>                                                                               | <b>2.465.242.760,56</b> | <b>1.475.780.757,37</b> | <b>989.462.003,19</b> | <b>67,05</b> |

#### 5.4.1.1.4.8 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO

**Tabel 5. 393 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO**

| Uraian Pendapatan                                | Tahun 2025       | Tahun 2024    | Naik/(Turun)     | %         |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO | 8.324.399.447,96 | 73.846.832,18 | 8.250.552.615,78 | 11.172,52 |

Nilai Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO pada tahun 2025 sebesar Rp8.324.399.447,96 mengalami kenaikan sebesar Rp8.250.552.615,78 atau 11.172,52% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp73.846.832,18.

#### 5.4.1.1.4.9 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

**Tabel 5. 394 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**

| Uraian Pendapatan                                            | Tahun 2025     | Tahun 2024     | Naik/(Turun)   | %     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 943.614.083,40 | 483.851.538,86 | 459.762.544,54 | 95,02 |

Nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO pada tahun 2025 sebesar Rp943.614.083,40 mengalami kenaikan sebesar Rp459.762.544,54 atau 95,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp483.851.538,86.

#### 5.4.1.1.4.10 Pendapatan Denda Pajak Daerah

**Tabel 5. 395 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO**

| Uraian Pendapatan                | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)       | %       |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|
| Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO | 4.570.139.780,00 | 8.440.614.675,00 | (3.870.474.895,00) | (45,86) |

Nilai Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO pada tahun 2025 sebesar Rp4.570.139.780,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.870.474.895,00 atau 45,86% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8.440.614.675,00.

**Tabel 5. 396 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO**

| Uraian                                                                                               | Tahun 2025              | Tahun 2024              | Naik/(Turun)              | %              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO                                                                      | 4.531.619,00            | 3.066.734,00            | 1.464.885,00              | 47,77          |
| Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO                                                                     | 971.083,00              | 906.147,00              | 64.936,00                 | 7,17           |
| Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO                                                           | 88.775,00               | 237.480,00              | (148.705,00)              | (62,62)        |
| Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO                                            | 112.090,00              | 194.870,00              | (82.780,00)               | (42,48)        |
| Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO                      | 150.213,00              | 35.474,00               | 114.739,00                | 323,45         |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO                                                    | 314.400.268,00          | 99.882.485,00           | 214.517.783,00            | 214,77         |
| Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO                                                   | 0,00                    | 8.530,00                | (8.530,00)                | (100,00)       |
| Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO                                                      | 0,00                    | 12.000,00               | (12.000,00)               | (100,00)       |
| Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO                                          | 3.769.544,00            | 305.977.497,00          | (302.207.953,00)          | (98,77)        |
| Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO                                                              | 0,00                    | 618.848,00              | (618.848,00)              | (100,00)       |
| Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO                                      | 32.750,00               | 0,00                    | 32.750,00                 | 100,00         |
| Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO                              | 542.461,00              | 262.474,00              | 279.987,00                | 106,67         |
| Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO                                               | 13.531,00               | 400.409,00              | (386.878,00)              | (96,62)        |
| Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO                 | 721.122,00              | 4.821.912,00            | (4.100.790,00)            | (85,04)        |
| Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO | 1.751.139,00            | 313.456,00              | 1.437.683,00              | 458,66         |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO                                | 10.753.368,00           | 24.850.295,00           | (14.096.927,00)           | (56,73)        |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO                                                               | 0,00                    | 36.480,00               | (36.480,00)               | (100,00)       |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO                                                           | 242.400,00              | 1.501.366,00            | (1.258.966,00)            | (83,85)        |
| Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO                                        | 298.566,00              | 265.308,00              | 33.258,00                 | 12,54          |
| Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO                                                                     | 10.753.345,00           | 13.732.353,00           | (2.979.008,00)            | (21,69)        |
| Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO                                                                  | 9.729.017,00            | 10.442.023,00           | (713.006,00)              | (6,83)         |
| Pendapatan Denda PBBP2-LO                                                                            | 4.129.803.337,00        | 7.887.436.458,00        | (3.757.633.121,00)        | (47,64)        |
| Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak- LO                                                            | 81.475.152,00           | 85.612.076,00           | (4.136.924,00)            | (4,83)         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                        | <b>4.570.139.780,00</b> | <b>8.440.614.675,00</b> | <b>(3.870.474.895,00)</b> | <b>(45,86)</b> |

#### 5.4.1.1.4.11 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

**Tabel 5. 397 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO**

| Uraian Pendapatan                    | Tahun 2025 | Tahun 2024   | Naik/(Turun)   | %       |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------|
| Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO | 991.511,00 | 3.969.727,00 | (2.978.216,00) | (75,02) |

Nilai Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO pada tahun 2025 sebesar Rp991.511,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.978.216,00 atau 75,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.969.727,00.

**Tabel 5. 398 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO**

| Uraian                                   | Tahun 2025        | Tahun 2024          | Naik/(Turun)          | %              |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO  | 0,00              | 1.678.000,00        | (1.678.000,00)        | (100,00)       |
| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO | 991.511,00        | 2.291.727,00        | (1.300.216,00)        | (56,74)        |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>991.511,00</b> | <b>3.969.727,00</b> | <b>(2.978.216,00)</b> | <b>(75,02)</b> |

#### 5.4.1.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO

**Tabel 5. 399 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO**

| Uraian Pendapatan                           | Tahun 2025 | Tahun 2024     | Naik/(Turun)     | %        |
|---------------------------------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO | 0,00       | 116.003.153,00 | (116.003.153,00) | (100,00) |

Nilai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 116.003.153,00 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp116.003.153,00.

#### 5.4.1.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian-LO

**Tabel 5. 400 Pendapatan dari Pengembalian-LO**

| Uraian Pendapatan               | Tahun 2025        | Tahun 2024     | Naik/(Turun)      | %        |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| Pendapatan dari Pengembalian-LO | 16.562.952.582,00 | 956.102.673,06 | 15.606.849.908,94 | 1.632,34 |

Nilai Pendapatan dari Pengembalian-LO pada tahun 2025 sebesar Rp 16.562.952.582,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.606.849.908,94 atau 1.632,34% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp956.102.673,06.

**Tabel 5. 401 Rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO**

| Uraian                                                                                | Tahun 2025     | Tahun 2024     | Naik/(Turun)    | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO                 | 13.472.706,00  | 19.644.670,00  | (6.171.964,00)  | (31,42) |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO | 46.594,00      | 56.716,00      | (10.122,00)     | (17,85) |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) - LO         | 99.180,00      | 170.145,00     | (70.965,00)     | (41,71) |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LO | 511.221.230,00 | 547.816.556,00 | (36.595.326,00) | (6,68)  |

| Uraian                                                                                                                                                                                             | Tahun 2025               | Tahun 2024            | Naik/(Turun)             | %               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN - LO                                                                                                            | 54.556.427,00            | 14.832.654,00         | 39.723.773,00            | 267,81          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO                                                                  | 0,00                     | 22.879.262,00         | (22.879.262,00)          | (100,00)        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-LO                                                                   | 2.875.623,00             | 0,00                  | 2.875.623,00             | 100,00          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)-LO                                                                                       | 150.000,00               | 0,00                  | 150.000,00               | 100,00          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO                                                                                                                   | 19.860.001,00            | 277.700.003,00        | (257.840.002,00)         | (92,85)         |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO                                                  | 0,00                     | 980.825,00            | (980.825,00)             | (100,00)        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 15.921.337.521,00        | 0,00                  | 15.921.337.521,00        | 100,00          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - LO                     | 9.600.000,00             | 4.100.179,00          | 5.499.821,00             | 134,14          |
| Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air irigasi                                                                                                               | 0,00                     | 66.201.663,06         | (66.201.663,06)          | (100,00)        |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler-LO                                                                                                         | 29.325.000,00            | 0,00                  | 29.325.000,00            | 100,00          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO                                                                                                   | 408.300,00               | 0,00                  | 408.300,00               | 100,00          |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO           | 0,00                     | 1.720.000,00          | (1.720.000,00)           | (100,00)        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16.562.952.582,00</b> | <b>956.102.673,06</b> | <b>15.606.849.908,94</b> | <b>1.632,34</b> |

#### 5.4.1.1.4.14 Pendapatan dari BLUD-LO

Tabel 5. 402 Pendapatan dari BLUD-LO

| Uraian Pendapatan       | Tahun 2025        | Tahun 2024       | Naik/(Turun)      | %        |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Pendapatan dari BLUD-LO | 22.280.438.525,70 | 1.594.657.433,63 | 20.685.781.092,07 | 1.297,19 |

Nilai Pendapatan dari BLUD-LO pada tahun 2025 sebesar Rp22.280.438.525,70 mengalami kenaikan sebesar Rp20.685.781.092,07 atau 1.297,19% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.594.657.433,63.

#### 5.4.1.1.4.15 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

**Tabel 5. 403 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO**

| Uraian Pendapatan                                     | Tahun 2025     | Tahun 2024   | Naik/(Turun)   | %         |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO | 798.130.000,00 | 1.400.000,00 | 796.730.000,00 | 56.909,29 |

Nilai Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO pada tahun 2025 sebesar Rp798.130.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp796.730.000,00 atau 56.909,29% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.400.000,00.

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

**Tabel 5. 404 Pendapatan Transfer**

| Uraian Pendapatan      | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Naik/(Turun)         | %      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Pendapatan Transfer-LO | 2.422.697.366.528,00 | 2.616.484.344.206,00 | (193.786.977.678,00) | (7,41) |

Nilai Pendapatan Transfer pada tahun 2025 sebesar Rp2.422.697.366.528,00 mengalami penurunan sebesar Rp193.786.977.678,00 atau 7,41% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.616.484.344.206,00.

**Tabel 5. 405 Rincian Pendapatan Transfer-LO**

| Uraian                                  | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Naik/(Turun)                | %             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 2.149.628.803.599,00        | 2.102.959.260.959,00        | 46.669.542.640,00           | 2,22          |
| Pendapatan Pemerintah Provinsi-LO       | 273.068.562.929,00          | 513.525.083.247,00          | (240.456.520.318,00)        | (46,82)       |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>2.422.697.366.528,00</b> | <b>2.616.484.344.206,00</b> | <b>(193.789.977.678,00)</b> | <b>(7,41)</b> |

#### 5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

**Tabel 5. 406 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

| Uraian Pendapatan                    | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Naik/(Turun)      | %    |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.149.628.803.599,00 | 2.102.959.260.959,00 | 46.669.542.640,00 | 2,22 |

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2025 sebesar Rp2.149.628.803.599,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.669.542.640,00 atau 2,22% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.102.959.260.959,00.

Tabel 5. 407 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

| Uraian                 | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Naik/(Turun)             | %           |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| Dana Bagi Hasil - LO   | 206.548.829.700,00          | 175.228.162.000,00          | 31.320.667.700,00        | 17,87       |
| Dana Alokasi Umum-LO   | 1.311.103.564.100,00        | 1.272.254.530.355,00        | 38.849.033.745,00        | 3,05        |
| Dana Alokasi Khusus-LO | 617.547.440.799,00          | 655.476.568.604,00          | (37.929.127.805,00)      | (5,79)      |
| Insentif Fiskal-LO     | 14.428.969.000,00           | 0,00                        | 14.428.969.000,00        | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>          | <b>2.149.628.803.599,00</b> | <b>2.102.959.260.959,00</b> | <b>46.669.542.640,00</b> | <b>2,22</b> |

Tabel 5. 408 Perbedaan Nilai Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO

| URAIAN              | LRA                  | LO                   | SELISIH              | PENJELASAN SELISIH                |                  |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
|                     |                      |                      |                      | Kenaikan/<br>Penurunan<br>Piutang | TDF              | resiprokal dana<br>desa |
| Dana Bagi Hasil     | 214.703.688.700,00   | 206.548.829.700,00   | (8.154.859.000,00)   | (8.154.859.000,00)                |                  |                         |
| Dana Alokasi Umum   | 1.311.742.341.100,00 | 1.311.103.564.100,00 | (638.777.000,00)     |                                   | (638.777.000,00) |                         |
| Dana Alokasi Khusus | 617.547.440.799,00   | 617.547.440.799,00   | 0,00                 |                                   |                  |                         |
| Insentif Fiskal     | 14.428.969.000,00    | 14.428.969.000,00    | 0,00                 |                                   |                  |                         |
| Dana Desa           | 307.367.596.442,00   | 0,00                 | (307.367.596.442,00) |                                   |                  | (307.367.596.442,00)    |

#### 5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Tabel 5. 409 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

| Uraian Pendapatan                   | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)         | %       |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | 273.068.562.929,00 | 513.525.083.247,00 | (240.456.520.318,00) | (46,82) |

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO pada tahun 2024 sebesar Rp273.068.562.929,00 mengalami penurunan sebesar Rp240.456.520.318,00 atau 46,82% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp513.525.083.247,00.

Tabel 5. 410 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

| Uraian                   | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)                | %              |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Pendapatan Bagi Hasil-LO | 262.332.020.150,00        | 502.620.091.047,00        | (240.288.070.897,00)        | (47,81)        |
| Bantuan Keuangan-LO      | 10.736.542.779,00         | 10.904.992.200,00         | (168.449.421,00)            | (1,54)         |
| <b>Jumlah</b>            | <b>273.068.562.929,00</b> | <b>513.525.083.247,00</b> | <b>(240.456.520.318,00)</b> | <b>(46,82)</b> |

Terdapat perbedaan nilai realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah antara LRA dan LO sebesar Rp70.203.800,00 yang terdapat pada Bantuan Keuangan dikarenakan pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Khusus ke RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### 5.4.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO

**Tabel 5. 411 Pendapatan Bagi Hasil-LO**

| Uraian Pendapatan        | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)         | %       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| Pendapatan Bagi Hasil-LO | 262.332.020.150,00 | 502.620.091.047,00 | (240.288.070.897,00) | (47,81) |

Nilai Pendapatan Bagi Hasil - LO pada tahun 2025 sebesar Rp262.332.020.150,00 mengalami penurunan sebesar Rp240.288.070.897,00 atau 47,81% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp502.620.091.047,00.

**Tabel 5. 412 Rincian Pendapatan Bagi Hasil-LO**

| Uraian                                                        | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)                | %              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO             | 17.585.267.100,00         | 175.673.096.400,00        | (158.087.829.300,00)        | (89,99)        |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO    | 12.069.439.200,00         | 102.039.515.300,00        | (89.970.076.100,00)         | (88,17)        |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO | 141.913.589.900,00        | 147.613.806.500,00        | (5.700.216.600,00)          | (3,86)         |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO                 | 1.249.025.450,00          | 1.199.679.400,00          | 49.346.050,00               | 4,11           |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO                          | 89.514.698.500,00         | 76.093.993.447,00         | 13.420.705.053,00           | 17,64          |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>262.332.020.150,00</b> | <b>502.620.091.047,00</b> | <b>(240.288.070.897,00)</b> | <b>(47,81)</b> |

#### 5.4.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan-LO

**Tabel 5. 413 Bantuan Keuangan-LO**

| Uraian Pendapatan   | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %      |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| Bantuan Keuangan-LO | 10.736.542.779,00 | 10.904.992.200,00 | (168.449.421,00) | (1,54) |

Nilai Bantuan Keuangan-LO pada tahun 2025 sebesar Rp10.736.542.779,00 mengalami kenaikan sebesar Rp168.449.421,00 atau 1,54% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10.904.992.200,00. Bantuan Keuangan-LO merupakan pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 5. 414 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO**

| Uraian                                           | Jumlah                   | Keterangan                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 75.594.195,00            | BKK Bid. Kesehatan : Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH) |
|                                                  | 4.400.000,00             | BKK Bid. Kesehatan : Konseling Dari Pintu Ke Pintu (KOPIPU)  |
|                                                  | 12.400.000,00            | BKK Bid. Kesehatan : Honorarium Perawat Ponkesdes            |
|                                                  | 116.722.084,00           | Bantuan Pendampingan Bumil Risti                             |
|                                                  | 44.936.500,00            | Jatim Puspa                                                  |
|                                                  | 1.674.750.000,00         | Honorarium Aparatur Pemerintah Desa                          |
|                                                  | 520.000.000,00           | Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS               |
|                                                  | 24.000.000,00            | Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP            |
|                                                  | 8.263.740.000,00         | BKK BPPDGS (BOSDA MADIN)                                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>10.736.542.779,00</b> |                                                              |

#### 5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

**Tabel 5. 415 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

| Uraian Pendapatan                    | Tahun 2025         | Tahun 2024        | Naik/(Turun)       | %      |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 198.774.819.861,68 | 46.171.590.916,26 | 152.603.228.945,42 | 330,51 |

Nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2025 sebesar Rp198.774.819.861,68 mengalami kenaikan sebesar Rp152.603.228.945,42 atau 330,51% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp46.171.590.916,26.

Terdapat perbedaan nilai realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara LRA dan LO sebesar Rp190.970.881.568,68 yang terdapat pada Pendapatan Hibah Barang.

##### 5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

**Tabel 5. 416 Pendapatan Hibah**

| Uraian Pendapatan | Tahun 2025         | Tahun 2024        | Naik/(Turun)       | %      |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Pendapatan Hibah  | 198.774.819.861,68 | 46.170.921.677,21 | 152.603.898.184,47 | 330,52 |

Nilai Pendapatan Hibah pada tahun 2025 sebesar Rp198.774.819.861,68 mengalami kenaikan sebesar Rp152.603.898.184,47 atau 330,52% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp46.170.921.677,21.

**Tabel 5. 417 Rincian Pendapatan Hibah-LO**

| Uraian                                                                     | Tahun 2025                | Tahun 2024               | Naik/(Turun)              | %             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO                                  | 141.726.789.549,00        | 1.075.502.730,00         | 140.651.286.819,00        | 13.077,72     |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO                         | 48.627.855.532,68         | 36.824.418.851,21        | 11.803.436.681,47         | 32,05         |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO       | 4.753.260.781,00          | 8.271.000.096,00         | (3.517.739.315,00)        | (42,53)       |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO | 3.666.913.999,00          | 0,00                     | 3.666.913.999,00          | 100,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                              | <b>198.774.819.861,68</b> | <b>46.170.921.677,21</b> | <b>152.603.898.184,47</b> | <b>330,52</b> |

Terdapat Pendapatan Hibah berupa barang dengan nilai sebesar Rp198.774.819.861,68 yang diterima oleh 10 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                    | Nilai              | SKPD                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO | 15.058.765.545,00  | Dinas Pendidikan & Kebudayaan                                          |
|                                           | 4.339.436.210,00   | Dinas Kesehatan                                                        |
|                                           | 904.631.948,00     | RSUD RT NOTOPURO                                                       |
|                                           | 104.881.495.520,00 | Dinas Pekerjaan Umum & Bina Marga                                      |
|                                           | 4.348.651.082,00   | Dinas Perumahan & Permukiman                                           |
|                                           | 6.797.262.085,00   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    |
|                                           | 971.981.710,00     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana |

| Uraian                                                                      | Nilai                     | SKPD                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                             | 3.004.947.949,00          | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil    |
|                                                                             | 1.419.617.500,00          | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO                                  | 46.453.917.110,68         | Dinas Kesehatan                            |
|                                                                             | 899.110.606,00            | Dinas Perhubungan                          |
|                                                                             | 1.274.827.816,00          | Pangan dan Pertanian                       |
| Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO        | 295.500.000,00            | Dinas Pendidikan & Kebudayaan              |
|                                                                             | 4.457.760.781,00          | RSUD R.T. Notopuro                         |
|                                                                             | 39.042.000,00             | RSUD Sidoarjo Barat                        |
| Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO | 120.439.999,00            | Dinas Perumahan & Permukiman               |
|                                                                             | 3.507.432.000,00          | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| <b>Jumlah</b>                                                               | <b>198.774.819.861,68</b> |                                            |

Terdapat hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupa Laptop, Smartboard (berupa IFP), dan Media Penyimpan Eksternal (Hardisk) namun belum bisa dicatat pada aset dikarenakan belum diketahui nilai perolehannya.

Dengan rincian sebagai berikut :

| LEMBAGA    | TAHUN PEROLEHAN 2024 |                         |                                     | TAHUN PEROLEHAN 2025 |                         |                                     | TAHUN PEROLEHAN 2026 |                         |                                     |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|            | LAPTOP               | Smartboard (berupa IFP) | Media Penyimpan Eksternal (hardisk) | LAPTOP               | Smartboard (berupa IFP) | Media Penyimpan Eksternal (hardisk) | LAPTOP               | Smartboard (berupa IFP) | Media Penyimpan Eksternal (hardisk) |
| SD NEGERI  | 0                    | 1                       | 0                                   | 19                   | 454                     | 18                                  | 444                  | 8                       | 443                                 |
| SMP NEGERI | 0                    | 0                       | 0                                   | 1                    | 47                      | 1                                   | 46                   | 0                       | 46                                  |

Terdapat hibah yang belum dilakukan pengesahan oleh BUD dan belum tercatat di Laporan Keuangan sebesar Rp85.390.607.865 yang disajikan secara rinci **dalam lampiran 36** yang merupakan bagian dari LKPD.

#### 5.4.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

**Tabel 5. 418 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**

| Uraian Pendapatan                                                            | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Naik/(Turun) | %        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 0,00       | 669.239,05 | (669.239,05) | (100,00) |

Nilai Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp669.239,05 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp669.239,05.

#### 5.4.1.2 Beban Daerah

**Tabel 5. 419 Beban Daerah**

| Uraian       | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Naik/(Turun)       | %    |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|
| Beban Daerah | 5.053.182.085.466,62 | 4.850.161.827.214,85 | 203.020.258.251,77 | 4,19 |

Nilai Beban Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp4.994.373.496.597,19 mengalami kenaikan sebesar Rp144.211.669.382,34 atau 2,97% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.850.161.827.214,85. Perbedaan antara Belanja Daerah dan Beban Daerah tahun 2025 pada LRA dan LO disajikan secara rinci dalam **lampiran 30** yang merupakan bagian dari LKPD.

Tabel 5. 420 Rincian Beban Daerah

| Uraian            | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Naik/(Turun)              | %           |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Beban Operasi     | 4.642.376.944.675,60        | 4.548.456.804.254,33        | 93.920.140.421,27         | 2,06        |
| Beban Transfer    | 410.805.140.791,02          | 301.705.022.960,52          | (712.510.163.751,54)      | 36,16       |
| Beban Tak Terduga | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>     | <b>5.053.182.085.466,62</b> | <b>4.850.161.827.214,85</b> | <b>203.020.258.251,77</b> | <b>4,19</b> |

#### 5.4.1.2.1 Beban Operasi

Tabel 5. 421 Beban Operasi

| Uraian        | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Naik/(Turun)      | %    |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| Beban Operasi | 4.642.376.944.675,60 | 4.548.456.804.254,33 | 93.920.140.421,27 | 2,06 |

Nilai Beban Operasi pada tahun 2025 sebesar Rp4.642.376.944.675,60 mengalami kenaikan sebesar Rp93.920.140.421,27 atau 2,06% jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp4.548.456.804.254,33.

Tabel 5. 422 Rincian Beban Operasi

| Uraian                        | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Naik/(Turun)             | %           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| Beban Pegawai                 | 1.775.507.456.239,06        | 1.757.330.325.262,61        | 18.177.130.976,45        | 1,03        |
| Beban Persediaan              | 660.167.157.891,08          | 597.820.111.253,25          | 62.347.046.637,83        | 10,43       |
| Beban Jasa                    | 991.309.982.041,60          | 876.029.953.751,96          | 115.280.028.289,64       | 13,16       |
| Beban Pemeliharaan            | 170.107.413.338,58          | 138.432.661.221,16          | 31.674.752.117,42        | 22,88       |
| Beban Perjalanan Dinas        | 73.822.119.646,00           | 110.523.458.873,00          | (36.701.339.227,00)      | (33,21)     |
| Beban Bunga                   | 2.533.508.080,22            | 0,00                        | 2.533.508.080,22         | 100         |
| Beban Subsidi                 | 3.128.933.535,00            | 3.009.364.430,00            | 119.569.105,00           | 3,97        |
| Beban Hibah                   | 273.391.805.661,44          | 361.998.076.858,22          | (88.606.271.196,78)      | (24,48)     |
| Beban Bantuan Sosial          | 93.725.551.700,00           | 106.371.888.000,00          | (12.646.336.300,00)      | (11,89)     |
| Beban Penyisihan Piutang      | 38.195.234.213,32           | 43.689.631.975,19           | (5.494.397.761,87)       | (12,58)     |
| Beban Penyusutan & Amortisasi | 560.487.782.329,30          | 553.251.332.628,94          | 7.236.449.700,36         | 1,31        |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>4.642.376.944.675,60</b> | <b>4.548.456.804.254,33</b> | <b>93.920.140.421,27</b> | <b>2,06</b> |

#### 5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Tabel 5. 423 Beban Pegawai

| Uraian        | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Naik/(Turun)      | %    |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| Beban Pegawai | 1.775.507.456.239,06 | 1.757.330.325.262,61 | 18.177.130.976,45 | 1,03 |

Nilai Beban Pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp1.775.507.456.239,06 mengalami kenaikan sebesar Rp18.177.130.976,45 atau 1,03% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.757.330.325.262,61.

**Tabel 5. 424 Rincian Beban Pegawai**

| Uraian                                                                   | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Naik/(Turun)             | %           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 878.749.629.180,01          | 878.432.795.414,51          | 316.833.765,50           | 0,04        |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN                                           | 393.133.742.032,00          | 399.332.807.389,00          | (6.199.065.357,00)       | (1,55)      |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 464.488.701.705,05          | 445.471.236.414,10          | 19.017.465.290,95        | 4,27        |
| Beban Gaji dan Tunjangan DPRD                                            | 33.091.718.386,00           | 30.761.620.840,00           | 2.330.097.546,00         | 7,57        |
| Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                        | 1.231.297.895,00            | 828.965.142,00              | 402.332.753,00           | 48,53       |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                    | 4.812.367.041,00            | 2.502.900.063,00            | 2.309.466.978,00         | 92,27       |
| <b>Jumlah</b>                                                            | <b>1.775.507.456.239,06</b> | <b>1.757.330.325.262,61</b> | <b>18.177.130.976,45</b> | <b>1,03</b> |

Perbedaan antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai tahun 2025 pada LRA dan LO disajikan secara rinci dalam **lampiran 31** yang merupakan bagian dari LKPD.

#### 5.4.1.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

**Tabel 5. 425 Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

| Uraian                       | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)   | %    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------|
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 878.749.629.180,01 | 878.432.795.414,51 | 316.833.765,50 | 0,04 |

Nilai Beban Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2025 sebesar Rp878.749.629.180,01 mengalami kenaikan sebesar Rp316.833.765,50 atau 0,04% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp878.432.795.414,51.

**Tabel 5. 426 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN**

| Uraian                                    | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %       |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Beban Gaji Pokok PNS                      | 436.511.481.926,00 | 465.079.588.497,00 | (28.568.106.571,00) | (6,14)  |
| Beban Gaji Pokok PPPK                     | 221.471.368.060,00 | 201.913.022.700,00 | 19.558.345.360,00   | 9,69    |
| Beban Tunjangan Keluarga PNS              | 40.118.797.502,00  | 42.405.293.222,00  | (2.286.495.720,00)  | (5,39)  |
| Beban Tunjangan Keluarga PPPK             | 20.297.201.919,00  | 18.331.324.334,00  | 1.965.877.585,00    | 10,72   |
| Beban Tunjangan Jabatan PNS               | 5.320.560.000,00   | 5.346.620.000,00   | (26.060.000,00)     | (0,49)  |
| Beban Tunjangan Fungsional PNS            | 31.555.712.500,00  | 35.149.743.524,00  | (3.594.031.024,00)  | (10,22) |
| Beban Tunjangan Fungsional PPPK           | 29.880.000,00      | 0,00               | 29.880.000,00       | 0,00    |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS       | 4.843.691.000,00   | 5.453.407.000,00   | (609.716.000,00)    | (11,18) |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK      | 12.729.435.000,00  | 11.714.600.000,00  | 1.014.835.000,00    | 8,66    |
| Beban Tunjangan Beras PNS                 | 21.844.849.786,00  | 23.326.844.100,00  | (1.481.994.314,00)  | 6,35    |
| Beban Tunjangan Beras PPPK                | 13.777.398.060,00  | 12.529.094.520,00  | 1.248.303.540,00    | 9,96    |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 14.146.921.264,00  | 3.793.222.263,00   | 10.353.699.001,00   | 272,95  |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 280.816.268,00     | 83.706.665,00      | 197.109.603,00      | 235,48  |

| Uraian                                    | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)          | %           |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Beban Pembulatan Gaji PNS                 | 5.543.922,00              | 6.473.430,00              | (929.508,00)          | (14,36)     |
| Beban Pembulatan Gaji PPPK                | 3.352.008,00              | 3.977.090,00              | (625.082,00)          | (15,72)     |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS         | 34.617.940.569,01         | 37.650.310.522,51         | (3.032.369.953,50)    | (8,05)      |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK        | 15.771.479.418,00         | 10.163.588.751,00         | 5.607.890.667,00      | 55,18       |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 894.201.786,00            | 954.168.292,00            | (59.966.506,00)       | (6,28)      |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 461.483.389,00            | 416.365.638,00            | 45.117.751,00         | 10,84       |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS          | 2.682.307.210,00          | 2.862.419.962,00          | (180.112.752,00)      | (6,29)      |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK         | 1.385.207.593,00          | 1.249.024.904,00          | 136.182.689,00        | 10,9        |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>878.749.629.180,01</b> | <b>878.432.795.414,51</b> | <b>316.833.765,50</b> | <b>0,04</b> |

#### 5.4.1.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

**Tabel 5. 427 Beban Tambahan Penghasilan ASN**

| Uraian                         | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)              | %             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Beban Tambahan Penghasilan ASN | <b>393.133.742.032,00</b> | <b>399.332.807.389,00</b> | <b>(6.199.065.357,00)</b> | <b>(1,55)</b> |

Nilai Beban Tambahan Penghasilan ASN pada tahun 2025 sebesar Rp393.133.742.032,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.199.065.357,00 atau 1,55% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp399.332.807.389,00.

Pada tahun 2025 terdapat Kode rekening baru yaitu Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebesar Rp484.642.861,00 yang diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.

**Tabel 5. 428 Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN**

| Uraian                                                        | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)              | %             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS        | 128.384.514.122,00        | 239.644.182.435,00        | (111.259.668.313,00)      | (46,43)       |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK       | 2.523.165.175,00          | 33.700.170.081,00         | (31.177.004.906,00)       | (92,51)       |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS      | 67.970.908.353,00         | 15.356.414.088,00         | 52.614.494.265,00         | 342,62        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK     | 8.190.079.785,00          | 865.584.991,00            | 7.324.494.794,00          | 846,19        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 484.642.861,00            | 0,00                      | 484.642.861,00            | 100,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS     | 152.709.016.212,00        | 103.333.775.385,00        | 49.375.240.827,00         | 47,78         |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK    | 32.871.415.524,00         | 6.432.680.409,00          | 26.438.735.115,00         | 411,01        |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>393.133.742.032,00</b> | <b>399.332.807.389,00</b> | <b>(6.199.065.357,00)</b> | <b>(1,55)</b> |

Pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK terdapat kenaikan nilai sebesar Rp7.324.494.794,00 atau sebesar 846,19% dan pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK terdapat kenaikan sebesar Rp26.438.735.115,00 atau sebesar 411,01%. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran tunjangan PPPK angkatan pertama.

#### 5.4.1.2.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

**Tabel 5. 429 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

| Uraian                                                                   | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 464.488.701.705,05 | 445.471.236.414,10 | 19.017.465.290,95 | 4,27 |

Nilai Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada tahun 2025 sebesar Rp464.488.701.705,05 mengalami penurunan sebesar Rp19.017.465.290,95 atau 4,27% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp445.471.236.414,10.

**Tabel 5. 430 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

| Uraian                                                                                  | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                                    | 13.961.068.299,00  | 20.036.184.918,00  | (6.075.116.619,00)  | (30,32)  |
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah                                | 84.983.505,00      | 1.943.875.721,00   | (1.858.892.216,00)  | (95,63)  |
| Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                                 | 153.543.019.400,00 | 198.091.555.684,00 | (44.548.536.284,00) | (22,49)  |
| Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                           | 792.500.000,00     | 6.838.562.500,00   | (6.046.062.500,00)  | (88,41)  |
| Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                                 | 163.047.426.894,05 | 197.651.115.047,10 | (34.603.688.153,05) | (17,51)  |
| Beban Honorarium                                                                        | 0,00               | 20.522.307.620,00  | (20.522.307.620,00) | (100,00) |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD                                                              | 369.035.145,00     | 387.634.924,00     | (18.599.779,00)     | (4,80)   |
| Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK                                                 | 99.237.445.100,00  | 0,00               | 99.237.445.100,00   | 100,00   |
| Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK                                           | 2.492.500.000,00   | 0,00               | 2.492.500.000,00    | 100,00   |
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame                                   | (59.235.656,00)    | 0,00               | (59.235.656,00)     | 100,00   |
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                 | 6.517.784,00       | 0,00               | 6.517.784,00        | 100,00   |
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 442.234.760,00     | 0,00               | 442.234.760,00      | 100,00   |
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan       | (3.040.931.674,00) | 0,00               | (3.040.931.674,00)  | 100,00   |

| Uraian                                                                        | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)             | %           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | 410.176.426,00            | 0,00                      | 410.176.426,00           | 100,00      |
| Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  | 496.513.200,00            | 0,00                      | 496.513.200,00           | 100,00      |
| Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                                       | 32.667.528.522,00         | 0,00                      | 32.667.528.522,00        | 100,00      |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                         | 37.920.000,00             | 0,00                      | 37.920.000,00            | 100,00      |
| Jumlah                                                                        | <b>464.488.701.705,05</b> | <b>445.471.236.414,10</b> | <b>19.017.465.290,95</b> | <b>4,27</b> |

Pada tahun 2025 Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD tidak masuk pada akun Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN melainkan pada akun Beban Tambahan Penghasilan ASN. Hal ini sesuai dengan kebijakan kode rekening yang terbaru.

#### 5.4.1.2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

**Tabel 5. 431 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

| Uraian                        | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 33.091.718.386,00 | 30.761.620.840,00 | 2.330.097.546,00 | 7,57 |

Nilai Beban Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2025 sebesar Rp 33.091.718.386,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.330.097.546,00 atau 7,57% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp30.761.620.840,00.

**Tabel 5. 432 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**

| Uraian                                                        | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)   | %        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| Beban Uang Representasi DPRD                                  | 1.104.810.000,00 | 1.100.610.000,00 | 4.200.000,00   | 0,38     |
| Beban Tunjangan Keluarga DPRD                                 | 114.578.100,00   | 110.552.400,00   | 4.025.700,00   | 3,64     |
| Beban Tunjangan Beras DPRD                                    | 126.517.740,00   | 126.952.260,00   | (434.520,00)   | (0,34)   |
| Beban Uang Paket DPRD                                         | 95.025.000,00    | 94.290.000,00    | 735.000,00     | 0,78     |
| Beban Tunjangan Jabatan DPRD                                  | 1.599.538.500,00 | 1.595.732.250,00 | 3.806.250,00   | 0,24     |
| Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD                         | 130.782.750,00   | 110.350.800,00   | 20.431.950,00  | 18,52    |
| Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                 | 15.255.450,00    | 11.708.025,00    | 3.547.425,00   | 30,30    |
| Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 8.761.200.000,00 | 8.717.100.000,00 | 44.100.000,00  | 0,51     |
| Beban Tunjangan Reses DPRD                                    | 2.190.300.000,00 | 1.455.300.000,00 | 735.000.000,00 | 50,51    |
| Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan                      | 109.724.113,00   | 3.881.457,00     | 105.842.656,00 | 2.726,68 |
| Beban Jaminan Kesehatan DPRD                                  | 91.115.598,00    | 0,00             | 91.115.598,00  | 100,00   |
| Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD                           | 6.957.831,00     | 0,00             | 6.957.831,00   | 100,00   |
| Beban Jaminan Kematian DPRD                                   | 8.697.304,00     | 0,00             | 8.697.304,00   | 100,00   |

| Uraian                                                  | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)            | %           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 11.613.216.000,00        | 10.550.128.648,00        | 1.063.087.352,00        | 10,08       |
| Beban Tunjangan Transportasi DPRD                       | 7.124.000.000,00         | 6.450.000.000,00         | 674.000.000,00          | (100,00)    |
| Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD                         | 0,00                     | 435.015.000,00           | (435.015.000,00)        | (100,00)    |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>33.091.718.386,00</b> | <b>30.761.620.840,00</b> | <b>2.330.097.546,00</b> | <b>7,57</b> |

#### 5.4.1.2.1.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

**Tabel 5. 433 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

| Uraian                            | Tahun 2025       | Tahun 2024     | Naik/(Turun)     | %      |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------|
| Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.231.297.895,00 | 828.965.142,00 | 1.080.648.020,00 | 130,36 |

Nilai Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada tahun 2025 sebesar Rp1.231.297.895,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.080.648.020,00 atau 130,36% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp828.965.142,00.

**Tabel 5. 434 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

| Uraian                                                                                       | Tahun 2025              | Tahun 2024            | Naik/(Turun)            | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Beban Gaji Pokok KDH/WKDH                                                                    | 52.500.000,00           | 54.965.342,00         | (2.465.342,00)          | (4,49)        |
| Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH                                                            | 6.888.000,00            | 7.644.000,00          | (756.000,00)            | (9,89)        |
| Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH                                                             | 86.940.000,00           | 69.660.000,00         | 17.280.000,00           | 24,81         |
| Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH                                                               | 7.024.740,00            | 8.111.040,00          | (1.086.300,00)          | (13,39)       |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH                                                | 1.072.310.955,00        | 98.369.576,00         | 973.941.379,00          | 990,08        |
| Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH                                                               | 440,00                  | 1.040,00              | (600,00)                | (57,69)       |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH                                                       | 5.184.480,00            | 4.358.880,00          | 825.600,00              | 18,94         |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH                                                | 112.320,00              | 112.320,00            | 0,00                    | 0,00          |
| Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH                                                        | 336.960,00              | 336.960,00            | 0,00                    | 0,00          |
| Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah                                    | 0,00                    | 585.405.984,00        | (585.405.984,00)        | (100,00)      |
| Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame                                   | 11.945.198,00           | 0,00                  | 11.945.198,00           | 100,00        |
| Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                 | 2.396.034,00            | 0,00                  | 2.396.034,00            | 100,00        |
| Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 188.812.805,00          | 0,00                  | 188.812.805,00          | 100,00        |
| Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan       | 337.288.472,00          | 0,00                  | 337.288.472,00          | 100,00        |
| Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            | 78.784.433,00           | 0,00                  | 78.784.433,00           | 100,00        |
| Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 59.088.325,00           | 0,00                  | 59.088.325,00           | 100,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                | <b>1.909.613.162,00</b> | <b>828.965.142,00</b> | <b>1.080.648.020,00</b> | <b>130,36</b> |

#### 5.4.1.2.1.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

**Tabel 5. 435 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

| Uraian                                                | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)     | %     |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 4.134.051.774,00 | 2.502.900.063,00 | 1.631.151.711,00 | 65,17 |

Nilai Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2025 sebesar Rp4.134.051.774,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.631.151.711,00 atau 65,17% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.502.900.063,00.

**Tabel 5. 436 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

| Uraian                               | Tahun 2025              | Tahun 2024              | Naik/(Turun)            | %            |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD | 393.120.000,00          | 360.360.000,00          | 32.760.000,00           | 9,09         |
| Beban Dana Operasional KDH/WKDH      | 3.740.931.774,00        | 2.142.540.063,00        | 1.598.391.711,00        | 74,60        |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>4.134.051.774,00</b> | <b>2.502.900.063,00</b> | <b>1.631.151.711,00</b> | <b>65,17</b> |

#### 5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

**Tabel 5. 437 Beban Persediaan**

| Uraian           | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %     |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Beban Persediaan | 660.167.157.891,08 | 597.820.111.253,25 | 62.347.046.637,83 | 10,43 |

Nilai Beban Barang dan Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp660.167.157.891,08 mengalami kenaikan sebesar Rp62.347.046.637,83 atau 10,43% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp597.820.111.253,25. Perbedaan antara pendapatan Belanja Persediaan dan Beban Persediaan tahun 2025 pada LRA dan LO disajikan secara rinci dalam **lampiran 32** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 438 Rincian Beban Persediaan**

| Uraian                                                     | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)             | %            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| Beban Barang Pakai Habis                                   | 646.951.261.768,94        | 588.808.072.438,45        | 58.143.189.330,49        | 9,87         |
| Beban Barang Tak Habis Pakai                               | 149.181.140,00            | 9.441.504,80              | 139.739.635,20           | 1480,06      |
| Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 13.066.714.982,14         | 9.002.597.310,00          | 4.064.117.672,14         | 45,14        |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>660.167.157.891,08</b> | <b>597.820.111.253,25</b> | <b>62.347.046.637,83</b> | <b>10,43</b> |

#### 5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

**Tabel 5. 439 Beban Jasa**

| Uraian     | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)       | %     |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Beban Jasa | 991.309.982.041,60 | 876.029.953.751,96 | 115.280.028.289,64 | 13,16 |

Nilai Beban Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp991.309.982.041,60 mengalami kenaikan sebesar Rp115.280.028.289,64 atau 13,16% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp876.029.953.751,96.

Perbedaan antara pendapatan Belanja Jasa dan Beban Jasa tahun 2025 pada LRA dan LO disajikan secara rinci dalam **lampiran 33** yang merupakan bagian dari LKPD.

Telah dilakukan resiprokal antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO dan beban jasa LO atas pembayaran dinas Kesehatan kepada RSUD RTN, RSUD Sibar, dan 31 puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Beban terdiri dari:                                               |                         |
| Beban Jasa Tenaga Kesehatan                                       | 339.500.000,00          |
| Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS | 844.012.000,00          |
| Beban Jasa Tenaga Laboratorium                                    | 23.167.000,00           |
| Beban Kursus Singkat / Pelatihan                                  | 110.725.000,00          |
| Beban Medical Check Up                                            | 137.801.946,00          |
| <b>Total</b>                                                      | <b>1.455.205.946,00</b> |

#### 5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

**Tabel 5. 440 Beban Pemeliharaan**

| Uraian             | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %     |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Beban Pemeliharaan | 170.107.413.338,58 | 138.432.661.221,16 | 31.674.752.117,42 | 22,88 |

Nilai Beban Pemeliharaan pada tahun 2025 sebesar Rp170.107.413.338,58 mengalami kenaikan sebesar Rp31.674.752.117,42 atau 22,88% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp138.432.661.221,16.

Perbedaan antara pendapatan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan tahun 2025 pada LRA dan LO disajikan secara rinci dalam **lampiran 34** yang merupakan bagian dari LKPD

**Tabel 5. 441 Rincian Beban Pemeliharaan**

| Uraian                                          | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)             | %            |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| Beban Pemeliharaan Tanah                        | 14.666.664,00             | 0,00                      | 14.666.664,00            | 100,00       |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          | 66.402.033.593,00         | 62.999.575.717,00         | 3.402.457.876,00         | 5,40         |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          | 38.426.959.730,17         | 35.482.758.357,82         | 2.944.201.372,35         | 8,30         |
| Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 62.375.243.447,41         | 39.096.847.517,34         | 23.278.395.930,07        | 59,54        |
| Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya           | 1.103.280.740,00          | 53.007.400,00             | 1.050.273.340,00         | 1.981,37     |
| Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software | 1.785.229.164,00          | 800.472.229,00            | 984.756.935,00           | 123,02       |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>170.107.413.338,58</b> | <b>138.432.661.221,16</b> | <b>31.674.752.117,42</b> | <b>22,88</b> |

#### 5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

**Tabel 5. 442 Beban Perjalanan Dinas**

| Uraian                 | Tahun 2025        | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %       |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Beban Perjalanan Dinas | 73.822.119.646,00 | 110.523.458.873,00 | (36.701.339.227,00) | (33,21) |

Nilai Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2025 sebesar Rp73.808.559.646,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.714.899.227,00 atau 33,22% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp110.523.458.873,00.

Perbedaan antara pendapatan Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 pada LRA dan LO disajikan secara rinci dalam **lampiran 35** yang merupakan bagian dari LKPD.

**Tabel 5. 443 Rincian Beban Perjalanan Dinas**

| Uraian                              | Tahun 2025               | Tahun 2024                | Naik/(Turun)               | %              |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 73.822.119.646,00        | 109.723.458.873,00        | (35.901.339.227,00)        | (32,72)        |
| Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri  | 0,00                     | 800.000.000,00            | (800.000.000,00)           | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>73.822.119.646,00</b> | <b>110.523.458.873,00</b> | <b>(36.701.339.227,00)</b> | <b>(33,21)</b> |

**Tabel 5. 444 Rincian Beban Perjalanan Dinas**

| Uraian                                          | Tahun 2025               | Tahun 2024                | Naik/(Turun)               | %              |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Dinas Biasa                    | 30.447.290.565,00        | 63.379.130.120,00         | (32.931.839.555,00)        | (51,96)        |
| Beban Perjalanan Dinas Tetap                    | 894.170.000,00           | 1.061.005.000,00          | (166.835.000,00)           | (15,72)        |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 29.300.247.280,00        | 32.864.012.655,00         | (3.563.765.375,00)         | (10,84)        |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 882.324.430,00           | 1.790.920.581,00          | (908.596.151,00)           | (50,73)        |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 12.298.087.371,00        | 10.628.390.517,00         | 1.669.696.854,00           | 15,71          |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri        | 0,00                     | 800.000.000,00            | (800.000.000,00)           | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>73.822.119.646,00</b> | <b>110.523.458.873,00</b> | <b>(36.701.339.227,00)</b> | <b>(33,21)</b> |

#### 5.4.1.2.1.6 Beban Bunga

**Tabel 5. 445 Beban Bunga**

| Uraian      | Tahun 2025       | Tahun 2024 | Naik/(Turun)     | %      |
|-------------|------------------|------------|------------------|--------|
| Beban Bunga | 2.533.508.080,22 | 0,00       | 2.533.508.080,22 | 100,00 |

Nilai Beban bunga pada tahun 2025 sebesar Rp2.533.508.080,22 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.533.508.080,22 atau 100,00% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp0,00. Terdapat perbedaan antara Belanja Bunga dan Beban Bunga sebesar Rp169.325.331,9, selisih tersebut merupakan pelunasan utang atas belanja bunga pinjaman bank jatim Bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2025 milik RSUD RT Notopuro.

#### 5.4.1.2.1.7 Beban Subsidi

**Tabel 5. 446 Beban Subsidi**

| Uraian        | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)   | %    |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------|
| Beban Subsidi | 3.128.933.535,00 | 3.009.364.430,00 | 119.569.105,00 | 3,97 |

Nilai Beban Subsidi pada tahun 2025 sebesar Rp3.128.933.535,00 mengalami kenaikan sebesar Rp119.569.105,00 atau 3,97% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.009.364.430,00.

Terdapat perbedaan antara Belanja Subsidi dengan Beban Subsidi antara LRA dan LO pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp173.647.596,00 dikarenakan adanya penyesuaian Beban Dibayar Dimuka.

#### 5.4.1.2.1.8 Beban Hibah

**Tabel 5. 447 Beban Hibah**

| Uraian      | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %       |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Beban Hibah | 273.391.805.661,44 | 361.998.076.858,22 | (88.606.271.196,78) | (24,48) |

Nilai Beban Hibah pada tahun 2025 sebesar Rp273.391.805.661,44 mengalami penurunan sebesar Rp88.606.271.196,78 atau 24,48% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp361.998.076.858,22. Tidak terdapat perbedaan nilai Belanja Hibah dan Beban Hibah.

**Tabel 5. 448 Rincian Beban Hibah**

| Uraian                                                                                     | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)               | %              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                        | 41.256.108.551,00         | 111.569.587.108,22        | (70.313.478.557,22)        | (63,02)        |
| Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 22.838.100.780,44         | 42.888.326.779,00         | (20.050.225.998,56)        | (46,75)        |
| Beban Hibah Dana BOS                                                                       | 76.813.758.000,00         | 150.463.932.400,00        | (73.650.174.400,00)        | (48,95)        |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                         | 10.861.860.000,00         | 10.329.902.000,00         | 531.958.000,00             | 5,15           |
| Beban Hibah Dana BOSP                                                                      | 121.621.978.330,00        | 46.746.328.571,00         | 74.875.649.759,00          | 160,17         |
| <b>Jumlah</b>                                                                              | <b>273.391.805.661,44</b> | <b>361.998.076.858,22</b> | <b>(88.606.271.196,78)</b> | <b>(24,48)</b> |

**Tabel 5. 449 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat**

| Uraian                              | Tahun 2025        | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %       |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat | 41.256.108.551,00 | 111.569.587.108,22 | (70.313.478.557,22) | (63,02) |

Nilai Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2025 sebesar Rp41.256.108.551,00 mengalami penurunan sebesar Rp70.313.478.557,22 atau 63,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp111.569.587.108,22.

**Tabel 5. 450 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat**

| Uraian                                     | Tahun 2025               | Tahun 2024                | Naik/(Turun)               | %              |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat   | 37.495.665.224,00        | 74.308.238.300,00         | (36.812.573.076,00)        | (49,54)        |
| Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 3.760.443.327,00         | 37.261.348.808,22         | (33.500.905.481,22)        | (89,91)        |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>41.256.108.551,00</b> | <b>111.569.587.108,22</b> | <b>(70.313.478.557,22)</b> | <b>(63,02)</b> |

**Tabel 5. 451 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

| Uraian                                                                                     | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)        | %       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
| Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 22.838.100.780,44 | 42.888.326.779,00 | (20.050.225.998,56) | (46,75) |

Nilai Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada tahun 2025 sebesar Rp22.838.100.780,44 mengalami penurunan sebesar Rp20.050.225.998,56 atau 46,75% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp42.888.326.779,00.

**Tabel 5. 452 Rincian Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

| Uraian                                                                                                                                        | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)               | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan | 19.276.105.787,44        | 13.737.377.442,00        | 5.538.728.345,44           | 40,32          |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar                         | 1.794.133.178,00         | 25.960.661.728,00        | (24.166.528.550,00)        | (93,09)        |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                    | 1.767.861.815,00         | 2.988.907.609,00         | (1.221.045.794,00)         | (40,85)        |
| Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                  | 0,00                     | 151.380.000,00           | (151.380.000,00)           | (100,00)       |
| Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                               | 0,00                     | 50.000.000,00            | (50.000.000,00)            | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                 | <b>22.838.100.780,44</b> | <b>42.888.326.779,00</b> | <b>(20.050.225.998,56)</b> | <b>(46,75)</b> |

**Tabel 5. 453 Beban Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta**

| Uraian                                                   | Tahun 2025        | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Beban Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 76.813.758.000,00 | 150.463.932.400,00 | (73.650.174.400,00) | (48,95) |

Nilai Beban Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta pada tahun 2025 sebesar Rp76.813.758.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp73.650.174.400,00 atau 48,95% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp150.463.932.400,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dari yang semula Beban Hibah Dana BOS menjadi Beban Hibah Dana BOSP-BOS.

**Tabel 5. 454 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

| Uraian                                             | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)   | %    |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------|
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 10.861.860.000,00 | 10.329.902.000,00 | 531.958.000,00 | 5,15 |

Nilai Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada tahun 2025 sebesar Rp10.861.860.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp531.958.000,00 atau 5,15% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp10.329.902.000,00.

**Tabel 5. 455 Beban Hibah Dana BOSP**

| Uraian                | Tahun 2025         | Tahun 2024        | Naik/(Turun)      | %      |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Beban Hibah Dana BOSP | 121.621.978.330,00 | 46.746.328.571,00 | 74.875.649.759,00 | 160,17 |

Nilai Beban Hibah Dana BOSP pada tahun 2025 sebesar Rp121.621.978.330,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.875.649.759,00 atau 160,17% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp46.746.328.571,00.

**Tabel 5. 456 Rincian Beban Hibah Dana BOSP**

| Uraian                                 | Tahun 2025                | Tahun 2024               | Naik/(Turun)             | %             |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Beban Hibah Dana BOSP - BOS            | 77.410.122.600,00         | 1.631.517.200,00         | 75.778.605.400,00        | 4.644,67      |
| Beban Hibah Dana BOSP - BOP PAUD       | 39.574.831.759,00         | 41.016.759.157,00        | (1.441.927.398,00)       | (3,52)        |
| Beban Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan | 4.637.023.971,00          | 4.098.052.214,00         | 538.971.757,00           | 13,15         |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>121.621.978.330,00</b> | <b>46.746.328.571,00</b> | <b>74.875.649.759,00</b> | <b>160,17</b> |

#### 5.4.1.2.1.9 Beban Bantuan Sosial

**Tabel 5. 457 Beban Bantuan Sosial**

| Uraian               | Tahun 2025        | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %       |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|
| Beban Bantuan Sosial | 93.725.551.700,00 | 106.371.888.000,00 | (12.646.336.300,00) | (11,89) |

Nilai Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025 sebesar Rp93.725.551.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.646.336.300,00 atau 11,89% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp106.371.888.000,00. Terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial dengan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp2.217.365.200,00 yang merupakan reklasifikasi beban tidak terduga sesuai substansi.

**Tabel 5. 458 Rincian Beban Bantuan Sosial**

| Uraian                                                                                                      | Tahun 2025               | Tahun 2024                | Naik/(Turun)               | %              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu                                                                   | 77.882.985.000,00        | 97.735.225.000,00         | (19.852.240.000,00)        | (20,31)        |
| Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu                                               | 8.397.921.500,00         | 0,00                      | 8.397.921.500,00           | 100,00         |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga                                                                   | 994.520.000,00           | 999.970.000,00            | (5.450.000,00)             | (0,55)         |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat                                                        | 2.217.365.200,00         | 3.403.873.000,00          | (1.186.507.800,00)         | (34,86)        |
| Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 4.232.760.000,00         | 4.232.820.000,00          | (60.000,00)                | (0,00)         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                               | <b>93.725.551.700,00</b> | <b>106.371.888.000,00</b> | <b>(12.646.336.300,00)</b> | <b>(11,89)</b> |

#### 5.4.1.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

**Tabel 5. 459 Beban Penyisihan Piutang**

| Uraian                   | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)       | %       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Beban Penyisihan Piutang | 38.195.234.213,32 | 43.689.631.975,19 | (5.494.397.761,87) | (12,58) |

Nilai Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2025 sebesar Rp38.195.234.213,32 mengalami penurunan sebesar Rp5.494.397.761,87 atau 12,58% jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp43.689.631.975,19.

**Tabel 5. 460 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

| Uraian                                          | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)              | %              |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah           | 35.597.949.526,75        | 40.007.692.336,14        | (4.409.742.809,39)        | (11,02)        |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah       | 1.953.195.722,20         | 2.586.584.642,75         | (633.388.920,55)          | (24,49)        |
| Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 644.088.964,37           | 976.843.666,25           | (332.754.701,88)          | (34,06)        |
| Beban penyisihan piutang lainnya                | 0,00                     | 118.511.330,05           | (118.511.330,05)          | (100,00)       |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>38.195.234.213,32</b> | <b>43.689.631.975,19</b> | <b>(5.494.397.761,87)</b> | <b>(12,58)</b> |

**Tabel 5. 461 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

| Uraian                                | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)       | %       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 35.597.949.526,75 | 40.007.692.336,14 | (4.409.742.809,39) | (11,02) |

Nilai Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp35.597.949.526,75 mengalami kenaikan sebesar Rp4.409.742.809,39 atau 11,02% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp40.007.692.336,14.

**Tabel 5. 462 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

| Uraian                                                                          | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)              | %              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel                                            | 2.067.000,00             | 500.000,00               | 1.567.000,00              | 313,40         |
| Beban Penyisihan Pajak Restoran                                                 | 11.149.014,00            | 36.620.494,75            | (25.471.480,75)           | (69,56)        |
| Beban Penyisihan Pajak Hiburan                                                  | 9.031.643,50             | 60.000,00                | 8.971.643,50              | 14.952,74      |
| Beban Penyisihan Pajak Reklame                                                  | 49.368.838,90            | 29.465.218,40            | 19.903.620,50             | 67,55          |
| Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan                                         | 4,00                     | 84.381,50                | (84.377,50)               | (100,00)       |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir                                           | 37.780.238,40            | 5.458.125,00             | 32.322.113,40             | 592,18         |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah                                        | 43.618.167,25            | 51.136.252,45            | (7.518.085,20)            | (14,70)        |
| Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 35.435.485.092,75        | 39.884.367.864,04        | (4.448.882.771,29)        | (11,15)        |
| Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak                                   | 9.449.527,95             | 0,00                     | 9.449.527,95              | (99,98)        |
| <b>Jumlah</b>                                                                   | <b>35.597.949.526,75</b> | <b>40.007.692.336,14</b> | <b>(4.409.742.809,39)</b> | <b>(11,02)</b> |

**Tabel 5. 463 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

| Uraian                                    | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)     | %       |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 1.953.195.722,20 | 2.586.584.642,75 | (633.388.920,55) | (24,49) |

Nilai Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp1.953.195.722,20 mengalami kenaikan sebesar Rp633.388.920,55 atau 24,49% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.586.584.642,75.

**Tabel 5. 464 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

| Uraian                                        | Tahun 2025              | Tahun 2024              | Naik/(Turun)            | %              |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum  | 1.464.420.019,00        | 2.438.250.824,20        | (973.830.805,20)        | (39,94)        |
| Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha | 488.775.703,20          | 148.333.818,55          | 340.441.884,65          | 229,51         |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>1.953.195.722,20</b> | <b>2.586.584.642,75</b> | <b>(633.388.920,55)</b> | <b>(24,49)</b> |

#### 5.4.1.2.1.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Tabel 5. 465 Beban Penyusutan Dan Amortisasi**

| Uraian                          | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)     | %    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| Beban Penyusutan Dan Amortisasi | 560.487.782.329,30 | 553.251.332.628,94 | 7.236.449.700,36 | 1,31 |

Nilai Beban Penyusutan Dan Amortisasi pada tahun 2025 sebesar Rp560.487.782.329,30 mengalami penurunan sebesar Rp7.236.449.700,36 atau 1,31% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp553.251.332.628,94.

**Tabel 5. 466 Rincian Beban Penyusutan Dan Amortisasi**

| Uraian                                                        | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)            | %           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                          | 229.488.365.534,62        | 238.116.842.301,83        | (8.628.476.767,21)      | (3,62)      |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                          | 70.150.046.483,70         | 67.756.399.878,91         | 2.393.646.604,79        | 3,53        |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi                  | 254.924.189.273,31        | 240.886.686.062,02        | 14.037.503.211,29       | 5,83        |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya                           | 539.609.800,20            | 509.730.172,12            | 29.879.628,08           | 5,86        |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 3.169.073.978,75          | 3.169.073.978,75          | 0,00                    | 0,00        |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya                                 | 52.110.430,16             | 287.810.880,00            | (235.700.449,84)        | (81,89)     |
| Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud           | 1.769.226.243,40          | 2.129.628.770,15          | (360.402.526,75)        | (16,92)     |
| Beban Penyusutan Properti Investasi                           | 395.160.585,16            | 395.160.585,16            | 0,00                    | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>560.487.782.329,30</b> | <b>553.251.332.628,94</b> | <b>7.236.449.700,36</b> | <b>1,31</b> |

#### 5.4.1.2.1.11.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

**Tabel 5. 467 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

| Uraian Pendapatan                    | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)       | %      |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 229.488.365.534,62 | 238.116.842.301,83 | (8.628.476.767,21) | (3,62) |

Nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 sebesar Rp229.488.365.534,62 mengalami penurunan sebesar Rp8.628.476.767,21 atau 3,62% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp238.116.842.301,83.

**Tabel 5. 468 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

| Uraian                                                 | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)              | %             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Beban Penyusutan Alat Besar                            | 10.134.750.936,33         | 7.255.512.773,33          | 2.879.238.163,00          | 39,68         |
| Beban Penyusutan Alat Angkutan                         | 20.179.653.037,43         | 19.935.866.603,00         | 243.786.434,43            | 1,22          |
| Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur            | 4.739.133.244,16          | 4.733.254.924,96          | 5.878.319,20              | 0,12          |
| Beban Penyusutan Alat Pertanian                        | 224.840.953,25            | 325.986.589,25            | (101.145.636,00)          | (31,03)       |
| Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 48.686.309.936,37         | 50.591.697.365,70         | (1.905.387.429,33)        | (3,77)        |
| Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 6.052.014.414,85          | 5.802.906.925,77          | 249.107.489,08            | 4,29          |
| Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan         | 91.914.772.146,98         | 103.856.077.628,43        | (11.941.305.481,45)       | (11,50)       |
| Beban Penyusutan Alat Laboratorium                     | 6.855.831.855,29          | 6.419.697.620,30          | 436.134.234,99            | 6,79          |
| Beban Penyusutan Alat Persenjataan                     | 165.383.660,00            | 172.188.210,00            | (6.804.550,00)            | (3,95)        |
| Beban Penyusutan Komputer                              | 36.681.325.049,24         | 35.773.756.685,13         | 907.568.364,11            | 2,54          |
| Beban Penyusutan Alat Pengeboran                       | 400.000,00                | 0,00                      | 400.000,00                | 0,00          |
| Beban Penyusutan Alat Produksi dan Pemurnian           | 108.210.493,00            | 47.200.000,00             | 61.010.493,00             | 129,26        |
| Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja                | 554.363.451,20            | 495.917.308,20            | 58.446.143,00             | 11,79         |
| Beban Penyusutan Alat Peraga                           | 77.458.786,23             | 69.585.161,23             | 7.873.625,00              | 11,32         |
| Beban Penyusutan Peralatan Proses Produksi             | 23.932.900,00             | 9.540.000,00              | 14.392.900,00             | 150,87        |
| Beban Penyusutan Rambu-Rambu                           | 2.164.051.537,89          | 1.961.566.212,53          | 202.485.325,36            | 10,32         |
| Beban Penyusutan Peralatan Olahraga                    | 925.933.132,40            | 666.088.294,00            | 259.844.838,40            | 39,01         |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>229.488.365.534,62</b> | <b>238.116.842.301,83</b> | <b>(8.628.476.767,21)</b> | <b>(3,62)</b> |

#### 5.4.1.2.1.11.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

**Tabel 5. 469 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

| Uraian                               | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 70.150.046.483,70 | 67.756.399.878,91 | 2.393.646.604,79 | 3,53 |

Nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp70.150.046.483,70 mengalami penurunan sebesar Rp2.393.646.604,79 atau 3,53% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp67.756.399.878,91.

**Tabel 5. 470 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

| Uraian                                    | Tahun 2025               | Tahun 2024               | Naik/(Turun)            | %           |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung          | 69.568.541.434,93        | 67.261.129.279,54        | 2.307.412.155,39        | 3,43        |
| Beban Penyusutan Monumen                  | 201.415.861,28           | 212.171.581,01           | (10.755.719,73)         | (5,07)      |
| Beban Penyusutan Bangunan Menara          | 11.040.000,00            | 11.040.000,00            | 0,00                    | 0,00        |
| Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti | 369.049.187,49           | 272.059.018,36           | 96.990.169,13           | 35,65       |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>70.150.046.483,70</b> | <b>67.756.399.878,91</b> | <b>2.393.646.604,79</b> | <b>3,53</b> |

#### 5.4.1.2.1.11.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

**Tabel 5. 471 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

| Uraian Pendapatan                            | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 254.924.189.273,31 | 240.886.686.062,02 | 14.037.503.211,29 | 5,83 |

Nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2025 sebesar Rp254.924.189.273,31 mengalami kenaikan sebesar Rp14.037.503.211,29 atau 5.83% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp240.886.686.062,02.

**Tabel 5. 472 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

| Uraian                              | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)             | %           |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 188.269.656.099,48        | 175.454.959.311,45        | 12.814.696.788,03        | 7,30        |
| Beban Penyusutan Bangunan Air       | 43.323.256.382,67         | 43.338.643.484,16         | (15.387.101,49)          | 0,04        |
| Beban Penyusutan Instalasi          | 3.394.626.160,65          | 3.362.267.859,65          | 32.358.301,00            | 0,96        |
| Beban Penyusutan Jaringan           | 19.936.650.630,51         | 18.730.815.406,76         | 1.205.835.223,75         | 6,44        |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>254.924.189.273,31</b> | <b>240.886.686.062,02</b> | <b>14.037.503.211,29</b> | <b>5,83</b> |

#### 5.4.1.2.1.11.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

**Tabel 5. 473 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

| Uraian Pendapatan                   | Tahun 2025     | Tahun 2024     | Naik/(Turun)  | %    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 539.609.800,20 | 509.730.172,12 | 29.879.628,08 | 5,86 |

Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp539.609.800,20 mengalami penurunan sebesar Rp29.879.628,08 atau 5.86% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp509.730.172,12.

#### 5.4.1.2.1.11.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga

**Tabel 5. 474 Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

| Uraian Pendapatan                                             | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun) | %    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 3.169.073.978,75 | 3.169.073.978,75 | 0,00         | 0,00 |

#### 5.4.1.2.1.11.6 Beban Penyusutan Aset Lainnya

**Tabel 5. 475 Beban Penyusutan Aset Lainnya**

| Uraian Pendapatan             | Tahun 2025    | Tahun 2024     | Naik/(Turun)     | %      |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | 52.110.430,16 | 287.810.880,00 | (235.700.449,84) | (0,82) |

Nilai Beban Penyusutan Aset Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp52.110.430,16 mengalami penurunan sebesar Rp235.700.449,84 atau 0,82% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp287.810.880,00.

#### 5.4.1.2.1.11.7 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

**Tabel 5. 476 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

| Uraian Pendapatan                                   | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)     | %      |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud | 1.731.726.243,40 | 2.129.628.770,15 | (397.902.526,75) | (0,19) |

Nilai Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025 sebesar Rp1.731.726.243,40 mengalami penurunan sebesar Rp397.902.526,75 atau 0,19% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.129.628.770,15.

#### 5.4.1.2.1.11.8 Beban Penyusutan Properti Investasi

**Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

| Uraian Pendapatan                   | Tahun 2025     | Tahun 2024     | Naik/(Turun) | %    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------|
| Beban Penyusutan Properti Investasi | 395.160.585,16 | 395.160.585,16 | 0.00         | 0,00 |

Nilai Beban Penyusutan Properti Investasi pada tahun 2025 sebesar Rp395.160.585,16 seluruhnya terdapat pada Properti Investasi Gedung dan Bangunan.

#### 5.4.1.2.2 Beban Transfer

**Tabel 5. 477 Beban Transfer**

| Uraian         | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)       | %     |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Beban Transfer | 410.805.140.791,02 | 301.705.022.960,52 | 109.100.117.830,50 | 36,16 |

Nilai Beban Transfer pada tahun 2025 sebesar Rp410.805.140.791,02 mengalami kenaikan sebesar Rp109.100.117.830,50 atau 0,36% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp301.705.022.960,52.

**Tabel 5. 478 Rincian Beban Transfer**

| Uraian                              | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)              | %            |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak     | 175.089.404.628,18        | 140.766.306.747,31        | 34.323.097.880,87         | 24,38        |
| Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi | 7.921.804.010,84          | 5.571.488.663,21          | 2.350.315.347,63          | 42,18        |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan     | 227.793.932.152,00        | 155.367.227.550,00        | 72.426.704.602,00         | 46,62        |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>410.805.140.791,02</b> | <b>301.705.022.960,52</b> | <b>109.100.117.830,50</b> | <b>36,16</b> |

#### 5.4.1.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

**Tabel 5. 479 Beban Bagi Hasil Pajak**

| Uraian Pendapatan               | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %     |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | 175.089.404.628,18 | 140.766.306.747,31 | 34.323.097.880,87 | 24,38 |

Nilai Beban Bagi Hasil Pajak pada tahun 2025 sebesar Rp175.089.404.628,18 mengalami kenaikan sebesar Rp34.323.097.880,87 atau 24,38% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp140.766.306.747,31.

#### 5.4.1.2.2.1.1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

**Tabel 5. 480 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**

| Uraian                          | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %     |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | 175.089.404.628,18 | 140.766.306.747,31 | 34.323.097.880,87 | 24,38 |

Nilai Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa pada tahun 2025 sebesar Rp175.089.404.628,18 mengalami kenaikan sebesar Rp34.323.097.880,87 atau 24,38% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp140.766.306.747,31.

#### 5.4.1.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi

**Tabel 5. 481 Rincian Beban Bagi Hasil Retribusi**

| Uraian                              | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)     | %     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi | 7.921.804.010,84 | 5.571.488.663,21 | 2.350.315.347,63 | 42,18 |

Nilai Beban Bagi Hasil Retribusi pada tahun 2025 sebesar Rp7.921.804.010,84 mengalami kenaikan sebesar Rp2.350.315.347,63 atau 42,18% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.571.488.663,21.

#### 5.4.1.2.2.1 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

**Tabel 5. 482 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**

| Uraian                              | Tahun 2025       | Tahun 2024       | Naik/(Turun)     | %     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi | 7.921.804.010,84 | 5.571.488.663,21 | 2.350.315.347,63 | 42,18 |

Nilai Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa pada tahun 2025 sebesar Rp7.921.804.010,84 mengalami kenaikan sebesar Rp2.350.315.347,63 atau 42,18% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.571.488.663,21.

#### 5.4.1.2.2.3 Beban Bantuan Keuangan

**Tabel 5. 483 Beban Bantuan Keuangan**

| Uraian                          | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %     |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Beban Transfer Bantuan Keuangan | 227.793.932.152,00 | 155.367.227.550,00 | 72.426.704.602,00 | 46,62 |

Nilai Beban Bantuan Keuangan pada tahun 2025 sebesar Rp227.793.932.152,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.426.704.602,00 atau 46,62% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp155.367.227.550,00.

#### 5.4.1.2.2.3.1 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

**Tabel 5. 484 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa**

| Uraian                                                             | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)      | %     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa | 227.793.932.152,00 | 155.367.227.550,00 | 72.426.704.602,00 | 46,62 |

Nilai Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa pada tahun 2025 sebesar Rp227.793.932.152,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.426.704.602,00 atau 46,62% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp155.367.227.550,00.

**Tabel 5. 485 Rincian Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa**

| Uraian                                                     | Tahun 2025        | Tahun 2024       | Naik/(Turun)      | %    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|
| Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten / Kota kepada Desa   | 72.644.000.000,00 | 9.875.000.000,00 | 62.769.000.000,00 | 6,36 |
| Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa | 4.414.466.452,00  | 1.878.483.750,00 | 2.535.982.702,00  | 1,35 |

| Uraian                                                                                           | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Naik/(Turun)             | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa | 150.735.465.700,00        | 143.613.743.800,00        | 7.121.721.900,00         | 0,05         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                    | <b>227.793.932.152,00</b> | <b>155.367.227.550,00</b> | <b>72.426.704.602,00</b> | <b>46,62</b> |

#### 5.4.1.3 Beban Tak Terduga

Tabel 5. 486 Beban Tak Terduga

| Uraian Pendapatan | Tahun 2025 | Tahun 2024 | Naik/(Turun) | %    |
|-------------------|------------|------------|--------------|------|
| Beban Tak Terduga | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |

Realisasi Belanja Tak Terduga pada LRA senilai Rp 10.254.834.782,00 telah reklasifikasi seluruhnya sesuai dengan substansi bebannya, dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                 | Nilai                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Beban Bantuan Sosial                                   | 2.217.365.200,00         |
| Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 447.011.000,00           |
| Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat            | 2.182.367.623,00         |
| Beban Pemeliharaan                                     | 5.337.887.159,00         |
| Pembayaran Utang BKK Propinsi tahun 2024 Melalui BTT   | 70.203.800,00            |
| <b>Total</b>                                           | <b>10.254.834.782,00</b> |

#### 5.4.2 Surplus/Defisit dari Operasional

Tabel 5. 487 Surplus Operasional-LO

| Uraian Pendapatan      | Tahun 2025         | Tahun 2024         | Naik/(Turun)       | %      |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Surplus Operasional-LO | 416.775.414.265,52 | 179.502.629.225,42 | 237.272.785.040,10 | 232,18 |

Nilai Surplus Operasional-LO pada tahun 2025 sebesar Rp416.775.414.265,52 mengalami penurunan sebesar Rp237.272.785.040,10 atau 232,18% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp179.502.629.225,42.

#### 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tabel 5. 488 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

| Uraian Pendapatan                             | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | 22.665.232.728,17 | 22.799.431.926,80 | (134.199.198,63) | 99,41 |

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 sebesar surplus Rp22.665.232.728,17 mengalami penurunan sebesar Rp134.199.198,63 atau 99,41% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar defisit Rp22.799.431.926,80.

### 5.4.3.1 Surplus Non Operasional-LO

**Tabel 5. 489 Surplus Non Operasional-LO**

| Uraian Pendapatan          | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)     | %     |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| Surplus Non Operasional-LO | 61.374.441.677,21 | 53.675.730.206,81 | 7.698.711.470,40 | 14,34 |

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 sebesar Rp61.374.441.677,21 mengalami kenaikan sebesar Rp7.698.711.470,40 atau 14,34% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp53.675.730.206,81.

**Tabel 5. 490 Rincian Surplus Non Operasional-LO**

| URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                        | NILAI            | SKPD                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Koreksi belum tercatatnya pengurangan penyisihan piutang dagulir tahun 2024 atas Pembayaran Piutang Dagulir Bulan Desember 2024<br>Nur Yahya sejumlah Rp 300.000<br>Suhermono sejumlah Rp 200.000<br>Sayono Markus sejumlah Rp 200.000<br>Total Rp 700.000,00 | 700.000,00       | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Kekurangan Pencatatan Penyisihan Piutang tahun 2023 dan 2024 atas nama Abdul Bani, Abdul Hafid, Abdul Azis, Rachmad, Raifah, dan Sulaiman dengan total Rp 6.275.000,00                                                                                        | 6.275.000,00     | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| ppkd - Terdapat Penyerahan PSU Perumahan TAS 7 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 653/15395/438.5.4/2023 tanggal 29 Desember 2023                                                                                                                         | 6.961.525.000,00 | BPKAD                            |
| ppkd - Terdapat Penyerahan PSU Perumahan TAS 7 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 653/15395/438.5.4/2023 tanggal 29 Desember 2023                                                                                                                         | 2.470.269.000,00 | BPKAD                            |
| ppkd - Terdapat Penyerahan PSU Perumahan TAS 7 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 653/15395/438.5.4/2023 tanggal 29 Desember 2023                                                                                                                         | 4.471.323.625,00 | BPKAD                            |
| ppkd - Terdapat Penyerahan PSU Perumahan Graha Surya Mas sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 653/8777/438.5.4/2020 tanggal 2 Desember 2020                                                                                                                 | 2.604.140.000,00 | BPKAD                            |
| ppkd - Terdapat Penyerahan PSU Perumahan Graha Surya Mas sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 653/8777/438.5.4/2020 tanggal 2 Desember 2020                                                                                                                 | 774.846.460,00   | BPKAD                            |
| ppkd - Terdapat Penyerahan PSU Perumahan Graha Surya Mas sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 653/8777/438.5.4/2020 tanggal 2 Desember 2020                                                                                                                 | 1.402.914.739,00 | BPKAD                            |
| Penyesuaian utang jaskom 2024                                                                                                                                                                                                                                 | 279.666,00       | Din. PUBM & Sumber daya air      |
| Penyesuaian kelebihan pencatatan utang telepon senilai Rp. 291.100,00 yang seharusnya Rp. 288.600,00 sehingga terdapat selisih Rp. 2.500,00                                                                                                                   | 2.500,00         | Din. Koperasi & Usaha Mikro      |
| KOREKSI UTANG BELANJA TELEPON DAN INTERNET TAHUN 2024                                                                                                                                                                                                         | 4.500,00         | Din. Penanaman Modal & PTSP      |
| Koreksi pencatatan utang telpon tahun lalu TBP No.35.15/06.0/000006/UP/1.02.0.00.0.00.01.0031/M/01/2025                                                                                                                                                       | 2.500            | RSUD SIBAR                       |
| Penyesuaian atas Selisih Pembayaran Iuran 4% BPJS Bulan Desember 2024                                                                                                                                                                                         | 107.741,00       | Kec. Tanggulangin                |
| Jurnal penyesuaian atas koreksi utang belanja yang dicatat terlalu tinggi karena pegawai atas nama Mirta Indrariska mutasi ke Sekretariat DPRD                                                                                                                | 113.161,00       | Kec. Tulangan                    |
| koreksi akumulasi penyusutan gedung sesuai Kertas Kerja aset                                                                                                                                                                                                  | 0,01             | Kec. Sukodono                    |
| Penyisihan Piutang Dagulir TW I 2025 sejumlah Rp 1.100.000<br>Rincian:<br>15/01 Nur Yahya Rp 300.000<br>16/01 Maisah Rp 100.000                                                                                                                               | 1.100.000,00     | Din. Perindustrian & Perdagangan |

| URAIAN                                                                                                                                                                                               | NILAI          | SKPD                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 22/01 Suhermono Rp 200.000                                                                                                                                                                           |                |                                  |
| 03/02 Maisah Rp 100.000                                                                                                                                                                              |                |                                  |
| 13/03 Suhermono Rp 200.000                                                                                                                                                                           |                |                                  |
| 17/03 Sayono Markus Rp 200.000                                                                                                                                                                       |                |                                  |
| Penghapusan Selisih atas Pembayaran Utang Belanja Insentif Pasar Triwulan IV TA 2024 SPM No. 35.15/03.0/LS/000017/3.30.3.31.0.00.01.0000/M/02/2025                                                   | 34.000,00      | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Penyesuaian selisih kelebihan pencatatan utang barjas 2024                                                                                                                                           | 12.000,00      | Satpol PP                        |
| Penyesuaian utang belanja internet                                                                                                                                                                   | 4.195.800,00   | Kec. Tarik                       |
| Koreksi pencatatan utang telpon tahun lalu                                                                                                                                                           | 1.888.352      | Kec. Tarik                       |
| Pembayaran utang Belanja Pegawai atas Tahun 2024 Periode Pembayaran Januari - April 2025                                                                                                             | 805.186        | Din. Kesehatan                   |
| Pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa atas Tahun 2024 Periode Pembayaran Januari - April 2025                                                                                                     | 82.215.956,00  | Din. Kesehatan                   |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 1 tahun 2025 sebesar Rp3.450.000                                                                                                | 3.450.000,00   | Din. Pangan & Pertanian          |
| Koreksi karena kelebihan pencatatan utang air                                                                                                                                                        | 3.000,00       | Din. LH & Kebersihan             |
| Koreksi pencatatan utang listrik tahun lalu, TBP No.35.15/06.0/000001,5/UP/2.23.2.24.0.00.01.0000/M/01/2025                                                                                          | 1.000,00       |                                  |
| Air , Tbp No. 35.15/06.0/000003 dan 000004/UP/2.23.2.24.0.00.01.0000/M/01/2025<br>Telepon , TBP No.35.15/06.0/000002/UP/2.23.2.24.0.00.01.0000/M/01/2025                                             |                | Din. Perpustakaan & Arsip        |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 1 tahun 2025 sebesar Rp 89.442.575,47                                                                                           | 89.442.575,47  | Din. Koperasi & Usaha Mikro      |
| Penyesuaian Penyisihan atas Piutang Macet dengan WR sebagaimana terlampir                                                                                                                            | 1.854.000,00   | Din. LH & Kebersihan             |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 2 tahun 2025 sebesar Rp10.060.000                                                                                               | 10.060.000,00  | Din. Pangan & Pertanian          |
| Penambahan aset dari hasil inventarisasi berupa Tanah sesuai Surat Permohonan Pencatatan No. 00.2.3.2/519/438.7.1/2025 (2 Mei) dan Surat No. 900.1.13.1/1557/438.6.3/2025 (22 Mei)                   | 7.690.000,00   | Kec. Sidoarjo                    |
| Pencatatan Penyisihan Piutang Atas Pembayaran Piutang Dagulir TW II TA 2025 sejumlah Rp 3.692.800 sesuai dokumen yang terlampir                                                                      | 3.692.800,00   | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Pembayaran Piutang Dagulir TW III 2025 sejumlah Rp 800.000                                                                                                                                           |                |                                  |
| Rincian:                                                                                                                                                                                             |                |                                  |
| 23/07/2025 Suhermono 200.000                                                                                                                                                                         | 800.000,00     | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| 31/07/2025 Maisah 200.000                                                                                                                                                                            |                |                                  |
| 25/08/2025 Suhermono 200.000                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| 30/09/2025 Suhermono 200.000                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| Pencatatan Penyisihan atas Pembayaran Piutang Pasar atas: (09/09) Stand Los Pasar Krian a.n. MAHRUS sebesar Rp 1.500.000,00 (12/09) Stand Kios Buah Pasar Krian a.n. Prawito sebesar Rp 3.000.000,00 | 4.500.000,00   | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Penambahan aset dari hasil inventarisasi berupa Tanah sesuai Surat Permohonan Pencatatan No. 900.1.13.4/715/438.7.1/2025 (17 Juni) dan Surat No. 900.1.13.1/2325/438.6.3/2025 (29 Juli)              | 125.440.000,00 | Kec. Sidoarjo                    |
| Penyesuaian Utang Belanja Modal sesuai Surat Pernyataan Kec. Jabon                                                                                                                                   | 81             | Kec. Jabon                       |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 3 tahun 2025 sebesar SEBESAR Rp31.000.000,00                                                                                    | 31.000.000,00  | Din. Pangan & Pertanian          |
| Penyesuaian Penyisihan atas Piutang Macet dengan WR sebagaimana terlampir                                                                                                                            | 510.000,00     | Din. LH & Kebersihan             |

| URAIAN                                                                                                                                                                                                                           | NILAI             | SKPD                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 1 tahun 2025 sebesar Rp 87.802.415,69                                                                                                                       | 87.802.415,69     | Din. Koperasi & Usaha Mikro      |
| Inventarisasi Aset Tak Berwujud                                                                                                                                                                                                  | 98.612.400,00     | RSUD SIBAR                       |
| Software SIM Keuangan sesuai BA rekon Aset                                                                                                                                                                                       |                   |                                  |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 1 tahun 2025 sebesar Rp 28.574.317,00                                                                                                                       | 28.574.317,00     | Din. Koperasi & Usaha Mikro      |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 4 tahun 2025 sebesar Rp813.127,00                                                                                                                           | 813.127,00        | Din. PMD                         |
| Penambahan aset hasil Inventarisasi berupa Bangunan di Terminal Porong sesuai Surat Permohonan Pencatatan No. 000.2.3.2/446/438.5.13/2025 (03 Maret 2025) dan Surat No. 00176/2.0174-01/PI/11/0468/1/VIII/2025 (27 Agustus 2025) |                   |                                  |
| -Pos Utara (Thn 2003) 86.780.120,00                                                                                                                                                                                              |                   |                                  |
| -Kantor Terminal (Thn 2003) 3.541.632.900,00                                                                                                                                                                                     | 8.058.339.360,00  | Din. Perhubungan                 |
| -Shelter Bus (Thn 2015) 840.536.000,00                                                                                                                                                                                           |                   |                                  |
| 4.202.680.000,00                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                  |
| -Ponten (Thn 2003) 87.000.000,00                                                                                                                                                                                                 |                   |                                  |
| -Pos Selatan (Thn 2003) 67.782.840,00                                                                                                                                                                                            |                   |                                  |
| -Pos Samping Gapura (Thn 2003) 72.463.500,00                                                                                                                                                                                     |                   |                                  |
| Penyesuaian Penyisihan atas Piutang Macet dengan WR sebagaimana terlampir                                                                                                                                                        | 510.000,00        | Din. LH & Kebersihan             |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 4 tahun 2025 per 30 November 2025 sebesar Rp149.292.068,00                                                                                                  | 149.292.068,00    | Din. Pangan & Pertanian          |
| pembayaran terhadap nilai yang disepakati dalam Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 027110.24.3/PPKON4/43 8.6.4/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebesar Rp. 8.576.415, 50 menjadi Rp. 8.576.415,00                                   | 1                 | BKD                              |
| Pembayaran Piutang Dagulir TW IV per 30 November 2025 sejumlah Rp 200.000 atas nama sehermono                                                                                                                                    | 200.000,00        | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Penyisihan Piutang per 31 Oktober 2025 atas nama Suhermono sebesar Rp 200.000                                                                                                                                                    | 200.000,00        | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Penyisihan Pembayaran Piutang Pasar atas Togu Pasar Krian atas nama Tutik Ariani (03 Oktober 2025) sejumlah Rp 127.500.000,00                                                                                                    | 127.500.000,00    | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Pembayaran Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sesuai 35.15/04.0/LS/000374/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 /DD                                                                             | 1                 | Bappeda                          |
| Penyesuaian saldo Awal Akm Penyusutan Aset Lain-lain sesuai BMD                                                                                                                                                                  | 0,01              | Bappeda                          |
| Penyisihan piutang th 2025                                                                                                                                                                                                       | 68.285.732,06     | Bappeda                          |
| Pendapatan atas Piutang Pajak Daerah yang telah disisihkan                                                                                                                                                                       | 22.797.338.443,70 | BPPD - Pajak                     |
| Penyesuaian saldo awal penyusutan Aset Tak Berwujud sesuai BA BMD                                                                                                                                                                | 0,12              | BPPD - Pajak                     |
| Pencatatan Penyisihan Piutang Atas Pembayaran Piutang Dagulir Bulan Desember Tahun 2025 sejumlah Rp 200.000                                                                                                                      | 200.000,00        | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Pencatatan Penyisihan Pembayaran Piutang Pasar atas nama Evi Marianty sejumlah: 28/10/2025 Rp 113.310,000 28/10/2025 Rp 115.980.000 sejumlah Rp 229.290.000,00                                                                   | 229.290.000,00    | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Penyesuaian saldo awal sesuai BMD                                                                                                                                                                                                | 1,36              | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Koreksi Kekurangan Pencatatan Penyisihan Pembayaran Piutang atas nama Abdul Hafid pada 31/07/2024 sejumlah Rp 400.000,00                                                                                                         | 400.000,00        | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Penyesuaian Utang Belanja Jasa Pengawasan Pemeliharaan Kanopi Rumah Dinas 2024                                                                                                                                                   | 549.450,00        | SETWAN                           |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada TW 4 tahun 2025 sebesar SEBESAR Rp40.637.523,00                                                                                                                | 40.637.523,00     | Din. Pangan & Pertanian          |

| URAIAN                                                                                                                                                                 | NILAI            | SKPD                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| penyesuaian penyisihan piutang atas hapus buku piutang daerah secara bersyarat berupa Sapi Kereman a.n H. Syaifulloh sesuai KepBup NOMOR: 100.3.3.2/334/438.1.1.3/2025 | 8.075.000,00     | Din. Pangan & Pertanian     |
| Penyesuaian Penyisihan atas Piutang Macet dengan WR sebagaimana terlampir                                                                                              | 4.320.000,00     | Din. LH & Kebersihan        |
| Penyesuaian saldo awal piutang sesuai hasil audit KAP 2024                                                                                                             | 1.190.423.687,48 | Din. LH & Kebersihan        |
| Penyesuaian penyisihan piutang 2025                                                                                                                                    | 492.000,00       | Din. LH & Kebersihan        |
| (Akumulasi Penyusutan)                                                                                                                                                 |                  |                             |
| Koreksi Pencatatan                                                                                                                                                     |                  |                             |
| Alat Angkutan (Milik Kementerian)                                                                                                                                      |                  |                             |
| -Sepeda Motor 13.600.000,00                                                                                                                                            |                  |                             |
|                                                                                                                                                                        | 27.225.000,00    | Din. Perikanan              |
| Reklas ke Persediaan                                                                                                                                                   |                  |                             |
| Alat Laboratorium (Kesalahan Kode Rekening/ Belanja untuk diserahkan masyarakat)                                                                                       |                  |                             |
| - PH Meter (diserahkan ke Kelompok Pembudidaya Ikan, BM 2024) 25.000.000,00                                                                                            |                  |                             |
| - DO Meter (diserahkan ke Kelompok Pembudidaya Ikan, BM 2024) 84.000.000,00                                                                                            |                  |                             |
| Koreksi atas penyisihan piutang Dagulir NRV = 0 yang dibayar pada tahun 2025 sebesar Rp 3.781.817,00                                                                   | 3.781.817,00     | Din. Koperasi & Usaha Mikro |
| Pendapatan atas piutang yang telah disisihkan sebesar Rp.10.079.917,5 (Kertas kerja lampiran 8a piutang)                                                               | 10.079.917,50    | Din. Kepemudaan, OR, Par    |
| Penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sesuai BMD                                                                                                                 | 0,81             | Din. Kepemudaan, OR, Par    |
| Penyesuaian Penyisihan Piutang 2025                                                                                                                                    | 7.407.689,05     | RSUD SIBAR                  |
| Penyesuaian akumulasi penyusutan sesuai BMD                                                                                                                            | 0,09             | RSUD SIBAR                  |
| Penyesuaian saldo awal sesuai BMD                                                                                                                                      | 1,26             | Din. PUBM & Sumber daya air |
| Penyesuaian saldo awal sesuai BMD                                                                                                                                      | 0,03             | Din. PUBM & Sumber daya air |
| Pembayaran Utang Tahun 2024                                                                                                                                            | 90.000,00        | Din. Perkim, CK dan TR      |
| Penyisihan piutang th 2025                                                                                                                                             | 67.650.771,70    | Din. Perkim, CK dan TR      |
| Inventarisasi (pencatatan gedung bangunan)                                                                                                                             |                  |                             |
| - Gedung Pelayanan KIA/KB PKM Sidoarjo : 175.099.738,00                                                                                                                |                  |                             |
| - Gedung Puskesmas Kepadangan : 1.376.974.034,00                                                                                                                       | 1.578.008.882,00 | Din. Kesehatan              |
| - Rumdin Paramedis PKM Tanggulangin : 25.935.110,00                                                                                                                    |                  |                             |
| Penyesuaian saldo awal akm penyusutan Aset lain-lain sesuai BMD                                                                                                        | 1,09             | Din. Kesehatan              |
| Penyesuaian saldo awal akm penyusutan AT sesuai BMD                                                                                                                    | 0,03             | Din. Kesehatan              |
| Inventarisasi Perhitungan Nilai Tanah Negara seluas 1,141m                                                                                                             | 700.574.000,00   | Din. Kesehatan              |
| Koreksi atas utang luran jaminan kesehatan ASN karena kelebihan catat utang diakhir tahun 2024 sesuai sebesar Rp40.616                                                 | 40.616,00        | Din. Kesehatan              |
| Penyesuaian Penyisihan Piutang 2025 (Pendapatan atas piutang yg disisihkan tahun 2025)                                                                                 | 3.065.525.652,40 | Din. Kesehatan              |
| Koreksi atas utang jasa pengolahan sampah karena kelebihan catat utang diakhir tahun 2024 sesuai sebesar Rp5.000                                                       | 5.000,00         | Din. Kesehatan              |
| Penyesuaian saldo awal Aset lain-lain sesuai BMD                                                                                                                       | 0,55             | Din. Kesehatan              |
| Nilai Akm Penyusutan atas Kurvol Audited                                                                                                                               | 1.142.363,50     | Din. Kesehatan              |
| Penyesuaian saldo alat berat sesuai BMD                                                                                                                                | 0,30             | Din. Kesehatan              |
| Koreksi atas belanja yang diserahkan kepada masyarakat namun sampai dengan akhir periode pelaporan 31 Desember 2025 pekerjaan tersebut belum dilakukan serah           | 3.959.855.794,00 | Din. Perkim, CK dan TR      |

| URAIAN                                                                    | NILAI                    | SKPD |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| terima kepada penerima manfaat, sehingga perlu dicatat sebagai persediaan |                          |      |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>61.374.441.677,21</b> |      |

### 5.4.3.2 Defisit Non Operasional-LO

**Tabel 5. 491 Defisit Non Operasional-LO**

| Uraian Pendapatan          | Tahun 2025        | Tahun 2024        | Naik/(Turun)       | %       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Defisit Non Operasional-LO | 27.515.126.685,67 | 30.876.298.280,01 | (3.361.171.594,34) | (10,89) |

Nilai Defisit Non Operasional-LO pada tahun 2025 sebesar Rp27.515.126.685,67 mengalami penurunan sebesar Rp3.361.171.594,34 atau 10,89% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp30.876.298.280,01.

**Tabel 5. 492 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO**

| Uraian Pendapatan                               | Tahun 2025          | Tahun 2024         | Naik/(Turun)        | %      |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO | (18.731.179.263,37) | (4.293.145.185,01) | (14.438.034.078,36) | 336,30 |

Nilai Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO pada tahun 2025 sebesar Rp18.731.179.263,37 mengalami kenaikan sebesar Rp14.438.034.078,36 atau 336,30% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.293.145.185,01. Hal ini dikarenakan adanya elum tercatatnya Penghapusan Tanah Lebo yang menjadi objek tukar menukar seluas 15.570m sesuai SK Penghapusan No. 100.3.3.2/33/438.1.1.3/2025 tanggal 30 Januari 2025.

**Tabel 5. 493 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO**

| Uraian Pendapatan          | Tahun 2025       | Tahun 2024        | Naik/(Turun)        | %       |
|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------|
| Defisit Non Operasional-LO | 8.783.947.422,30 | 26.583.153.095,00 | (17.799.205.672,70) | (66,96) |

Nilai Defisit Non Operasional-LO pada tahun 2025 sebesar Rp8.783.947.422,30 mengalami penurunan sebesar Rp17.799.205.672,70 atau 66,96% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp26.583.153.095,00.

**Tabel 5. 494 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO**

| URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | SKPD                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Kekurangan Pencatatan Pembayaran Piutang tahun 2023 dan 2024 atas nama Abdul Bani, Abdul Hafid, Abdul Azis, Rachmad, Raifah, dan Sulaiman dengan total Rp 6.275.000,00 | 6.275.000,00   | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| ppkd - Terdapat Penyerahan PSU Perumahan Graha Surya Mas sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 653/8777/438.5.4/2020 tanggal 2 Desember 2020                          | 643.440.343,80 | BPKAD                            |
| ppkd - Terdapat Penyerahan PSU Perumahan TAS 7 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 653/15395/438.5.4/2023 tanggal 29 Desember 2023                                  | 993.075.485,00 | BPKAD                            |
| Penyesuaian saldo Akm penyusutan Gedung&Bangunan sesuai BMD                                                                                                            | 0,25           | Kec. Sidoarjo                    |

| URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | SKPD                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| koreksi atas selisih Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sesuai kertas kerja aset                                                                                                                                                                                                      | 0,09             | Din. Pangan & Pertanian          |
| koreksi atas selisih akumulasi penyusutan aset sesuai kertas kerja Aset                                                                                                                                                                                                                                 | 0,04             | Din. Kominfo                     |
| Selisih penerimaan atas piutang pendapatan retribusi di puskesmas tahun 2024 adalah senilai Rp. 11.831.500,00                                                                                                                                                                                           | 11.831.500,00    | Din. Kesehatan                   |
| Selisih verifikasi atas saldo piutang tahun lalu (2024) yang tidak akan dibayar di tahun 2025                                                                                                                                                                                                           | 8.377.876,00     | RSUD                             |
| Penyesuaian Pengurangan aset setor kembali temuan BPK ( Pembangunan GDT Rp. 801.151.426,27, MK Tambahan Ram Lantai 4 Parkir R2 Rp. 1.273.366, Perencanaan penambahan sarpras GPT Rp. 7.077.233, MK Penambahan Sarpras GPT Rp. 6.340.021, Perencanaan jembatan sambungan tulip ke teratai Rp. 2.412.500) | 818.904.313,27   | RSUD                             |
| penyesuaian saldo awal aset berupa taman atas selisih dengan KK Aset                                                                                                                                                                                                                                    | 0,07             | Din. LH & Kebersihan             |
| koreksi atas Akumulasi Penyusutan sesuai Kertas Kerja Aset                                                                                                                                                                                                                                              | 1,18             | Din. LH & Kebersihan             |
| koreksi akumulasi penyusutan sesuai Kertas Kerja Aset                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,17             | Din. Perhubungan                 |
| koreksi atas selisih Akumulasi Penyusutan Peralin dan Gedung sesuai Kertas Kerja Aset                                                                                                                                                                                                                   | 0,04             | Kec. Krian                       |
| koreksi saldo awal Aset Lain-Lain sesuai dengan Kertas Kerja Aset                                                                                                                                                                                                                                       | 0,16             | kec. Prambon                     |
| Penyesuaian Pengurangan Nilai Piutang                                                                                                                                                                                                                                                                   | 755.585.600,00   | RSUD SIBAR                       |
| Selisih verifikasi atas saldo piutang tahun lalu (2024) yang tidak akan dibayar di tahun 2025                                                                                                                                                                                                           | 1.283.422,00     | RSUD                             |
| Selisih penerimaan atas piutang pendapatan retribusi di puskesmas tahun 2024 adalah senilai Rp. 25.000,00                                                                                                                                                                                               | 25.000,00        | Din. Kesehatan                   |
| Pembayaran Piutang Pasar atas:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                  |
| (09/09) Stand Los Pasar Krian a.n. Mahrus sebesar Rp 1.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 4.500.000,00     | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| (12/09) Stand Kios Buah Pasar Krian a.n. Prawito sebesar Rp 3.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                  |
| skpd - Terdapat penghapusan aset berupa Tanah Kantor Pemerintahan yang dihibahkan kepada BNN Kab. Sidoarjo sesuai dengan SK Penghapusan nomor 100.3.3.2/460/438.1.1.3/2025 tanggal 06 November 2025                                                                                                     | 2.218.298.369,00 | BPKAD                            |
| skpd ppkd - Terdapat penghapusan aset berupa Tanah Lapang yang dihibahkan kepada Kepolisian Resor Kota Sidoarjo sesuai dengan SK Penghapusan nomor 100.3.3.2/460/438.1.1.3/2025 tanggal 06 November 2025                                                                                                | 167.445.982,00   | BPKAD                            |
| PPKD - Terdapat Penyerahan Hibah Peralatan dan Mesin dari BPIPI - Kementerian Perindustrian RI sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor B/1661/IKMA/BPIPI/BMN/X/2025 tanggal 17 November 2025                                                                                                             | 1.403.117.500,00 | BPKAD                            |
| Pembayaran Piutang Pasar atas Togu Pasar Krian atas nama Tutik Ariani (03 Oktober 2025) sejumlah Rp 127.500.000,00                                                                                                                                                                                      | 127.500.000,00   | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Koreksi Pencatatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.600.000,00    | Din. Perikanan                   |

| URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | SKPD                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Alat Angkutan (Milik Kementerian)                                                                                                                                                                                                                               |                  |                             |
| -Sepeda Motor 13.600.000,00                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                             |
| "Penyesuaian kurang catat pelunasan piutang di tahun 2024 dan baru diketahui ditahun 2025 TW 4 (Nov 2026)                                                                                                                                                       | 883.460,00       | RSUD                        |
| Penyesuaian saldo awal akm penyusutan sesuai BMD                                                                                                                                                                                                                | 0,09             | RSUD                        |
| Nilai Akm penyusutan atas Hibah berupa TCM                                                                                                                                                                                                                      | 287.130.303,00   | RSUD                        |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Atas Hibah thn 2025                                                                                                                                                                                                    | 1.207.469.017,15 | Din. Kesehatan              |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi sesuai KK Aset Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:<br>Bertambah (Hasil Inventarisasi) 580.879.607                                                                                                | 580.879.607,08   | Din. Kesehatan              |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan atas Aset lain-lain yang direklas menjadi Aset Tetap                                                                                                                                                                               | 108.699.512,00   | Din. Kesehatan              |
| Amortisasi software atas hasil inventarisasi th 2025                                                                                                                                                                                                            | 1.643.540,00     | RSUD SIBAR                  |
| Nilai Penyusutan atas Hibah dari kementerian                                                                                                                                                                                                                    |                  |                             |
| - Peningkatan Jalan Juwetkenongo - Krembung 1 50.357.675.690                                                                                                                                                                                                    | 9.880.432.776,91 | Din. PUBM & Sumber daya air |
| - Peningkatan Jalan Juwetkenongo - Krembung 2 48.446.652.080                                                                                                                                                                                                    |                  |                             |
| - Jalan Lingkar Timur Sidoarjo 6.077.167.750                                                                                                                                                                                                                    |                  |                             |
| Koreksi atas pembayaran belanja modal yang aset JIJ nya sudah diakui                                                                                                                                                                                            | 206.951.984,00   | Din. PUBM & Sumber daya air |
| Penyusutan atas Hibah                                                                                                                                                                                                                                           | 4.387.447.081,20 | Din. Perkim, CK dan TR      |
| Penyesuaian saldo awal penyusutan sesuai BMD                                                                                                                                                                                                                    | 0,38             | Din. Perkim, CK dan TR      |
| pencatatan akm penyusutan atas Penambahan aset hasil Inventarisasi berupa Bangunan di Terminal Porong sesuai Surat Permohonan Pencatatan No. 000.2.3.2/446/438.5.13/2025 (03 Maret 2025) dan Surat No. 00176/2.0174-01/PI/11/0468/1/VIII/2025 (27 Agustus 2025) |                  |                             |
| -Pos Utara (Thn 2003)                                                                                                                                                                                                                                           | 2.537.026.118,40 | Din. Perhubungan            |
| -Kantor Terminal (Thn 2003)                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                             |
| -Shelter Bus (Thn 2015)                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                             |
| -Ponton (Thn 2003)                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                             |
| -Pos Selatan (Thn 2003)                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                             |
| -Pos Samping Gapura (Thn 2003)                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                             |
| pencatatan akm penyusutan atas Terdapat Hibah dari Pemprov Jatim (BAST no 900.1/5653/203.5/2025) (09 Mei 2025)                                                                                                                                                  | 55.937.891,16    | Din. Perhubungan            |
| -Palang Pintu Perlindungan KA JPL 56 (Thn 2023) sejumlah 1 249.668.336,00                                                                                                                                                                                       |                  |                             |
| -Palang Pintu Perlindungan KA JPL 15 (Thn 2023) sejumlah 1 249.668.337,00                                                                                                                                                                                       |                  |                             |

| URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH                   | SKPD                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| -Pos Jaga Perlintasan KA JPL 56<br>(Thn 2023) sejumlah 1<br>199.886.966,00                                                                                                                                       |                          |                                  |
| -Pos Jaga Perlintasan KA JPL 15<br>(Thn 2023) sejumlah 1<br>199.886.967,00                                                                                                                                       |                          |                                  |
| hapus buku piutang daerah secara<br>bersyarat berupa Sapi Kereman a.n H.<br>Syaifulloh sesuai KepBup NOMOR:<br>100.3.3.2/334/438.1.1.3/2025                                                                      | 8.075.000,00             | Din. Pangan & Pertanian          |
| Pembayaran Piutang Pasar atas nama<br>Evi Marianty sejumlah:                                                                                                                                                     |                          |                                  |
| 28/10/2025 Rp 113,310,000                                                                                                                                                                                        |                          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 229.290.000,00           | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| 28/10/2025 Rp 115.980.000                                                                                                                                                                                        |                          |                                  |
| sejumlah Rp 229.290.000,00                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |
| Koreksi Saldo Awal sesuai BMD                                                                                                                                                                                    | 0,02                     | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| Koreksi Kekurangan Pencatatan<br>Pembayaran Piutang Retribusi atas nama<br>Abdul Hafid pada 31/07/2024 sejumlah<br>Rp 400.000,00                                                                                 | 400.000,00               | Din. Perindustrian & Perdagangan |
| koreksi saldo awal penyusutan Aset Lain-<br>Lain sesuai dengan Kertas Kerja Aset                                                                                                                                 | 0,40                     | SETDA                            |
| Penyesuaian saldo Akm penyusutan<br>sesuai BMD                                                                                                                                                                   | 0,14                     | Kec. Sidoarjo                    |
| Penyesuaian saldo Akm penyusutan<br>sesuai BMD                                                                                                                                                                   | 0,03                     | Kec. Wonoayu                     |
| Penyesuaian saldo Akm penyusutan<br>sesuai BMD                                                                                                                                                                   | 0,42                     | Bappeda                          |
| Penyesuaian saldo Akm penyusutan<br>sesuai BMD                                                                                                                                                                   | 0,10                     | BPPD - Pajak                     |
| Penyesuaian saldo Akm penyusutan<br>sesuai BMD                                                                                                                                                                   | 0,08                     | BPPD - Pajak                     |
| Penyesuaian saldo Akm penyusutan<br>sesuai BMD                                                                                                                                                                   | 0,04                     | Kec. Sidoarjo                    |
| Belum tercatatnya Hibah USG Internal<br>Medicine dari Kementerian Kesehatan<br>Republik Indonesia Direktorat Jenderal<br>Kesehatan Masyarakat sesuai BAST No.<br>KN.02.07/B.I/1853/2023 tanggal 13 April<br>2023 | 849.600.000,00           | Dinkes                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>27.515.126.685,67</b> |                                  |

#### 5.4.4 Surplus/Defisit LO

Tabel 5. 495 Surplus/Defisit LO

| Uraian             | Per 31 Des 2025    | Per 31 Des 2024    | +/-(-)             |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Surplus/Defisit LO | 439.440.646.993,69 | 202.302.061.152,22 | 237.138.585.841,47 |

Saldo Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp439.440.646.993,69 mengalami kenaikan sebesar Rp237.138.585.841,47 atau 217,22% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp202.302.061.152,22.

## 5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari hasil penjumlahan ekuitas awal per 1 Januari 2025, surplus LO Tahun 2025, dampak kumulatif perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan mendasar per 31 Desember 2025 baik yang menambah atau mengurangi ekuitas.

**Tabel 5. 496 Laporan Perubahan Ekuitas**

| Uraian LPE                                                      | 2025                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| EKUITAS AWAL                                                    | 23.008.854.766.847,82        |
| SURPLUS/DEFISIT LO                                              | 439.440.646.993,69           |
| <b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b> | <b>0,00</b>                  |
| KOREKSI NILAI PIUTANG                                           | 0,00                         |
| KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG                                | 0,00                         |
| KOREKSI BEBAN DIBAYAR DIMUKA                                    | 0,00                         |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                        | 0,00                         |
| KOREKSI INVESTASI & DANA CADANGAN                               | 0,00                         |
| KOREKSI ASET TETAP                                              | 0,00                         |
| KOREKSI ASET TAK BERWUJUD                                       | 0,00                         |
| KOREKSI ASET LAIN LAIN                                          | 0,00                         |
| KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP                         | 0,00                         |
| KOREKSI AMORTISASI                                              | 0,00                         |
| KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN                     | 0,00                         |
| KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA                              | 0,00                         |
| KOREKSI UTANG                                                   | 0,00                         |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                            | <b>23.448.295.413.841,50</b> |

### 5.5.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp23.008.854.766.847,82 dan Rp22.805.036.725.621,60. Nilai ekuitas tersebut merupakan selisih antara aset dengan kewajiban yang diperoleh dari neraca per 31 Desember 2025 dan 2024. Nilai ekuitas awal Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp203.818.041.226,22 atau 0.89% apabila dibandingkan ekuitas awal Tahun 2024.

**Tabel 5. 497 Ekuitas Awal**

| Uraian       | Per 31 Des 2025       | Per 31 Des 2024       | Kenaikan/<br>Penurunan |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Ekuitas Awal | 23.008.854.766.847,82 | 22.805.036.725.621,60 | 203.818.041.226,22     |

### 5.5.2 Surplus (Defisit) LO

Nilai Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp439.440.646.993,69 dan Rp202.302.061.152,22.

Surplus(Defisit) LO tersebut merupakan penjumlahan surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, serta pos luar biasa sebagai berikut:

Tabel 5. 498 Rincian Surplus (Defisit) LO

| No       | Uraian                           | Per 31 Des 2025 (Rp)      | Per 31 Des 2024 (Rp)      |
|----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>Kegiatan Operasional</b>      | <b>416.775.414.265,52</b> | <b>179.502.629.225,42</b> |
|          | Pendapatan                       | 5.469.957.499.732,14      | 5.029.664.456.440,27      |
|          | Beban                            | 5.053.182.085.466,62      | 4.850.161.827.214,85      |
| <b>2</b> | <b>Kegiatan Non Operasional</b>  | <b>22.665.232.728,17</b>  | <b>22.799.431.926,80</b>  |
|          | Surplus Kegiatan Non Operasional | 22.665.232.728,17         | 27.092.577.111,81         |
|          | Defisit Kegiatan Non Operasional | 0,00                      | (4.293.145.185,01)        |
| <b>3</b> | <b>Pos Luar Biasa</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|          | Pendapatan Luar Biasa            | 0,00                      | 0,00                      |
|          | Beban Luar Biasa                 | 0,00                      | 0,00                      |
|          | <b>Jumlah</b>                    | <b>439.440.646.993,69</b> | <b>202.302.061.152,22</b> |

Nilai Surplus (Defisit) LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp237.138.585.841,47 atau 117,22% apabila dibandingkan Tahun 2024.

### 5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada Tahun 2025 tidak terdapat koreksi atas dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar. Pada tahun 2024 penambahan ekuitas pada akun laba ditahan yang tersaji pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 Perseroda Delta Tirta sebesar Rp1.515.980.074,00.

### 5.5.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp 23.448.295.413.841,50 mengalami kenaikan sebesar Rp439.440.646.993,70 atau 1,91% dari Tahun 2024 sebesar Rp23.008.854.766.847,82.

Tabel 5. 499 Ekuitas Akhir

| Uraian        | Per 31 Des 2025       | Per 31 Des 2024       | Kenaikan/<br>Penurunan |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Ekuitas Akhir | 23.448.295.413.841,50 | 23.008.854.766.847,82 | 439.440.646.993,70     |

## 5.6 LAPORAN ARUS KAS

### 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp743.787.299.819,11 dan Rp748.375.331.216,34. Jumlah tersebut diperoleh dari pengurangan jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi dengan jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 500 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

| Uraian                                   | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Selisih                   |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Aktivitas Operasi</b>                 |                             |                             |                           |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>             | <b>5.524.803.785.400,54</b> | <b>5.331.640.322.199,81</b> | <b>193.163.463.200,73</b> |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>            | <b>4.781.016.485.581,43</b> | <b>4.583.264.990.983,47</b> | <b>197.751.494.597,96</b> |
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi</b> | <b>743.787.299.819,11</b>   | <b>748.375.331.216,34</b>   | <b>(4.588.031.397,23)</b> |

Nilai arus kas bersih dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp743.787.299.819,11 mengalami penurunan sebesar Rp4.588.031.397,23 atau 0,61% apabila dibandingkan Tahun 2024.

#### 5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Tahun 2025 sebesar Rp5.524.803.785.400,54 mengalami kenaikan sebesar Rp193.163.463.200,73 atau 3,62% apabila dibandingkan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 501 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

| Uraian                                                       | Tahun 2025           | Tahun 2024           | Selisih             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Aktivitas Operasi</b>                                     |                      |                      |                     |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                                        |                      |                      |                     |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      | 1.750.894.046.285,18 | 1.407.663.067.473,40 | 343.230.978.811,78  |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 896.932.667.144,57   | 861.595.661.847,07   | 35.337.005.297,50   |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 47.730.122.053,50    | 38.107.714.620,50    | 9.622.407.433,00    |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah                            | 90.075.066.726,29    | 43.923.942.343,79    | 46.781.124.382,50   |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak                             | 214.703.688.700,00   | 210.276.122.670,00   | 4.427.566.030,00    |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 1.311.742.341.100,00 | 1.272.254.530.355,00 | 39.487.810.745,00   |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus                               | 617.547.440.799,00   | 655.476.568.604,00   | (37.929.127.805,00) |
| Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Penerimaan Dana Desa                                         | 307.367.596.442,00   | 328.647.743.000,00   | (21.280.146.558,00) |
| Penerimaan Dana Insentif Fiskal                              | 14.428.969.000,00    | 0,00                 | 14.428.969.000,00   |

| Uraian                                 | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Selisih                   |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 262.332.020.150,00          | 502.620.091.047,00          | (240.288.070.897,00)      |
| Penerimaan Bantuan Keuangan            | 11.049.827.000,00           | 10.975.196.000,00           | 74.631.000,00             |
| Penerimaan Pendapatan Hibah            | 0,00                        | 99.015.000,00               | (99.015.000,00)           |
| Penerimaan Lainnya                     | 0,00                        | 669.239,05                  | (669.239,05)              |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>           | <b>5.524.803.785.400,54</b> | <b>5.331.640.322.199,81</b> | <b>193.163.463.200,73</b> |

#### 5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2025 sebesar Rp4.781.016.485.581,43 mengalami kenaikan sebesar Rp197.751.494.597,96 atau 4,31% apabila dibandingkan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 502 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

| Uraian                                   | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Selisih                   |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Aktivitas Operasi</b>                 |                             |                             |                           |
| <b>Arus Kas Keluar</b>                   |                             |                             |                           |
| Pembayaran Pegawai                       | 1.786.341.122.963,05        | 1.778.430.605.560,10        | 7.910.517.402,95          |
| Pembayaran Barang dan Jasa               | 1.883.021.460.459,29        | 1.690.376.003.896,45        | 192.645.456.562,84        |
| Pembayaran Bunga                         | 2.580.053.896,65            | 345.719.188,92              | 2.234.334.707,73          |
| Pembayaran Subsidi                       | 2.955.285.939,00            | 1.767.853.335,00            | 1.187.432.604,00          |
| Pembayaran Hibah                         | 273.391.805.661,44          | 362.111.796.853,00          | (88.719.991.191,56)       |
| Pembayaran Bantuan Sosial                | 91.508.186.500,00           | 102.968.015.000,00          | (11.459.828.500,00)       |
| Pembayaran Tak Terduga                   | 10.254.834.782,00           | 26.568.948.044,00           | (16.314.113.262,00)       |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak              | 186.785.423.521,00          | 132.387.660.544,00          | 54.397.762.977,00         |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi          | 9.016.783.265,00            | 4.293.418.012,00            | 4.723.365.253,00          |
| Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 535.161.528.594,00          | 484.014.970.550,00          | 51.146.558.044,00         |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>            | <b>4.781.016.485.581,43</b> | <b>4.583.264.990.983,47</b> | <b>197.751.494.597,96</b> |

#### 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp681.622.341.018,66) dan (Rp666.074.157.282,78) Jumlah tersebut diperoleh dari pengurangan jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 503 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

| Uraian                                     | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Selisih                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Aktivitas Investasi</b>                 |                             |                             |                            |
| Jumlah Arus Kas Masuk                      | 1.715.056.712,16            | 2.003.842.035,22            | (288.785.323,06)           |
| Jumlah Arus Kas Keluar                     | 683.337.397.730,82          | 668.077.999.318,00          | 15.259.398.412,82          |
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi</b> | <b>(681.622.341.018,66)</b> | <b>(666.074.157.282,78)</b> | <b>(15.548.183.735,88)</b> |

Nilai arus kas bersih dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp681.622.341.018,66) mengalami penurunan sebesar Rp15.548.183.735,88 atau 2,33% apabila dibandingkan Tahun 2024.

### 5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Tahun 2025 sebesar Rp1.715.056.712,16 mengalami penurunan sebesar Rp288.785.323,06 atau 14,41% apabila dibandingkan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 504 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

| Uraian                                                | Tahun 2025              | Tahun 2024              | Selisih                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aktivitas Investasi</b>                            |                         |                         |                         |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                                 |                         |                         |                         |
| Pencairan Dana Cadangan                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Pendapatan Penjualan atas Tanah                       | 0,00                    | 763.776.000,00          | (763.776.000,00)        |
| Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin         | 179.596.274,00          | 326.670.199,00          | (147.073.925,00)        |
| Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan         | 1.080.413.795,00        | 648.697.936,00          | 431.715.859,00          |
| Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya                          | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | 0,00                    |
| Penjualan Aset Lainnya                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Penerimaan Kembali Dana Bergulir                      | 451.046.643,16          | 260.697.900,22          | 190.348.742,94          |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                          | <b>1.715.056.712,16</b> | <b>2.003.842.035,22</b> | <b>(288.785.323,06)</b> |

### 5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2025 sebesar Rp683.337.397.730,82 mengalami kenaikan sebesar Rp15.259.398.412,82 atau 2,28% apabila dibandingkan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 505 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

| Uraian                     | Tahun 2025        | Tahun 2024     | Selisih           |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Aktivitas Investasi</b> |                   |                |                   |
| <b>Arus Kas Keluar</b>     |                   |                |                   |
| Pembentukan Dana Cadangan  | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| Perolehan Tanah            | 23.250.256.678,00 | 822.965.280,00 | 22.427.291.398,00 |

| Uraian                                       | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Selisih                  |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Perolehan Peralatan dan Mesin                | 206.772.187.050,00        | 191.438.182.917,00        | 15.334.004.133,00        |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                | 252.754.816.360,50        | 193.594.456.481,00        | 59.160.359.879,50        |
| Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan       | 199.730.563.281,32        | 281.538.154.853,00        | (81.807.591.571,68)      |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                 | 584.702.457,00            | 128.568.760,00            | 456.133.697,00           |
| Perolehan Aset Lainnya                       | 244.871.904,00            | 555.671.027,00            | (310.799.123,00)         |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                | <b>683.337.397.730,82</b> | <b>668.077.999.318,00</b> | <b>15.259.398.412,82</b> |

### 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp24.286.058.018,28) dan Rp48.572.116.036,59. Jumlah tersebut diperoleh dari pengurangan jumlah arus masuk kas dari aktivitas pendanaan dan jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 506 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**

| Uraian                                     | Tahun 2025                 | Tahun 2024               | Selisih                    |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Aktivitas Pendanaan</b>                 |                            |                          |                            |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>               | 0,00                       | 51.245.044.141,00        | (51.245.044.141,00)        |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>              | 24.286.058.018,28          | 2.672.928.104,41         | 21.613.129.913,87          |
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan</b> | <b>(24.286.058.018,28)</b> | <b>48.572.116.036,59</b> | <b>(72.858.174.054,87)</b> |

Nilai arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp24.286.058.018,28) mengalami penurunan sebesar (Rp72.858.174.054,87) atau 150,00% apabila dibandingkan Tahun 2024.

Nilai arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan ini berasal penerimaan pinjaman BLUD dikurangi pembayaran pinjaman BLUD dari Bank Jatim sesuai Perjanjian Kredit Nomor 72 Tanggal 17 Mei 2025 antara RSUD RT Notopuro dengan PT. Bank Jatim untuk mendapatkan pinjaman Kredit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp60.000.000.000,00. Pada tahun 2025 sudah tidak menerima pinjaman dan terdapat pembayaran pinjaman sebesar Rp24.286.058.018,28.

### 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah.

Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan

Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp552.411.335,00 dan (Rp613.213.347,00) yang diperoleh dari pengurangan jumlah arus masuk kas aktivitas transitoris dengan jumlah arus keluar kas aktivitas transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 507 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

| Uraian                                       | Tahun 2025            | Tahun 2024              | Selisih                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aktivitas Transitoris</b>                 |                       |                         |                         |
| Jumlah Arus Kas Masuk                        | 220.589.374.380,00    | 215.277.552.515,00      | 5.311.821.865,00        |
| Jumlah Arus Kas Keluar                       | 220.036.963.045,00    | 215.890.765.862,00      | 4.146.197.183,00        |
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris</b> | <b>552.411.335,00</b> | <b>(613.213.347,00)</b> | <b>1.165.624.682,00</b> |

Nilai arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp552.411.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.165.624.682,00 atau 190,08%.

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

**Tabel 5. 508 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris Tahun 2024 (LAK)</b> |                       | <b>(613.213.347,00)</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Rincian 2024:                                                 |                       |                         |
| Saldo E-Money Thn 2024                                        | (10.342.580,00)       |                         |
| Uang Titipan BLUD TPA Jabon - Saldo 2024                      | (188.059.025,00)      |                         |
| Rincian 2025:                                                 |                       |                         |
| Saldo E-Money RSUD RTN Thn 2025                               | 22.425.090,00         |                         |
| Uang Titipan BLUD TPA Jabon - Saldo 2025                      | 189.590.450,00        |                         |
| Uang Titipan Jaminan Rusunawa – Saldo 2025                    | 538.782.400,00        |                         |
| Kas di Bendahara BOS                                          | 15.000,00             |                         |
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris (LAK) - 2025</b>     | <b>552.411.335,00</b> |                         |

Saldo e-Money sebesar Rp22.425.090,00 merupakan saldo pada Kartu Flazz yang digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BBM) yang ada di RSUD RT Notopuro per 31 Desember 2025 dan terdapat pada 25 kartu dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 509 Rincian Saldo Kartu Flazz RSUD RT Notopuro per 31 Desember 2025**

| No | Nomor Kartu         | Saldo per 31 Desember 2025 |
|----|---------------------|----------------------------|
| 1  | 0145 0145 0021 9677 | 7.800,00                   |
| 2  | 0145 0040 0030 8450 | 321.940,00                 |
| 3  | 0145 0040 0032 9431 | 1.000.000,00               |
| 4  | 0145 0040 0030 8476 | 383.060,00                 |
| 5  | 0145 0040 0030 8534 | 2.290,00                   |
| 6  | 0145 0145 0000 4483 | 50.000,00                  |
| 7  | 0145 0040 0030 8468 | 450.000,00                 |
| 8  | 0145 0145 0047 0213 | 200.000,00                 |
| 9  | 0145 0040 0032 9456 | 2.000.000,00               |

|              |                     |                      |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 10           | 0145 0145 0021 9685 | 2.000.000,00         |
| 11           | 0145 0040 0032 9449 | 2.000.000,00         |
| 12           | 0145 0040 0030 8310 | 2.000.000,00         |
| 13           | 0145 0145 0006 1434 | 2.000.000,00         |
| 14           | 0145 0145 0021 9461 | 2.000.000,00         |
| 15           | 0145 0040 0030 8328 | 2.000.000,00         |
| 16           | 0145 0040 0030 8260 | 2.000.000,00         |
| 17           | 0145 0040 0034 2285 | 1.000.000,00         |
| 18           | 0145 0040 0030 8344 | 500.000,00           |
| 19           | 0145 0040 0030 8336 | 500.000,00           |
| 20           | 0145 0040 0030 8385 | 500.000,00           |
| 21           | 0145 0145 0006 0287 | 500.000,00           |
| 22           | 0145 0040 0032 9423 | 10.000,00            |
| 23           | 0145 0040 0030 8419 | 400.000,00           |
| 24           | 0145 0040 0034 0818 | 500.000,00           |
| 25           | 0145 0040 0030 8393 | 100.000,00           |
| <b>Total</b> |                     | <b>22.425.090,00</b> |

Saldo uang titipan atas pembayaran TOP UP kartu untuk pelayanan persampahan blod TPA Jabon yang terdapat pada Bank Jatim Nomor Rekening 0261084236 pada tahun 2025 sebesar Rp189.590.450,00. Bertambah sebesar Rp1.531.425,00 dari tahun 2024 sebesar Rp188.059.025.

Terdapat pencatatan atas uang jaminan penyewa rusunawa yang dititipkan ke bendahara penerimaan sebagai jaminan sewa (kas yang dibatasi penggunaannya) dengan rincian sbb:

**Tabel 5. 510 Rincian Uang Jaminan Rusunawa per 31 Desember 2025**

| No | Rusunawa              | Nomor Rekening (Bank Jatim) | Saldo per 31 Desember 2025 |
|----|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | Rusunawa Wonocolo     | 0261100011                  | 165.475.000,00             |
| 2  | Rusunawa Bulusidokare | 0261100029                  | 50.755.000,00              |
| 3  | Rusunawa Pucang       | 0261100037                  | 137.306.800,00             |
| 4  | Rusunawa Ngelom       | 0261089985                  | 177.870.600,00             |
| 5  | Rusunawa Tambaksawah  | 0261100002                  | 7.375.000,00               |

#### 5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2025 sebesar Rp220.589.374.380,00 mengalami kenaikan sebesar 5.311.821.865,00 atau 2,47% apabila dibandingkan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 511 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

| Uraian                                    | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Selisih                 |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 220.589.374.380,00        | 215.277.552.515,00        | 5.311.821.865,00        |
| Penerimaan Setoran dari BLUD              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>              | <b>220.589.374.380,00</b> | <b>215.277.552.515,00</b> | <b>5.311.821.865,00</b> |

**Tabel 5. 512 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

| Uraian                                                               | Tahun 2025 (Rp)           | Tahun 2024 (Rp)           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Penerimaan PFK                                                       |                           |                           |
| Pajak Pusat                                                          | 141.433.109.386,00        | 147.590.222.535,00        |
| BPJS (atas gaji & TPP)                                               | 78.405.452.54,00          | 67.676.987.400,00         |
| TASPEN                                                               | 0,00                      | 0,00                      |
| Saldo kartu flazz (e-money) di RSUD RT Notopuro per 31 Desember 2025 | 22.425.090,00             | 10.342.580,00             |
| Setoran Titipan Top Up E-Money BLUD TPA Jabon                        | 189.590.450,00            | 0,00                      |
| Setoran SD Swasta Tutup (Uang Transer Pusat)                         | 15.000,00                 | 0,00                      |
| Uang Jaminan Rusunawa                                                | 538.782.400,00            | 0,00                      |
| <b>Jumlah</b>                                                        | <b>220.589.374.380,00</b> | <b>215.277.552.515,00</b> |

#### 5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Nilai arus kas keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp220.036.963.045,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.146.197.183,00 atau 1,92% apabila dibandingkan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 513 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**

| Uraian                                     | Tahun 2025                | Tahun 2024                | Selisih                 |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 220.036.963.045,00        | 215.890.765.862,00        | 4.146.197.183,00        |
| Pengeluaran - Setor Ke Kasda               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                    |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>              | <b>220.036.963.045,00</b> | <b>215.890.765.862,00</b> | <b>4.146.197.183,00</b> |

**Tabel 5. 514 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**

| Uraian                                                                     | Tahun 2025 (Rp)           | Tahun 2024 (Rp)           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pengeluaran PFK                                                            |                           |                           |
| Pajak Pusat                                                                | 149.373.163.949,00        | 147.590.222.535,00        |
| BPJS (atas gaji & TPP)                                                     | 70.663.799.096,00         | 67.676.987.400,00         |
| TASPEN                                                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| Pengeluaran Setoran dari Kasda ke BLUD                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| Pengeluaran Setoran Titipan Top Up e money BLUD TPA Jabon                  | 0,00                      | 86.156.650,00             |
| Pengeluaran Saldo kartu flazz (e-money) diseluruh OPD per 31 Desember 2025 | 0,00                      | 517.314.277,00            |
| Pengeluaran Setoran SD Swasta Tutup (Utang Transfer Pusat)                 | 0,00                      | 20.085.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                                                              | <b>220.036.963.045,00</b> | <b>215.890.765.862,00</b> |

#### 5.6.5 Kenaikan / Penurunan Kas

Pada Tahun 2025 terdapat kenaikan kas sebesar Rp38.431.312.117,17 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5. 515 Kenaikan/Penurunan Kas**

| Uraian                                     | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Selisih                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi</b>   | <b>743.787.299.819,11</b>   | <b>748.375.331.216,34</b>   | <b>(4.588.031.397,23)</b>  |
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi</b> | <b>(681.622.341.018,66)</b> | <b>(666.074.157.282,78)</b> | <b>(15.548.183.735,88)</b> |

| Uraian                                       | Tahun 2025                 | Tahun 2024                | Selisih                    |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan</b>   | <b>(24.286.058.018,28)</b> | <b>48.572.116.036,59</b>  | <b>(72.858.174.054,87)</b> |
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris</b> | <b>552.411.335,00</b>      | <b>(613.213.347,00)</b>   | <b>1.165.609.682,00</b>    |
| <b>Kenaikan Kas</b>                          | <b>38.431.312.117,17</b>   | <b>130.260.076.623,15</b> | <b>(91.828.779.505,98)</b> |

### 5.6.6 Saldo Kas

Saldo awal Kas dan saldo akhir kas Tahun 2025 sebesar dan Rp642.974.057.123,20 dan Rp681.405.369.240,37 dirinci sebagai berikut:

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Rincian Saldo Awal Kas sebesar Rp642.974.057.123,20 terdiri dari :</b>  |                           |
| Kas di Kas Daerah                                                          | 489.907.723.574,75        |
| Kas in Transit di Bank Jatim - Pajak Jasa Giro                             | 327,85                    |
| Kas Lainnya (E-Money di RSUD RT Notopuro)                                  | 10.342.580,00             |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                                               | 0,00                      |
| Kas di Bendahara Penerimaan                                                | 0,00                      |
| Kas Lainnya (E-Money)                                                      | 10.342.580,00             |
| Kas di BLUD RSUD RT NOTOPURO                                               | 107.870.857.318,38        |
| Kas di BLUD RSUD SIBAR                                                     | 31.183.017.288,95         |
| Kas di BLUD PUSKESMAS                                                      | 9.889.810.672,83          |
| Kas di BLUD TPA                                                            | 3.144.069.332,44          |
| Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top UP )                                     | 188.059.025,00            |
| Kas di Bendahara BOS                                                       | 46.000,00                 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran (Kewajiban Pajak)                             | 0,00                      |
| Kas Dana BOK di PUSKESMAS                                                  | 780.131.003,00            |
|                                                                            | <b>642.974.057.123,20</b> |
| <b>Rincian Saldo Akhir Kas sebesar Rp681.405.369.240,37 terdiri dari :</b> |                           |
| Kas di Kas Daerah                                                          | 573.120.409.199,45        |
| Kas in Transit di Bank Jatim - Pajak Jasa Giro                             | 0,00                      |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                                               | 0,00                      |
| Kas di Bendahara Penerimaan                                                | 0,00                      |
| Kas Lainnya (E-Money di RSUD RT Notopuro)                                  | 22.425.090,00             |
| Kas di BLUD RSUD RT NOTOPURO                                               | 70.316.192.622,56         |
| Kas Lainnya (Jaminan Rusunawa)                                             | 538.782.400,00            |
| Kas di BLUD RSUD SIBAR                                                     | 22.940.206.588,03         |
| Kas di BLUD PUSKESMAS                                                      | 11.125.864.658,69         |
| Kas di BLUD TPA                                                            | 2.779.686.085,93          |
| Kas di BLUD IPALD                                                          | 113.757.734,71            |
| Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top UP )                                     | 189.590.450,00            |
| Kas Lainnya – Jaminan Rusunawa                                             | 538.782.400,00            |
| Kas di Bendahara BOS                                                       | 15.000,00                 |
| Kas Dana BOK di PUSKESMAS                                                  | 258.439.411,00            |
|                                                                            | <b>681.405.369.240,37</b> |

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

Selain informasi keuangan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa informasi non keuangan yang berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, sebagai berikut:

#### **6.1 Kondisi Internal yang Berpengaruh Pada Laporan Keuangan Tahun 2025**

##### **6.1.1 Adanya Perubahan Regulasi dan Penggunaan Aplikasi Nasional (SIPD) pada Penyusunan APBD TA 2025**

Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang juga dipergunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menandatangani Pakta Integritas tentang komitmen Penggunaan aplikasi SIPD fitur Penatausahaan dan Aklap, dan telah mencoba melakukan penginputan data keuangan melalui pada aplikasi SIPD. Penyusunan LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 menggunakan aplikasi SIKSDA dan SIPD.

##### **6.1.2 Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Berubah pada Tahun 2023**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terdapat perubahan struktur organisasi bersifat khusus (UOBK) RSUD, menjadi 4 (empat) Lembaga yaitu : (a) RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, kelas A; (b) RSUD Sidoarjo Barat, kelas C; (c) RSUD Sidoarjo Timur, kelas D; (d) RSUD Sukodono, kelas D

## BAB VII PENUTUP

Pada akhir periode Tahun 2025 diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp680.654.556.300,37 yang diperoleh dengan mengurangkan jumlah realisasi pendapatan dengan realisasi belanja, serta memperhitungkannya dengan realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

| Uraian                                                      | Nilai                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Realisasi Pendapatan                                        | 5.526.067.795.469,54      |
| Realisasi Belanja                                           | 5.464.353.883.312,25      |
| Surplus                                                     | 61.713.912.157,29         |
| Pembiayaan Netto                                            | 618.940.644.143,08        |
| <b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran menurut LRA</b>          | <b>680.654.556.300,37</b> |
| <b>Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran menurut LRA:</b> |                           |
| Kas di Kas Daerah                                           | 573.120.409.199,45        |
| Kas di BLUD RSUD RT Notopuro                                | 70.316.192.622,56         |
| Kas di BLUD PUSKESMAS                                       | 11.125.864.658,69         |
| Kas di BLUD RSUD SIBAR                                      | 22.940.206.588,03         |
| Kas di BLUD TPA Jabon                                       | 2.779.686.085,93          |
| Kas di BLUD PALD                                            | 113.757.734,71            |
| Kas dana BOK di PUSKESMAS                                   | 258.439.411,00            |

Rincian Kas menurut SILPA LRA, LPSAL, Laporan Arus Kas dan Neraca sebagai berikut:

| Rincian Kas                                | Menurut LRA:              | Menurut LPSAL:            | Menurut LAK :             | Menurut Neraca :          |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kas di Kas Daerah                          | 573.120.409.199,45        | 573.120.409.199,45        | 573.120.409.199,45        | 573.120.409.199,45        |
| Kas di BLUD RSUD RT Notopuro               | 70.316.192.622,56         | 70.316.192.622,56         | 70.316.192.622,56         | 70.316.192.622,56         |
| Kas di BLUD PUSKESMAS                      | 11.125.864.658,69         | 11.125.864.658,69         | 11.125.864.658,69         | 11.125.864.658,69         |
| Kas di BLUD RSUD SIBAR                     | 22.940.206.588,03         | 22.940.206.588,03         | 22.940.206.588,03         | 22.940.206.588,03         |
| Kas di BLUD TPA JABON                      | 2.779.686.085,93          | 2.779.686.085,93          | 2.779.686.085,93          | 2.779.686.085,93          |
| Kas di BLUD PALD                           | 113.757.734,71            | 113.757.734,71            | 113.757.734,71            | 113.757.734,71            |
| Kas dana BOK di PUSKESMAS                  | 258.439.411,00            | 258.439.411,00            | 258.439.411,00            | 258.439.411,00            |
| Kas di Bendahara BLUD TPA (Titipan Top UP) | 0,00                      | 0,00                      | 189.590.450,00            | 189.590.450,00            |
| Kas di Bendahara BOS                       | 0,00                      | 0,00                      | 15.000,00                 | 15.000,00                 |
| Kas Lainnya -e Money di RSUD RT Notopuro   | 0,00                      | 0,00                      | 22.425.090,00             | 22.425.090,00             |
| Kas Lainnya (Uang Jaminan Rusunawa)        | 0,00                      | 0,00                      | 538.782.400,00            | 538.782.400,00            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>680.654.556.300,37</b> | <b>680.654.556.300,37</b> | <b>681.405.369.240,37</b> | <b>681.405.369.240,37</b> |

44

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi dan kejadian yang berpengaruh dan mempengaruhi posisi keuangan saat ini maupun yang akan datang.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan memberi ridho atas upaya yang kami lakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo supaya lebih baik dari sebelumnya.

Sidoarjo, 25 Mei 2026

PBUPATI SIDOARJO



SUBANDI





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

# LAPORAN KEUANGAN

## TAHUN 2025 AUDITED

### LAMPIRAN



Lampiran atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 (Audited) disampaikan dalam bentuk *softcopy* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 (Audited) sebagaimana link/tautan di bawah ini :

Tautan : <https://bit.ly/LampiranLKPDSDA2025>

